

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR: 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan Pembangunan Daerah dengan Kebijakan Nasional mengenai Pembentukan dan susunan perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dirubah bila terjadi perubahan yang mendasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan daerah ini

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 2017

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

AMBOK TUO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2017
NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,
PROVINSI JAMBI : 9/2017.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016-2021

1. UMUM

Diawali perubahan regulasi pemerintah pusat dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi atas akutanbilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2016 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, mendorong dilakukannya penyesuaian nomenklatur perangkat daerah serta evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021. Berdasarkan penyesuaian nomenklatur perangkat daerah dan evaluasi maka dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

Pada saat bersamaan penyusunan (perubahan) RPJMD Kab. Tanjung Barat Tahun 2016 - 2021 dalam bulan Oktober 2017 ini, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu penyesuaian substansi dan sistematika penyusunan RPJMD yang baru. Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 pada prinsipnya menyesuaikan dan memberi arah yang jelas pada sasaran strategis dengan dilengkapi indikator kinerja yang relevan, terukur, dan spesifik di masing - masing Bab meliputi :

1. Bab I Pendahuluan (menyesuaikan dasar hukum, maksud dan tujuan);
2. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah (menampilkan data terbaru hingga tahun 2015 serta analisis);
3. Bab III Gambaran Keuangan Daerah (Penyesuaian kapasitas riil kemampuan keuangan, dan revisi proyeksi pendapatan daerah);

4. Bab IV Permasalahan dan Isu –isu Strategis Daerah (penambahan / pengurangan isu – isu strategis);
5. Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (perbaiki sasaran, indikator kinerja, dan target);
6. Bab VI Strategi, Arah Kebijakan, Dan Program Pembangunan Daerah (penyesuaian dan perbaikan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah, dan penyesuaian nomenklatur perangkat daerah);
7. Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah (penambahan program baru, perbaikan indikator dan target, penyesuaian pagu indikatif, dan penyesuaian nomenklatur perangkat daerah);
8. Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (penambahan Indikator Kinerja Utama, dan menyesuaikan target kinerja);
9. Bab IX Penutup (tidak ada perubahan).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | li |
| DAFTAR GAMBAR | iii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1. Latar Belakang | I-1 |
| 1.2. Dasar Hukum Penyusunan | I-2 |
| 1.3. Hubungan Antar Dokumen | I-7 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | I-16 |
| 1.5. Maksud dan Tujuan | I-17 |
| 1.2.1. Maksud | I-17 |
| 1.2.2. Tujuan | I-17 |
| | |
| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-1 |
| 2.1. Aspek Geografi Dan Demografi | II-1 |
| 2.1.1. Kondisi Geografis Daerah | II-1 |
| 2.1.2. Kondisi Demografis | II-7 |
| 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat | II-8 |
| 2.2.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi | II-8 |
| 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial | II-24 |
| 2.2.3. Fokus Seni Budaya Dan Olahraga | II-35 |
| 2.3. Aspek Pelayanan Umum | II-38 |
| 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib | II-38 |
| 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan | II-102 |
| 2.4. Aspek Daya Saing Daerah | II-139 |
| 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah | II-139 |
| 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur | II-140 |
| 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi | II-142 |
| | |
| BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH | III-1 |
| 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu | III-1 |
| 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD | III-2 |
| 3.1.2 Neraca Daerah | III-32 |
| 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu | III-41 |
| 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran | III-41 |
| 3.2.2 Analisis Pembiayaan | III-43 |

| | |
|---|--------|
| 3.3. Kerangka Pendanaan | III-45 |
| 3.3.1 Analisis Belanja | III-45 |
| 3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan | III-47 |
| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DAERAH DAERAH | IV-1 |
| 4.1 Permasalahan Pembangunan | IV-1 |
| 4.1.1. Permasalahan Kebutuhan Dasar | IV-1 |
| 4.1.2. Permasalahan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga | IV-2 |
| 4.1.3. Permasalahan Infrastruktur Daerah | IV-3 |
| 4.1.4 Permasalahan Pertanian, Pertambangan dan Lingkungan Hidup | IV-3 |
| 4.1.5. Permasalahan Perekonomian Daerah | IV-4 |
| 4.2. Isu Strategis | IV-6 |
| 4.2.1 Isu Strategis Kebutuhan Dasar | IV-6 |
| 4.2.2 Isu Strategis Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga | IV-6 |
| 4.2.3 Isu Strategis Infrastruktur Daerah | IV-7 |
| 4.2.4. Isu Strategis Pertanian, Pertambangan Dan Lingkungan Hidup | IV-8 |
| 4.2.5. Isu Strategis Perekonomian Daerah | IV-8 |
| 4.2.6. Isu Strategis Pemerintahan dan Politik | IV-9 |
| BABI V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-1 |
| 5.1. Visi Daerah | V-1 |
| 5.2. Misi Daerah | V-2 |
| 5.3 Tujuan dan Sasaran | V-2 |
| 5.3.1. Tujuan Pembangunan Daerah | V-2 |
| 5.3.2. Sasaran Pembangunan | V-3 |
| BABI VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | VI-1 |
| 6.1. Strategi Pembangunan Daerah | VI-1 |
| 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah | VI-2 |
| BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | VII-1 |
| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH | VIII-1 |
| BAB IX PENUTUP | IX-1 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|-------|
| Gambar 1.1 | Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Dalam Alur Perencanaan dan Penganggaran..... | I. 11 |
|------------|--|-------|

DAFTAR GRAFIK

| | | |
|-----------------|---|-------|
| Grafik G.II.1 | Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Migas dan Tanpa Migas (%) | II-9 |
| Grafik G.II.2. | Peranan Sektor Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2011-2015 | II-11 |
| Grafik G.II.3. | Peran Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015 (%) | II-13 |
| Grafik G.II.4 | Peran Sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015 (%) | II-13 |
| Grafik G.II.5. | Perkembangan Inflasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015 | II-14 |
| Grafik G.II.8. | Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015 | II-16 |
| Grafik G.II.9. | Distribusi Pendapatan Menurut Bank Dunia di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 -2014 | II-18 |
| Grafik G.II.10. | Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 -2013 | II-21 |
| Grafik G.II.11. | Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 -2013 | II-22 |
| Grafik G.II.12. | Garis Kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 -2013 | II-23 |
| Grafik G.II.13. | IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 -2015 | II-25 |
| Grafik G.II.14. | Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015 | II-26 |
| Grafik G.II.15. | Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010-2014 | II-27 |
| Grafik G.II.16. | Capaian Angka Melek Huruf Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012-2015 | II-29 |
| Grafik G.II.17. | Capaian Angka Melek Huruf Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 | II-30 |
| Grafik G.II.18. | Capaian APK SD, SMP dan SMA Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015 | II-31 |
| Grafik G.II.19. | Tingkat Kelulusan SD, SMP dan SMA/SMK Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015 | II-32 |
| Grafik G.II.20. | Capaian APM SD, SMP dan SMA Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015 | II-34 |

| | | |
|-----------------|--|-------|
| Grafik G.II.21. | Angka Harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015 | II-35 |
| Grafik G.II.22. | Perkembangan Grup Seni Budaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015..... | II-36 |
| Grafik G.II.23. | Grup Seni Budaya pada Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 | II-36 |
| Grafik G.II.24. | Jumlah Gedung Olahraga pada Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 | II-37 |
| Grafik G.II.25. | Perkembangan Pembangunan Ruang Kelas baru untuk SD, SMP, dan SMA/SMK di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015 | II-38 |
| Grafik G.II.26 | Rasio Jumlah SD dan SMP dengan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012-2015 | II-39 |
| Grafik G.II.27 | Rasio Jumlah SD dengan Jumlah Penduduk Usia SD pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 | II-39 |
| Grafik G.II.28. | Rasio Jumlah SMP dengan Jumlah Penduduk Usia SMP pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 | II-40 |
| Grafik G.II.29. | Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang Pendidikan SD dan SMP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012-2015 ... | II-41 |
| Grafik G.II.30. | Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang Pendidikan SD Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 | II-42 |
| Grafik G.II.31 | Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang Pendidikan SMP Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 | II-43 |
| Grafik G.II.31 | Angka Kematian Bayi, Neonatal dan Balita Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015 | II-44 |
| Grafik G.II.32 | Angka Kematian Ibu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015 | II-45 |
| Grafik G.II.33 | Persentase Balita Gizi Kurang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015 | II-46 |
| Grafik G.II.34 | Mutu Pelayanan RSUD KH Daud Arif Tahun 2011-2015 | II-48 |
| Grafik G.II.36 | Persentase Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011-2015 | II-50 |

| | | |
|-----------------|---|-------|
| Grafik G.II.37 | Persentase Kondisi Jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011-2015..... | II-51 |
| Grafik G.II.38 | Pembangunan Jembatan Besi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014 | II-52 |
| Grafik G.II.39 | Rehabilitasi Irigasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014 | II-53 |
| Grafik G.II.40 | Pembangunan Jalan Baru di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014 | II-53 |
| Grafik G.II.41 | Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014 | II-54 |
| Grafik G.II.42 | Perkembangan Dermaga Kayu dan Pos Pengawasandi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2014 | II-58 |
| Grafik G.II.43 | Arus Penumpang Angkutan Umum Darat dan laut di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2014..... | II-59 |
| Grafik G.II.44. | Persentase Pelaku Usaha dan Fasilitas Yang Wajib Ijin Lingkungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 | II-60 |
| Grafik G.II.45 | Pelayanan Bidang KependudukanKabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2015 | II-64 |
| Grafik G.II.46 | Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010-2014..... | II-65 |
| Grafik G.II.47 | Perkembangan Bidang Keluarga BerencanaKabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2015..... | II-66 |
| Grafik G.II.48 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011-2015 | II-69 |
| Grafik G.II.49 | Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2010-2015 | II-69 |
| Grafik G.II.50. | Jumlah KUD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 | II-71 |
| Grafik G.II.51 | Jumlah Anggota KUD pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 | II-72 |
| Grafik G.II.52 | Jumlah Simpanan, Modal, Volume Usaha dan SHU KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015..... | II-73 |
| Grafik G.II.53 | Jumlah UMKM dan Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 | II-75 |
| Grafik G.II.54 | Jumlah PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015 | II-88 |

| | | |
|-----------------|---|--------|
| Grafik G.II.55 | Golongan PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015 | II-89 |
| Grafik G.II.56 | Tingkat Pendidikan PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015 | II-90 |
| Grafik G.II.57 | Stock/Cadangan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011-2015 | II-92 |
| Grafik G.II.58 | Perkembangan Harga Beras, Jagung, Kedelai Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015 | II-93 |
| Grafik G.II.59 | Perkembangan Harga Daging Sapi dan Ayam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015 | II-94 |
| Grafik G.II.60 | Perkembangan Harga Minyak Goreng dan Gula Pasir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015 | II-94 |
| Grafik G.II.61 | Perkembangan Harga Telur Ayam Ras Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015 | II-95 |
| Grafik G.II.62 | Hotspot, Titik Api dan Luas Kebakaran Lahan dan Hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015 | II-108 |
| Grafik G.II.63 | Cakupan Pelayanan Air Bersih | II-123 |
| Grafik G.III.1. | Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2015 | III-5 |
| Grafik G.III.2 | Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015 | III-7 |
| Grafik G.III.3 | Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015 | III-9 |
| Grafik G.III.4 | Proporsi Komponen PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015 | III-10 |
| Grafik G.III.5 | Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015 | III-11 |
| Grafik G.III.6 | Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015 | III-13 |
| Grafik G.III.7 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2015 | III-15 |
| Grafik G.III.8 | Lain - lain PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015 | III-16 |
| Grafik G.III.9 | Dana Perimbangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2015 | III-17 |

| | | |
|------------------|---|--------|
| Grafik G.III.10. | Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2015 | III-18 |
| Grafik G.III.11. | Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2015 | III-26 |
| Grafik G.III.12 | Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2015 | III-27 |
| Grafik G.III.13 | Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2015 | III-29 |
| Grafik G.III.14 | Proporsi Jenis Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 - 2015 | III-29 |
| Grafik G.III.15 | Belanja Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2015 | III-30 |
| Grafik G.III.16 | Proporsi Jenis Belanja Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2015 | III-31 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------------|---|--------|
| Tabel T.II.C.1. | Pembagian Wilayah Administrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 | II-2 |
| Tabel T.II.C.2. | Luas Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dibedakan Menurut Klasifikasi Ketinggian Tahun 2015 | II-3 |
| Tabel T.II.C.3. | Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Lahan Existing Tahun 2015 | II-5 |
| Tabel T.II.C.4. | Jumlah Penduduk dan Kepadatan Dirinci per Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2015 | II-7 |
| Tabel T.II.C.5. | PDRB PerKapita Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2014 | II-15 |
| Tabel T.II.C.6. | Jumlah Organisasi Masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 | II-80 |
| Tabel T.II.C.7 | Peraturan Daerah yang Dihasilkan Tahun 2011 - 2015 | II-81 |
| Tabel T.II.C.8. | Pemeriksaan Internal dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2012-2015 | II-85 |
| Tabel T.II.C.9. | Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2015 | II-91 |
| Tabel T.II.C.10. | Perkembangan Koleksi Buku Kantor Pendataan Elektronik, Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun Anggaran 2011-2015 | II-99 |
| Tabel T.II.C.11 | Perkembangan Produksi Padi dan Palawija Tahun 2015 (Ton) | II-100 |
| Tabel T.II.C.12. | Luas Lahan dan Produktifitas Komoditi Pertanian Tahun 2014..... | II-102 |
| Tabel T.II.C.13. | Perkembangan ternak menurut jenis, 2011 – 2015 (Ekor).... | II-103 |
| Tabel T.II.C.14. | Perkembangan Komoditi Perkebunan Tahun 2011-2015.... | II-105 |
| Tabel T.II.C.15. | Realisasi Bantuan Bibit Tanamanan Tahun 2012-2015 | II-106 |
| Tabel T.II.C.16. | Rekapitulasi Data Hostpot, Titik Api dan Luas Kebakaran Lahan dan Hutan di Kab. Tanjung Jabung Barat 2011-2015 .. | II-107 |
| Tabel T.II.C.17. | Realisasi Rehabilitasi Hutan Lindung Gambut Dengan Tanaman Jelutung | II-109 |
| Tabel T.II.C.18. | Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana | II-111 |

| | | |
|------------------|---|--------|
| | Reboisasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015 | |
| Tabel T.II.C.19. | Capaian Bidang Sumber Daya Mineral dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015 | II-112 |
| Tabel T.II.C.20. | Capaian Kinerja Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2015 | II-113 |
| Tabel T.II.C.21. | Perkembangan Produksi Ikan Menurut Sub Sektor di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015 | II-114 |
| Tabel T.II.C.22. | Jumlah Pasar (Unit) Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015..... | II-116 |
| Tabel T.II.C.24. | Rasio panjang jalan menurut jenis permukaan | II-122 |
| Tabel T.II.C.25. | Panjang Jaringan Listrik Di Kecamatan 2011-2015 | II-123 |
| Tabel T.II.C.26. | Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik..... | II-124 |
| Tabel T.II.C.27. | Jenis - jenis izin | II-125 |
| Tabel T.II.C.28. | Realisasi Pajak Daerah Berdasarkan Jenis Penerimaan Kabupaten Tanjung jabung Barat tahun 2011-2015..... | II-127 |
| Tabel T.II.C.29. | Hasil Analisa gambaran umum Kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kab. Tanjung Jbaung Barat | II-128 |
| Tabel T.III.C.1. | Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 - 2015..... | III-3 |
| Tabel T.III.C.2. | Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 - 2015..... | III-20 |
| Tabel T.III.C.3. | Neraca Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2015..... | III-33 |
| Tabel T.III.C.4 | Rasio Keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2015..... | III-33 |
| Tabel T.III.C.5 | Proporsi Penggunaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 - 2015 | III-43 |
| Tabel T.III.C.6 | Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 - 2015 (Dalam Jutaan) | III-44 |
| Tabel T.III.C.7 | Realisasi Penggunaan Anggaran Pemerintah Kabupaten | III-46 |

| | | |
|-----------------|--|----------|
| | Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 - 2015 | |
| Tabel T.III.C.8 | Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 – 2021 (Dalam Jutaan) ... | III-46 |
| Tabel T.III.C.9 | Proyeksi Komposisi Linear Pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 - 2021 | III-50 |
| Tabel T.V.C.11 | Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat | V-7V-7 |
| Tabel T-C.12 | Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Tanjung Jabung Barat | VI - 5 |
| Tabel T-C.13 | Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat | VI - 13 |
| Tabel T-C.14 | Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Tanjung Jabung Barat | VI - 34 |
| Tabel T-C.14 | Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 | VII - 4 |
| Tabel T-C.17 | Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 | VIII - 3 |
| Tabel T-C.18 | Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 | VIII - 7 |



BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016 – 2021 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat terpilih berdasarkan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 dan dilantik oleh Gubernur Jambi pada tanggal 17 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.15 – 703 Tahun 2016, Tanggal 12 Februari 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.15 – 704 Tahun 2016, Tanggal 12 Februari 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

Dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus tersedia dalam penyelenggaraan pemerintah sebagai satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan Provinsi Jambi dan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 merupakan tahapan lima (5) tahun yang ketiga dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten



Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025, RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016 – 2021 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis setiap Organisasi Perangkat Daerah (Renstra PERANGKAT DAERAH) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Disamping itu, RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 disusun secara terintegrasi dan menyeluruh dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dan aspirasi *stakeholder* pembangunan lainnya.

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 juga merupakan dokumen perencanaan strategis dalam mengimplementasikan visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 khususnya untuk perioderisasi tahun ketiga dari 20 tahunan RPJPD tersebut. Materi strategi, kebijakan dan program yang termuat dalam RPJMD ini sangat bermakna untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Materi yang termuat dalam RPJMD harus berkualitas agar diperoleh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas pula.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan ideal dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini adalah Pancasila serta Landasan Konstitusional UUD 1945. Sedangkan landasan operasional meliputi perundang-undangan/peraturan yang berkaitan langsung dengan perencanaan pembangunan daerah yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah



- Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755).
 3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 12. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan



- Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 24. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 25. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
 26. Surat Edaran Bersama Menteri dalam Negeri Replublik Indonesia dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Republik Indonesia tentang Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2015 - 2019;
 27. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013–2033.
 28. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025



29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3)

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, RPJMD merupakan satu kesatuan dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan.

Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. RPJMD dan RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 merupakan rencana pembangunan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Selain menjabarkan, dan memuat visi, misidan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025. dengan visi *Tanjung Jabung Barat Maju, Berdaya Saing, Adil Dan Sejahtera* yang kemudian dijabarkan dalam misi yang berkaitan yaitu :

Misi I, Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berahlak mulia, dengan mengedepankan pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan, pengendalian jumlah penduduk,



meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek, meningkatnya kualitas kualitas kehidupan beragama, mengembangkan budaya yang berbasis iptek dan kearifan lokal

Misi II, Mewujudkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang berkualitas, melalui pembangunan transportasi jalan, jembatan, terminal, pelabuhan, pengairan, listrik, telpon, infrastruktur sosial dan infrastruktur ekonomi yang maju serta mampu mendukung kegiatan perekonomian dan pengembangan wilayah secara terpadu

Misi 3, Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas yang berbasis pada agroindustri dan SDA, dengan memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan komperatif masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan serta memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis

Misi 4, Mewujudkan masyarakat dan pemerintahan yang baik dan menjunjung tinggi supremasi hukum, melalui peningkatan kelembagaan dan budaya demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; melakukan pembenahan substansi hukum, struktur hukum dan mebudayakan budaya hukum serta menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil dan dengan menjamin keamanan dan ketentraman

Misi 5, Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dengan mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang tertinggal, menanggulangi kemiskinan secara bertahap, menyediakan akses yang



sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, dan menghapuskan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk diskriminasi gender. Menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial dan ekonomi, dan upaya konservasi; pemanfaatan ekonomi SDA dan lingkungan yang berkesinambungan; pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

2. RPJMD dan RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat

RPJMD harus memperhatikan dan mempertimbangkan arahan, pola, dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai dasar guna menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana telah tertuang dalam Perda Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 - 2033.

3. RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang untuk jangka waktu



5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

4. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan lainnya. Penyusunan RPJMD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025, RPJMD Provinsi Jambi 2016 – 2021, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, serta dokumen perencanaan lainnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 merupakan dokumen induk yang memuat visi dan misi Bupati untuk pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) bagi Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 ini nantinya akan dijabarkan di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berisikan program prioritas dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja (RENJA) serta prioritas dan plafon anggaran (PPA) setiap tahunnya. Dengan demikian diharapkan sasaran dan tujuan pembangunan di dalam RPJMD ini setiap tahun dapat dicapai secara bertahap, sehingga proses pembangunan dapat terwujud dalam suatu sistem yang terencana dan berkelanjutan



Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya akan terlihat dengan rinci bila dituangkan kedalam skematis. Adapun skematis yang dimaksud dapat terlihat pada gambar berikut.

Gambar 1.1

Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Dalam Alur Perencanan dan Penganggaran



5. RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan RPJM Nasional

Harmonisasi *Misi* pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 – 2021 terhadap agenda pokok pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional



(RPJMN) 2015 – 2019 dari sembilan agenda pembangunan nasional keterkaitan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 khususnya pada delapan agenda pembangunan nasional, yaitu :

(Agenda 1) Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap Bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh Warga Negara

(Agenda 2) Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun Tata kelola Pemerintah yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya.

(Agenda 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

(Agenda 4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya

(Agenda 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di Tahun 2019

(Agenda 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

(Agenda 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.



(Agenda 8) Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

(Agenda 9) Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Namun demikian dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, maka dari sembilan agenda pembangunan nasional tersebut di harmonisasikan sesuai dengan tingkat kewenangan daerah.

6. RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan RPJMD Provinsi Jambi serta RPJMD Daerah Lainnya.

Yang perlu dicermati dalam keterkaitan antara dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan RPJMD Provinsi serta Daerah lainnya antara lain adalah dalam misi pembangunan dengan harapan agar arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat berjalan secara harmonis dan saling mendukung.

a. RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan RPJMD Provinsi Jambi

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap RPJMD Provinsi Jambi terlihat khususnya pada misi Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :



1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif serta berorientasi pelayanan publik;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender;
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan jaminan kepastian hukum;
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan agroindustri;
5. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan;
6. Mengentaskan kemiskinan dan pengangguran dengan penciptaan lapangan kerja dan penguatan modal;

b. RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah kabupaten berbatasan terdekat dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam hal Keterkaitan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi terlihat khususnya pada misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan



3. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, Kesetaraan Gender, dan penerapan IPTEK.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta menciptakan peluang investasi di bidang Industri dan Kepariwisata.
5. Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif.

c. *RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan RPJMD Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.*

Kabupaten Batang Hari adalah salah satu Kabupaten yang garis batas wilayah administratifnya berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan apabila di lihat dari uraian misi pembangunan Kabupaten Batanghari tahun 2016 – 2021, maka misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 – 2021 dapat diselaraskan secara harmonis dengan misi Kabupaten Batanghari sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia masyarakat dan aparatur pemerintah.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui ekonomi kerakyatan.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat.
4. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara paroporsional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan melalui penerapan reformasi birokrasi yang berkeadilan.



5. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal, keagamaan, kebudayaan, adat dan kesenian daerah dalam kerangka memperkuat kebudayaan nasional.

1.4. Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV PERMASLAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
- BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH
- BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- BAB IX PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 adalah penyesuaian nomenklatur nama – nama perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan lebih memberi arah yang jelas pada beberapa rumusan sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan indikatornya dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tanjung



Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 dengan memperhatikan arahan RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025, dan memperhatikan aspirasi seluruh *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan acuan dalam penentuan program daerah yang akan dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara bertingkat.

1.5.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama tahun 2016 – 2021.
2. Menyiapkan acuan resmi bagi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk menentukan program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, APBD Provinsi Jambi dan APBN serta sumber dana lainnya;
3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan daerah antar perangkat daerah, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, serta antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Pusat.



4. Mempermudah pengukuran kinerja dan pengevaluasian kinerja dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Meningkatkan pemerataan pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil-hasil pembangunan daerah tersebut.
6. Menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), untuk terwujudnya kondisi yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan daerah melalui kebersamaan antara Pemerintah Daerah dengan swasta dan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Kondisi Geografis Daerah

2.1.1.1. Letak Wilayah dan Topografi

Secara geografis Kabupaten Tanjung Jabung Barat terletak diantara 0°53' - 01°41' Lintang Selatan dan 103°23' - 104°31' Bujur Timur di bagian Timur Provinsi Jambi, dengan total luas 5.375,16 km² (Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tanggal 31 Desember 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033). Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Laut China Selatan, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Selat Berhala, kemudian berturut - turut sebelah Selatan dan Barat masing – masing berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi, Tebo dan Batanghari.

Secara umum untuk satu wilayah kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat rata-rata dibagi dalam 10-11 desa/kelurahan dengan pembagian wilayah terbanyak yaitu di Kecamatan Pengabuan. Hal ini perlu dipahami karena salah satu tujuan untuk menentukan sebaran desa dan kelurahan diupayakan untuk meningkatkan akses pelayanan pada masyarakat, sehingga secara ideal jangkauan pelayanan administrasi pada masyarakat harus sedekat mungkin berada disekitar masyarakat.



Tabel T.II.C.1. Pembagian Wilayah Administrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015

| No | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Luas Kecamatan | |
|---------------|----------------|------------------|-------------|-----------------|--------|
| | | | | Km ² | (%) |
| 1. | Tungkal Ilir | 8 | 2 | 222,09 | 4,13 |
| 2. | Seberang Kota | 1 | 7 | 243,07 | 4,52 |
| 3. | Bram Itam | 1 | 9 | 312,66 | 5,82 |
| 4. | Tunggal Ulu | 1 | 9 | 345,69 | 6,43 |
| 5. | Tebing Tinggi | 1 | 9 | 342,89 | 6,38 |
| 6. | Batang Asam | 1 | 10 | 1.042,37 | 19,39 |
| 7. | Merlung | 1 | 9 | 311,65 | 5,80 |
| 8. | Renah Mendaluh | 1 | 9 | 473,72 | 8,81 |
| 9. | Muara Papalik | 1 | 9 | 336,38 | 6,26 |
| 10 | Betara | 1 | 11 | 570,21 | 10,61 |
| 11 | Kuala Betara | 1 | 9 | 307,67 | 5,72 |
| 12 | Pengabuan | 1 | 12 | 440,13 | 8,19 |
| 13 | Senyerang | 1 | 9 | 426,63 | 7,94 |
| JUMLAH | | 20 | 114 | 5.375,16 | 100,00 |

Sumber : RTRW Tanjung Jabung Barat

Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 meter dpl di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 500 meter dpl, ke arah barat morfologi lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) yang berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Provinsi Riau, untuk dataran rendah yang berkisar pada ketinggian 0 – 25 meter di atas permukaan laut, maka struktur tanahnya sebagian besar merupakan tanah gambut dan dipengaruhi oleh pasang/surutnya air laut.



Tabel T.II.C.2. Luas Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dibedakan Menurut Klasifikasi Ketinggian Tahun 2015

| Topografi/ Ketinggian (m/dpl) | Luas | | Wilayah/ Kabupaten |
|-------------------------------------|---------|------|---|
| | Ha | % | |
| Dataran Rendah (0 - 25) | 213.424 | 42,8 | Kecamatan Pengabuan, Senyerang, Tungkal Ilir, Bram Itam, Seberang Kota, Betara dan Kuala Betara. |
| Dataran sedang (25 – 500) | 273.090 | 54,8 | Kecamatan Tungkal Ulu, Merlung, Sebagian Batang Asam, Tebing Tinggi, Sebagian Renah Mendaluh dan Kecamatan Muara Papalik. |
| Dataran Tinggi (>500) | 11.910 | 2,4 | Sebagian Batang Asam, Sebagian Renah Mendaluh |
| Jumlah | 500.982 | 100 | |

Sumber : RTRW Tanjung Jabung Barat

Kondisi geografi Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya pada dataran rendah yang terpengaruh langsung oleh pasang surutnya air laut sebagian besar terdiri dari lapisan tanah gambut dan lumpur pada permukaan tanahnya sehingga hal ini berpengaruh pada kedalaman air tanah (kedalaman lebih dari 100 meter) dengan kondisi air tanah yang mengandung mineral dan warna yang relatif tinggi sehingga memerlukan biaya produksi yang relatif tinggi untuk diolah menjadi air minum yang memenuhi syarat kesehatan sedangkan pada dataran sedang dan tinggi adalah perbukitan dengan unsur penyusun utama terdiri dari tanah liat sehingga kualitas air tanahnya relatif lebih baik dibandingkan dengan dataran rendah.

Berdasarkan topografi daerah tersebut dapat diketahui bahwa secara umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat berpotensi rawan bencana kekeringan yang dapat memicu peningkatan kasus



penyakit potensial wabah seperti diare, kholera, disentri, demam berdarah, dan penyakit potensial wabah lain khususnya yang berhubungan dengan ketersediaan air bersih/minum.

Bencana lain yang berpotensi terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Kebakaran hutan/lahan maupun pemukiman sedangkan pada Daerah Aliran Sungai terjadi kerawanan bencana banjir karena pendangkalan badan sungai.

2.1.1.2. Klimatologi

Keadaan iklim di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak jauh berbeda dengan keadaan iklim di wilayah Provinsi Jambi pada umumnya. Berdasarkan klasifikasi menurut *Schmidt dan Ferguson*, iklim di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Type Afa, yaitu type iklim hujan tropis. Suhu udara rata-rata sebesar 29,9° C, suhu udara maksimum mencapai 32° C dan suhu udara minimum 21° C. Curah hujan tahunan rata-rata berkisar antara 2.324 - 2.373 mm per tahun.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari berbagai sumber diketahui bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk daerah belokan angin atau daerah perputaran arah awan basah sehingga peluang untuk hujan lebih tinggi baik dalam hal frekuensi maupun intensitasnya, dari informasi tersebut dapat diasumsikan bahwa air hujan adalah salah satu alternatif penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat (khususnya wilayah kecamatan klasifikasi dataran rendah dan sedang) sehingga perlu adanya beberapa usaha nyata untuk menjaga kualitas air hujan agar tidak menurun kualitasnya oleh adanya pencemaran udara.

2.1.1.3. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih didominasi oleh daerah terbangun dengan total luas 258.830 Ha atau 51,62% dari luas total Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari luas daerah



terbangun tersebut masih didominasi oleh lahan tegalan/Ladang dengan total seluas 10,36%, kemudian diikuti lahan sawah (7,45 %), lahan kebun kelapa sawit (7,21 %) dan lahan bangunan dengan luas 7,17%. Sedangkan sisa penggunaan lahan lainnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah lahan kawasan hutan dengan total luas 245.663 Ha atau 49,04% dari luas total Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tabel T.II.C.3. Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Lahan Existing Tahun 2015

| Penggunaan Lahan | | Luas (Ha) | (%) |
|--|---------------------------------|----------------|--------------|
| Kawasan Hutan | | | |
| 1 | Hutan Produksi | 179.635 | 33,4 |
| 2 | Hutan Produksi Terbatas | 35.585 | 6,62 |
| 3 | Hutan Lindung Gambut | 15.050 | 2,80 |
| 4 | Hutan Cagar Alam | 126,09 | 0,03 |
| 5 | Taman Nasional Bukit Tiga Puluh | 11.520 | 2,14 |
| 6 | Konservasi Kerang Darah | 365,30 | 0,07 |
| Jumlah | | 245.663 | 49,04 |
| Daerah Terbangun | | | |
| 1 | Permukiman | 2.952 | 0,59 |
| 2 | Bangunan | 65.904 | 7,17 |
| 3 | Sawah | 47.382 | 7,45 |
| 4 | Tegalan/Ladang | 51.918 | 10,36 |
| 5 | Kebun Campuran | 3.269 | 0,65 |
| 6 | Semak Belukar | 14.567 | 2,91 |
| 7 | Kebun Kelapa Sawit | 36.100 | 7,21 |
| 8 | Kebun Kelapa Dalam | 34.009 | 6,79 |
| 9 | Kebun Karet | 22.755 | 4,54 |
| 10 | Kebun Kopi | 4.500 | 0,90 |
| 11 | Kebun Pinang | 8.325 | 1,66 |
| 12 | Sungai/Rawa | 6.989 | 1,40 |
| Jumlah | | 258.830 | 51,62 |
| Total Luas Penggunaan Lahan : 500.982,00 | | | |

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Tanjab Barat Tahun 2012



2.1.1.4. Potensi Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari sudut Ekonomi, kepentingan sosial dan budaya dan/atau lingkungan adalah :

1. Kawasan Strategis Ekonomi adalah : Kawasan Perkotaan Kuala Tungkal di Kecamatan Tungkal Ilir, Kawasan Sepanjang Jalan Lintas Timur Kabupaten, Kawasan Perkotaan Tebing Tinggi, Kawasan Minapolitan Sungai Dualap di Kecamatan Kuala Betara dan Kawasan Pelabuhan di Kecamatan Tungkal Ilir.
2. Kawasan Strategis Kepentingan Sumber Daya Alam adalah kawasan Pertambangan Minyak, Batu Bara dan Gas Bumi yang tersebar di Kecamatan Betara, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Merlung dan Kecamatan Tungkal Ulu.
3. Kawasan Strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terbagi dua, yaitu :
 - a. Cagar alam hutan bakau pantai timur yang terletak di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberang Kota dan Kecamatan Kuala Betara.
 - b. Kawasan lindung gambut yang juga merupakan kawasan strategis nasional terletak di Kecamatan Betara, Bram Itam dan Pengabuan.



Adapun Kawasan Strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau) yang berada di Kecamatan Renah Mendaluh dan Kecamatan Batang Asam.

2.1.2. Kondisi Demografis

Dalam hal ini akan dibahas tentang penambahan dan kepadatan penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam upaya untuk merencanakan, menilai, dan mengevaluasi hasil pembangunan di berbagai bidang dengan jumlah penduduk berdasarkan proyeksi 2015 asumsi tidak terjadi pergerakan penduduk secara signifikan.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2015 bertambah sebanyak 1.331 jiwa dengan seks ratio yang tidak mengalami perubahan terlalu signifikan. Secara umum dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah 62 jiwa per km² atau dengan kata lain apabila tidak dikurangi dengan peruntukan lainnya dan dibagi secara merata, maka pada tahun 2015 setiap jiwa berpotensi memiliki lahan seluas 16.129 meter persegi atau 1 - 2 ha/jiwa dan apabila dihitung secara bebas maka setiap kepala keluarga berpotensi memiliki 8 – 10ha lahan.

Tabel T.II.C.4. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Dirinci per Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2015

| No | Kecamatan | 2015 | | | | |
|----|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------------------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | Penduduk | Sex Ratio | jiwa/km ² |
| 1. | Tungkal Ulu | 6,714 | 6,437 | 13,522 | 1,04 | 38 |
| 2. | Merlung | 8,619 | 7,857 | 16,943 | 1,10 | 53 |
| 3. | Batang Asam | 15,021 | 13,606 | 27,060 | 1,10 | 27 |
| 4. | Tebing Tinggi | 22,297 | 19,586 | 39,294 | 1,14 | 122 |
| 5. | R.Mendaluh | 7,275 | 6,602 | 14,850 | 1,10 | 29 |



| | | | | | | |
|----|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------|
| 6. | Ma. Papalik | 6,114 | 5,230 | 12,002 | 1,17 | 38 |
| 7. | Pengabuan | 12,906 | 12,236 | 24,492 | 1,05 | 57 |
| 8. | Senyerang | 12,111 | 11,193 | 23,426 | 1,08 | 55 |
| 9. | Tungkal Ilir | 35,992 | 35,702 | 74,215 | 1,01 | 715 |
| 10 | Bram Itam | 7,994 | 7,444 | 17,794 | 1,07 | 49 |
| 11 | Sbg Kota | 4,457 | 4,169 | 8,891 | 1,07 | 71 |
| 12 | Betara | 14,609 | 13,363 | 24,038 | 1,09 | 49 |
| 13 | Ka Betara | 6,868 | 6,512 | 13,056 | 1,05 | 72 |
| | Jumlah | 160,977 | 149,937 | 309,583 | 1,07 | 62 |

Sumber : BPS Tanjung Jabung Barat 2016. (Data Diolah)

Kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Tungkal Ilir dan jika dikonversikan sebagaimana dasar peruntukan lahan seperti di atas, maka setiap jiwa memiliki \pm 1.400 meter persegi atau setiap kepala keluarga dapat memiliki lahan seluas 5.000 hingga 7.000 meter persegi (tanpa memperhatikan peruntukan lainnya), dan ini berbanding terbalik dengan Kecamatan Batang Asam dimana setiap Kepala Keluarga masih berkesempatan untuk memiliki lahan \pm 16 hingga 20 hektare.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Untuk mengetahui proses kenaikan pendapatan per kapita daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam jangka panjang, dan sekaligus untuk mengetahui perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan adalah merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama ini ternyata juga memberikan dampak pelebaran kesenjangan pendapatan masyarakat,

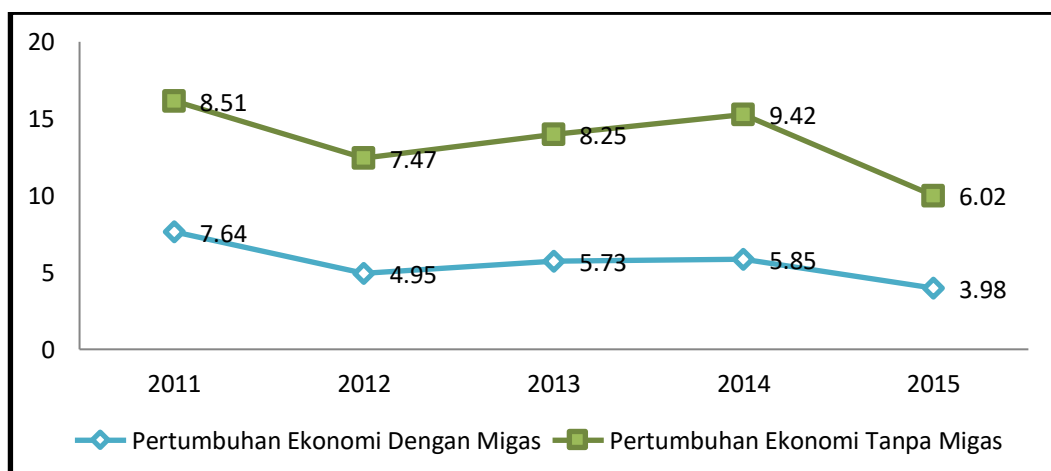


sehingga diperlukan suatu kebijakan dan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta manfaatnya dapat dinikmati masyarakat secara lebih merata, adil dan inklusif (*equitable, just and inclusive growth*), sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi dengan migas pada periode waktu tahun 2010-2015 rata-rata sebesar 6,22 % per tahun. Namun tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut masih di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi (7,45 % per tahun). Dibandingkan dengan 11 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jambi, maka rata-rata pertumbuhan ekonomi dengan migas Kabupaten Tanjung Jabung Barat menempati urutan ke 10, hanya di atas Kabupaten Tanjung Jabung Timur (5,13 % per tahun).

Pada periode tahun 2010-2015, pertumbuhan ekonomi dengan migas Kabupaten Tanjung Jabung Barat berfluktuasi dengan kisaran antara 4,95 – 7,64 %. Pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi dengan migas sebesar 7,64 % turun menjadi 4,95 % pada tahun 2012, namun pada tahun 2013-2014 kembali naik masing-masing sebesar 5,78 % dan 5,85 %. Kemudian pada tahun 2015 mengalami penurunan sehingga menjadi 3,98%.

Grafik G.II.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Migas dan Tanpa Migas (%)





Untuk tanpa migas, pada periode yang sama Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami pertumbuhan ekonomi juga berfluktuasi dengan kisaran antara 6,02 – 9,42%. Pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanpa migas sebesar 8,51% turun menjadi 7,47% pada tahun 2012, namun pada tahun 2013-2014 kembali naik masing-masing sebesar 8,25% dan 9,42%. Kemudian pada tahun 2015 mengalami penurunan kembali sehingga menjadi 6,02%. Secara rata-rata, capaian ini lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi tanpa migas Provinsi Jambi (8,41 % per tahun) dan menempati posisi ke 4 dari 11 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jambi.

Selanjutnya, untuk mengetahui kondisi ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam suatu periode tertentu, baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) adalah berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

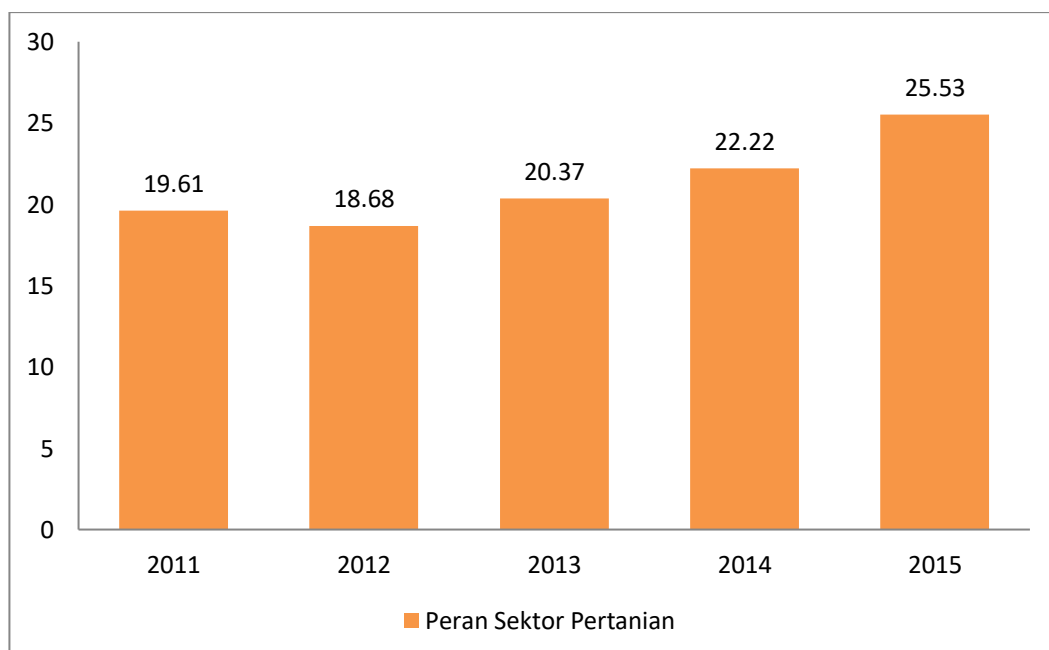
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB ADHB digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.



Berbicara tentang kontribusi/peranan/penyumbang suatu sektor terhadap PDRB Kabupaten/Kota, memang tidak terlepas dari dua hal, yaitu produksi dan harga, dari dua hal tersebut akan dihasilkan output dan selanjutnya dapat dihitung nilai tambah bruto. Oleh karena itu naik turunnya peranan suatu sektor sangat tergantung pada produksi dan harga baik komoditi sektor tersebut maupun sektor-sektor yang lain.

Sektor pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan masih memegang peranan terpenting dan merupakan sektor utama dalam pembentukan perekonomian daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Peranan sektor pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun tahun 2011 sampai dengan 2015 mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2011 sebesar 19,61 % kemudian naik pada tahun 2015 menjadi 25,53 % per tahun dengan rata-rata tumbuh sebesar 5,57 % persen per tahun.

Grafik G.II.2. Peranan Sektor Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2011-2015





Selama kurun waktu tahun 2011-2015 seluruh Kabupaten/kota kecuali Kota Jambi dan Sungai Penuh, sektor pertanian merupakan penyumbang cukup besar terhadap PDRB. Naik turunnya peran kategori pertanian terjadi karena meningkatnya peranan sektor-sektor lain. Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat, rata-rata peran sektor pertanian (20,50 % per tahun) masih lebih kecil dibandingkan Kabupaten Kerinci (53,81 %), Kabupaten Merangin (50,55 %), Kabupaten Tebo (48,81 %), Kabupaten Batang Hari (40,96 %), Kabupaten Muaro Jambi (40,27 %) dan Kabupaten Sarolangun (29,44 %).

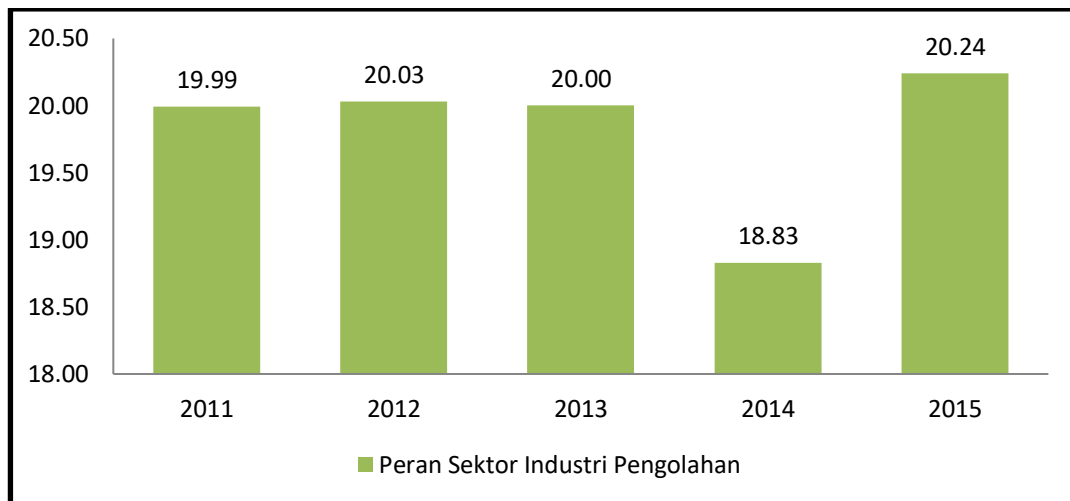
Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat selain dibangun oleh sektor pertanian, juga berasal dari sektor industri pengolahan yaitu industri manufaktur yang mencakup seluruh kegiatan pengolahan baik barang organik maupun non organik dari bentuk yang sederhana menjadi produk baru yang lebih tinggi nilainya. Dimana bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan galian.

Besarnya peranan sektor industri pengolahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggambarkan kemampuan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan proses pengolahan barang mentah menjadi barang jadi agar mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi. Sedangkan perkembangan peranan sektor industri pengolahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain ditemukan oleh tersedianya bahan baku, mesin industri dan tenaga kerja yang berasal dari daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau daerah lain.

Peranan sektor industri pengolahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun tahun 2011-2015 mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2011, peranan sektor industri pengolahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 19,99 % selanjutnya hingga pada tahun 2015 menjadi 20,24 %. Berarti, industri pengolahan mengalami pertumbuhan negatif yaitu rata-rata sebesar 0,42 % per tahun.



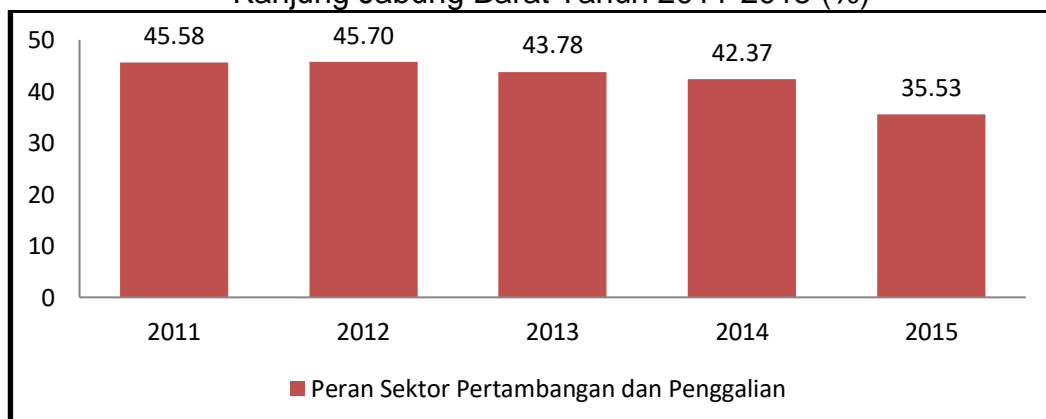
Grafik G.II.3. Peran Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015 (%)



Secara rata-rata pada periode tahun 2011-2015, peran industri pengolahan dalam perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebesar 19,82 %. Capaian ini paling besar dibandingkan capaian peran industri pengolahan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jambi.

Perekonomian daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga disumbangkan oleh sektor pertambangan dan penggalian secara signifikan. Terbukti selama periode tahun 2011-2015, sektor pertambangan dan penggalian menyumbang perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat rata-rata sebesar 42,59 % per tahun.

Grafik G.II.4. Peran Sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015 (%)

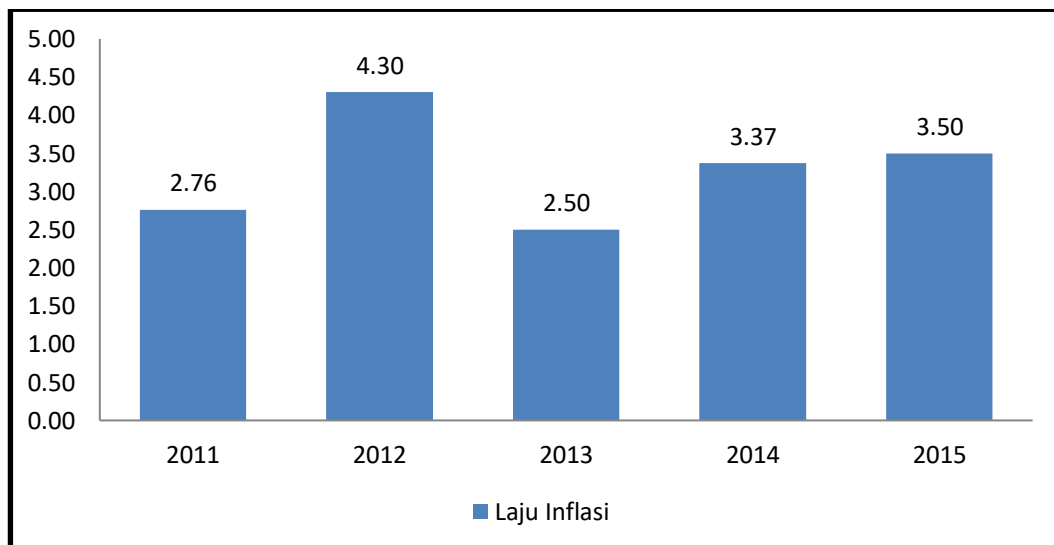




2.2.1.2. Laju Inflasi

Gambaran stabilitas ekonomi sekaligus mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat dari besaran inflasi. Dimana laju inflasi diukur dari laju perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) yaitu suatu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan inflasi atau deflasi. Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat hingga saat ini masih berpegang pada laju inflasi Kota Jambi yang dapat dilihat dari data IHK Kota Jambi sebagaimana ditampilkan pada grafik di bawah ini.

Grafik G.II.5. Perkembangan Inflasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015



Dalam kurun waktu tahun 2011-2015, inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 4,30 %, kemudian di tahun-tahun berikutnya inflasi berfluktuasi antara 2,50 sampai dengan 3,50 %. Dalam kurun waktu tersebut inflasi terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 2,50 % dan pada tahun 2015 inflasi sebesar 3,50 %.



2.2.1.3. PDRB per Kapita ADHK

Untuk mengetahui tingkat perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam lingkup makro atau sebagai acuan memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa adalah melalui PDRB perkapita. PDRB perkapita ADHK adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB perkapita ADHK daerah tersebut. Semakin tinggi PDRB perkapita ADHK suatu daerah, semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode 5 tahun terakhir (tahun 2010-2014) memiliki PDRB per Kapita selalu lebih dibandingkan dengan PDRB per Kapita Provinsi Jambi maupun PDRB per Kapita kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jambi. Pada tahun 2010, PDRB per Kapita ADHK Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar Rp. 68.954.873,31 meningkat 45,31 % pada tahun 2014 yaitu menjadi Rp. 100.197.514,51.

Tabel T.II.C.5. PDRB PerKapita Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2014

| No | Kabupaten/Kota | PDRB per Kapita | | Perubahan (%) |
|----|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | 2010 | 2014 | |
| 1 | Kerinci | 15.812.461,24 | 28.812.958,53 | 82,22 |
| 2 | Merangin | 17.404.470,34 | 27.959.051,29 | 60,64 |
| 3 | Sarolangun | 26.225.720,91 | 41.577.409,44 | 58,54 |
| 4 | Batang Hari | 28.208.012,45 | 45.433.096,24 | 61,06 |
| 5 | Muaro Jambi | 27.089.072,83 | 41.160.806,56 | 51,95 |
| 6 | Tanjab Timur | 61.861.686,01 | 92.091.755,19 | 48,87 |
| 7 | Tanjab Barat | 68.954.873,31 | 100.197.514,51 | 45,31 |
| 8 | Tebo | 19.140.275,93 | 32.504.660,64 | 69,82 |
| 9 | Bungo | 23.027.897,24 | 37.504.660,64 | 62,87 |



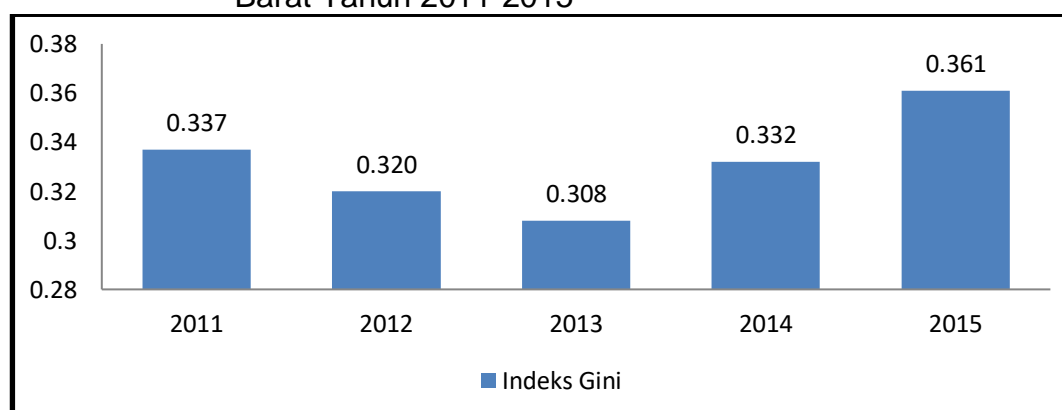
| | | | | |
|-----------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 10 | Kota Jambi | 20.711.636,32 | 34.528.290,71 | 66,71 |
| 11 | Kota Sungai Penuh | 31.384.114,95 | 52.280.842,90 | 66,58 |
| | Provinsi Jambi | 29.160.162,08 | 46.004.118,38 | 57,76 |

Meskipun secara jumlah PDRB per Kapita Kabupaten Tanjung Jabung Barat paling besar, namun laju pertumbuhan PDRB per Kapitanya (45,31 %) paling kecil dibandingkan laju pertumbuhan PDRB per Kapita Provinsi Jambi (57,76 %) maupun laju pertumbuhan PDRB per Kapita kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jambi.

2.2.1.4. Indeks Gini

Indikator utama yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh adalah Indeks Gini. Semakin tinggi nilai koefisien gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi (Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1). *Daimon dan Thorbecke* (1999) berpendapat bahwa penurunan ketimpangan (perbaikan distribusi pendapatan) selalu tidak konsisten dengan bertambahnya insiden kemiskinan kecuali jika terdapat dua aspek yang mendasari inkonsistensi tersebut. Pertama, variasi distribusi pendapatan dari kelas terendah meningkat secara drastis sebagai akibat krisis. Kedua, merupakan persoalan metodologi berkaitan dengan keraguan dalam pengukuran kemiskinan dan indikator ketimpangan. Selanjutnya Koefisien Gini di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Grafik G.II.8. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015





Jika diamati menurut besarnya koefisien gini tahun 2011 hingga 2015, maka rata-rata ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 0,324 per tahun adalah masuk kategori sedang. Tingginya kesenjangan di Kabupaten ini bisa disebabkan oleh tingginya pertumbuhan ekonomi pada sektor-sektor tertentu yang tidak dinikmati oleh masyarakat luas. Bisa juga akibat tidak meratanya perkembangan antar kecamatan, sehingga kesenjangan (*gap*) antar wilayah kecamatan semakin tampak.

2.2.1.5. Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia

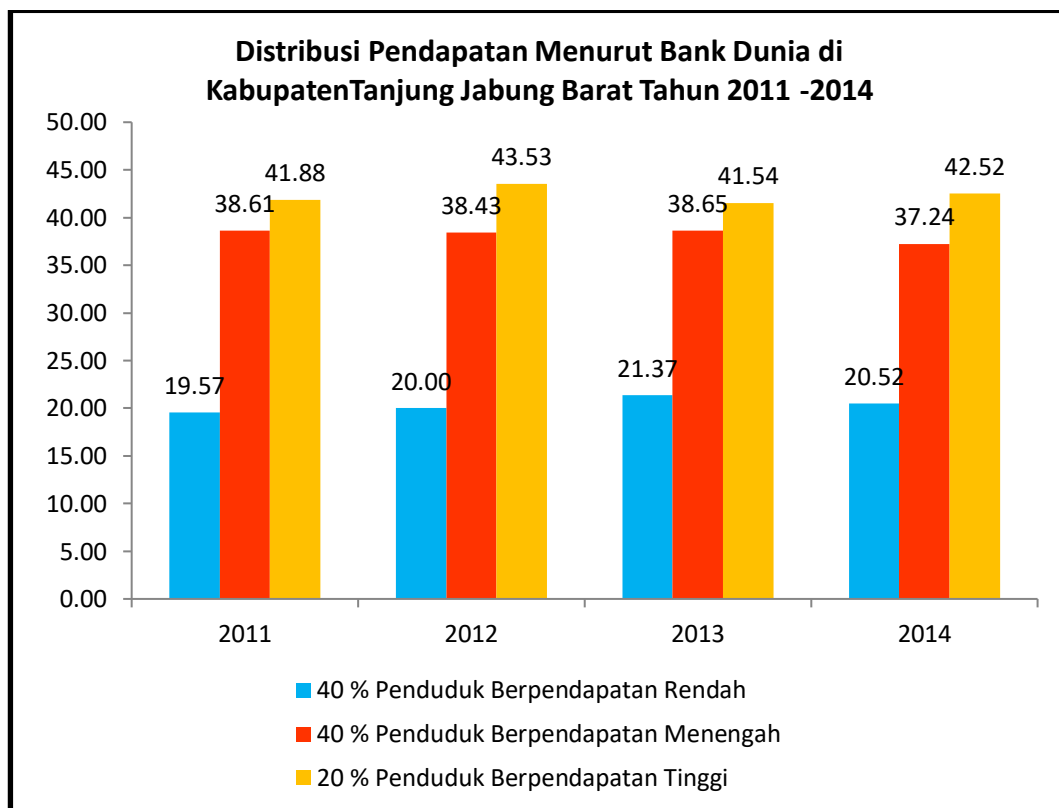
Pola distribusi pendapatan masyarakat yang didasarkan pada hasil perhitungan indeks gini hanya bisa menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan secara umum, tetapi belum menjelaskan besarnya porsi yang diterima oleh kelompok berpendapatan rendah/miskin dari keseluruhan pendapatan wilayah. Dengan menggunakan ukuran yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian Bank Dunia dan Lembaga Studi Pembangunan *Universitas Sussex*, akan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai masalah ketidakadilan (*inequality*) melalui indikator yang disebut *relative inequality* atau biasa disebut dengan kriteria Bank Dunia. *Relative Inequality* diartikan sebagai ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan masyarakat. Bank Dunia dalam upaya mengukur ketimpangan pendapatan, membagi penduduk menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 40 % penduduk berpendapatan rendah, kelompok 40 % penduduk berpendapatan menengah, dan kelompok 20 % penduduk berpendapatan tinggi.

Persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 % penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berpendapatan rendah pada periode tahun 2011-2014 terdapat kecenderungan meningkat, yaitu 19,57 % pada tahun 2011 meningkat menjadi 20,52 % pada tahun 2014 atau tumbuh sebesar 1,69 % per tahun. Secara rata-rata persentase



pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 % penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berpendapatan rendah pada periode tahun 2011-2014 sebesar 20,37 % per tahun. Artinya kelompok 40 % penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berpendapatan terendah selama periode tahun 2011-2014 rata-rata menerima 20,52 % per tahun dari total pendapatan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Grafik G.II.9. Distribusi Pendapatan Menurut Bank Dunia di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 -2014



Menurut Bank Dunia, ketimpangan pendapatan ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 % penduduk berpendapatan rendah, dengan kriteria sebagai berikut :



- a. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 % penduduk berpendapatan rendah lebih kecil dari 12 %, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan tinggi.
- b. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 % penduduk berpendapatan rendah antara 12 % - 17 %, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan moderat/sedang/menengah.
- c. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 % penduduk berpendapatan rendah lebih besar dari 17 %, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan rendah.

Berdasarkan kriteria ini, maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki ketimpangan pendapatan rendah (*low inequality*) selama periode 2011-2014 karena persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 % penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berpendapatan rendah lebih besar dari 17 %.

Selanjutnya, untuk persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 % penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berpendapatan menengah pada periode tahun 2011-2014 terdapat kecenderungan menurun, yaitu 38,61 % pada tahun 2011 menurun menjadi 37,24 % pada tahun 2014 atau menurun sebesar -1,18 % per tahun. Hal ini menandakan adanya pergeseran proporsi pengeluaran, harapannya pergeseran ini berpindah pada persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 % penduduk yang berpendapatan menengah, karena jika ini terjadi berarti kesenjangan dalam masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai berkurang, namun dengan syarat proporsi pada persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 20 % penduduk yang berpendapatan tinggi mulai menurun.

Secara rata-rata persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 % penduduk yang berpendapatan menengah pada periode tahun 2011-2014 sebesar 38,23 %. Artinya kelompok 40 % penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berpendapatan menengah selama



periode tahun 2011-2014 rata-rata menerima 38,23 % per tahun dari total pendapatan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kemudian, persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 20% penduduk yang berpendapatan tinggi pada periode tahun 2011-2014 berfluktuasi dengan kecenderungan stabil, yaitu 41,887 % pada tahun 2011 menjadi 42,52 % pada tahun 2014 atau tumbuh sebesar 0,58 % per tahun. Secara rata-rata persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 20 % penduduk yang berpendapatan tinggi pada periode tahun 2011-2014 sebesar 42,37 % per tahun. Artinya kelompok 20 % penduduk yang berpendapatan tinggi selama periode tahun 2011-2014 rata-rata menerima 42,37 % per tahun dari total pendapatan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

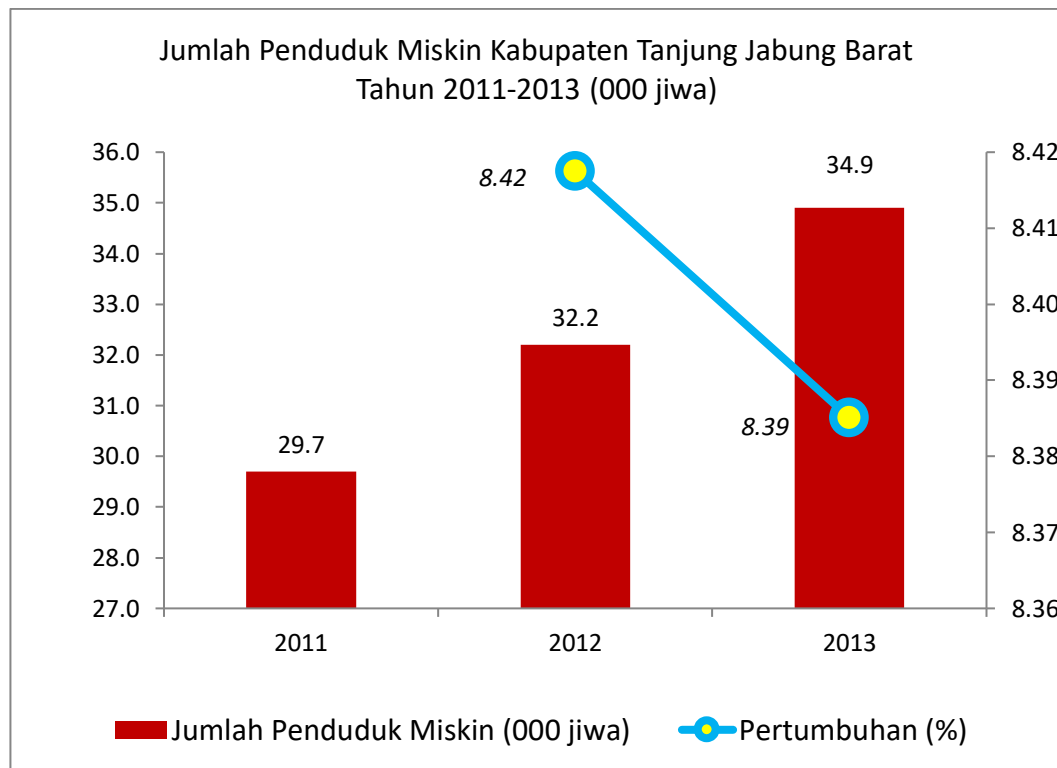
2.2.1.7. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumberdaya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan. Pada banyak kasus, penyebab dan dampak kemiskinan saling berinteraksi. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini.



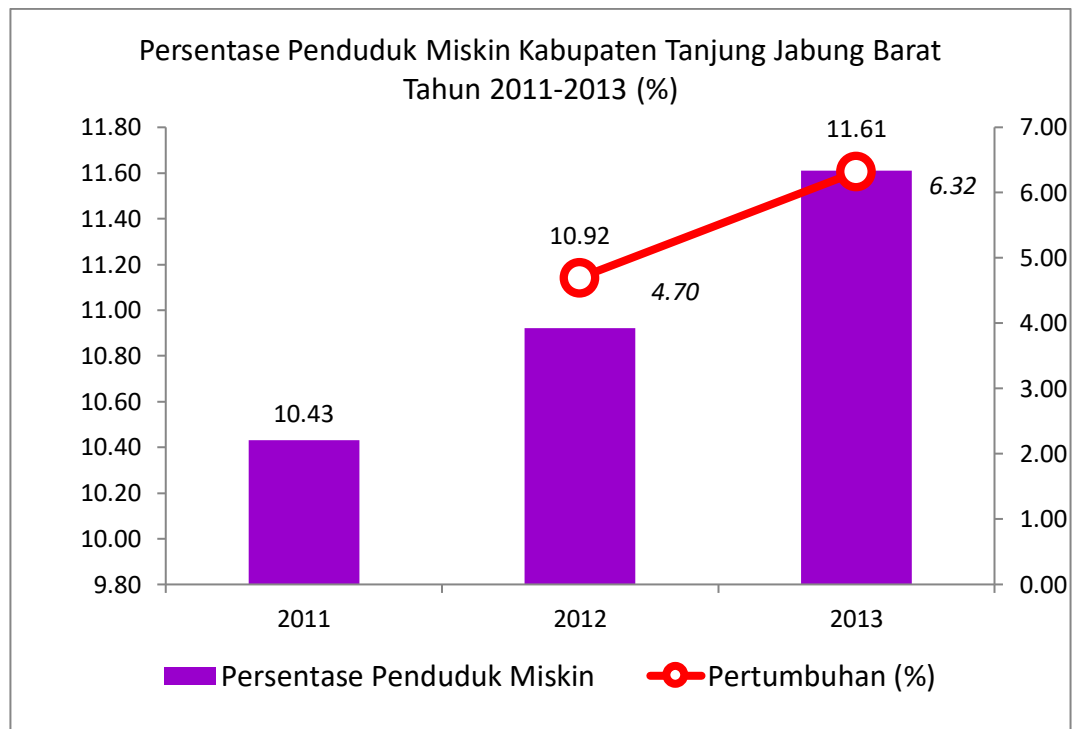
Grafik G.II.10. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 -2013



Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus meningkat selama periode tahun 2011-2013. Pada tahun 2011, jumlah penduduk miskin Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 29,7 ribu jiwa meningkat menjadi 34,9 ribu jiwa pada tahun 2013 atau rata-rata meningkat sebesar 8,40 % per tahun.



Grafik G.II.11. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 -2013

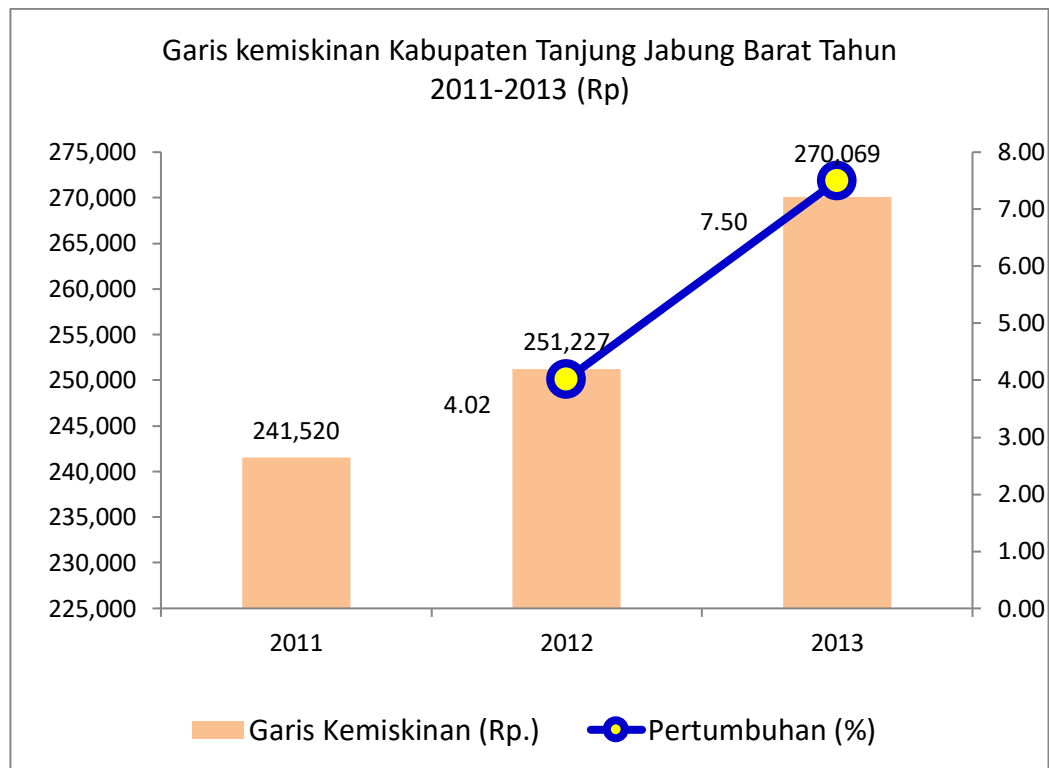


Sejalan dengan jumlah penduduk miskin, maka persentase penduduk miskin Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga meningkat setiap tahun selama periode tahun 2011-2013. Persentase penduduk miskin Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2011 sebesar 10,43 % dan pada tahun 2013 menjadi 11,61 % atau rata-rata sebesar 10,99 % per tahun.

Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan 2.100 kilokalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minimum non makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Garis kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus meningkat selama periode tahun 2011-2013. Adapun pada tahun 2011, garis kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebesar Rp. 241.520,- meningkat menjadi sebesar Rp. 270.069,- pada tahun 2013 atau rata-rata meningkat sebesar 5,76 % per tahun.



Grafik G.II.12. Garis Kemiskinan di KabupatenTanjung Jabung Barat Tahun 2011 -2013



2.2.1.8. Angka kriminalitas yang tertangani

Permasalahan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara keseluruhan masuk dalam kategori aman dan terkendali, namun demikian persoalan yang sering muncul dalam masa 5 tahun terakhir adalah konflik sengketa lahan, konflik buruh, konflik daerah perbatasan dan terakhir sejumlah kekerasan dalam rumah tangga, imigran gelap dan kriminalitas sedangkan kekerasan mengatasnamakan agama, radikalisme dan terorisme sebagaimana yang terjadi di daerah lain belum kelihatan kepermukaan.



2.2.2. FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

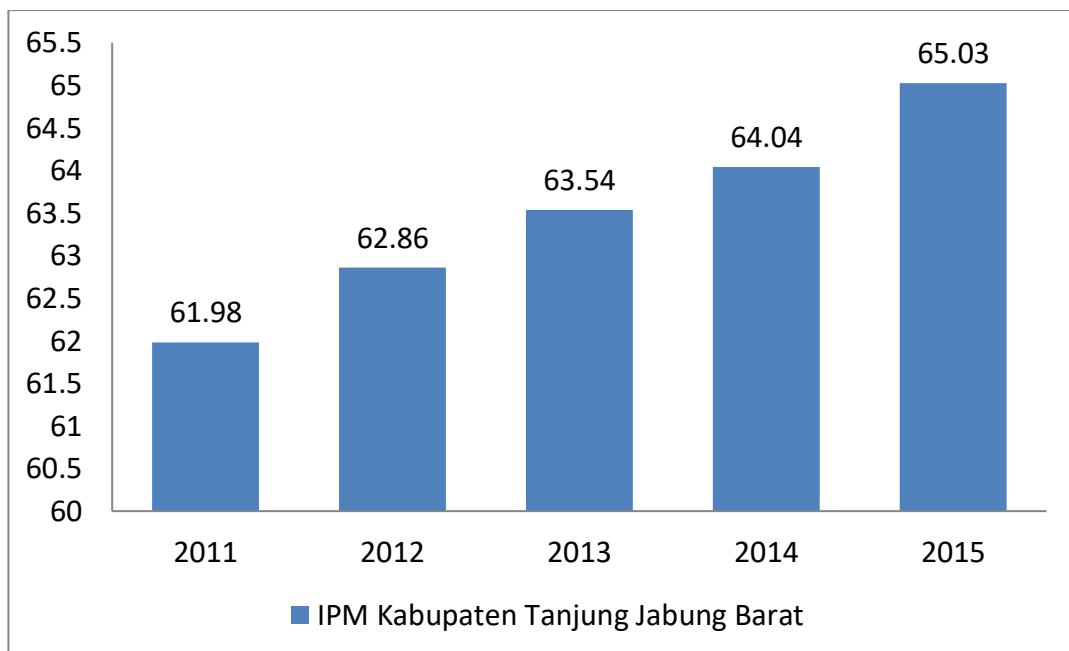
2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru

UNDP menyempurnakan metode Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Metode Baru pada tahun 2010. Adapun alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM metode baru adalah : 1) Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah; 2) penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

IPM dengan Metode Baru menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif) yaitu : a) Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi; b) PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.



Grafik G.II.13. IPM KabupatenTanjung Jabung Barat Tahun 2011 -2015



Selama periode tahun 2011-2015, IPM KabupatenTanjung Jabung Barat selalu meningkat setiap tahun, yaitu mulai dari 61,98 tahun 2011 meningkat menjadi 65,03 tahun 2015 atau rata-rata tumbuh sebesar 1,02 % per tahun. Secara rata-rata IPM KabupatenTanjung Jabung Barat selama periode tahun 2011-2015 adalah sebesar 63,49 per tahun.

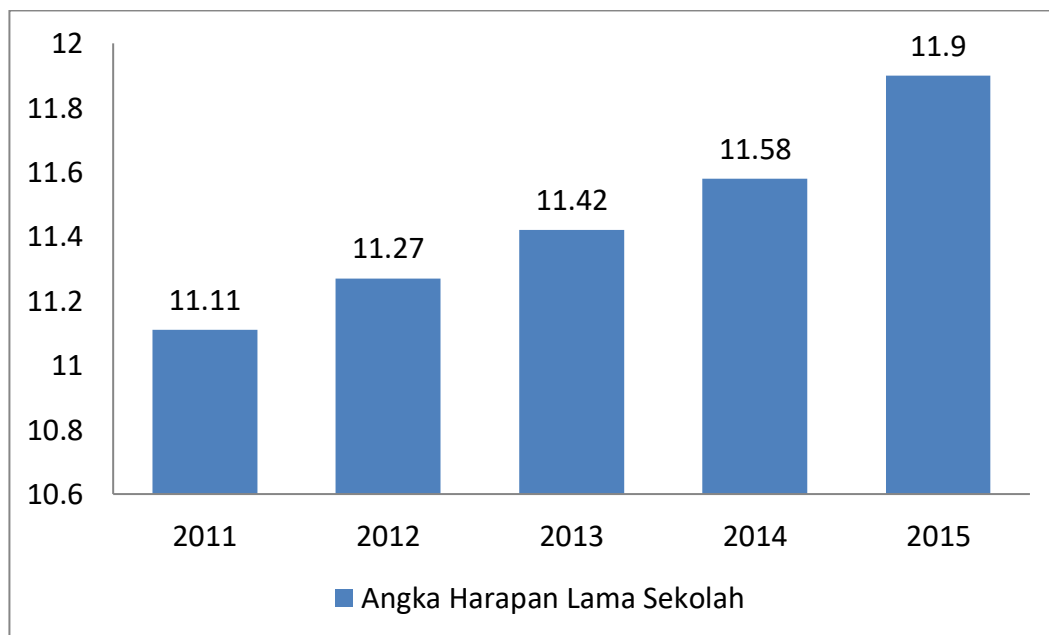
Meskipun IPM KabupatenTanjung Jabung Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir selalu naik, tetapi berdasarkan rangking IPM, maka KabupatenTanjung Jabung Barat selama periode tahun 2010-2014 selalu menempati posisi rangking ke 10 dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Pada tahun 2015, IPM KabupatenTanjung Jabung Barat (65,03) ternyata lebih rendah dibandingkan dengan IPM Provinsi Jambi (68,89), dan juga lebih rendah dibandingkan dengan IPM Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jambi kecuali Kabupaten Tanjung Jabung Timur (61,12).



2.2.2.1.1. Angka Harapan Lama Sekolah

Salah satu dimensi IPM adalah Angka Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*) yang didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Grafik G.II.14. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015



Setiap tahun Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada periode tahun 2011-2015 naik yaitu mulai dari 11,11 tahun pada tahun 2011 meningkat pada tahun 2015 menjadi 11,90 tahun atau rata-rata sebesar 11,46 tahun. Capaian ini masih di bawah

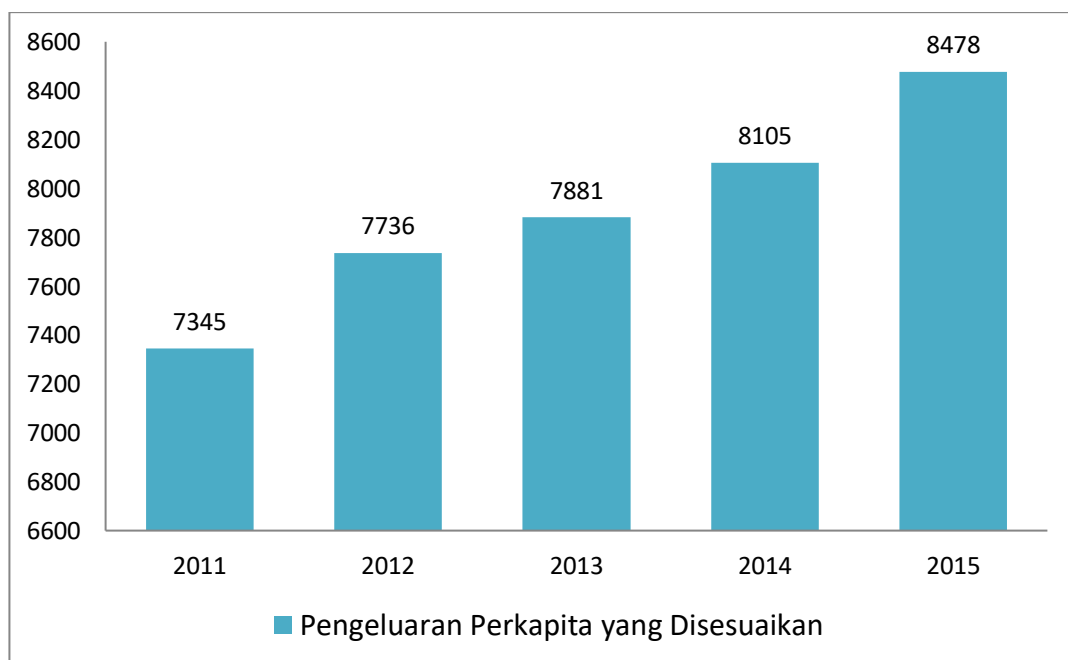


rata-rata Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Jambi (12,57 tahun) dan menempati posisi ke 7 dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Namun demikian, selama periode tahun 2011-2015, Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tanjung Jabung Barat rata-rata tumbuh sebesar 1,41 % per tahun.

2.2.2.1.2. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Dimensi kedua dari IPM adalah Pengeluaran per Kapita Disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level Kabupaten/Kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

Grafik G.II.15. Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010-2014





Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu tahun 2011-2015 memiliki Pengeluaran per kapita yang disesuaikan selalu naik setiap tahun dengan rata-rata meningkat 2,86 % per tahun. Pada tahun 2011, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar Rp. 7.345 ribu per orang per tahun meningkat menjadi sebesar Rp. 8.478 ribu per orang per tahun atau rata-rata sebesar Rp. 7.909 ribu per orang per tahun. Kondisi ini tidak lebih baik dibandingkan dengan rata-rata Pengeluaran per kapita yang Disesuaikan Provinsi Jambi (Rp. 9.446 ribu per orang per tahun) dan menempati urutan ke 9 dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi, hanya lebih baik dari Kabupaten Muaro Jambi (Rp. 6.935 ribu per orang per tahun) dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Rp. 7.391 ribu per orang per tahun).

2.2.2.2. Angka Melek Huruf

Salah satu indikator pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menurut *MDGs* adalah angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun. Kelompok penduduk usia sekolah ini adalah kelompok penduduk usia produktif, sebagai sumberdaya pembangunan yang seharusnya memiliki pendidikan yang memadai dan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

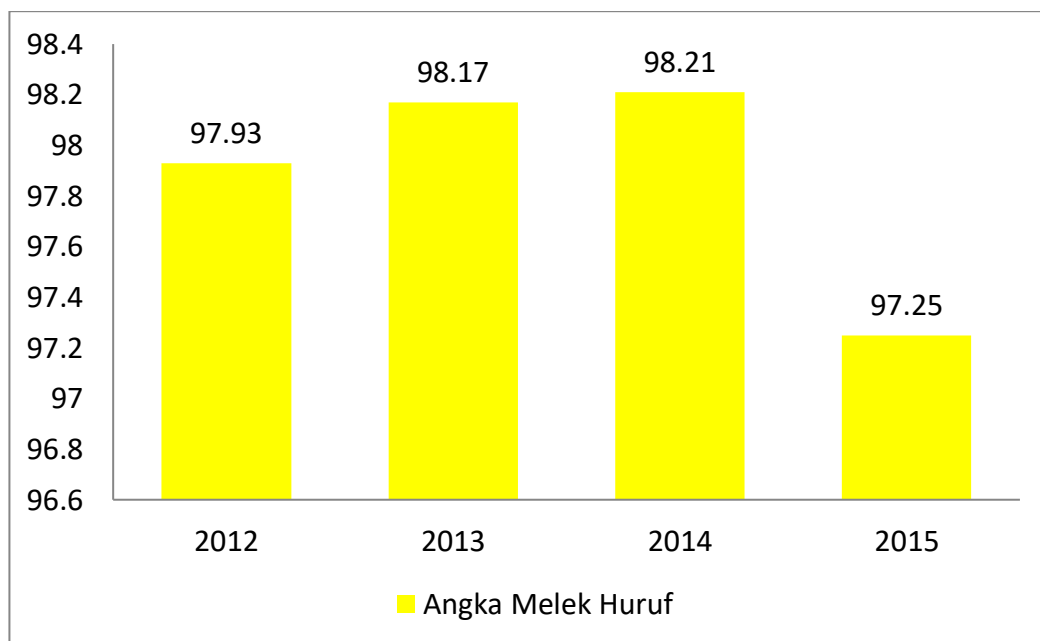
Dalam aspek ini, baik perempuan dan laki-laki kelompok umur 15-24 tahun membutuhkan intervensi pemerintah dan masyarakat agar mereka tidak buta huruf dan mampu mengakses lapangan pekerjaan. Mengutip pernyataan Direktur Eksekutif *UNICEF Ann M. Veneman* pada peringatan Hari Penghapusan Kemiskinan Sedunia (17 October 2009), hasil sebuah penelitian menunjukkan bahwa investasi sebesar \$1 untuk pendidikan bagi anak perempuan akan menghasilkan peningkatan 10 kali lipat produktivitas lebih banyak dibandingkan dengan investasi pada anak laki-laki. Dengan demikian, mempercepat kesetaraan laki-laki dan perempuan



yang melek huruf akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan produktivitas yang meningkat.

Capaian Angka Melek Huruf Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama Tahun 2012-2015 berfluktuasi setiap tahun. Pada tahun 2012, jumlah penduduk usia > 15 tahun sebanyak 190.885 jiwa dengan jumlah penduduk yang bisa baca tulis mencapai 186.934 jiwa sehingga diperoleh Angka Melek Hurufnya sebesar 97,93 %.

Grafik G.II.16. Capaian Angka Melek Huruf Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012-2015



Untuk tahun 2013, jumlah penduduk usia > 15 tahun sebanyak 197.126 jiwa dengan jumlah penduduk yang bisa baca tulis mencapai 193.519 jiwa maka diperoleh Angka Melek Hurufnya sebesar 98,17 %. Selanjutnya pada tahun 2014, jumlah penduduk usia > 15 tahun sebanyak 202.414 jiwa dengan jumlah penduduk yang bisa baca tulis mencapai 198.786 jiwa sehingga diperoleh Angka Melek Hurufnya sebesar 98,21 %.



Grafik G.II.17. Capaian Angka Melek Huruf Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015



Pada tahun 2015, Kecamatan Tungal Ilir memiliki Angka Melek Huruf tertinggi (99,78 %), diikuti Kecamatan Pangabuan (99,59 %) dan Angka Melek Huruf terendah pada Kecamatan Renah Mendaluh (94,95 %). Kondisi ini merupakan modal dasar bagi daerah untuk mentransformasi pembangunan yang dilaksanakan di daerah. Masyarakat akan dapat membaca informasi tentang pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang pada akhirnya masyarakat mampu menjadi subyek pembangunan dan memiliki peran untuk menentukan arah pembangunan yang diinginkan

2.2.2.3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan pendidikan

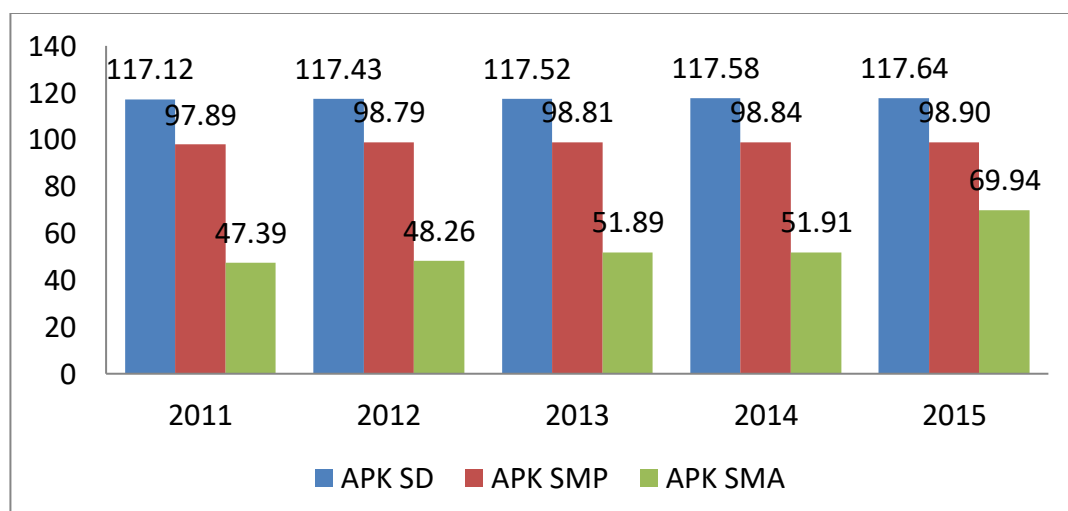


digunakan Angka Partisipasi Kasar (APK). Dimana APK merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Sesuai dengan konsep tersebut, APK untuk SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun. Nilai APK bisa lebih dari 100 % karena populasi siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan (misal anak bersekolah di SD berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun).

Capaian APK untuk SD/MI KabupatenTanjung Jabung Barat selama tahun 2011-2015 relatif tetap dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,13 % per tahun. Secara rata-rata capaian APK untuk SD/MI adalah 117,41 % per tahun berarti capaian di atas 100. Kondisi ini karena populasi siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI di KabupatenTanjung Jabung Barat selama tahun 2011-2015 mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI yaitu anak bersekolah di SD/MI berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun.

Grafik 18. Capaian APK SD, SMP dan SMA Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015



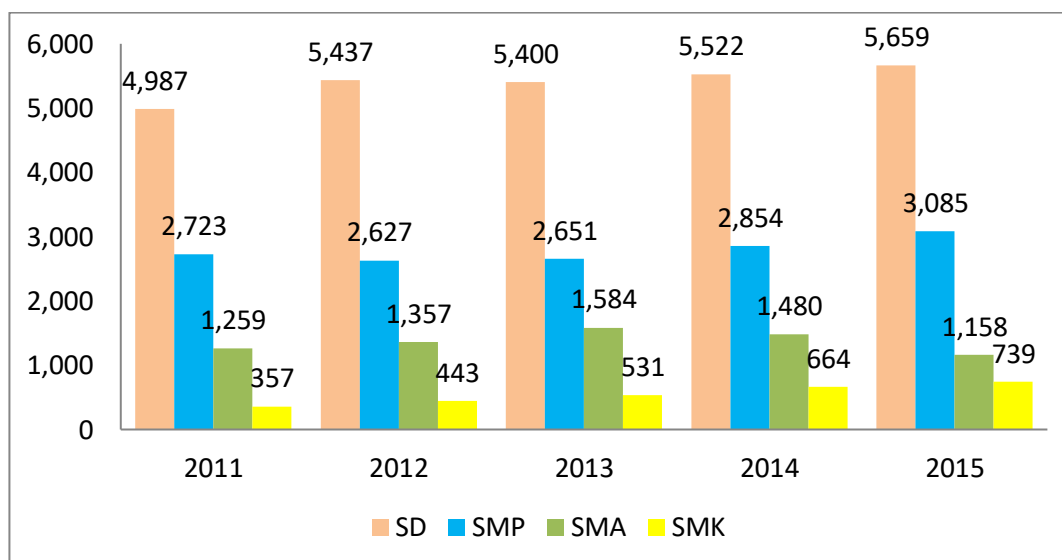


Untuk APK SMP KabupatenTanjung Jabung Barat pada periode 5 tahun terakhir relatif naik dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,32 % per tahun. Pada tahun 2011, APK SMP KabupatenTanjung Jabung Barat sebesar 97,89 % meningkat menjadi 98,90 % pada tahun 2015. Begitu pula untuk APK SMA, selama tahun 2011-2015 APK SMA KabupatenTanjung Jabung Barat mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,13 % per tahun. Pada tahun 2011, APK SMA KabupatenTanjung Jabung Barat sebesar 47,39 % meningkat menjadi sebesar 69,94 % pada tahun 2015.

2.2.2.4. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Pembebasan biaya pendidikan dasar di KabupatenTanjung Jabung Barat yang telah dilaksanakan sejak beberapa tahun yang lalu telah memberi dampak yang cukup bermakna, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya persentase penduduk yang mengikuti dan menamatkan SD, SMP maupun SMA/SMK dan yang sederajat.

Grafik G.II.19. Tingkat Kelulusan SD, SMP dan SMA/SMK Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015





Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa secara umum kecenderungan jumlah murid yang lulus pada tiap jenjang pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat relatif meningkat setiap tahunnya, dan peningkatan tersebut relatif linear beraturan sehingga dapat diasumsikan bahwa kecenderungan sumberdaya manusia terutama untuk kelompok umur sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011 sampai 2015 meningkat setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan

2.2.2.5. Angka Partisipasi Murni (APM)

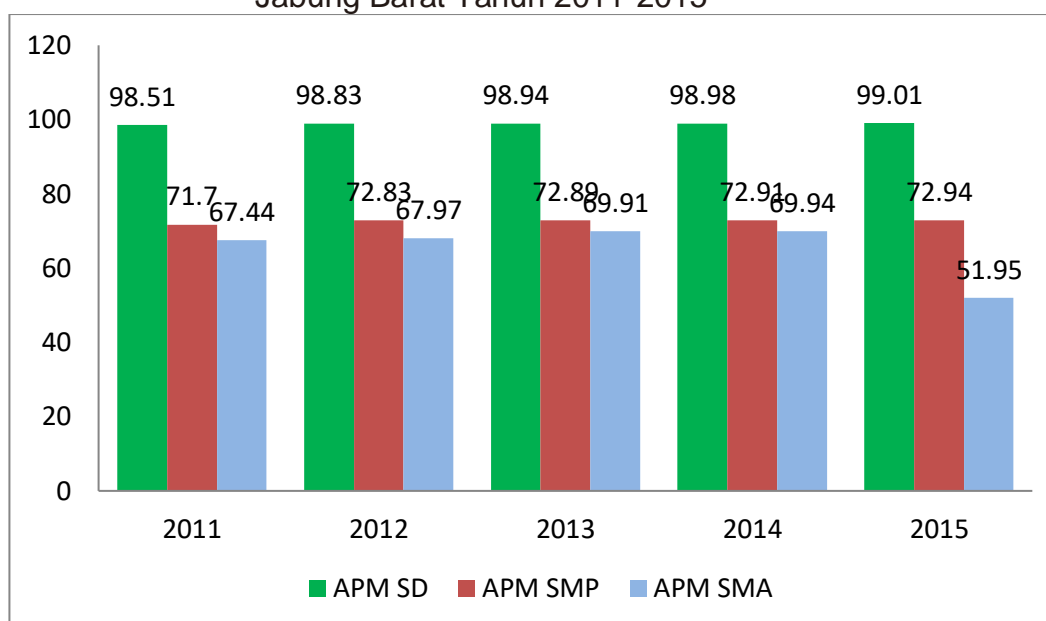
Untuk melihat penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu digunakan indikator Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu proporsi jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Sebagai gambaran dalam hal ini adalah APM untuk tingkat SD yang merupakan proporsi jumlah murid SD yang berusia 7 – 12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7 – 12 tahun.

Dalam hal seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan mencapai 100 persen. Sebaliknya, jika hanya sebagian anak usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan lebih kecil dari 100 persen. Sejalan dengan itu, nilai APM akan selalu lebih kecil dari 100 atau sama dengan 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari nilai APK, karena APK menyangkut anak diluar usia sekolah dan beberapa jenjang pendidikan.

Capaian APM untuk SD/MI KabupatenTanjung Jabung Barat selama tahun 2011-2015 sedikit naik dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,16 % per tahun. Secara rata-rata capaian APM untuk SD/MI adalah 98,82 % per tahun. Artinya tidak seluruh anak usia SD yang dapat bersekolah di SD/MI tepat waktu.



Grafik G.II.20. Capaian APM SD, SMP dan SMA Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015



Untuk APM SMP KabupatenTanjung Jabung Barat pada periode tahun 2011-2015 tumbuh rata-rata sebesar 0,56 % per tahun. Pada tahun 2011, APM SMP sebesar 71,70 % meningkat menjadi 72,94 % pada tahun 2015 atau rata-rata sebesar 72,58 %. Begitu pula untuk APK SMA, selama tahun 2011-2015 mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,23 % per tahun. Pada tahun 2011, APK SMA sebesar 47,39 % meningkat menjadi 51,95 % pada tahun 2015. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin rendah APM atau semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah tidak tepat waktu.

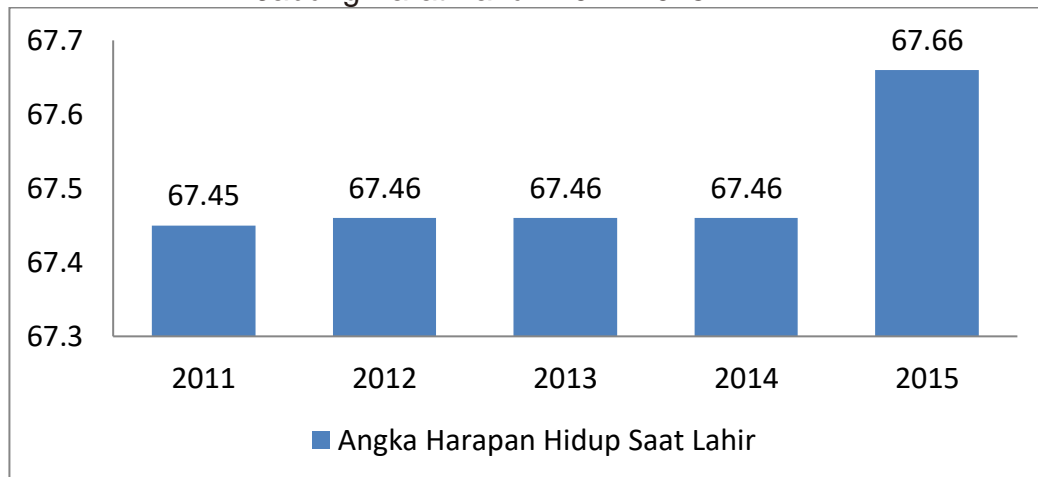
2.2.2.6. Angka Harapan Hidup Saat Lahir

Untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah KabupatenTanjung Jabung Barat dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya adalah menggunakan Angka Harapan Hidup Saat Lahir(*Life Expectancy*). Angka Harapan Hidup Saat Lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun



yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Grafik G.II.21. Angka Harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015



Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk kurun waktu tahun 2010-2015 baru dapat meningkatkan Angka Harapan Hidup Saat Lahir yaitu 67,4454 tahun pada tahun 2011 menjadi 67,66 tahun pada tahun 2015 atau hanya meningkat 0,01 % per tahun. Secara rata-rata Angka Harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk kurun waktu tahun 2011-2015 adalah 67,50 tahun. Hasil ini masih lebih kecil dibandingkan rata-rata Angka Harapan Hidup Saat Lahir Provinsi Jambi dan menempati posisi ke 9 dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi, hanya lebih baik dibandingkan Kabupaten Bungo (66,66 tahun) dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (65,07 tahun).

2.2.3. FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA

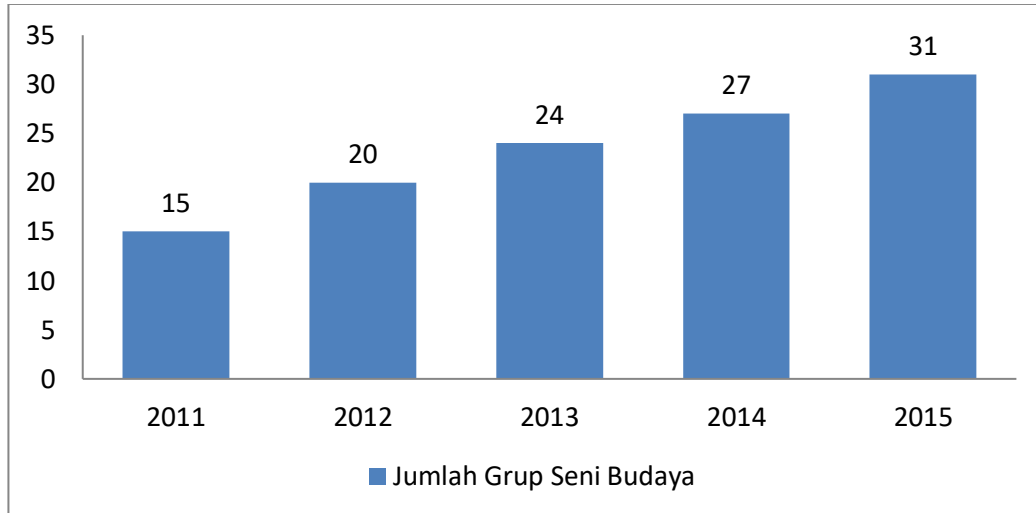
2.2.3.1. Jumlah Grup Kesenian

Grup seni budaya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011-2014 berhasil berkembang mulai dari 15 grup pada tahun 2011 menjadi 27 grup pada tahun 2014 atau berkembang sebanyak 21,94 % per tahun. Perkembangan ini berkat dukungan Pemerintah Daerah



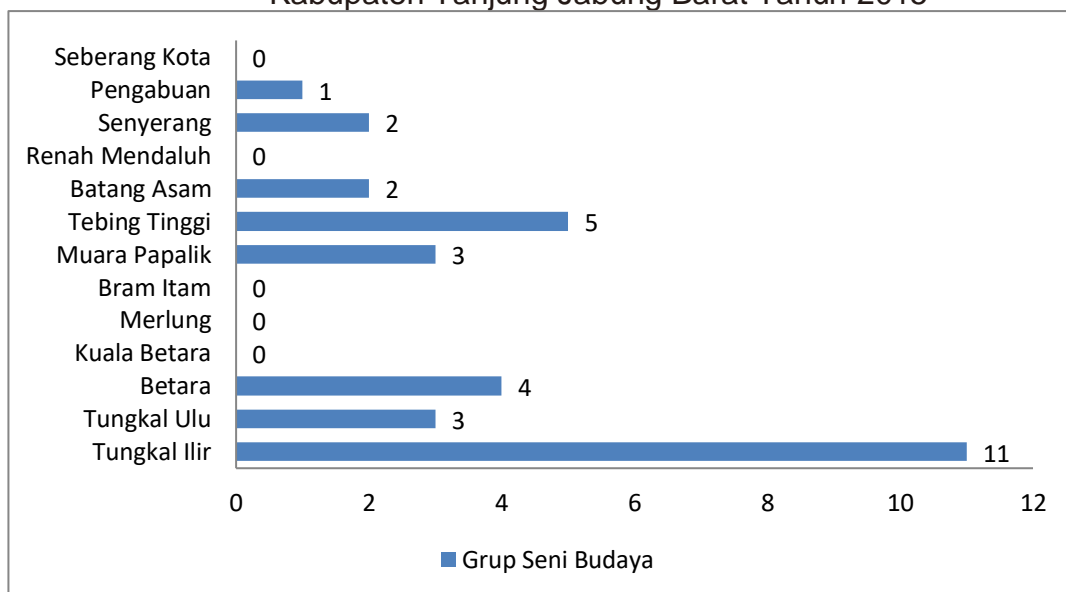
Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Grafik G.II.22. Perkembangan Grup Seni Budaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015



Meskipun berhasil berkembang cukup pesat grup seni budaya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, namun tidak merata pada masing-masing kecamatan. Kecamatan Tungkal Ilir memiliki hampir separuh jumlah grup seni budaya, dan diikuti kecamatan Tebing Tinggi, seperti tersaji pada Grafik berikut ini.

Grafik G.II.23. Grup Seni Budaya pada Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015

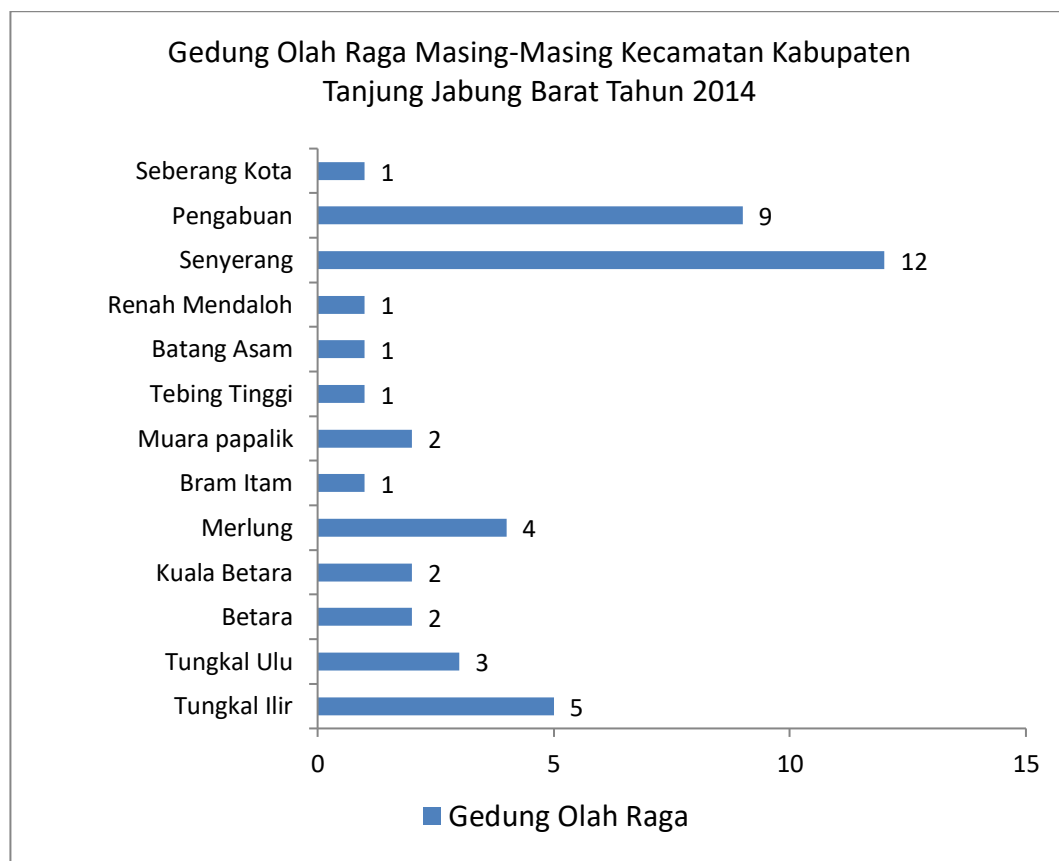




2.2.3.2. Jumlah Gedung Olahraga

Prestasi olahraga sangat berkaitan dengan sarana olahraga terutama gedung olahraga. Pembangunan gedung olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2014 agak merata, yang terbanyak di Kecamatan Senyerang sebanyak 12 gedung dan Kecamatan Pengabuan sebanyak 9 gedung. Selanjutnya untuk kecamatan-kecamatan lain tersaji pada Grafik berikut ini.

Grafik G.II.24. Jumlah Gedung Olahraga pada Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014





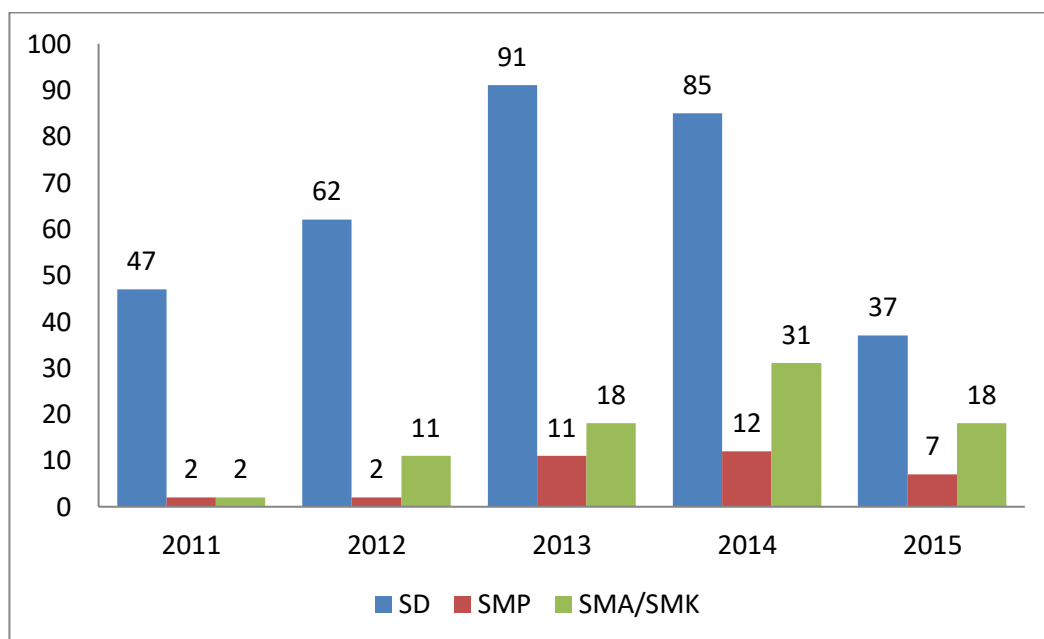
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB

2.3.1.1. Pendidikan

Penyediaan sarana belajar mengajar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan akhir tahun 2014 meningkat sangat signifikan dibandingkan dengan kondisi tahun 2011 dan peningkatan tersebut khususnya pada kegiatan pembangunan ruang kelas serta rehabilitasi berat ruang kelas SD dan SMP serta pembangunan sarana air bersih sekolah yang memadai.

Grafik G.II.25. Perkembangan Pembangunan Ruang Kelas baru untuk SD, SMP, dan SMA/SMK di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015

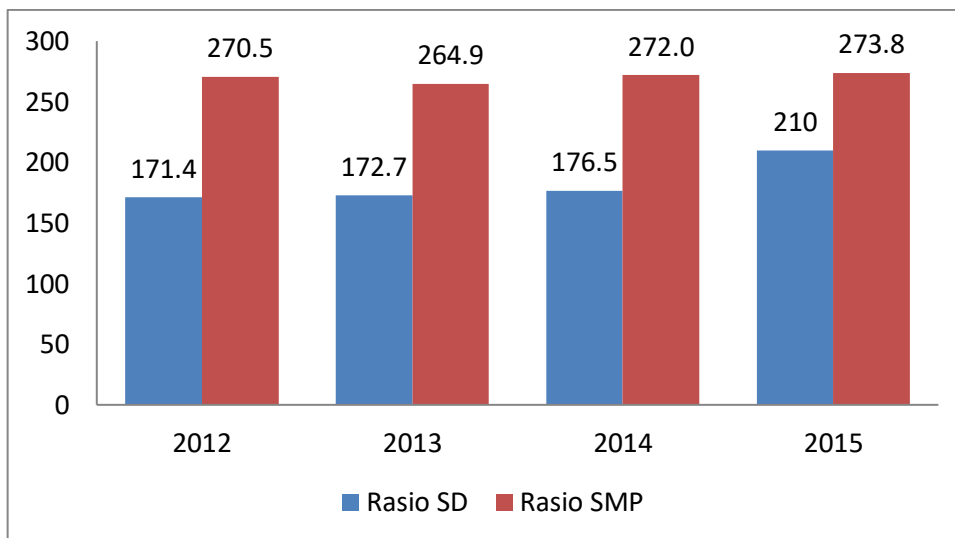


Kemampuan untuk menampung semua penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat usia pendidikan dasar adalah berdasarkan Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berhasil meningkatkan rasio jumlah SD dengan jumlah penduduk usia SD selama tahun 2012-2014 yaitu dari 171,40 pada tahun 2012 menjadi 176,5 pada tahun 2014 atau naik

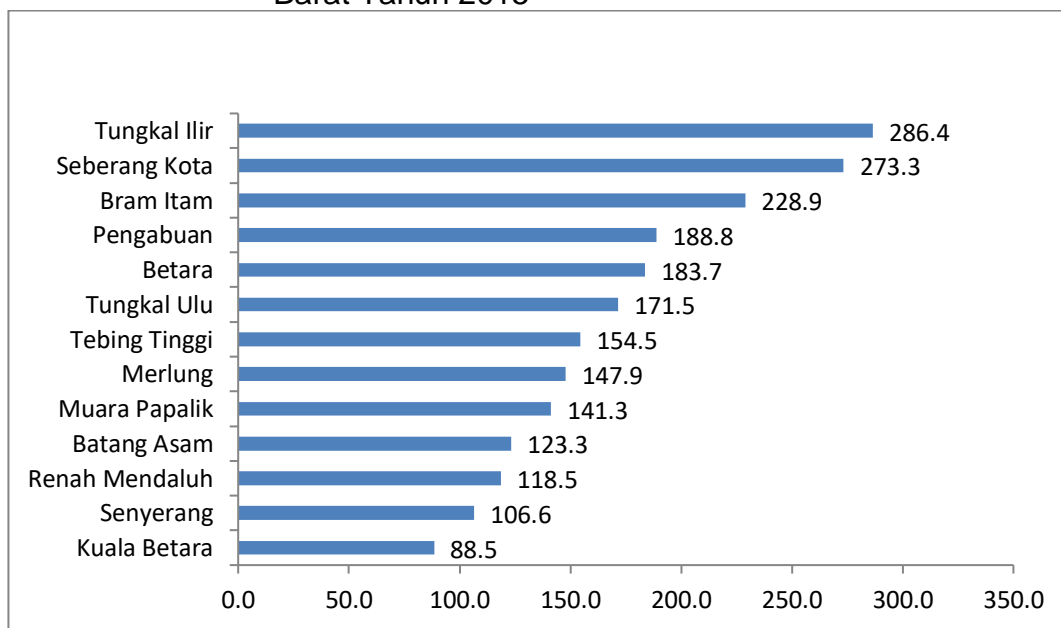


sebesar 1,48 % per tahun. Secara rata-rata rasio jumlah SD dengan jumlah penduduk usia SD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2012-2014 adalah 173,53, yang artinya setiap satu SD dapat menampung 173,53 penduduk usia SD (usia 7-12 tahun).

Grafik G.II.26. Rasio Jumlah SD dan SMP dengan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012-2015



Grafik G.II.27. Rasio Jumlah SD dengan Jumlah Penduduk Usia SD pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015

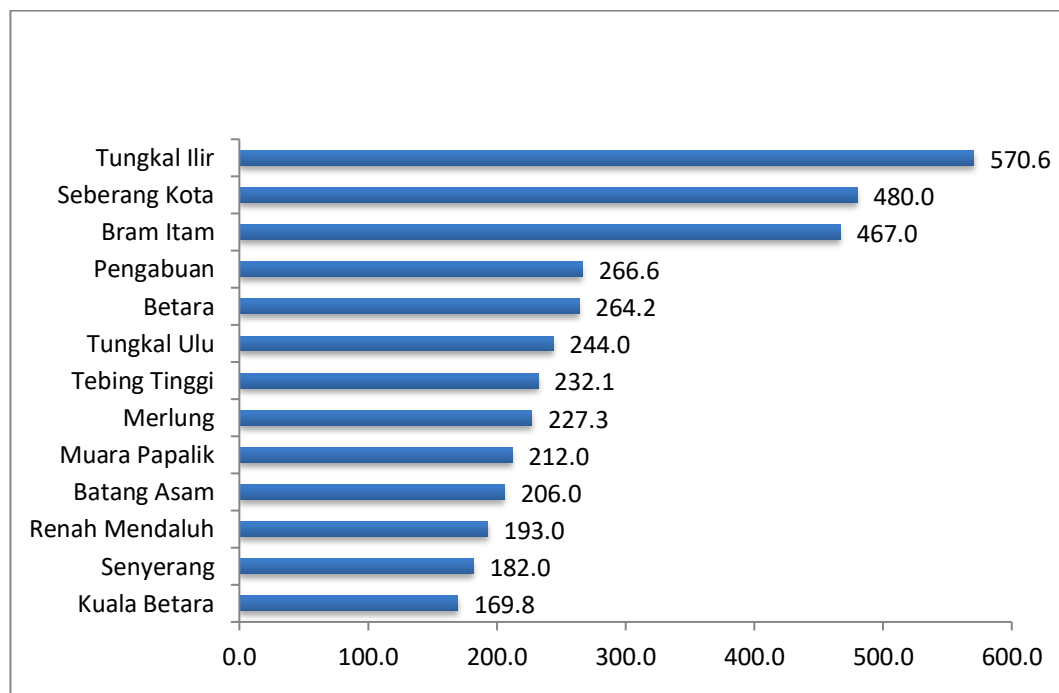




Kecamatan Tungkal Ilir memiliki rasio jumlah SD dengan jumlah penduduk usia SD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2015 yang terbesar yaitu 286,4, sedangkan yang rasio terkecil (88,5) terdapat pada Kecamatan Kuala Betara.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga berhasil meningkatkan rasio jumlah SMP dengan jumlah penduduk usia SMP selama tahun 2012-2015 yaitu dari 270,5 pada tahun 2012 menjadi 272,0 pada tahun 2014 atau naik sebesar 0,31 % per tahun. Secara rata-rata rasio jumlah SMP dengan jumlah penduduk usia SMP di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2012-2015 adalah 269,13, yang artinya setiap satu SMP dapat menampung 269,13 penduduk usia SMP (usia 13 - 15 tahun).

Grafik G.II.28. Rasio Jumlah SMP dengan Jumlah Penduduk Usia SMP pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015



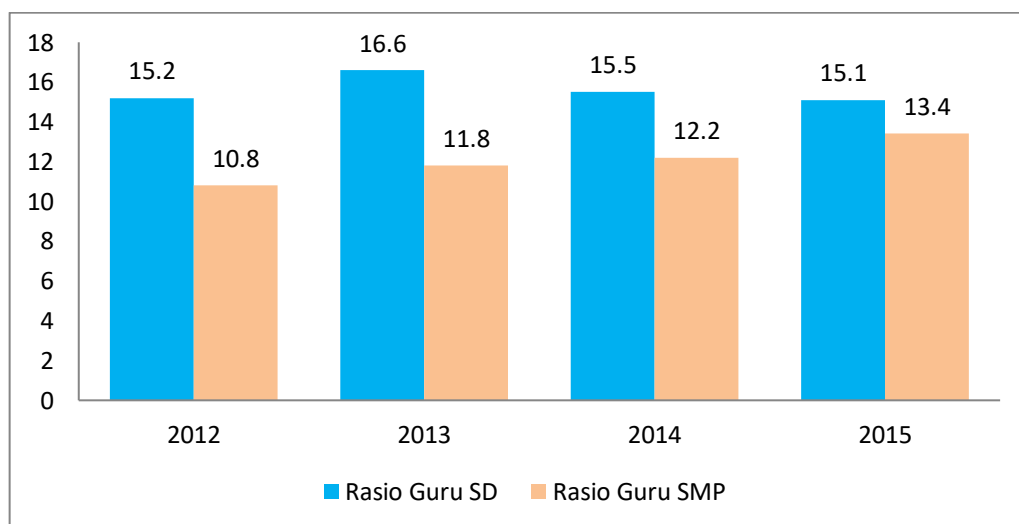
Untuk rasio jumlah SMP dengan jumlah penduduk usia SMP di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2015 yang terbesar terdapat



pada Kecamatan Tungkal Ilir yaitu 570,6, sedangkan Kecamatan Kuala Betara memiliki rasio jumlah SMP dengan jumlah penduduk usia SMP yang terkecil (169,8).

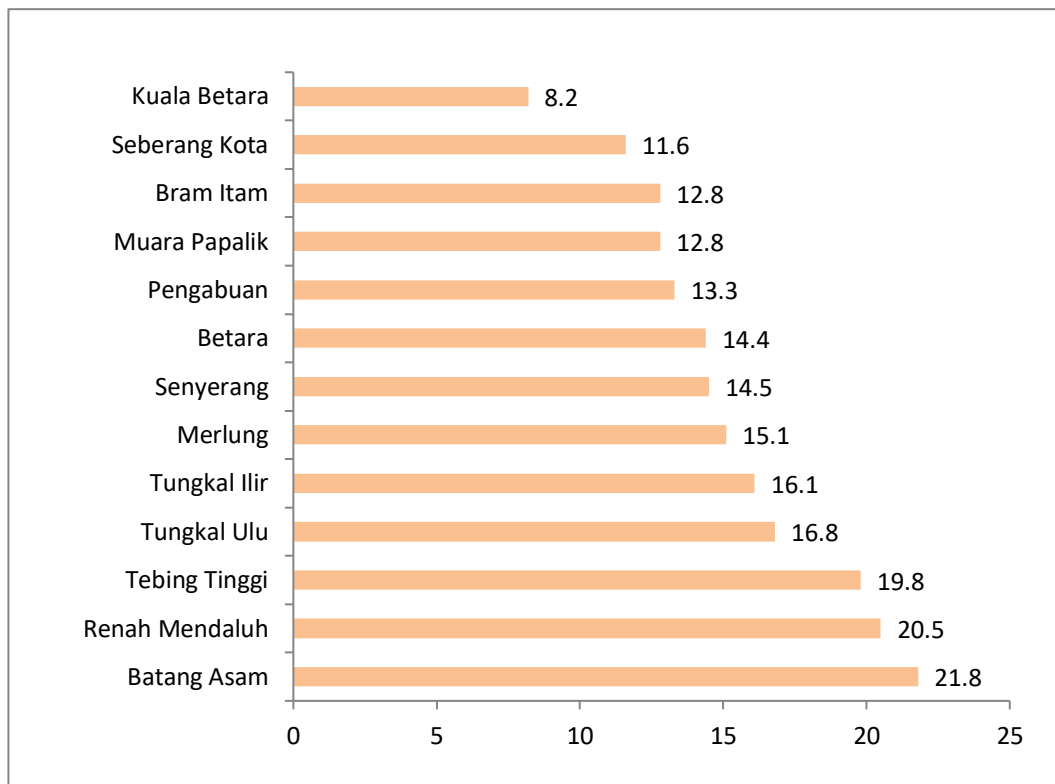
Jumlah tenaga pengajar yang tersedia pada suatu sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kualitas pendidikan di suatu sekolah. Semakin besar angka rasio ini, angka mutu pendidikan diharapkan akan lebih baik, dibanding sekolah yang mempunyai tenaga pengajar yang sedikit. Selama tahun 2012-2014, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berhasil meningkatkan rasio guru dengan murid baik untuk SD maupun SMP. Rasio guruSD dengan murid SD berhasil ditingkatkan menjadi 15,30 pada tahun 2015 dibandingkan pada tahun 2012 yaitu 15,20 atau meningkat sebesar 1,29 % per tahun. Sedangkan untuk rasio guruSMP dengan murid SMP berhasil ditingkatkan menjadi 13,40 pada tahun 2015 dibandingkan pada tahun 2012 yaitu 10,80 atau meningkat sebesar 6,32 % per tahun.

Grafik G.II.29. Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang Pendidikan SD dan SMP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012-2015





Grafik G.II.30. Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang Pendidikan SD Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015

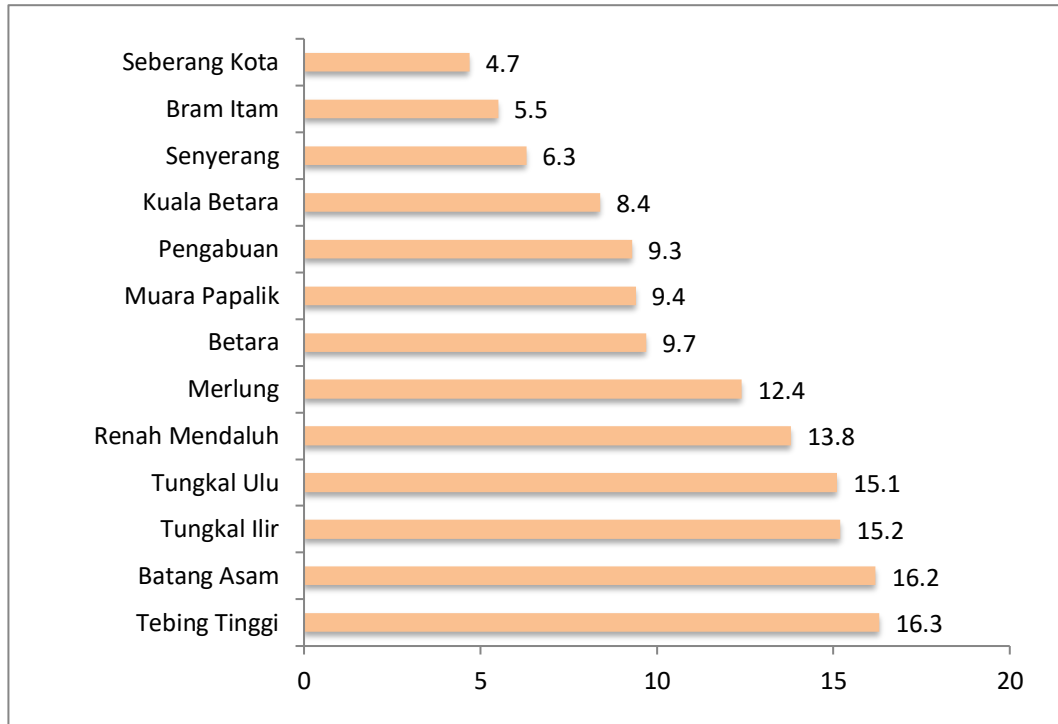


Untuk rasio guru SD dengan murid SD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2014 yang terbesar terdapat pada Kecamatan Batang Asam yaitu 21,80 dan Kecamatan Renah Mendaluh yaitu 20,50, sedangkan Kecamatan Kuala Betara dan Kecamatan Seberang Kota memiliki rasio guru SD dengan murid SD yang terkecil yaitu masing-masing 8,20 dan 11,60.

Selanjutnya untuk rasio guru SMP dengan murid SMP pada tahun 2014 yang terbesar terdapat pada Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Batang Asam yaitu masing-masing 16,3 dan 16,20, sedangkan rasio terkecil terdapat pada Kecamatan Seberang Kota dan Kecamatan Bram Itam yaitu masing-masing 4,70 dan 5,50.



Grafik G.II.31. Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang Pendidikan SMP Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015

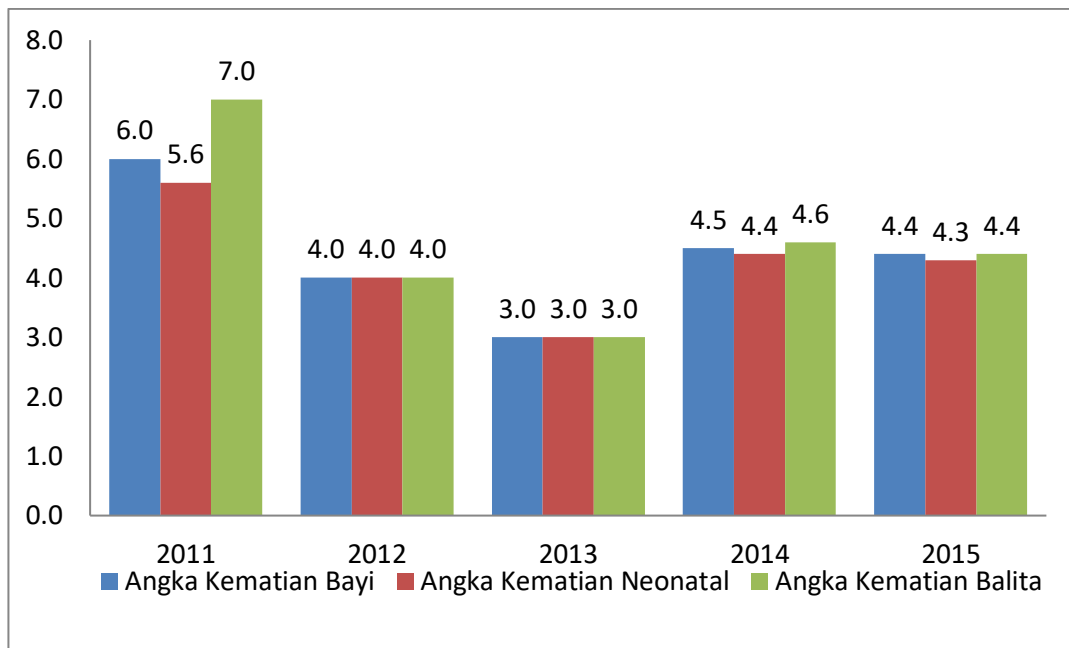


2.3.1.2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.



Grafik G.II.31. Angka Kematian Bayi, Neonatal dan Balita Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015



Terjadi penurunan Angka Kematian Bayi dari tahun 2011 yaitu 6 per 1.000 kelahiran hidup dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 4.4 per 1.000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan target MDG's (23 per 1.000 kelahiran hidup) maka masih jauh lebih baik. Kasus kematian bayi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor penyebab langsung dan faktor penyebab tidak langsung. Faktor penyebab langsung yaitu: Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), Kekurangan oksigen (Asfiksia) dan Infeksi. Adapun faktor penyebab tidak langsung yaitu: Keterlambatan dalam proses rujukan dikarenakan akses yang dipengaruhi oleh faktor geografis (daerah perairan dan pasang surut), Belum terbentuknya Regionalisasi rujukan kasus maternal dan neonatal ditingkat puskesmas, Berkurangnya kelengkapan Tim PONED (Pelayanan Obsetri Neonatal Esensial Dasar) Puskesmas yang sudah dibentuk dan dilatih dikarenakan pindah tempat bertugas sehingga dibutuhkan pelatihan tim yang baru, Masih ada beberapa desa yang belum maksimal menjalin kemitraan bidan

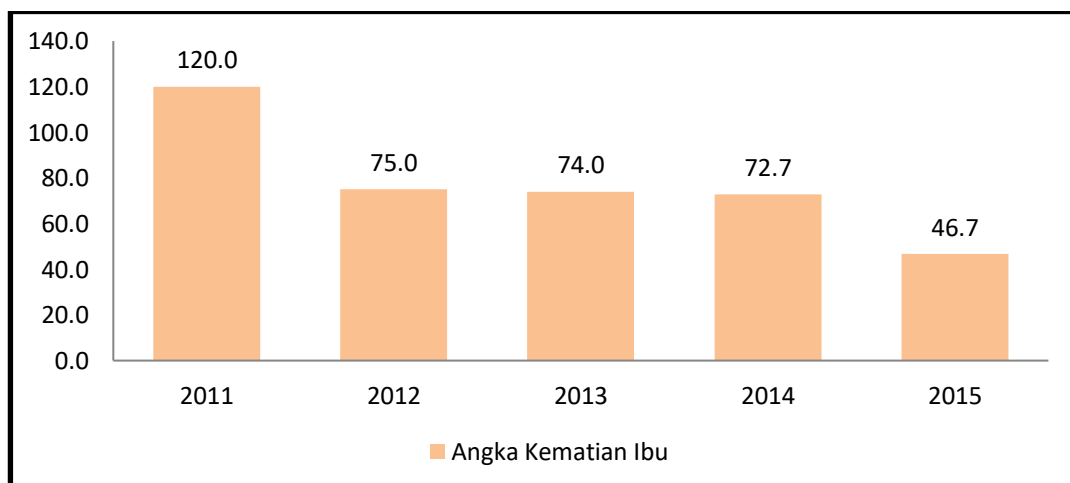


dengan dukun bayi sehingga masih ada persalinan yang ditolong oleh dukun bayi yang seharusnya ditolong oleh tenaga kesehatan.

Untuk mengatasi faktor penyebab tersebut dibutuhkan beberapa solusi yaitu: optimalisasi sistem rujukan dengan proses pembentukan regulasi regionalisasi rujukan tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas), Melakukan pelatihan Tim PONED Puskesmas Perawatan dan Memantapkan kembali Kemitraan bidan dan dukun bayi terutama bagi desa yang belum maksimal menjalani kemitraan sehingga mengurangi peran dukun bayi secara langsung dalam menolong persalinan dengan mengalihkan peran dukun tersebut sebagai pendamping bidan dalam menolong persalinan.

Angka kematian ibu (AKI), pada tahun 2011 terjadi 8 kasus kematian ibu dari 6.658 kelahiran hidup atau 120 per 100.000 kelahiran hidup, kemudian pada tahun 2012 menurun menjadi 5 kasus kematian dari 6.699 kelahiran hidup atau 75 per 100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2013 terjadi 5 kasus kematian ibu dari 6.707 kelahiran hidup atau 74 per 100.000 kelahiran hidup, serta pada tahun 2014 tidak mengalami peningkatan yaitu 5 kasus dari 6.871 kelahiran hidup atau 72,7 per 100.000 kelahiran hidup. Berarti Angka Kematian Ibu sudah mengalami penurunan dan sudah dapat ditekan kasus kematiannya.

Grafik G.II.32. Angka Kematian Ibu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015

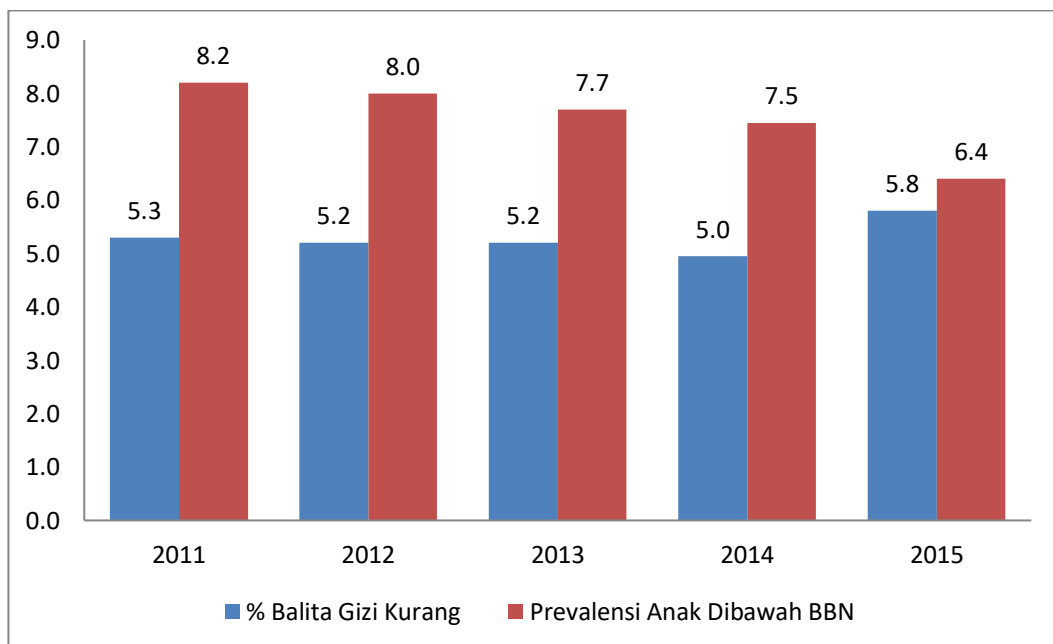




Bila di bandingkan dengan target angka kematian ibu (AKI) menurut MDGs tahun 2015 yaitu 102 per 100.000 kelahiran hidup, hal ini berarti untuk tahun 2014 AKI Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah lebih baik.

Selanjutnya penanganan gangguan gizi buruk juga dilaksanakan sebagai upaya untuk menekan angka kematian balita, bayi, serta gangguan kesehatan pada ibu hamil. Indikator penanganan gizi buruk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mencapai target sebagaimana yang diharapkan. Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan pada tahun 2011 berjumlah 4 kasus, tahun 2012 berjumlah 1 kasus, pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 3 kasus dan tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 2 kasus. Semua balita gizi buruk yang ditemukan diberi perawatan sesuai dengan standar (100%).

Grafik G.II.33. Persentase Balita Gizi Kurang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015



Gizi buruk disebabkan banyak faktor (kompleks) baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung gizi buruk dipengaruhi oleh asupan dan penyakit infeksi, sedangkan secara tidak langsung gizi buruk dipengaruhi pola asuh, pendidikan orang tua, tingkat ekonomi



keluarga, faktor lingkungan, hidup berpindah-pindah/tidak menetap, rendahnya tingkat pengetahuan orang tua serta penghasilan keluarga tidak menentu, mengakibatkan penurunan daya beli dan keterbatasan persediaan bahan makanan di tingkat rumah tangga berdampak kepada asupan gizi yang kurang, hingga menjadi penyebab utama dan sekaligus penyebab langsung anak menjadi gizi buruk

Gambaran kinerja dan perkembangan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah KH Daud Arif Tahun 2010-2014 pada Grafik dibawah ini :

1. BOR (*Bed Occupation Rate*)

Indikator ini untuk mengukur tinggi rendahnya pemanfaatan tempat tidur. Ada kecenderungan penurunan BOR yaitu 50,01 % tahun 2011 menurun menjadi 47,56 % pada tahun 2014 atau menurun -1,46 % per tahun. Sedangkan standar Nasional untuk BOR berkisar antara 75 – 85%. BOR juga dipengaruhi oleh peningkatan jumlah tempat tidur. Pemanfaatan tempat tidur tertinggi terdapat di kelas III sehingga terjadi kecenderungan pemanfaatan tempat tidur yang tidak merata antara kelas III, II, I dan VIP dengan BOR kelas III tahun 2013 sebesar 59,04 % tahun 2014 62,99 %.

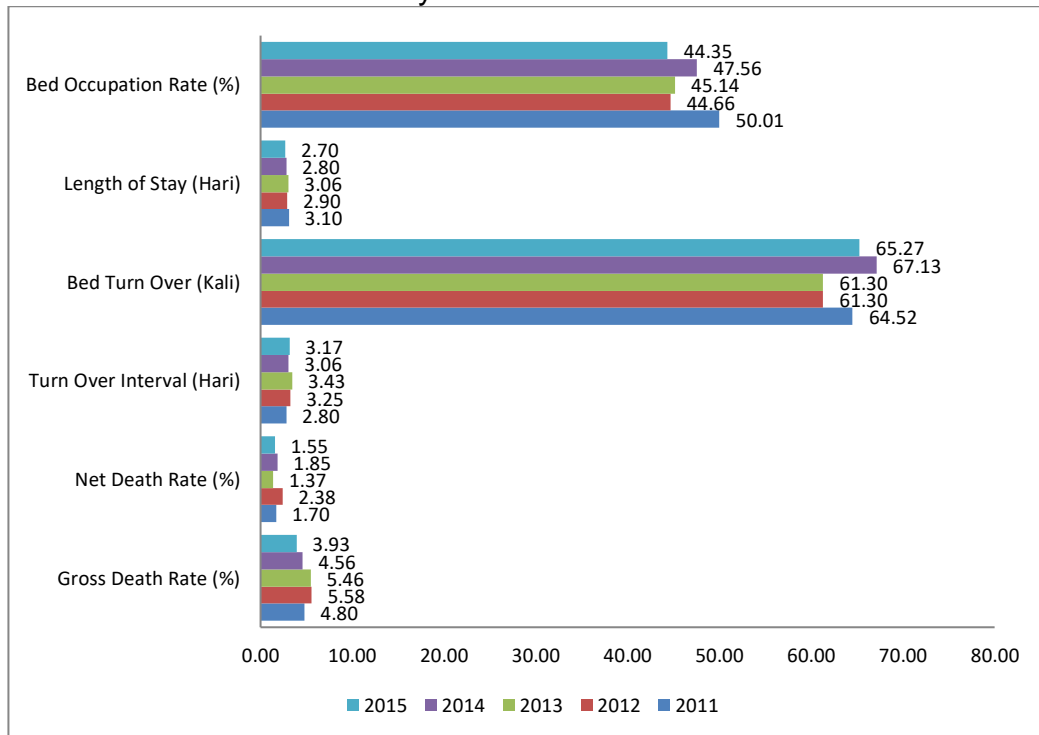
2. LOS (*Length of Stay*) merupakan salah satu indikator mutu pelayanan Rumah Sakit. Terdapat kecenderungan penurunan LOS yaitu 3,10 hari tahun 2011 menjadi 2,80 hari pada tahun 2014 atau menurun -3,14 % per tahun sehingga masih perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan indikator pelayanan ini baik melalui sarana pelayanan maupun pembinaan karakter petugas.

3. TOI (*Turn Over Interval*)

Indikator ini untuk mengukur rata – rata hari tempat tidur tidak ditempati saat ke saat sampai terisi berikutnya. Pada tahun 2014, TOI sebesar 3,06 hari meningkat dibandingkan tahun 2011 sebesar 2,80 hari, sedangkan standar nasional untuk TOI berkisar 1 – 3 hari.



Grafik G.II.34. Mutu Pelayanan RSUD KH Daud Arif Tahun 2011-2015



4. GDR (*Gross Death Rate*) atau Angka Kematian Kasar.

Indikator ini digunakan untuk menilai angka kematian dibawah 48 jam setelah dirawat. Terdapat penurunan GDR yaitu dari 4,80 % tahun 2011 menjadi 3,93 % tahun 2015, sedangkan standar Nasional untuk GDR yaitu dibawah dari 3%.

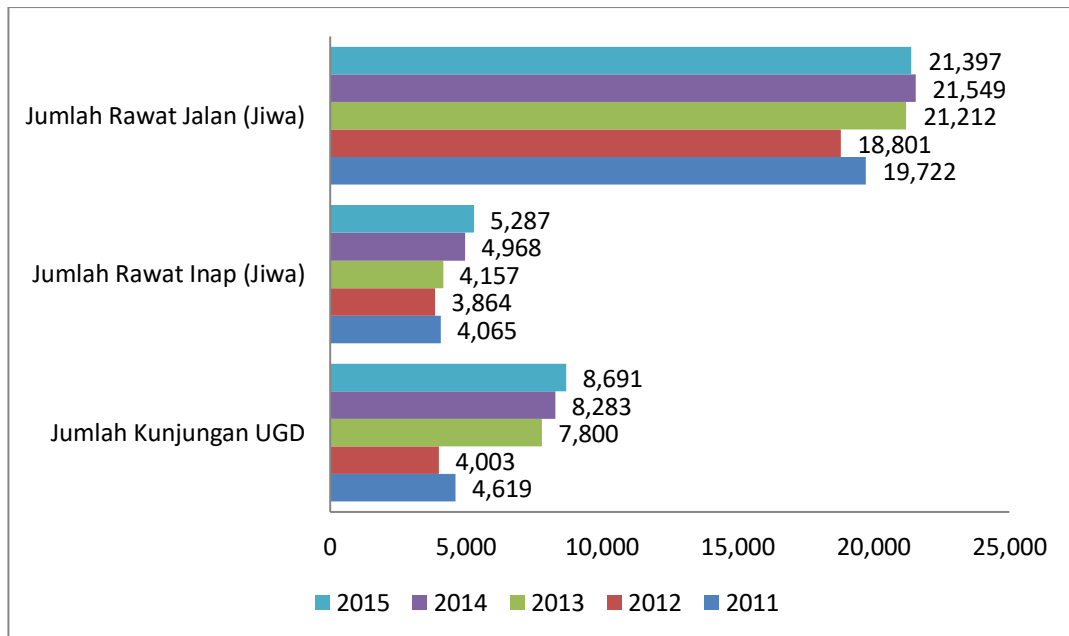
5. NDR (*Net Death Rate*) atau Angka Kematian Bersih

Indikator ini digunakan untuk menilai angka kematian diatas 48 jam setelah dirawat. Terjadi penurunan NDR yaitu dari 1,70 % tahun 2011 menjadi 1,55 % tahun 2015, sedangkan standar nasional untuk NDR yaitu dibawah dari 2,5%.

6. Jumlah kunjungan rawat inap dan jumlah kunjungan rawat jalan serta jumlah kunjungan UGD selama tahun 2011-2015 terus meningkat, masing-masing naik sebesar 7,38 % dan 3,25 % serta 29,24 % per tahun



Grafik G.II.35. Mutu Pelayanan RSUD KH Daud Arif Tahun 2011-2015



Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh RSUD KH Daud Arif dalam pelaksanaan kegiatan adalah : 1) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), seperti kurangnya tenaga dokter umum dan tenaga dokter spesialis yang tidak menetap di Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan 2) Kurangnya pemahaman dan komitmen dari tim pelaksana akreditasi (tim penyusun standar pelayanan kesehatan / dokumen-dokumen akreditasi) sehingga belum terlaksana sesuai target.

Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan diatas adalah sebagai berikut : 1) Memberikan pelayanan dokter spesialis semaksimal mungkin dengan mengoptimalkan peralatan kesehatan yang ada; 2) Koordinasi dan konsultasi ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Rumah Sakit yang sudah terakreditasi; 3) Pelatihan bagi pegawai untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman; dan 4) Adanya Komitmen yang kuat dari masing-masing lini sehingga tercapainya akreditasi.

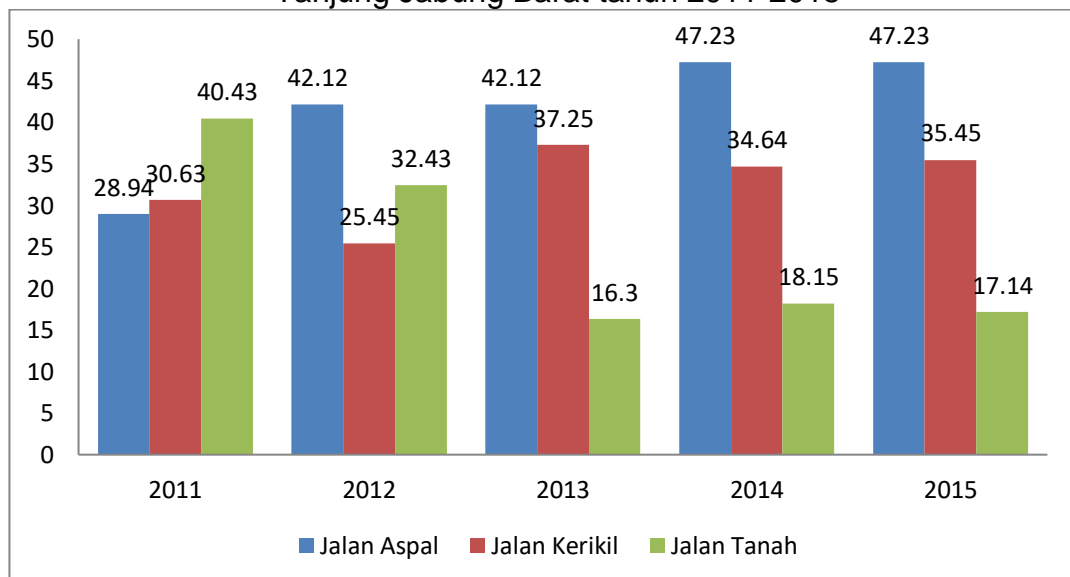


2.3.1.3. Pekerjaan umum

Infrastruktur merupakan unsur penting dalam menunjang perekonomian masyarakat sekaligus peluang untuk meningkatkan investasi. Ketersediaan Infrastruktur yang menghubungkan seluruh sumber perekonomian masyarakat akan meningkatkan perputaran barang dan jasa antar daerah, kondisi jalan yang baik akan mengurangi biaya operasional bagi para pelaku usaha. Kesemuanya itu pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Perkembangan jalan aspal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus meningkat selama tahun 2011-2015 yaitu 627,86 km pada tahun 2011 meningkat pada tahun 2015 menjadi 860,35 km atau rata-rata bertambah 11,27 % per tahun. Untuk jalan kerikil meningkat dari 531,85 km pada tahun 2011 menjadi 646,84 km pada tahun 2015 atau rata-rata naik 9,03 % per tahun. Sedangkan untuk jalan tanah menurun dari 576,68 km pada tahun 2011 menjadi 317,63 km pada tahun 2015 atau rata-rata turun - 12,11 % per tahun.

Grafik G.II.36. Persentase Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011-2015

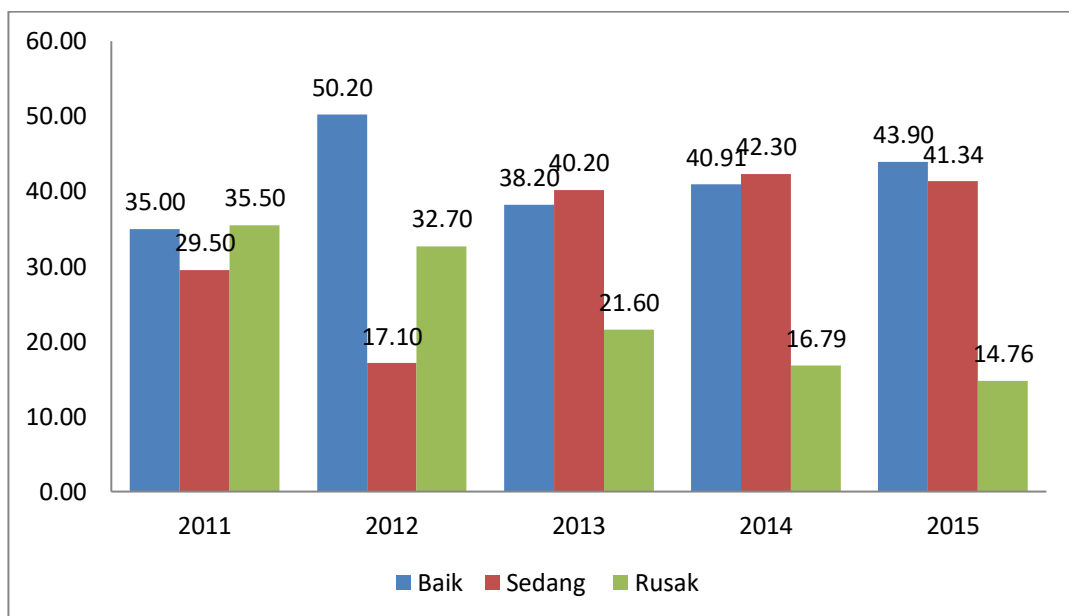


Secara persentase rata-rata jenis permukaan jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011-2015 yang terbanyak adalah



jalan aspal (40,10 %), diikuti jalan kerikil (31,99 %) dan yang paling sedikit adalah jalan tanah (26,83 %). Khusus untuk jalan aspal selain paling besar juga mengalami kenaikan setiap tahun dengan rata-rata naik sebesar 19,22 % per tahun. Untuk jalan kerikil persentasenya agak berfluktuasi namun cenderung naik yaitu rata-rata naik 7,47 % per tahun. Sedangkan untuk jalan tanah selain paling kecil juga mengalami penurunan setiap tahun dengan rata-rata turun sebesar -19,39 % per tahun.

Grafik G.II.37. Persentase Kondisi Jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011-2015



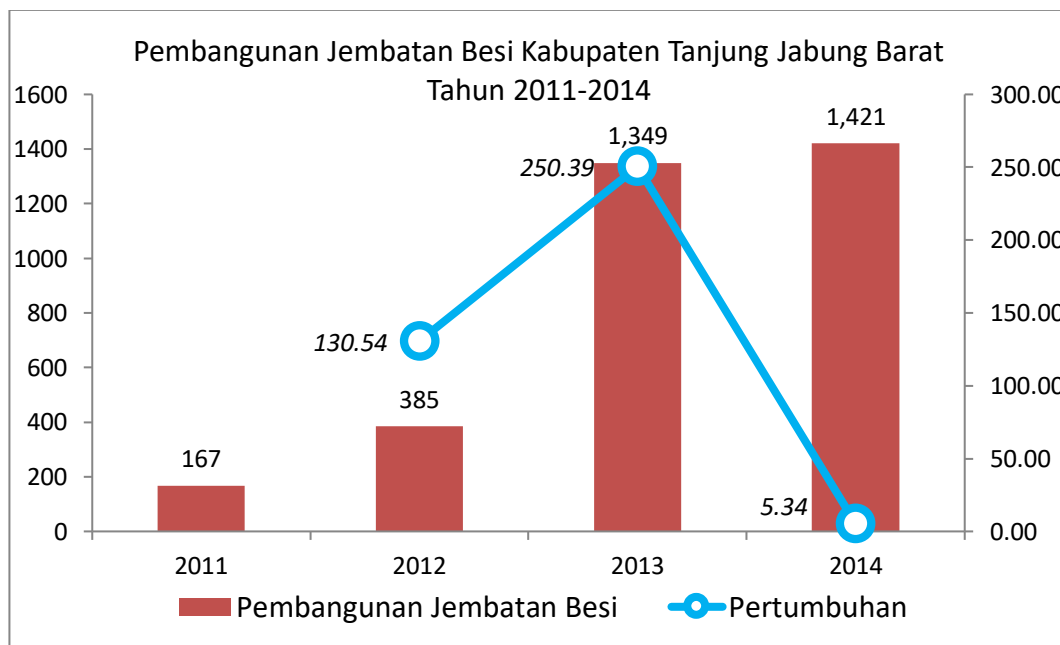
Walaupun persentase jalan dengan kondisi baik relatif menurun kondisi ini berbanding lurus dengan penurunan persentase kondisi jalan rusak, dan berkurangnya persentase kondisi jalan baik tersebut lebih disebabkan pada aktivitas proyek maupun peningkatan kelas jalan yang tahapannya belum dilaksanakan sampai dengan pengaspalan sehingga masih dikategorikan pada kondisi sedang dan dapat dilihat bahwa persentase kondisi jalan kategori sedang setiap tahun persentasenya relatif meningkat.



Sektor infrastruktur ini mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut, Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan, Merehabilitasi jaringan irigasi serta pembangunan sarana penampungan air Hujan.

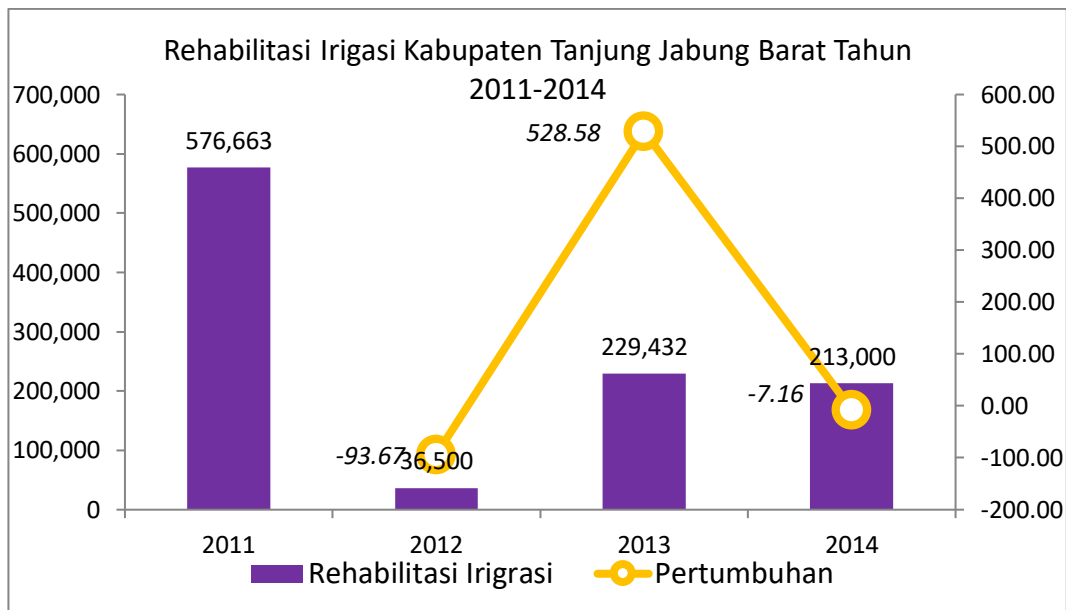
Dari pembangunan jembatan dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah membangun jembatan dengan bentang total 3.322 meter atau 3,322 Km dan didukung dengan pembangunan jalan baru melalui kerja sama dengan TNI dengan kegiatan TMMD nya serta peningkatan jalan sepanjang 80,97 Km atau rata-rata 20,24 Km untuk setiap tahunnya sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan akses transportasi darat masyarakat.

Grafik G.II.38. Pembangunan Jembatan Besi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014

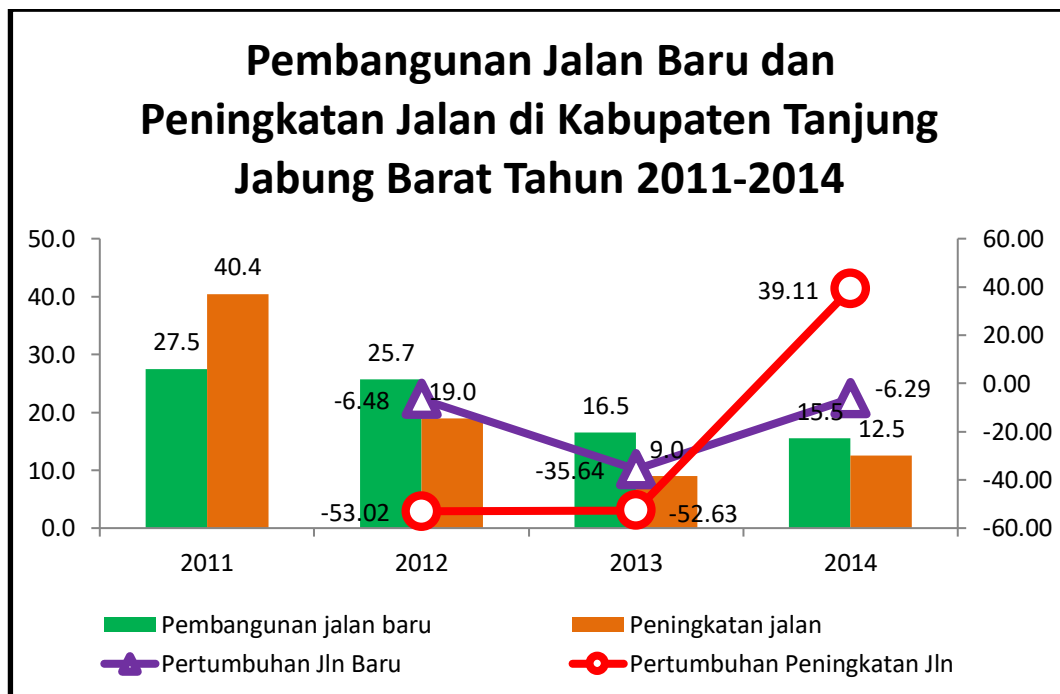




Grafik G.II.39. Rehabilitasi Irigasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014



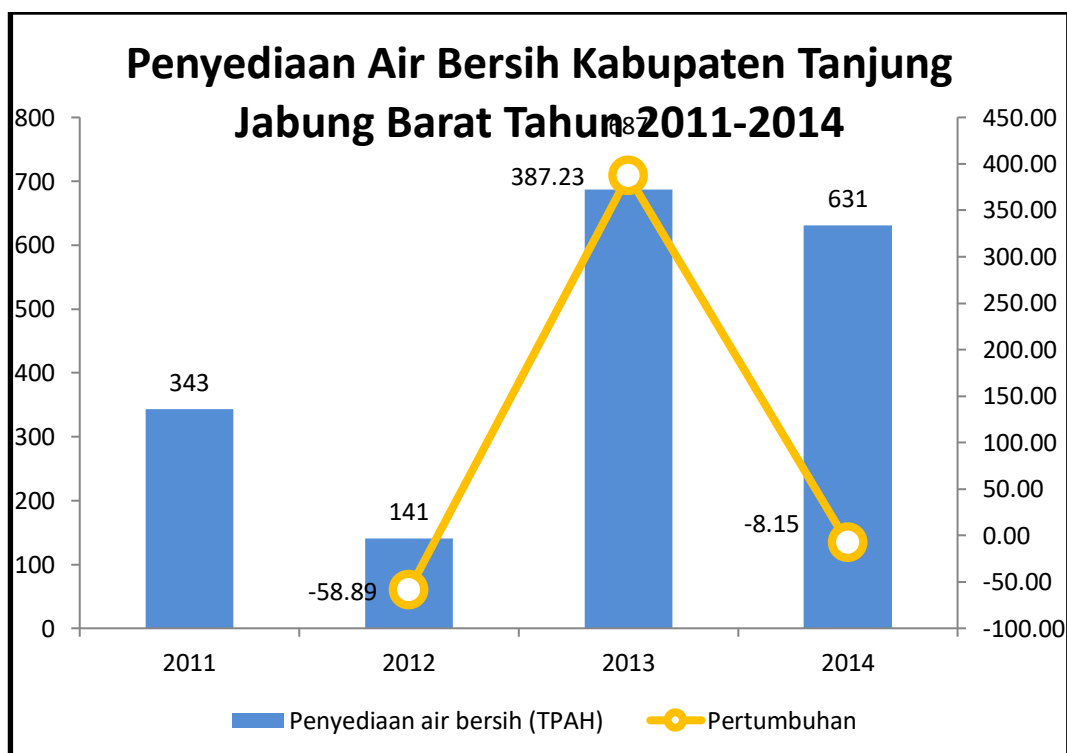
Grafik G.II.40. Pembangunan Jalan Baru di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014





Penyediaan Air Bersih dengan pembangunan TPAH dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih/minum masyarakat dan apabila dihitung secara linear bahwa setiap 1 (satu) sarana TPAH dibangun untuk memenuhi kebutuhan 10 – 15 Kepala Keluarga (KK) dengan anggota keluarga sebanyak 4 jiwa setiap KK nya maka untuk tahun 2011 – 2015 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah meningkatkan akses kebutuhan air bersih/minum melalui pembangunan sarana TPAH untuk 72.000 – 109.000 jiwa atau berkisar 23% - 35% dari prediksi jumlah penduduk tahun 2015.

Grafik G.II.41. Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014



Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan kegiatannya antara lain : 1) Pembangunan prasarana jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sebagian besar wilayahnya berawa-rawa dan dataran rendah sehingga memerlukan biaya yang tinggi dalam pembangunannya memerlukan penanganan konstruksi



secara khusus dengan akses transportasi material yang didatangkan dari luar daerah; 2) Penyebaran pembangunan sarana dan prasarana fisik di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang belum merata disetiap daerah terutama jalan-jalan poros menuju desa-desa yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan infrastruktur langsung pedesaan atau lingkungan menjadi sedikit terhambat; 3) Kurangnya sumber galian C di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga menyebabkan volume material perkerasan badan jalan memerlukan biaya yang tinggi untuk pengadaannya; 4) Karakteristik dan topografi wilayah yang memiliki ratusan sungai besar dan kecil, maka setiap pembangunan ruas jalan pasti akan diikuti pula dengan pembangunan jembatan, baik dengan bentang panjang maupun bentang pendek; 5) Program pengembangan jalan lingkungan pemukiman perdesaan yang memerlukan biaya tinggi, dikarenakan sebagian konstruksi yang digunakan merupakan struktur tiang beton bertulang; 6) Kurangnya pembinaan dan pengawasan sehingga masih ada sebagian masyarakat yang kurang menjaga dan merawat sarana/prasarana umum yang telah dibangun; 6) Sistem drainase yang belum maksimal yang dapat berakibat pada masih adanya di beberapa tempat yang menjadi daerah-daerah genangan air terutama air hujan, hal ini sangat berbahaya sekali karena dapat mengakibatkan banjir pada suatu wilayah serta memperpendek umur konstruksi jalan.

Solusi dari berbagai permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2014 : 1) Membuat jalur alternatif dalam pembangunan lingkungan perdesaan untuk mengupayakan ketersediaan material pembangunan di lokasi kegiatan; 2) Meningkatkan pembangunan jalan dengan menggunakan *Rigid Pavement* sehingga jalan dapat mendukung beban/kendaraan yang lewat sesuai dengan kelas/tonnase jalan sehingga jalan dapat berfungsi dengan baik; 3) Semaksimal mungkin untuk secepatnya membangun sarana prasarana penghubung untuk meminimalkan biaya pengangkutan material perkerasan ke lokasi



pembangunan; 4) Mengupayakan pengangkutan material untuk kegiatan dengan volume yang relatif besar dengan penghitungan yang lebih cermat melalui transportasi air; 5) Melaksanakan anggaran untuk pembangunan jembatan dengan konstruksi beton, sehingga Karakteristik dan topografi wilayah yang memiliki ratusan sungai besar dan kecil tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur lainnya; 6) Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan masyarakat untuk menyerahkan lahan agar pengembangan jalan lingkungan dapat dilaksanakan; 7) Meminimalkan titik – titik genangan melalui revitalisasi saluran drainase skunder maupun tersier secara efektif dan efisien; 8) Melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan juga kegiatan PKK dan lain sebagainya, hal ini dilakukan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai pemeliharaan serta pengawasan penggunaan sarana dan prasarana publik yang telah dibangun oleh pemerintah.

2.3.1.4. Perencanaan pembangunan

Beberapa langkah penting sebagai strategi di masa mendatang dalam melaksanakan tugas yang diemban khususnya di bidang perencanaan dengan mengantisipasi beberapa masalah antara lain : 1) Relatif menumpuknya kegiatan pembangunan sarana/prasarana sehingga interval waktu yang tersedia tidak memungkinkan untuk dilakukan monitoring evaluasi dalam penilaian progress; 2) Belum tersedianya sistem informasi untuk mendapatkan sebagian dokumen perencanaan secara lebih detil sehingga monitoring/evaluasi untuk jenis-jenis pekerjaan yang memerlukan uraian lebih lengkap tentang alamat maupun volume pekerjaan dalam mendukung analisa manfaat dan daya ungkit kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Beberapa solusi pemecahan masalah : 1) Mekanisme penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan akan dilakukan lebih akurat dan cermat, untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kinerja



berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan; 2) Pemutakhiran data sebagai media informasi dalam mempromosikan daerah akan terus disempurnakan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia; 3) Peningkatan sumber daya aparatur pemerintah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara berkesinambungan; 4) Peningkatan kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta dalam rangka pemenuhan dokumen pendukung perencanaan yang berkualitas; 5) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang perekonomian rakyat dalam rangka kesejahteraan rakyat; 6) Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

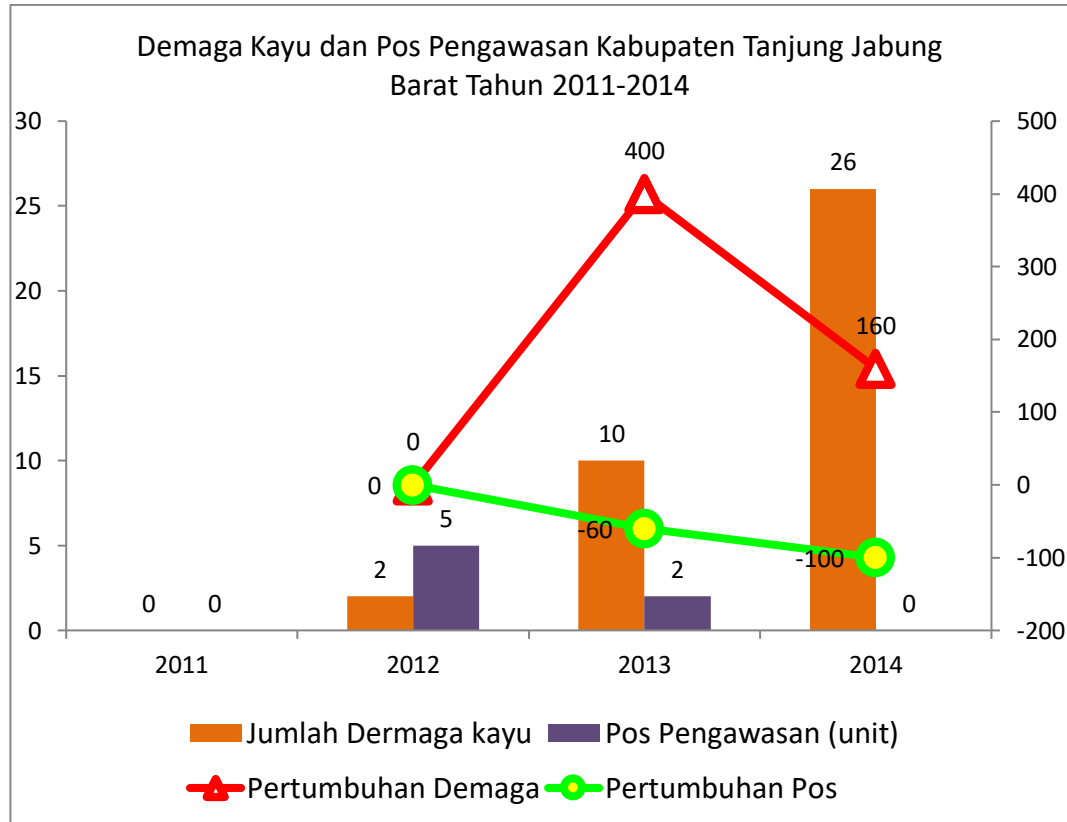
2.3.1.5. Perhubungan

Pencapaian pembangunan pada sektor perhubungan dapat tergambar pada peningkatan sarana prasarana perhubungan seperti dermaga, pelabuhan, angkutan penyeberangan. Sesuai dengan kondisi daerah yang memiliki 2 sungai besar dan puluhan anak sungai maka keberadaan dermaga-dermaga baik yang dikelola oleh masyarakat atau pemerintah daerah sangatlah menentukan denyut nadi perekonomian.

Pengembangan sektor perhubungan dilaksanakan terkait dengan peningkatan sarana transportasi khususnya untuk memudahkan akses mobilisasi masyarakat dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat maupun daerah lain sekitar perbatasan dengan Kabupaten/Propinsi berdekatan, hal ini terlihat dari jumlah dermaga yang dibangun sebagian besar adalah dermaga kayu.



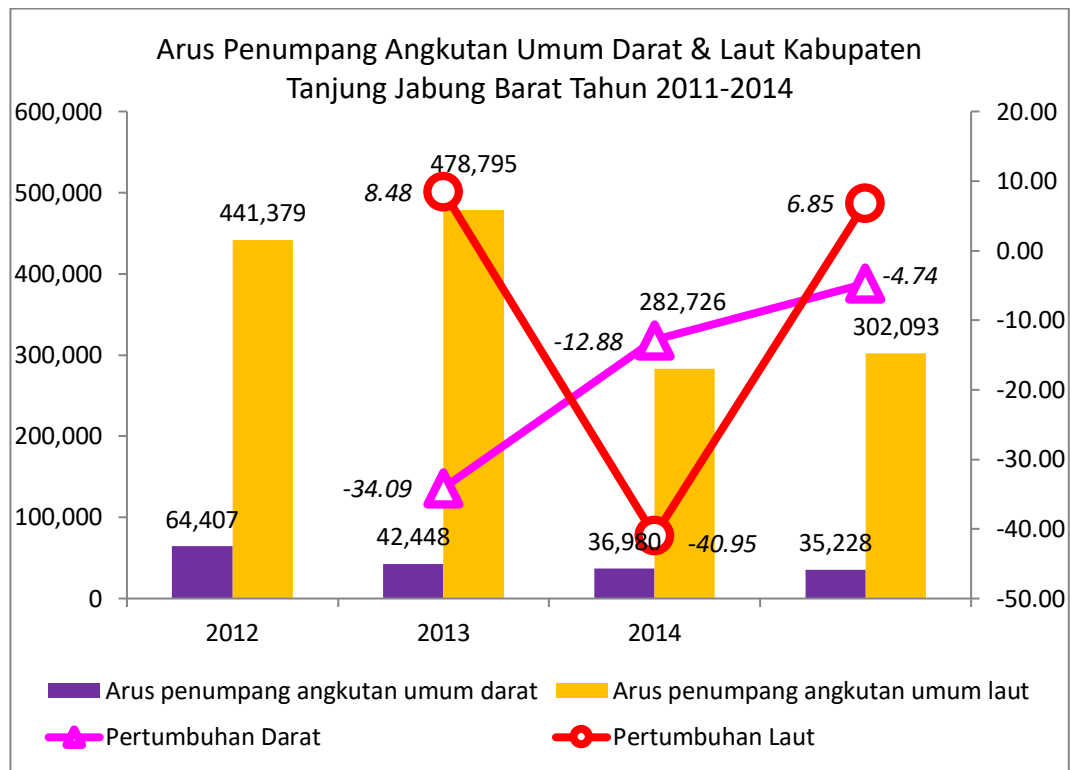
Grafik G.II.42. Perkembangan Dermaga Kayu dan Pos Pengawasandi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2014



Arus penumpang darat maupun laut (datang dan pergi) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat relatif menurun dibandingkan 3 (tiga) tahun sebelumnya, hal ini sebagai salah satu indikator bahwa akses transportasi jalan darat semakin terbuka dan sebagian masyarakat mulai menggunakan kendaraan pribadi untuk mobilisasinya dan harus mulai diimbangi dengan ketersediaan jalan yang memadai untuk mengantisipasi tingkat kepadatan yang melebihi kapasitas karena *over load* kendaraan dibanding dengan jalan akan meningkatkan resiko pengguna jalan.



Grafik G.II.43. Arus Penumpang Angkutan Umum Darat dan laut di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2014



Permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya anggaran untuk biaya operasional petugas retribusi menyebabkan beberapa kegiatan tidak maksimal;
- 2) Minimnya sarana dan prasarana penunjang dikantor dinas maupun di pos pengawasan LLASDP dan LLAJ sebagai ujung tombak pelayanan jasa retribusi berdampak terhadap Penerimaan/Pendapatan Daerah;
- 3) Minimnya personil dan SDM yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas baik administrasi maupun operasional sebagai tenaga teknis bidang LLAJ, ASDP dan laut;
- 4) Upaya pemecahan masalah yang dihadapi yaitumengusulkan penambahan anggaran ditahun berikutnya dengan skala prioritas secara proporsional sehingga program-program yang dianggap strategis dapat terlaksana dan menambah jumlah sarana prasarana serta personil yang memiliki kompetensi serta latar belakang pendidikan dibidang perhubungan.

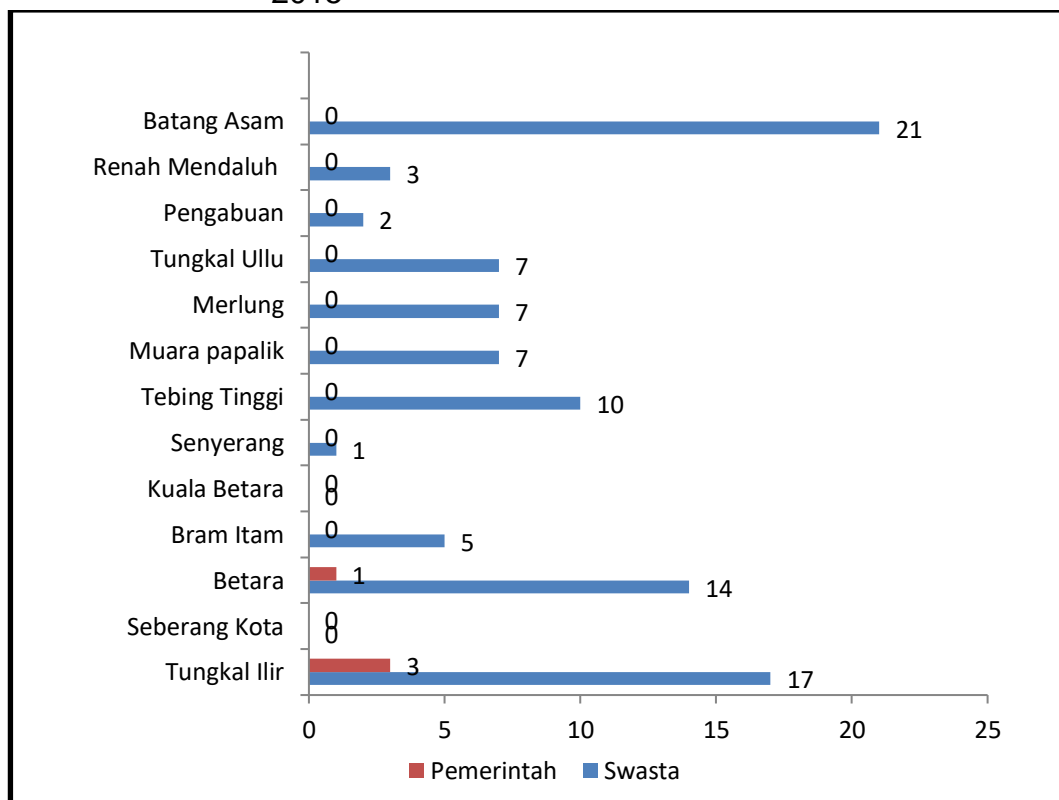


2.3.1.6. Lingkungan hidup

Permasalahan yang dihadapi : 1) Masih adanya sebagian pelaku usaha dan pemangku kepentingan yang belum memahami Peraturan dan Izin Lingkungan; 2) Masih kurangnya pemahaman pihak sekolah tentang sekolah yang berbasis lingkungan hidup (ADIWIYATA); 3) Belum adanya laboratorium di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 4) Perlu di bangunya Laboratorium untuk Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Solusi pemecahan masalah : 1) Meningkatkan dan mengintensifkan sosialisasi tentang peraturan serta izin lingkungan melalui berbagai media dan kesempatan serta sasaran; 2) Sosialisasi kepada pihak sekolah tentang sekolah yang berbasis lingkungan hidup (ADIWIYATA); 3) Di Bangunnya laboratorium Badan lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Grafik G.II.44. Persentase Pelaku Usaha dan Fasilitas Yang Wajib Ijin Lingkungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015





Semua pelaku usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melengkapi kegiatan usahanya dengan dokumen lingkungan sesuai skala usaha yang mereka lakukan, untuk menjamin ketaatan terhadap pengendalian lingkungan tersebut maka BLHD melaksanakan beberapa tahapan pengawasan serta pembinaan bekerja sama dengan instansi terkait baik secara horisontal maupun vertikal.

Karena keterbatasan anggaran dan SDM maka beberapa sarana pemerintah meliputi gedung dan fasilitas umum maupun sosial yang (seharusnya) wajib disertai dengan dokumen lingkungan belum dapat direalisasikan dengan maksimal yaitu 21,1% dan data jumlah fasilitas pemerintah di atas adalah sebatas fasilitas kesehatan meliputi Rumah Sakit dan Puskesmas Induk/Perawatan serta LLASDP di Tungkal Ilir, apabila penghitungan denominator dilakukan terhadap semua fasilitas pemerintah maka angka tersebut menjadi relatif sangat kecil.

Dalam upaya mengatasi masalah persampahan, Kantor PPKTB saat ini baru dapat mengelola sampah di dua kecamatan yaitu kecamatan Tungkal Ilir sebagian Kecamatan Bramitam dan Kecamatan Betara dengan kapasitas sampah \pm 15 kubik per hari dimana kapasitas tersebut belum mencapai setengah dari debit sampah setiap harinya sehingga masih ditemukan penumpukan sampah pada beberapa titik, beberapa keterbatasan tersebut disebabkan oleh beberapa masalah antara lain : 1) Terbatasnya sumberdaya manusia baik kuantitas maupun kualitas sehingga sangat mempengaruhi operasional kinerja pada Kantor PPKTB; 2) Sarana dan Prasarana kantor, operasional kendaraan, maupun peralatan kebersihan yang terbatas.

Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan diatas adalah sebagai berikut : 1) Perlu penambahan jumlah SDM yang berkualitas di Bidang masing- masing Kegiatan Kantor PPKTB agar kinerja lebih baik di tahun selanjutnya; 2) Mengoptimalkan pemeliharaan sarana



dan prasarana baik prasarana kantor maupun bidang penataan kota, bidang pertamanan serta bidang kebersihan dan pengelolaan pasar.

2.3.1.7. Pertanian

Berdasarkan data yang dimiliki Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sesuai dengan Iklim yang dimiliki di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka sebagian besar struktur tanah yang terbentuk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah tanah Padzolik seluas 226.608,7 Ha (45,46%) organosol 113.421,7 Ha (22,75%), Gleisol 95.032,4 Ha (19,07%), Alluvial 59.944,2 Ha (12,03%) dan Andosol 3.418,3 Ha (0,69%).

Program/Kegiatan pro rakyat yang direncanakan sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD periode sebelumnya yakni pemberian sertifikat gratis di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak dapat direalisasikan karena alasan kekurangan tenaga teknis yang dimiliki oleh pihak BPN untuk melaksanakan kegiatan pengukuran.

2.3.1.8. Kependudukan dan catatan sipil

Pada tahun 2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan kegiatan-kegiatan diantaranya sebagai berikut: 1) Pelaksanaan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan secara *mobilejemput* bola dilaksanakan sampai ke tingkatan desa yang pada tahun 2015 telah dilaksanakan dengan realisasi sebanyak 3.944 akta-akta catatan sipil dari target realisasi sebesar 3.400 akta-akta catatan sipil atau sebesar 116%. 2) Pelaksanaan pengelolaan dokumen register akta catatan sipil telah terlaksana penataan ulang dokumen dari tahun 1996 s/d 1998 sebanyak 23.280 akta kelahiran atau 100% dari target. 3) Terhadap perekaman KTP-el hingga tahun 2015 telah dilaksanakan perekaman sebanyak 171.958 orang dari 218.282 wajib KTP-el atau sebanyak 78,78% yang mana hingga saat ini terus dilakukan perekaman baik di kantor Dinas Dukcapil maupun di kecamatan



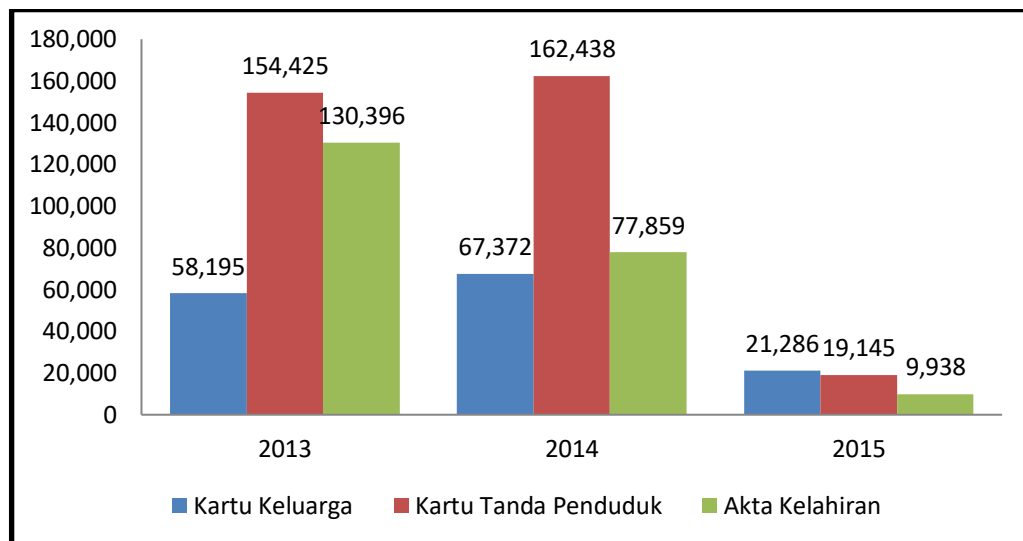
dan secara *mobile* di desa-desa; 4) Pelaksanaan Program Desa Binaan menuju Desa Percontohan Tertib Administrasi Kependudukan di Desa Serdang Jaya Kecamatan Betara. Tujuan Desa Binaan adalah peningkatan pelaksanaan administrasi kependudukan di tingkat desa berjalan tertib dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. *Outcome* terhadap program Desa Binaan di Desa Serdang Jaya pada tahun 2014 adalah penerbitan 737 KK atau 100% dari sasaran keluarga yang belum memiliki KK di Desa Serdang Jaya.

Penyelenggaraan urusan kependudukan tetap masih dihadapkan kepada masalah antara lain ketergantungan penggunaan peralatan perekaman dan pencetakan KTP-el terhadap pemerintah pusat sehingga apabila terjadi kerusakan atau gangguan teknis menghambat pelaksanaan perekaman dan pencetakan KTP-el dikarenakan eksklusivitas dan *security* peralatan KTP-el yang membutuhkan keahlian khusus dalam perbaikan baik *hardware* maupun *software*. Selain itu, permasalahan dalam pelayanan di desa-desa adalah masih banyaknya desa yang belum memiliki jaringan listrik sehingga menyulitkan penerbitan dokumen dalam pelayanan di tempat.

Sebagai solusi permasalahan tersebut terhadap kerusakan Peralatan KTP-el adalah dengan memberdayakan petugas yang ada pada Dinas Dukcapil dengan melakukan penanganan peralatan KTP-el secara hati-hati dan teliti sesuai dengan keahlian dan pengetahuan petugas tersebut sebagaimana tetap berpedoman pada standar operasional penggunaan peralatan yang dianjurkan serta perlu dilakukan *upgrading capability* terhadap petugas dengan mengutus untuk mengikuti pelatihan di Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Depdagri. Untuk pelayanan di desa-desa yang belum memiliki jaringan listrik adalah dilakukan dengan melakukan strategi jemput bahan dan pencetakan dokumen kependudukan dilaksanakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



Grafik G.II.45. Pelayanan Bidang Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2015



Capaian kinerja pada Dinas Dukcapil telah terlaksana dengan baik. Berkenaan dengan penerbitan KTP-el telah mencapai 162.437 orang dari wajib KTP-el sebanyak 218.282 orang atau 74,42 %, dimana sampai dengan tahun 2014 pencetakan KTP-el masih dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah ditugaskan untuk melakukan perekaman dan pendistribusian KTP-el. Untuk penerbitan KK sebagaimana tergambar dari tabel telah mencapai 67,372 orang dari sasaran KK sebanyak 86.872 orang atau 77,55 % dan ini akan terus meningkat seiring dengan optimalisasi pelayanan aktif dari Dinas Dukcapil.

Data yang digunakan adalah data yang bersumber dari Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) yang hingga saat ini masih terus dilakukan spin-off (pemisahan) dari data awal Tanjung Jabung menjadi Data Tanjung Jabung Barat dan sedang dilakukan *intensive updating* di mana jumlah kepemilikan akte kelahiran real lebih dari data yang dipublish.

2.3.1.9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

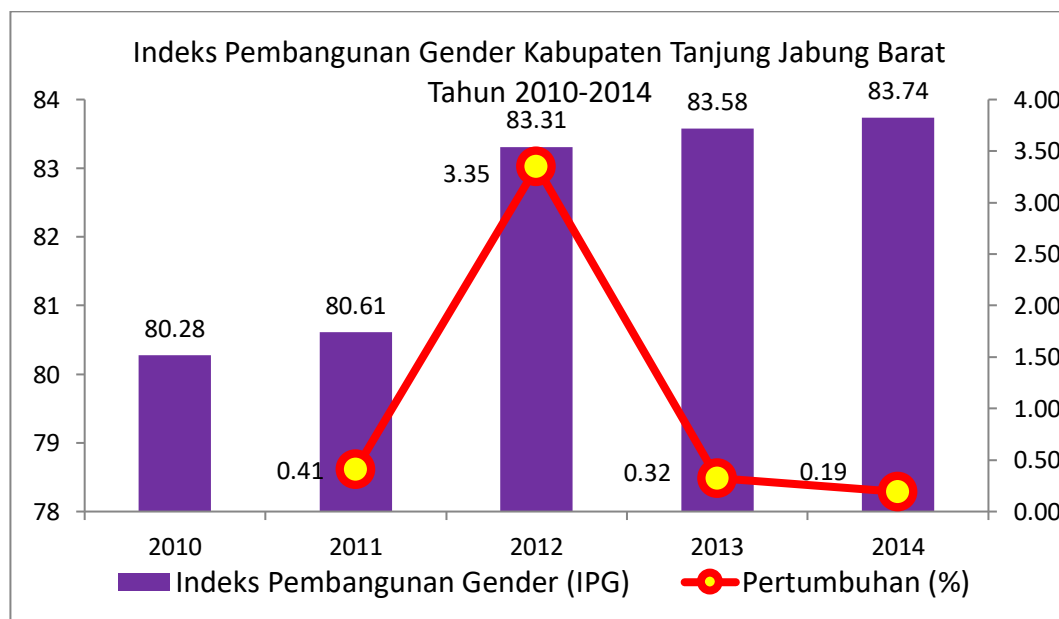
Untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat digunakan Indeks



Pembangunan Gender (IPG) atau *Gender-Related Development Index* (GDI). IPG adalah indikator komposit yang diukur melalui angka harapan hidup sejak lahir, angka melek huruf, dan gabungan angka partisipasi sekolah dasar, menengah, tinggi, serta Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*), dan dihitung berdasarkan jenis kelamin. Apabila nilai IPG sama dengan IPM, maka dapat dikatakan tidak terjadi kesenjangan gender, tetapi sebaliknya IPG lebih rendah dari IPM maka terjadi kesenjangan gender.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Gender selama periode tahun 2010-2014 yaitu dari 80,28 tahun 2010 meningkat menjadi 83,74 pada tahun 2014 atau rata-rata naik sebesar 1,07 % per tahun. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara rata-rata selama periode tahun 2010-2014 adalah 82,30. Berdasarkan capaian rata-rata tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih dibawah IPG Provinsi Jambi (85,69) dan hanya menempati posisi ke 7 dari 10 Kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Grafik G.II.46. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010-2014



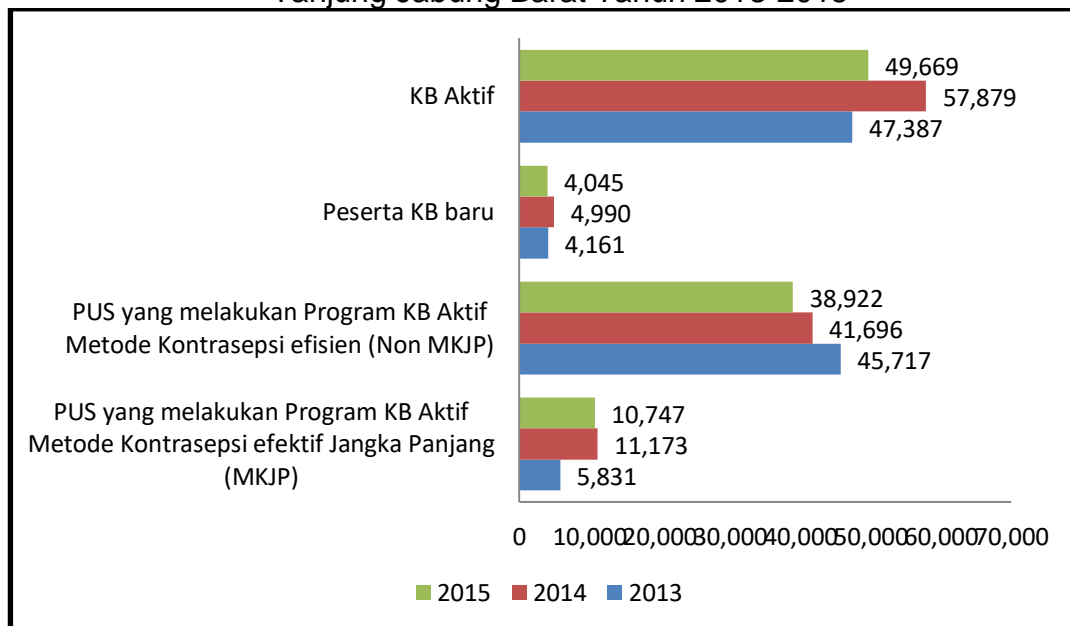


Pelayanan yang diberikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, sampai saat ini baru sebatas melayani konseling, informasi dan pendampingan korban untuk tahap selanjutnya sampai ke pengadilan. Pelayanan korban belum sampai pada tahap pemberdayaan korban, baik melalui pelatihan maupun pemberian bantuan modal usaha bagi korban yang memerlukan, tetapi pada dasarnya semua korban yang datang melapor dapat dilayani dengan baik dan kasusnya dapat diselesaikan, baik melalui mediasi sampai ke jalur hukum.

2.3.1.10. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kinerja Bidang KB meningkatnya capaian indikator dari tahun sebelumnya. PUS yang melakukan program KB aktif metode kontrasepsi efektif (MKJP) mengalami peningkatan sebesar 91,61% dan PUS yang melakukan program KB aktif metode kontrasepsi efisien/alat kontrasepsi (Non MKJP) mengalami penurunan sebesar (8,79 %). Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk melaksanakan program KB lebih baik dimana PUS lebih banyak beralih dari Non MKJP ke MKJP.

Grafik G.II.47. Perkembangan Bidang Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2015





Peserta KB baru mengalami peningkatan sebesar 19,92 % dari tahun 2013 dan KB aktif mengalami peningkatan sebesar 1,04% dari tahun 2013, untuk cakupan kepersertaan PUS di tahun 2015 berjumlah 61.373 PUS, yang melaksanakan program KB sebanyak 52.869 PUS atau sebesar 83,14 %, sedangkan 16,86% adalah PUS yang tidak ber KB (*Unmeet Need*) dengan alasan-alasan hamil, ingin anak segera(IAS), Ingin Anak Ditunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) dan kelompok ini kedepan akan di jadikan sebagai sasaran peserta KB baru.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan masih mengalami hambatan/kendala dalam upaya pencapaian kinerja pada tahun 2014 antara lain : 1) Masih minimnya sumberdaya manusia baik dari sisi kuantitas maupun kualitas dari tenaga motivator KB dilapangan; 2) Sulitnya melaksanakan pelayanan KB dan pergerakan masyarakat (Perempuan) di wilayah terpencil; 3) Minimnya instrument dan pemahaman program bagi tenaga ditingkat lapangan khususnya terkait pemberdayaan perempuan.

Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir permasalahan yang ada adalah sebagai berikut : 1) Melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi beberapa tenaga lapangan baik di kabupaten maupun provinsi; 2) Melaksanakan monev di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat guna meningkatkan kinerja petugas lapangan dan pengetahuan terhadap masyarakat tentang KB; 3) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dan penyebarluasan informasi melalui brosur, spanduk dan selebaran.

2.3.1.11. Sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial : a) Kegiatan Santunan Pemulangan Tuna Sosial :kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat insidentil yaitu apabila ada masyarakat yang memohon bantuan akan diberikan bantuan semaksimal mungkin sesuai



aturan yang berlaku; 2) Kegiatan Operasi Terpadu Tuna Sosial :dalam pelaksanaannya perlu koordinasi dengan SKPD terkait, namun kadang kala jadwal yang sudah disusun berbenturan dengan kegiatan SKPD terkait tersebut sehingga hanya dapat melaksanakan Operasi Yustisi ini sebanyak 2 kali.

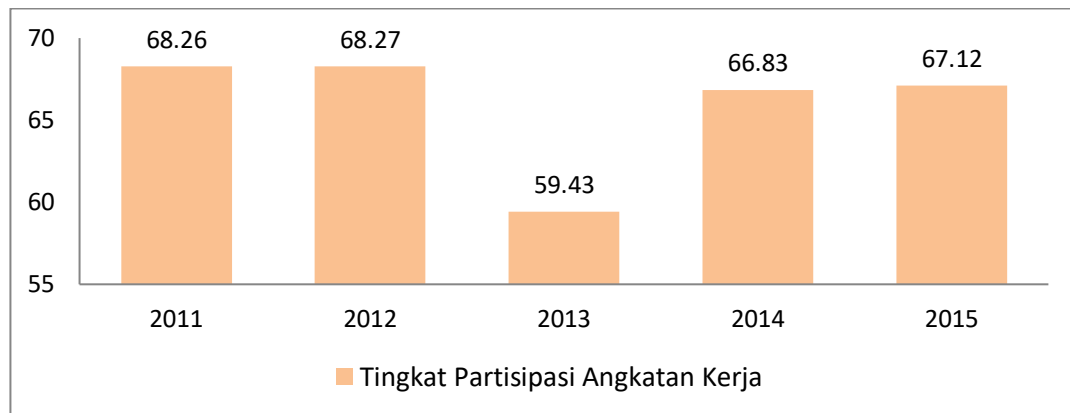
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial : a) Kegiatan TKSM adalah kegiatan dengan capaian program pembinaan dan pemberdayaan Tenaga Kerja Sosial Masyarakat (TKSM) dalam pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Kegiatan pembinaan untuk pemberdayaan TKSM sudah dilaksanakan namun pelaksanaan pendataan tentang masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tidak sempat dilaksanakan dikarenakan masalah administrasi keuangan yang mengakibatkan keterbatasan waktu yang tidak lagi memungkinkan; b) Kegiatan Peningkatan Peranan Kapasitas Kerja Legiun Veteran dan Dewan Harian Cabang 45. Kegiatan ini adalah kegiatan untuk mendukung dan meningkatkan Peranan dan Kapasitas Kerja Legiun Veteran dan Dewan Harian Cabang (DHC) 45. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Legiun Veteran dan DHC 45 sehingga segala kebutuhannya dikelola dan diusulkan serta dilaksanakan oleh Legiun Veteran dan DHC 45 dengan koordinasi mengusulkan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.3.1.12. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2010-2014 cenderung menurun yaitu dari 71,09 % tahun 2010 menurun menjadi 66,83 % tahun 2014 atau rata-rata turun sebesar - 1,12 % per tahun. Pada periode 5 tahun terakhir ini rata-rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat baru mencapai 66,78 % per tahun. Hasil ini masih lebih baik dibandingkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jambi (65,88 % per tahun) dan menduduki rangking ke 5 dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi.



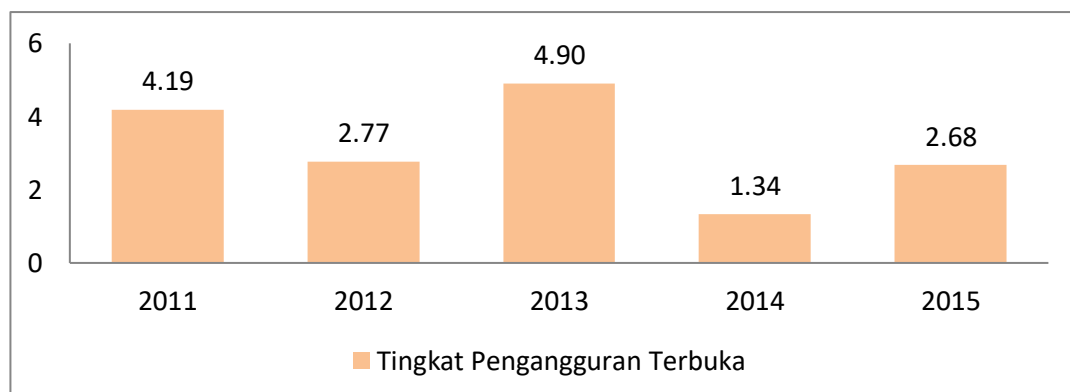
Grafik G.II.48. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011-2015



Program Peningkatan Kesempatan Kerja : Kegiatan peningkatan tenaga kerja melalui Mekanisme, AKL, AKAD dan TKWNAP adalah kegiatan dengan keluaran yaitu penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL, AKAD dan TKWNAP. Kegiatan ini merupakan kerjasama dengan pihak Akademisi dari Lembaga Penelitian Universitas Jambi.

Program perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Kegiatan Peran Lembaga Kerja Sama *Tripartite* merupakan Pembentukan Lembaga Kerja Sama *Tripartite* yaitu : Perusahaan, Pekerja dan Pemerintah. Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan iklim yang kondusif sehingga tidak membutuhkan banyak permasalahan yang harus ditindak lanjuti oleh kelembagaan ini namun demikian kelembagaan ini bersifat wajib adanya.

Grafik G.II.49. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2010-2015





Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari : a) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; b) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; c) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; d) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja

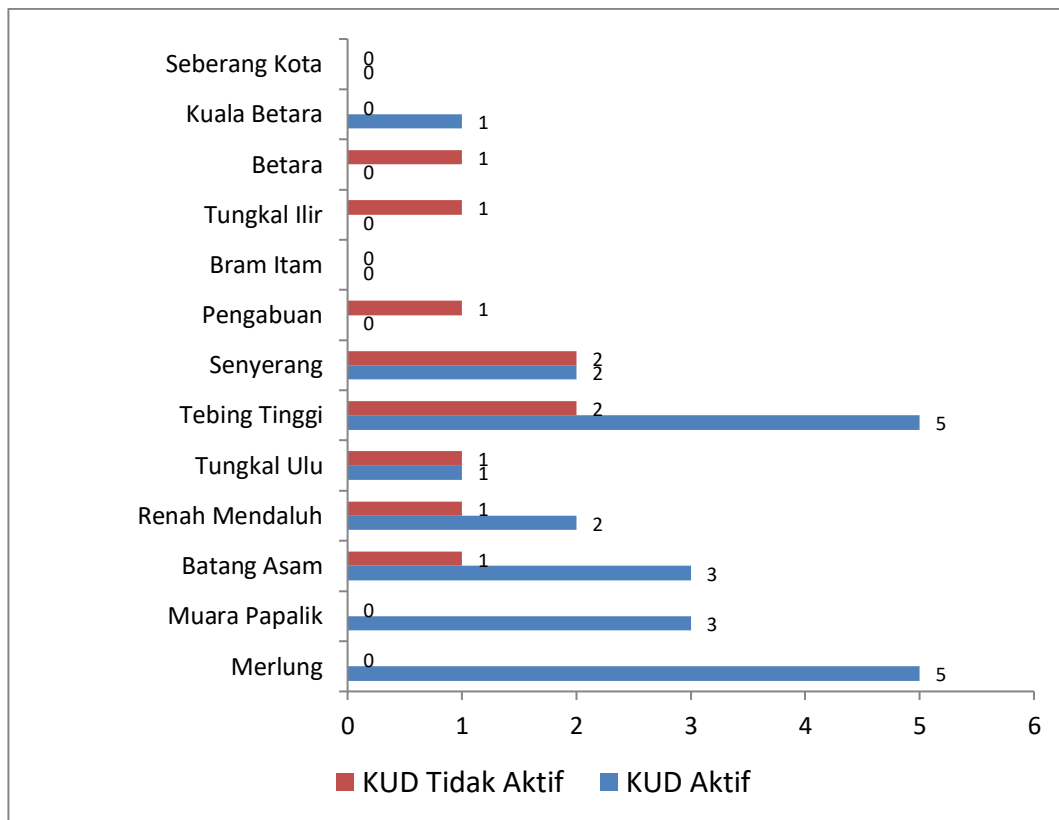
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode tahun 2011-2015 berfluktuasi dengan kecenderungan turun yaitu dari 4,19 % tahun 2011 menurun menjadi 2,68 % tahun 2015 atau rata-rata naik sebesar 5,00 % per tahun. Pada periode 5 tahun terakhir ini rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencapai 3,20 % per tahun. Hasil ini masih lebih baik dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi (4,51 % per tahun) dan menempati posisi ke 9 dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

2.3.1.13. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara keseluruhan dalam pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan menghadapi kendala antara lain: 1) Masih terbatasnya jumlah, pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur teknis dan auditor dalam melakukan pembinaan terhadap koperasi dan UMKM; 2) Masih lemahnya kesadaran berkoperasi dan arti pentingnya koperasi oleh anggota; 3) Masih lemahnya koordinasi antara dinas instansi dalam rangka pembinaan koperasi dan UMKM; 4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung bagi aparatur dalam melaksanakan tugas lapangan;



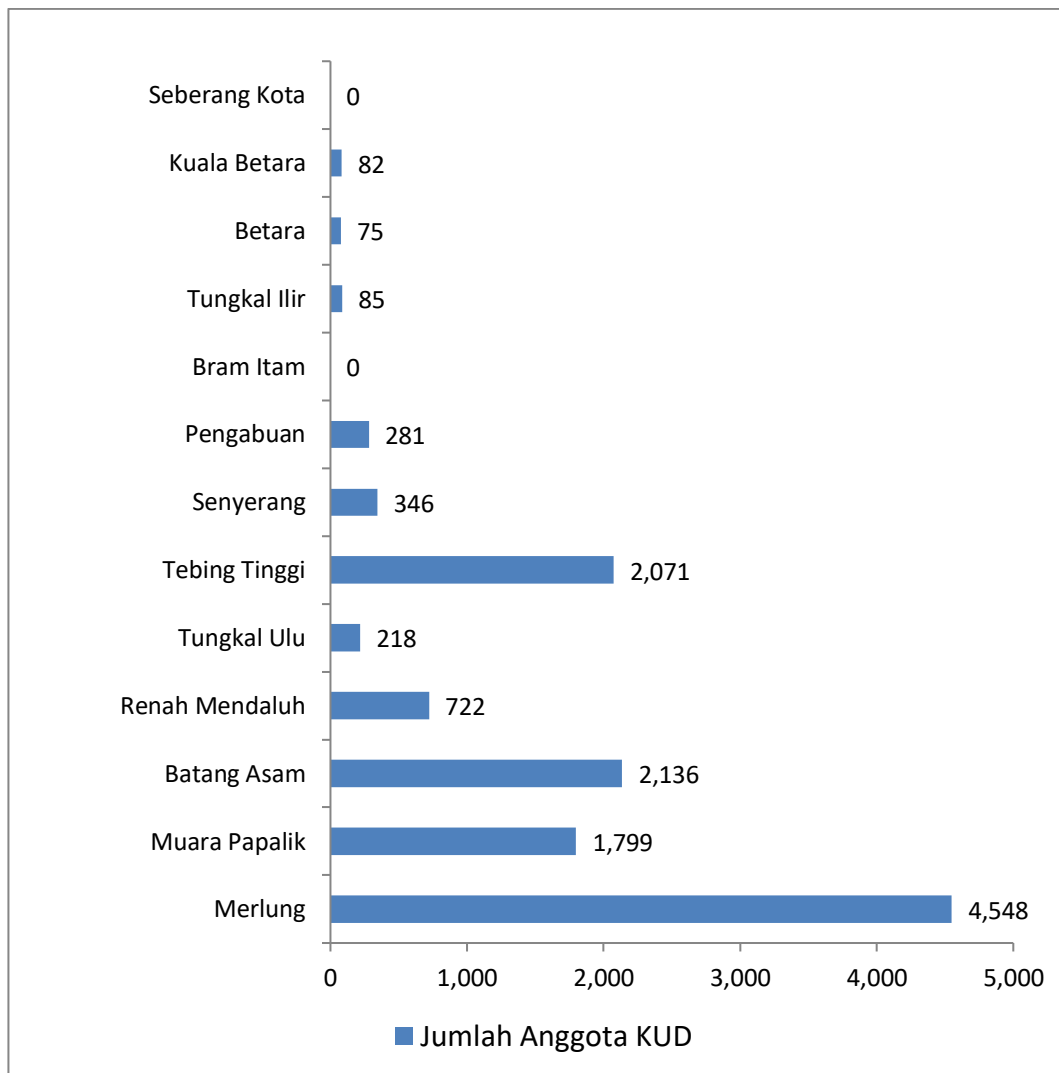
Grafik G.II.50. Jumlah KUD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015



Berdasarkan masalah-masalah tersebut, maka upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi, meminimalisir dan menyelesaikan masalah adalah: 1) Meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur teknis dan auditor dalam melakukan pembinaan terhadap UKM; 2) Melaksanakan Pelatihan, Bintek dan Penyuluhan terhadap para pengurus dan anggota koperasi; 3) Meningkatkan koordinasi antar dinas instansi dalam rangka pembinaan terhadap UKM dan pelaku usaha.



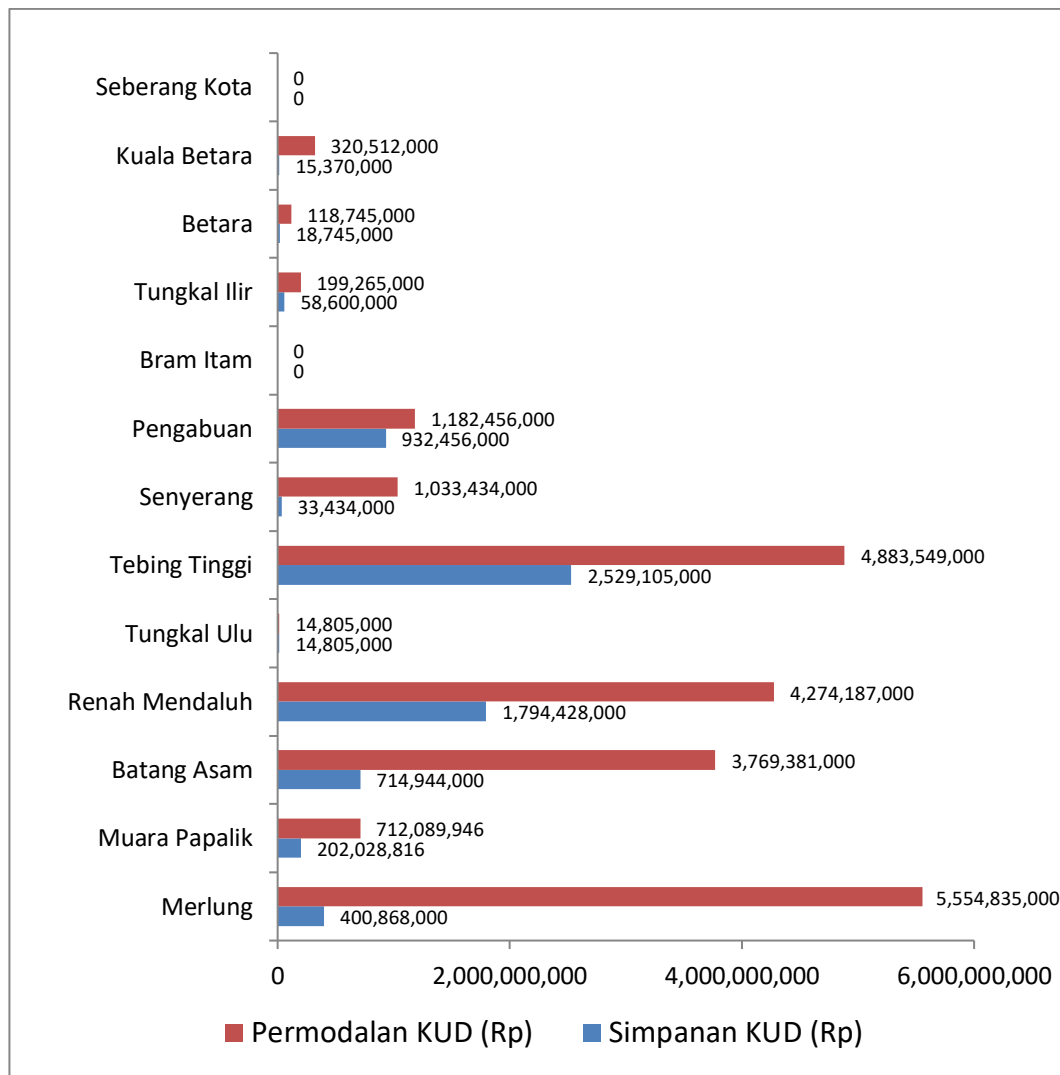
Grafik G.II.51. Jumlah Anggota KUD pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014



Seperti tampak pada Grafik di atas, pada tahun 2014 jumlah koperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 349 Koperasi yang terdiri dari 33 KUD dan 316 Non KUD. Dari jumlah tersebut hanya 102 koperasi yang aktif. Didalamnya terlibat 34.447 anggota koperasi.



Grafik G.II.52. Jumlah Simpanan, Modal, Volume Usaha dan SHU KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015



Seperti tampak pada tabel diatas, di Kecamatan Bram Itam Tidak terdapat KUD dan di Kecamatan Tungkal Ulu data untuk volume usaha dan SHU tidak ada dikarenakan KUD yang ada di daerah tersebut aktif tetapi tidak melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) sehingga tidak terdapat Laporan Perkembangan Usahanya.

Pada tabel diatas terlihat di beberapa Kecamatan seperti Kecamatan Muara Papalik, Bram Itam, Kuala Betara tidak tersedia data tentang volume usaha dan SHU. Hal tersebut dikarenakan ada koperasi tidak aktif



dan tidak melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan koperasi yang aktif tetapi laporan RAT nya belum sempurna sehingga tidak tercantum data volume usaha dan SHU.

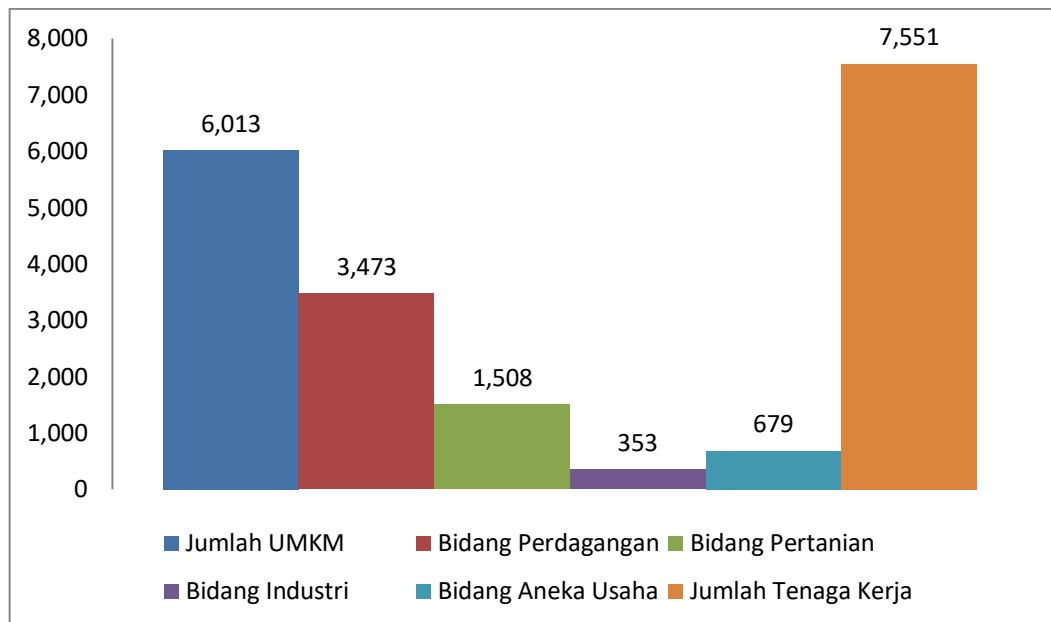
Masalah yang dihadapi : 1) Modal usaha yang relatif sedikit dan lemah dalam pengelolaannya; 2) Kualitas Sumber Daya Manusia yang mengelola koperasi yang relatif rendah (kemampuan manajemen yang masih rendah); 3) Khusus untuk koperasi yang mengalami penggantian pengurus, sering terjadi kurangnya terjalin kerjasama yang baik antara pengurus lama dan pengurus baru sehingga sering terjadi kesalahpahaman.

Solusi untuk masalah : 1) Penyediaan penguatan modal melalui dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan kemudahan akses dalam mengurus administrasi dan tingkat suku bunga yang rendah; 2) Meningkatkan kualitas dan kapasitas kompetensi Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh koperasi itu sendiri; 3) Memerintahkan kepada koperasi yang akan melakukan penggantian pengurus agar melakukan serah terima manajemen administrasi dan keuangan.

Jumlah UMKM yang terdata secara keseluruhan pada tahun 2014 sebesar 5083 unit usaha, terdiri dari bidang perdagangan, bidang pertanian, industri dan aneka usaha. Jumlah Tenaga kerja yang terserap sebesar 5879 orang. Masalah yang dihadapi : Pendataan UMKM tersebut belum dilakukan secara optimal. Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil pada pasal 4 ayat 4 bahwa Untuk mendukung pelaksanaan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan pendataan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil oleh Lurah/Kepala Desa di wilayah kerjanya dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil pada Pasal 18 pasal 1 bahwa Lurah/Kepala Desa menyampaikan laporan pendataan PUMK dan laporan hasil pemberian IUMK kepada Camat.



Grafik G.II.53. Jumlah UMKM dan Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015



Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagian besar belum melakukan pencatatan tentang keuangan usahanya, hal tersebut dikarenakan rendahnya SDM pelaku usaha tersebut dan ketidak tahuan mereka dalam melakukan pencatatan keuangan tersebut sehingga menyulitkan dalam melakukan pendataan Usaha Mikro dan Kecil tersebut. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagian besar juga masih bersifat sampingan sehingga menyulitkan untuk dilakukan pendataan dan pembinaan langsung ke pada pelaku usaha tersebut. Begitu juga dengan penggunaan tenaga kerja yang sebagian besar adalah pekerja lepas, yang digunakan apabila diperlukan.

Meningkatkan Intensitas Pembinaan Baik secara langsung melalui kunjungan ke tempat pelaku usaha maupun secara tidak langsung melalui sosialisasi dan pelatihan – pelatihan (teknis maupun manajemen) yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan mengusulkan pelatihan yang dilaksanakan oleh Provinsi Jambi. Dengan keluarnya Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil pada pasal 4 ayat 4 bahwa Untuk mendukung pelaksanaan IUMK sebagaimana dimaksud



pada ayat 1, dilakukan pendataan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil oleh Lurah/Kepala Desa diwilayah kerjanya dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil pada Pasal 18 pasal 1 bahwa Lurah/Kepala Desa menyampaikan laporan pendataan PUMK dan laporam hasil pemberian IUMK kepada Camat.

2.3.1.14. Penanaman modal, kebudayaan

Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu daya ungkit daerah dalam pembangunan ekonomi, dan untuk meningkatkan daya tarik investasi ini Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah membentuk sistim pelayanan perizinan satu pintu melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) yang total telah menerbitkan 10.587 ijin mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 serta menerbitkan 10 (sepuluh) Perda yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilaksanakan dengan mengutamakan dan mengembangkan kearifan lokal pembinaan kelompok seni yang tersebar di Kecamatan Tungkal Ilir 11 Grup Seni Budaya, Tungkal Ulu 1 Grup, Betara 4 Grup, Muara Papalik 1 Grup, Tebing Tinggi 5 Grup, Batang Asam 2 Grup, Senyerang 2 Grup dan Kecamatan Pengabuan 1 Grup Seni Budaya, sementara Kecamatan Kuala Betara, Merlung, Bramitam, Ranah Mendaluh dan Kecamatan Seberang Kota belum tercatat adanya kelompok seni yang potensial untuk pembinaan, tradisi yang telah dibangun dan dikembangkan sebagai budaya lokal antara lain adalah pawai ke aneka ragam suku dan budaya pada hari besar nasional, lomba arakan sahur menyambut bulan ramadhan dan doa bersama (khaul) Syekh KH. Abdul Kadir Jaelani.

2.3.1.15. Kepemudaan dan olah raga

Pembinaan kepemudaan khususnya kelompok remaja dapat meraih prestasi yang diraih Bidang Pemuda Selama Tahun 2014 adalah sebagai berikut :



1. Nama Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih (PASKIBRAKA) Kab. Tanjung Jabung Barat yang Mengharumkan Nama Daerah Tahun 2014:
 - a. Tingkat Provinsi : Tommydari SMAN 1 Kuala Tungkal, Refki Faris dari SMAN 2 Kuala Tungkal; Ammigita J dari SMAN 1 Kuala Tungkal; Mrtha Yonaldi dari SMAN 3 Kuala Tungkal; Fadli Carisma dari SMAN 3 Kuala Tungkal; Nursidah dari SMAN 3 Kuala Tungkal; Ayu Hartanti dari SMKN 1 Kuala Tungkal; Hidayatul Mitri dari MAN 1 Kuala Tungkal.
 - b. Tingkat Nasional : Ayu Hartanti dari SMKN 1 Kuala Tungkal.

Dari hasil pembinaan olah raga, maka putra – putri Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat meraih beberapa prestasi Olahraga selama Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Olahraga Sepak Bola
 - 1) Juara Pertama Gubernur Cup Provinsi Jambi Bulan Januari 2014 di Jambi.
 - 2) Juara Kedua ASSBI usia 15 tahun tingkat provinsi Jambi bulan Juli 2014.
 - 3) Juara Ketiga Donone Cup usia 12 tahun tingkat Provinsi Jambi Bulan April 2014.
 - 4) Juara Kedua POPDA tingkat Provinsi Jambi Bulan Juli 2014.
2. Olahraga Sepak Takraw
Juara Kedua POPDA tingkat Provinsi Jambi Bulan Juli 2014.
3. Olahraga Bulu Tangkis
 - 1) Juara Pertama a.n R. Alfath KEJURPROV Bulan April di Muara Jambi.
 - 2) Juara Ketiga a.n Afredo KEJURPROV Bulan April di Muara Jambi.
 - 3) Juara Ketiga a.n Nur Adha KEJURPROV Bulan April di Muara Jambi.
 - 4) Juara Ketiga a.n M. Amin KEJURPROV Bulan April di Muara Jambi.
 - 5) Juara Ketiga a.n Agung KEJURPROV Bulan April di Muara Jambi.



- 6) Juara Ketiga a.n Khalid KEJURPROV Bulan April di Muara Jambi.
 - 7) Juara Kedua beregu Putri (a.n Ardia Ramadhani, Nuradha, Nadia Lestari, Nuryulia Putri) pada POPDA tingkat provinsi Jambi bulan Juni 2014 di Jambi.
 - 8) Juara Kedua beregu Putra (a.n M. Ridwan Hakim, Apredo, Sukardi, Agung Setiawan) pada POPDA tingkat provinsi Jambi bulan Juni 2014 di Jambi.
4. Olahraga Bela Diri Pencak Silat
- 1) Juara Pertama beregu Putri (a.n Dian Afrelia, Sabita Mubaraqah, Eti Wahyuni) pada POPDA tingkat provinsi Jambi bulan Juni 2014 di Jambi.
 - 2) Juara Kedua a.n Rahmad Iqbal pada POPDA tingkat Provinsi Jambi Bulan Juni 2014 di Jambi.
 - 3) Juara Kedua a.n Dian Afrelia pada POPDA tingkat Provinsi Jambi Bulan Juni 2014 di Jambi.
 - 4) Juara Kedua a.n Dina Mariana pada POPDA tingkat Provinsi Jambi Bulan Juni 2014 di Jambi.
5. Bela Diri Karate
- Juara Ketiga a.n M. Wisnu Hidayat pada BANDUL OPEN JOGJA 2014.
6. Bela Diri Judo
- Juara Pertama a.n Aldo Putra pada KEJURNAS 2014.
7. Angkat Besi
- Juara Kedua a.n Mufti pada KEJURNAS Bulan Juni 2014 di Jogjakarta.
8. Bela Diri Tarung Derajat
- 1) Juara Pertama a.n Sri wahyuni pada KEJURPROV Bulan September 2014 di Jambi.
 - 2) Juara Kedua a.n Yeni pada KEJURPROV Bulan September 2014 di Jambi.
 - 3) Juara Kedua a.n Makmuruddin pada KEJURPROV Bulan September 2014 di Jambi.



- 4) Juara Kedua a.n Sugeng Hariyadi pada KEJURPROV Bulan September 2014 di Jambi.
- 5) Juara Kedua a.n Ajeng pada KEJURPROV Bulan September 2014 di Jambi.
- 6) Juara Kedua a.n Syukur pada KEJURPROV Bulan September 2014 di Jambi.
- 7) Juara Ketiga a.n Jamal pada KEJURPROV Bulan September 2014 di Jambi.
- 8) Juara Ketiga a.n Sarawati pada KEJURPROV Bulan September 2014 di Jambi.
- 9) Juara Ketiga a.n Mahmudin pada KEJURPROV Bulan September 2014 di Jambi.

2.3.1.16. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tetap masih dihadapkan kepada berbagai hambatan dan kendala yang cukup kompleks dan cenderung dinamis. Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi antara lain: 1) Pemantauan dan Monitoring kegiatan orang asing, LSM Asing (NGO) dan Lembaga asing dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikarenakan adanya perubahan kelembagaan struktur badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga menunggu peraturan perundang-undangan kelembagaan diterbitkan; 2) Pada Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanannya terealisasi sebesar 8,01 %, hal ini terjadi karena kondisi daerah kondusif yang Tidak adanya masalah konflik/gesekan antara perusahaan dengan masyarakat atau tenaga kerja, masyarakat dengan masyarakat; 3) Kegiatan kursus pelatihan Bintek Kominda belum teralisasi dikarenakan masih menunggu Petunjuk Teknis (juknis) dari pemerintah pusat (Kemendagri) kedaerah, sehingga tidak ada permintaan peserta untuk Bintek Kominda; 4) Kegiatan Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan



belum maksimal dikarenakan masih terdapat 6 kecamatan yang belum membentuk kepengurusan FPK di tingkat kecamatan yaitu kecamatan Betara, Bram Itam, Tebing Tinggi, Seberang Kota, Batang Asam dan Renah Mendaluh; 5) Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Agama (PAKEM) dipending pelaksanaannya karena masih menunggu Petunjuk Teknis dari Kementerian Dalam Negeri; 6) Pada Rakor Kegiatan Ekonomi Tingkat Kabupaten hanya terealisasi sebesar 64,04 %, hal ini terjadi dikarenakan adanya perubahan kelembagaan struktur Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga pelaksanaan yang direncanakan pertriwulan, hanya dapat dilaksanakan satu kali kegiatan.

Tabel T.II.C.6. Jumlah Organisasi Masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014

| NO | KECAMATAN | ORMAS | | LSM | | OKP | |
|--------|----------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| | | Daftar | Tak Daftar | Daftar | Tak Daftar | Daftar | Tak Daftar |
| 1 | Tungkal Ilir | 6 | - | 38 | - | 6 | - |
| 2 | Tungkal Ulu | - | - | 2 | - | - | - |
| 3 | Tebing Tinggi | - | - | 2 | 1 | - | - |
| 4 | Betara | - | - | 1 | - | - | - |
| 5 | Batang Asam | - | - | 1 | - | - | - |
| 6 | Merlung | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Muara Papalik | 1 | - | - | - | - | - |
| 8 | Renah Mendaluh | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Pengabuan | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Seberang Kota | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Senyerang | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Bram Itam | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Kuala Betara | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | | 7 | - | 44 | 1 | 6 | - |

Permasalahan ataupun kendala yang dihadapi merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi dan diatasi dengan berbagai upaya untuk mengurangi atau meminimalisir masalah antara lain: 1) Dengan adanya Perubahan peraturan nantinya dapat meningkatkan Pemantauan dan



Monitoring kegiatan orang asing, LSM Asing (NGO) dan Lembaga asing dalam wilayah Kabupaten. Tanjung Jabung Barat; 2) Meningkatkan stabilitasi pengamanan, dan koordinasi Tim Terpadu (TIMDU) penanganan gangguan keamanan dan Penanganan konflik, di tingkat kecamatan dan Kabupaten; 3) Mengikuti Bintek Kominda berdasarkan peraturan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri; 4) Melaksanakan sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan membentuk Forum FPK di 6 kecamatan yang belum membentuk kepengurusan FPK; 5) Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis dari kementerian Dalam Negeri tentang Aliran Kepercayaan (PAKEM) maka kegiatan ini dapat dilaksanakan; 6) Setelah adanya Perubahan Struktur Kelembagaan maka pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilaksanakan pertriwulan.

2.3.1.17. Otonomi Daerah

Selain itu program yang juga telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD adalah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dan penyusunan rancangan peraturan daerah hak inisiatif; kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah dengan hasil pembahasan peraturan daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel T.II.C.7. Peraturan Daerah yang Dihasilkan Tahun 2011 - 2015

| NO | PERATURAN DAERAH | | TENTANG | LAMANYA PEMBAHASAN (Hari) |
|----|------------------|-------|---|---------------------------|
| | NOMOR | TAHUN | | |
| 1 | 1 | 2015 | Penyelenggaraan tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan | 60 |
| 2 | 2 | 2015 | Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 60 |
| 3 | 3 | 2015 | Izin Usaha Konstruksi | 60 |
| 4 | | 2015 | Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing | |



| | | | |
|--|-------------|---|--|
| 5 | 2015 | Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang retribusi Perizinan tertentu | |
| 6 | 2015 | Pemilihan Kepala Daerah | |
| 7 | 2015 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji | |
| <i>KET : Perda yang belum diberi nomor karena menunggu hasil evaluasi kementerian dalam negeri</i> | | | |
| JUMLAH PERDA PER TAHUN | | | |
| | 2015 | 7 PERDA | |
| | 2014 | 10 PERDA | |
| | 2013 | 12 PERDA | |
| | 2012 | 12 PERDA | |
| | 2011 | 26 PERDA | |

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Tanjung Jabung Barat 2015

Penyusunan Peraturan Daerah merupakan harmonisasi koordinasi antara unsur eksekutif dan legislatif, sehingga jika dilihat dari lamanya pembahasan serta produk Perda yang ada sebagaimana tabel di atas, maka dapat diassumsikan bahwa koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjalan dengan baik.

2.3.1.18. Pemerintahan Umum

Salah satu pokok bahasan untuk pemerintahan umum adalah penegasan batas wilayah yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Tanjung Jabung yang pada Tahun 2013 telah dilaksanakan penegasan batas Kecamatan Tungkal Ulu dengan Kecamatan Batang Asam pada Segmen Desa Pematang Kecamatan Tungkal Ulu, dengan Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Sasam, dan pada Tahun 2015 telah dilaksanakan penegasan batas Kecamatan Pengabuan dengan Desa Kayu Aro Kecamatan Senyerang.

Sedangkan untuk penegasan batas antar desa, pada tahun 2014 telah dilaksanakan Penegasan batas desa antara lain Desa Mekar Jati, Desa Pasar Senin, dan Desa Sungai Jering Kecamatan Pengabuan, yang ditandai dengan Berita Acara Kesepakatan antar desa yang berbatasan.



Selanjutnya Batas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kabupaten Indragiri Hilir, telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 33, Tentang Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Jambi. Kemudian Batas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, telah ditetapkan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 62 Tahun 2014, tentang Batas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

Sedangkan Batas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, telah memasuki tahap pembahasan Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri oleh Kedua Pemerintah Kabupaten yang berbatasan beserta Dirjen Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri, dan diharapkan pada tahun ini segera diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Batas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.

Selanjutnya antar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu antara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kabupaten Muaro Jambi, telah dilaksanakan penetapan batas, dimana pada Tahun 2014 telah dibangun Tugu Batas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kabupaten Muaro Jambi pada segmen Desa Dusun Mudo Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

Khusus pada segmen Desa Terjun gajah Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, masih tersisa 2,5 Km segmen batas yang belum disepakati, hal ini disebabkan pada segmen tersebut terkait dengan titik simpul, kemudian terkait dengan batas Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, masih berada pada tahap fasilitasi dan mediasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi Melalui Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi.



2.3.1.19. Administrasi keuangan daerah

Beberapa permasalahan/kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pembinaan pengawasan SKPD antara lain : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, tingkat pencapaian 83% dikarenakan 11 kegiatan yang telah dilaksanakan realisasi keuangan sesuai dengan kebutuhan real yang dapat dipertanggungjawabkan; 2) Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, secara kumulatif tingkat pencapaiannya 71% karena ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana secara efektif yakni :

- a. Kegiatan sosial zona integrasi wilayah bebas korupsi (ZIWBK) dengan capaian realisasi anggaran 12 % karena terjadi perubahan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB yaitu dari Permenpan RB Nomor 60 Tahun 2012 menjadi Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014, yang menitik beratkan pada tujuan memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi (ZIWBK) dan wilayah Birokrasi bersih melayani (BUBBM).
- b. Kegiatan Penangan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemda dengan capaian realisasi keuangan 24 % hal ini terjadi karena jumlah pengaduan masyarakat yang dapat ditindak lanjuti berdasarkan disposisi Bapak Bupati tidak dapat ditentukan secara pasti hanya perkiraan jumlah pengaduan sesuai pengalaman tahun sebelumnya.
- c. Kegiatan tindak lanjut temuan hasil pengawasan dengan tingkat capaian realisasi keuangan 67 % hal ini disebabkan belum adanya sanksi yang tegas terhadap obyek pemeriksaan (obrik) yang tidak ada/belum tuntas melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan Ekstern Pemerintah (BPK-RI), pemahaman terhadap rekomendasi kurang/sulit menindak lanjuti temuan berkaitan dengan pihak ketiga.



Tabel T.II.C.8. Pemeriksaan Internal dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2012-2015

| No | Kegiatan | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | |
|----------|---|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|
| | | T | R | % | T | R | % | T | R | % | T | R | % |
| A | Pengawasan Internal secara berkala | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pemeriksaan Kasus Pengaduan | 30 | 17 | 57 | 30 | 21 | 70 | 30 | 7 | 23 | 24 | 12 | 50 |
| 2 | Reguler | 160 | 160 | 100 | 191 | 189 | 98 | 206 | 206 | 100 | 190 | 174 | 92 |
| 3 | Sidak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Dana BOS | 13 | 13 | 100 | 13 | 13 | 100 | 13 | 13 | 100 | 13 | 5 | 38 |
| B | Review Monitoring & Evaluasi | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Review Laporan Keuangan | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 2 | LAKIP | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 26 | 26 | 100 |
| 3 | Monitoring Bansos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Monitoring Penutupan Kas | - | - | - | 34 | 13 | 38 | 25 | 58 | 230 | 57 | 57 | 100 |
| 5 | Pre-audit Monitoring Khusus / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- a. Tingkat pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat dan telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat, menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
- b. Kas opname dan stock opname merupakan persyaratan untuk membuat laporan keuangan oleh SKPD (Pengguna Anggaran) maupun UPTD (Kuasa Pengguna Anggaran dalam bentuk berita acara pemeriksaan kas/barang).

Solusi yang dilaksanakan untuk meminimalisir permasalahan tersebut: 1) Pengiriman staf untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan sertifikasi tenaga auditor lebih ditingkatkan; 2) Koordinasi lebih intens untuk meningkatkan sinergi dengan pihak-pihak yang terkait dan antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP); 3) Pemutakhiran data yang



berkaitan dengan temuan dan hasil pengawasan akan lebih diintensifkan;
4) Pendekatan dengan objek pemeriksaan (SKPD) lebih ditingkatkan sehingga pelaksanaan pengawasan dan pembinaan akan berjalan dengan lancar, efektif dan efisien.

2.3.1.20. Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Untuk Menunjang Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan beberapa Kegiatan diantaranya Perencanaan pegawai secara nasional serta pemenuhan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja telah dilaksanakannya penyusunan formasi yang dilaksanakan oleh masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah mendapat persetujuan prinsip alokasi formasi penerimaan CPNS Formasi Umum Tahun 2014 dan telah dilaksanakannya pendaftaran secara online serta pelaksanaan Ujian Seleksi Penerimaan CPNS secara transparan melalui Sistem Computer Assited Test (CAT) dimana seluruh peserta dapat mengetahui secara langsung nilai ujian dan langsung ditayangkan serta diumumkan pada hari yang sama saat pelaksanaan ujian, pelaksanaan Sistem Computer Assited Test (CAT) difasilitasi oleh Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang dengan penyediaan sarana dan prasarana dari STIKOM Dinamika Bangsa di Jambi.

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dimana proses usul pengadaan, usul mutasi dan usul pensiun serta peremajaan data Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dengan sistem online yang databasenya terintegritasi dengan Badan Kepegawaian Negara. Hal ini sangat membantu dalam validasi dan verifikasi serta proses pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah menjadi lebih baik.

Kartu Pegawai Elektronik yang telah diterima oleh Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi multi fungsi



dimana sebelumnya hanya sebagai kartu identitas pegawai tetapi saat ini dapat dipergunakan untuk Pembayaran Gaji melalui Rekening dan PNS dapat menggunakannya sebagai ATM (Anjungan Tunai Mandiri).

Dalam rangka peningkatan kemampuan dan profesionalisme yang berbasis kompetensi di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan dengan pengembangan PNS melalui pendidikan formal berkelanjutan dalam bentuk pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS.

Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai sebagai pengganti DP3 Pegawai Negeri Sipil telah dilakukan sosialisasi ke Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah agar setiap Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mampu melakukan Penyusunan Sasaran Kinerja pada awal tahun yang dinilai pada akhir tahun setiap capaian dari target – target kinerja masing – masing Pegawai Negeri Sipil.

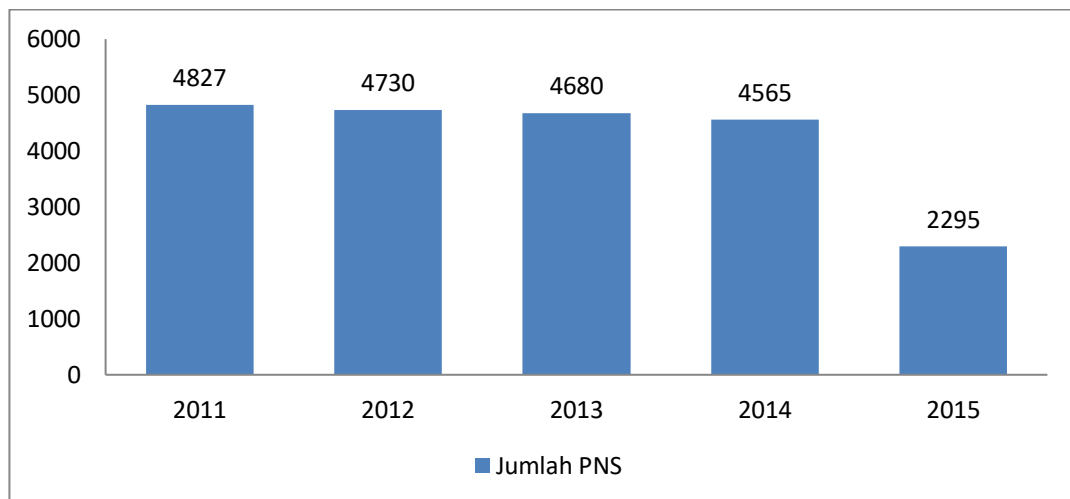
Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, professional dan bermoral tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk lebih produktif berdasarkan sistem karir dan system prestasi kerja. Pemerintah dalam hal ini telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini antara lain memuat kewajiban, larangan dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan pelanggaran, agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mempunyai



sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

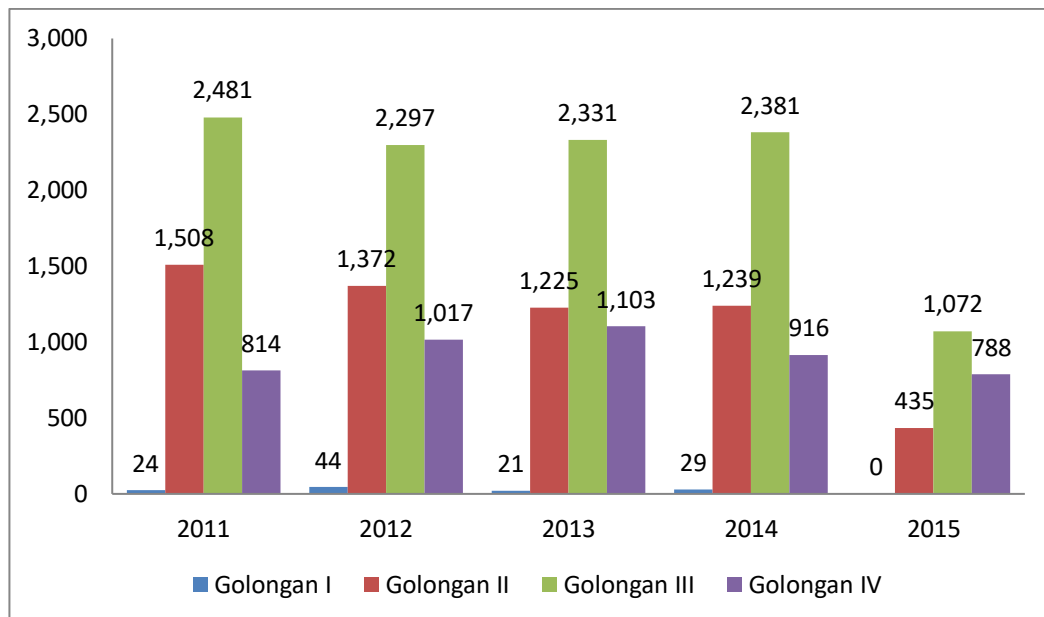
Grafik G.II.54. Jumlah PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015



Untuk menyikapi permasalahan yang terjadi mengingat pentingnya pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2015 telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada 13 (tiga belas) Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindakan indisipliner serta Pelanggaran tindak Pidana maka dijatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, hal ini merupakan wujud keseriusan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melakukan pembinaan Pegawai Negeri Sipil guna mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*).



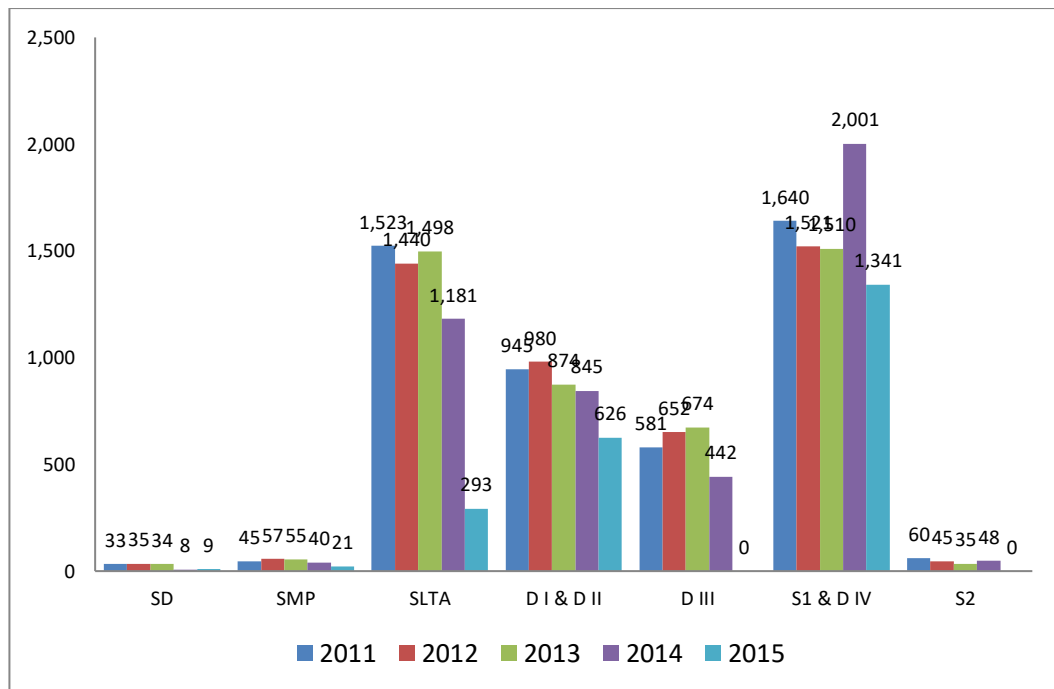
Grafik G.II.55. Golongan PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015



Dalam mewujudkan sumber daya aparatur yang berkualitas, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang dituangkan dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Pendidikan dan Pelatihan merupakan hal yang sangat penting dan bersifat strategis. Aspek pendidikan dan Pelatihan yang dimaksud adalah Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Yang Selanjutnya Disebut Diklat Adalah Proses Penyelenggaraan Belajar Dan Mengajar Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Pegawai Negeri Sipil, baik pendidikan dan pelatihan Struktural, Teknis maupun fungsional.



Grafik G.II.56. Tingkat Pendidikan PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015



Pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil bertujuan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara Profesional dengan didasari kepribadian etika pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan instansi, menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa, memantapkan sikap dan semangat kepribadian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, pemberdayaan masyarakat; menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola berpikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

2.3.1.23. Ketahanan pangan

2.3.1.23.1 Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Konsumsi Energi baru mencapai 4,084 (Kkal/Kap/Hari) atau 170,15 % AKE (Angka Kecukupan



Energi). Sedangkan Konsumsi Protein sebesar 68,22 (Gram/Kap/Hari) atau 108,28 % AKP (Angka Kecukupan Protein).

Tabel T.II.C.9. Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2015

| No. | Jenis Bahan Makanan | Ketersediaan Per Kapita Per Hari | | | |
|--------------|---------------------|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | Energi | | Protein | |
| | | Kkal | % | Gram | % |
| 1. | Padi-padian | 1.083 | 45,12 | 25,80 | 40,95 |
| 2. | Makanan Berpati | 31 | 1,27 | 0,2 | 0,32 |
| 3. | Gula | 100 | 4,16 | 0,01 | 0,01 |
| 4. | Buah Biji berminyak | 1.158 | 48,23 | 15,81 | 25,10 |
| 5. | Buah-buahan | 152 | 6,33 | 1,73 | 2,75 |
| 6. | Sayur-sayuran | 14 | 0,57 | 5,92 | 9,40 |
| 7. | Daging | 55 | 2,30 | 3,72 | 5,90 |
| 8. | Telur | 7 | 0,28 | 0,44 | 0,70 |
| 9. | Susu | 5 | 0,20 | 0,25 | 0,40 |
| 10. | Ikan | 63 | 2,64 | 12,71 | 20,17 |
| 11. | Minyak dan Lemak | 1.416 | 59,05 | 1,63 | 2,58 |
| Total | | 4.084 | 170,15 | 68,22 | 108,28 |

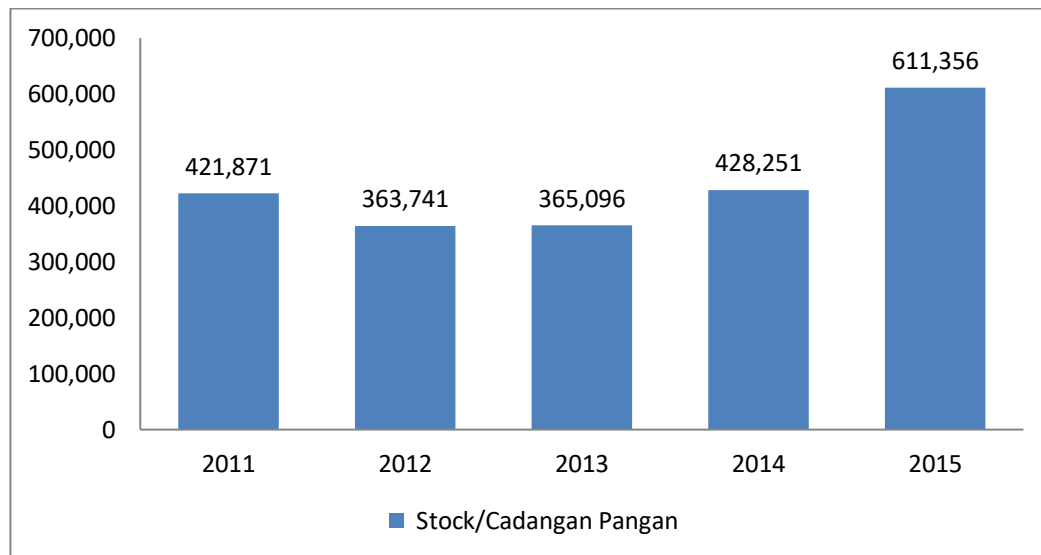
Penguatan Cadangan Pangan, Indikator ini menggambarkan bahwa dengan kegiatan pengembangan cadangan pangan masyarakat, diharapkan masyarakat mampu memberdayakan kelembagaan lumbung pangan untuk mengantisipasi masa panen/masa paceklik, penguatan cadangan pangan dan pengembangan usaha ekonomi kelompok menuju terwujudnya kemandirian kelembagaan lumbung pangan. Selain itu memberikan kesempatan kepada kelompok tani dan anggotanya untuk menyimpan hasil produksi pertaniannya sehingga bisa menjadi cadangan pangan di tingkat masyarakat.

Cadangan pangan mengacu pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, bahwa cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah adalah cadangan pangan tertentu bersifat pokok di tingkat nasional sebagai persediaan pangan pokok tertentu, misalnya



beras, sedangkan di tingkat daerah dapat berupa pangan pokok masyarakat di daerah Stok cadangan pangan pemerintah yang dikelola Perum Bulog Kabupaten Tanjung Jabung Barat setiap bulan 400.920 Kg.

Grafik G.II.57. Stock/Cadangan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011-2015



Sementara itu stok cadangan pangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2013 sebanyak 51 ton beras yang dititipkan pada gudang Perum Bulog. Stok Sampai dengan tahun 2014 telah diberdayakan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) sebanyak 6 Gapoktan yang berada pada 4 (empat) kecamatan. Stok yang ada di gapoktan sampai dengan Desember 2014 sebanyak 36.813 Kg.

Pengembangan cadangan pangan masyarakat, dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat terutama pada lokasi yang rawan bencana dan terpengaruh masa paceklik. Kelembagaan tersebut dibangun berkelompok dengan membangun dan mengembangkan cadangan pangan masyarakat berupa lumbung pangan. Sampai saat ini jumlah kelompok lumbung pangan yang ada sebanyak 2 kelompok. Dan yang aktif melaksanakan kegiatan penyimpanan serta penjualan baik sarana produksi maupun bahan pangan sebanyak 2 kelompok lumbung pangan.

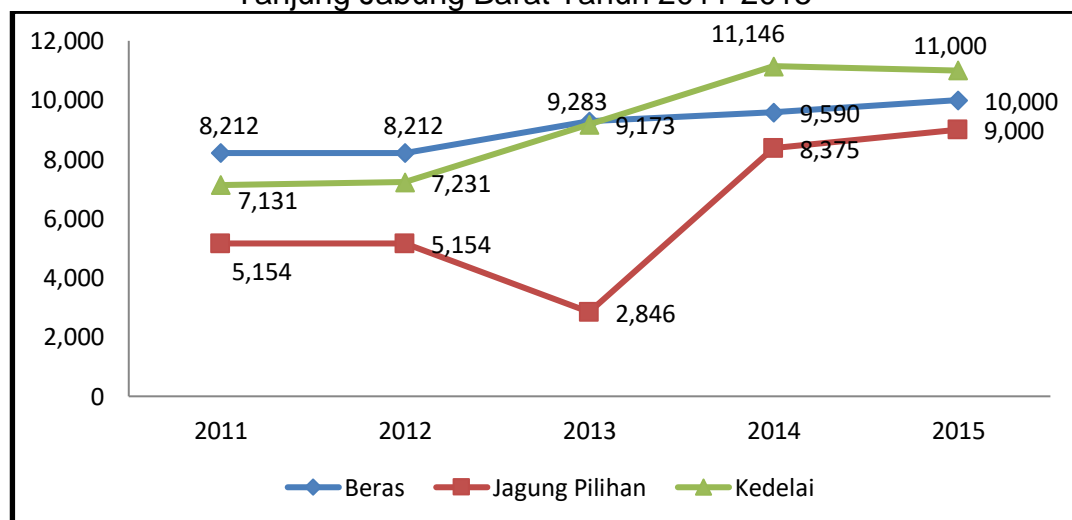


Pengembangan Lumbung Pangan dimaksudkan agar masyarakat mampu memberdayakan kelembagaan lumbung pangan melalui penguatan cadangan pangan dan pengembangan usaha ekonomi kelompok menuju terwujudnya kemandirian kelembagaan lumbung pangan. Kemandirian kelembagaan yang dimaksud, memberikan kesempatan kepada kelompok tani dan anggotanya untuk menyimpan hasil produksi pertaniannya sehingga bisa menjadi cadangan pangan masyarakat yang dapat digunakan pada saat paceklik atau harga mahal, dan juga memberikan kesempatan kepada kelompok tani dan anggotanya untuk menyimpan hasil produksi pertaniannya pada saat harga rendah untuk dijual kembali pada saat harga lebih tinggi. Kegiatan pengembangan kelembagaan lumbung pangan tidak hanya dilaksanakan dengan pembangunan fisik, namun juga disertai pembinaan terhadap kelembagaan lumbung pangan yang ada melalui penguatan cadangan pangan dan pengembangan usaha ekonomi kelompok.

2.3.1.23.2 Distribusi dan Akses Pangan

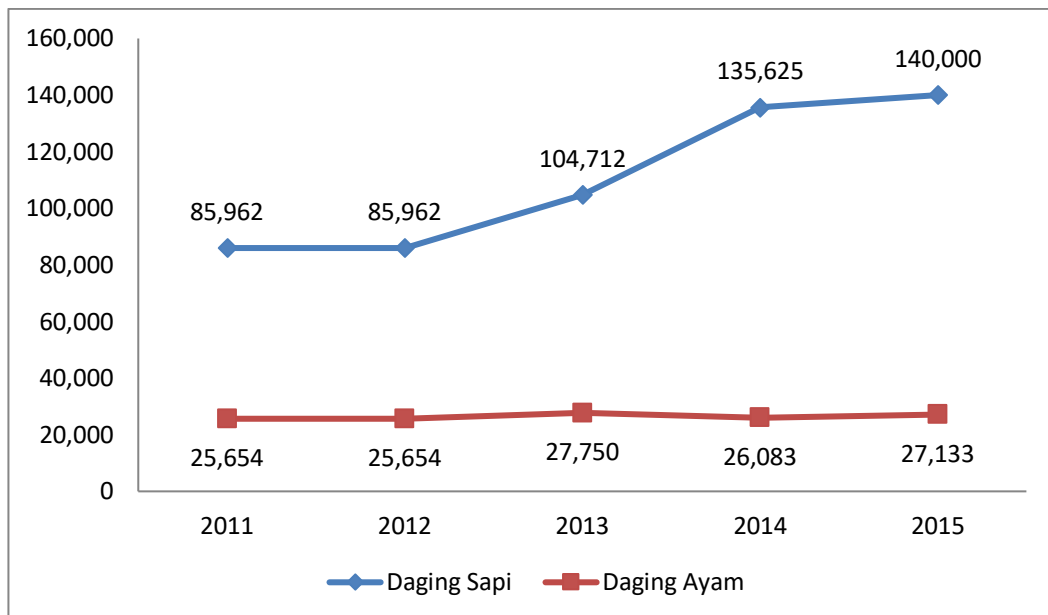
Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Strategis merupakan suatu upaya untuk memantau perkembangan harga bahan pangan pokok meliputi 9 komoditi pertanian di 13 kecamatan yang dilaksanakan oleh penyuluh pertanian.

Grafik G.II.58. Perkembangan Harga Beras, Jagung, Kedelai Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015

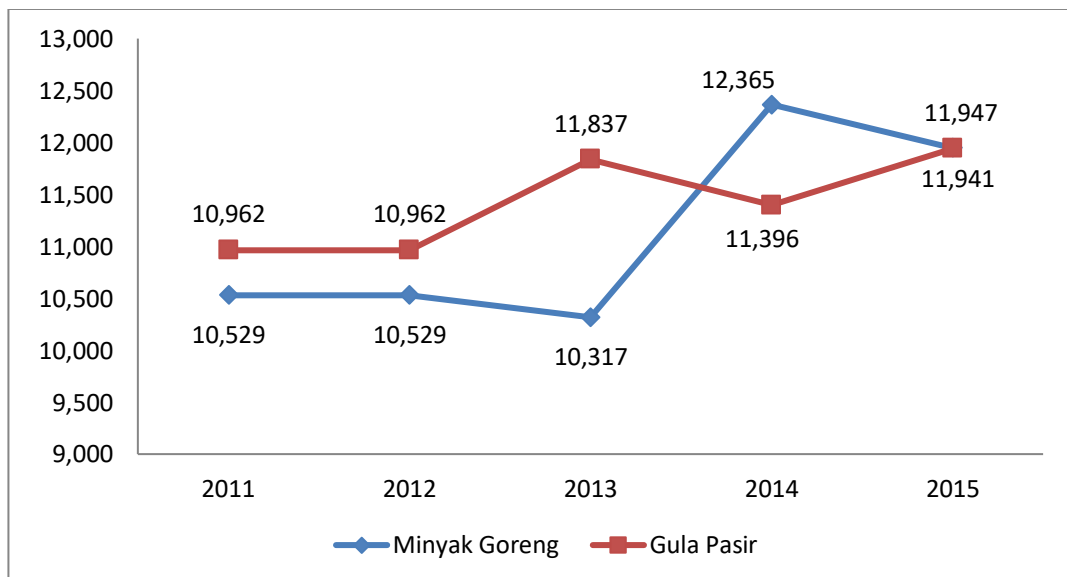




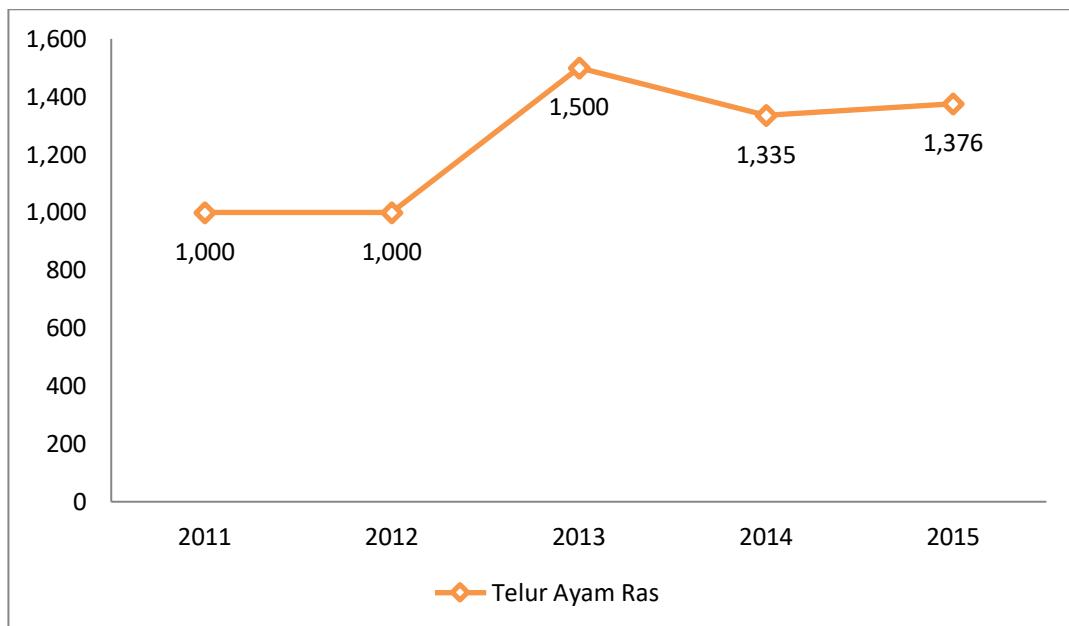
Grafik G.II.59. Perkembangan Harga Daging Sapi dan Ayam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015



Grafik G.II.60. Perkembangan Harga Minyak Goreng dan Gula Pasir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015



Grafik G.II.61. Perkembangan Harga Telur Ayam Ras Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015



Dalam pelaksana pencapaian indikator stabilisasi harga dan pasokan pangandi daerah/wilayah telah di bentuk Tim Khusus yang bertugas memantau dan intervensi pasar bila terjadi gejolak harga beranggotakan Dinas / instansi terkait seperti Bulog, Disperindag, BKP3, Dinas Pertanian dan sebagainya sehingga bila terjadi fluktuasi harga dan pasokan pangan tidak stabil segera melakukan pemantauan dan melakukan intervensi secara cepat.

2.3.1.23. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

Berdasarkan hasil survey konsumsi pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang kualitas (keragaman dan keseimbangan) konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan nilai skor pola pangan Harapan (PPH) pada tahun 2014 menghasilkan skor PPH 74,85 %, lebih tinggi daripada skor PPH tahun 2013 yang baru mencapai 71,25 %.. Namun prosentase capaian pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman di Kabupaten Tanjung Jabung Barat bila dibandingkan dengan target idial yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Gubernur No 71 Tahun 2010 mengenai target



sasaran skor PPH pada tahun 2012 sebesar 89,80%, baru mencapai 69,6 % meskipun ada kenaikan dari target yang ingin dicapai pada tahun 2012 sebesar 66,1 terealisasi sebesar 69,6 %. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pola makan masyarakat menuju ke arah lebih bergizi, seimbang, beragam, dan aman.

2.3.1.24. Pemberdayaan masyarakat dan desa

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan dan peluang bagi Desa untuk mendapat perhatian lebih dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendorong mempercepat pembangunan desa. Maka dari itu, pembangunan perdesaan diarahkan untuk (1) Mengurangi kemiskinan dan kerentanan ekonomi di perdesaan; (2) Memenuhi standar pelayanan minimum khususnya di desa-desa tertinggal dan perbatasan; (3) Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan; (4) Penguatan tata kelola pemerintahan Desa yang baik; (5) Mewujudkan Desa berkelanjutan, yang berbasis pada potensi sumber daya sosial budaya lokal dan daerah; serta (6) Membangun keterkaitan desa-kota melalui pengembangan kegiatan perekonomian hulu-hilir dan industrialisasi perdesaan khususnya di desa-desa yang telah berkembang dan mandiri yang terkait dengan industri di pusat-pusat pertumbuhan terdekat.

Gerakan Membangun Keberdayaan Masyarakat Perdesaan / Kelurahan yang disingkat dengan GEMMA Desa / Kelurahan dimana pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 16 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Gerakan Membangun Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/ Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana telah dirubah melalui Peraturan Bupati No. 32 tahun 2014.



Program GEMMA Desa/Kelurahan adalah program pemberdayaan dan percepatan pembangunan perdesaan/kelurahan melalui peningkatan kapasitas Pemerintah Desa/Kelurahan dan kelembagaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian Desa/Kelurahan serta mendorong pengelolaan pembangunan perdesaan yang otonom, efektif dan dinamis, di tahun 2014 ini diberikan bantuan keuangan kepada Desa/Kelurahan masing-masing sebesar Rp. 300.000.000,- atau sejumlah Rp. 40,2 Milyar.

Capaian program ini antara lain pembangunan Kantor Desa/Kelurahan sebanyak 100 unit, rehab Kantor Desa sebanyak 4 unit, pembangunan Aula sebanyak 15 unit, pengerasan jalan sepanjang 10.350 m, pembangunan Rabat Beton 4.120 m, pembangunan Jembatan Kayu 7 unit, *Boxculvert* 2 unit, Jerambah Beton 19,3 m dan penimbunan halaman kantor desa seluas 340 m² dan yang cukup menggembirakan, melalui program ini telah berhasil menambah pemberdayaan, kemandirian, partisipasi masyarakat Desa/Kelurahan karena memang program ini dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggung jawabannya dilaksanakan oleh masyarakat desa/kelurahan, ini dibuktikan program ini mampu menyerap Tenaga kerja lokal sebanyak ± 1.321 orang dan berhasil menghimpun Swadaya masyarakat berupa hibah lahan, bahan-bahan dan berupa sumbangan tenaga ± Rp. 2.367.570.000,-.

2.3.1.25. Statistik

Pengelolaan statistik dilakukan sebagai salah satu bagian dari program perencanaan daerah dan dilaksanakan melalui kerja sama dengan Badan Pengelola Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk beberapa produk statistik yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Penghitungan/Sensus Ekonomi Nasional, Penghitungan PDRB, dan Penghitungan Indeks Kemahalan Harga Konstruksi yang diharapkan produk statistik tersebut dapat



meningkatkan kualitas perencanaan maupun evaluasi terhadap hasil pembangunan.

2.3.1.26. Kearsipan

Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kearsipan, maka Kantor PDEPKD mengalami peningkatan seiring dengan prestasi yang diraihinya dalam “Lomba Pengelola Arsip Terbaik se Provinsi Jambi” dari Juara Harapan II pada tahun 2013 menjadi Juara I pada tahun 2014.

2.3.1.27. Komunikasi dan informatika

Peningkatan kapasitas Bandwith dari 5 Mbps pada Tahun Anggaran 2013 senilai Rp.248.483.564,- dengan pihak ketiga PT. Telekomunikasi Indonesia.Tbk ada peningkatan yang sangat baik pada Tahun Anggaran 2014 menjadi 17 Mbps Rp. 152.000.000,- dengan pihak ketiga PT. Pegascom yang juga merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara dengan tujuan operasional website Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (www.tanjabbarkab.go.id), Free Wifi Pujasera dan Free Wifi Ancol Beach.

Pada umumnya semua Program Kegiatan tidak mengalami kendala yang begitu berarti, hal ini dapat dilihat dari 8 (delapan) Program Kegiatan yang dilaksanakan terdapat satu Program Kegiatan yang rendah target realisasinya pada tahun anggaran 2015 yaitu pada Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

Adapun kendalanya: 1) Tidak teranggarkannya biaya penginapan untuk juri, guru pembimbing dan peserta lomba yang mengakibatkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan; 2) Penyerapan realisasi yang terlihat hanya pada pengiriman peserta lomba bercerita tingkat SD dan SLTA yang diselenggarakan pihak Provinsi; 2) Dikarenakan untuk peserta lomba bercerita tingkat SD dan SLTA pada tingkat nasional tidak dapat dilaksanakan (yang dikirim hanya juara 1).



2.3.1.28. Perpustakaan

Perkembangan jumlah buku dan bahan bacaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak ada peningkatan jumlah exemplar dan judul secara signifikan, dikarenakan pada Tahun Anggaran 2014 difokuskan untuk membangun infrastruktur gedung agar ada peningkatan layanan dan kenyamanan para pemustaka.

Tabel T.II..C.10. Perkembangan Koleksi Buku Kantor Pendataan Elektronik, Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun Anggaran 2011-2015

| No | Uraian | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|---|--------|--------|---------|--------|--------|
| 1 | Jumlah buku di kabupaten | 12.651 | 13.117 | 158.117 | 13.262 | 23.937 |
| 2 | Judul buku di kabupaten | 25.319 | 26.643 | 235.643 | 26.852 | 11.968 |
| 3 | Jumlah buku di desa | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 57.067 |
| 4 | Judul buku di desa | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 30.067 |
| 5 | Jumlah Perpustakaan di Desa / Kelurahan | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

2.3.2. FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

2.3.2.1. Pertanian

Dari tujuh komoditi tanaman pangan, hanya tiga komoditi yang mengalami peningkatan produksi pada tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu: Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu. Jagung mengalami peningkatan produksi yang terbesar mencapai 154,27% dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2015 produksi Jagung sebesar 2.508 ton pipilan kering meningkat sebesar 1.989 ton dibandingkan tahun 2013 yang hanya 1.289 ton. Peningkatan produksi didukung oleh peningkatan luas panen dan produktivitas. Luas panen tahun 2015 seluas 761 Ha,



meningkat sebanyak 318 Ha atau 71,78% dibandingkan luas panen tahun 2013 yang hanya 443 Ha.

Tabel T.II.C.11. Perkembangan Produksi Padi dan Palawija Tahun 2015 (Ton)

| HASIL PRODUKSI KOMODITI (TON) | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|
| No. | KECAMATAN | PADI | JAGUNG | KEDELAI | KACANG TANAH | KACANG HIJAU | UBI KAYU | UBI JALAR |
| 1 | Tungkal Ilir | 1.210 | 7 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 |
| 2 | Bram Itam | 2.272 | 303 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 |
| 3 | Seberang Kota | 545 | 385 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 |
| 4 | Betara | 1.146 | 74 | 0 | 0 | 0 | 968 | 0 |
| 5 | Kuala Betara | 1.040 | 88 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 |
| 6 | Pengabuan | 11.746 | 376 | 0 | 0 | 0 | 141 | 19 |
| 7 | Senyerang | 16.328 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tungkal Ulu | 132 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Batang Asam | 10.691 | 30 | 25 | 0 | 0 | 392 | 11 |
| 10 | Tebing Tinggi | 1.136 | 362 | 0 | 5 | 0 | 348 | 31 |
| 11 | Merlung | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 373 | 21 |
| 12 | Muara Papalik | 0 | 61 | 0 | 11 | 13 | 504 | 99 |
| 13 | Renah Mendaluh | 2.101 | 374 | 13 | 1 | 0 | 113 | 0 |
| Jumlah | | 48.345 | 2.508 | 68 | 17 | 13 | 4.069 | 181 |

Peningkatan luas panen juga didukung oleh pertanaman jagung yang merupakan kegiatan Pengembangan Komoditas Jagung dana APBD Kab. Tanjung Jabung Barat. Produktivitas Jagung tahun 2014 mencapai 43,07 Ku/Ha meningkat sebesar 13,97 Ku/Ha atau 40,02% dibandingkan produktivitas tahun 2013 yang mencapai 29,10 Ku/Ha. Peningkatan produktivitas Jagung yang cukup signifikan merupakan hasil peningkatan penggunaan benih Jagung Hibrida dengan estimasi produksi mencapai 6-7 ton pipilan kering per hektar.

Secara umum, produksi komoditi tanaman pangan pada tahun 2014 mengalami penurunan bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Iklim dan cuaca yang tidak mendukung serta bencana kebakaran hutan yang menyebabkan terjadinya kabut asap, ditengarai sebagai faktor utama penyebab terjadinya penurunan produksi selain faktor teknis dan non teknis lainnya.



Selama periode tahun 2011-2014 perkembangan keberhasilan GERTAKPADUKA sebagai suatu gerakan moral mengalami pasang surut yang tidak terlepas dari dinamika sosial, ekonomi, politik dan budaya berkehidupan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tahun 2011 sebagai tahun awal peng gagasan GERTAKPADUKA, pemerintah Kabupaten menargetkan seluas 2.200 Ha lahan sawah di daerah pasang surut akan berhasil ditingkatkan Indeks Pertanamannya (IP) dari IP 100 menjadi IP 200. Realisasi peningkatan IP selama tahun 2011 tercatat mencapai luas 3.263 Ha atau 148,32 %. Keberhasilan pencapaian ini didukung faktor-faktor antara lain: cuaca dan iklim yang mendukung dimana musim penghujan dan musim kemarau berlangsung dalam periode yang normal dengan intensitas yang relatif mencukupi dalam mendukung pertanaman padi, ketersediaan benih unggul yang sesuai baik dalam aspek kuantitas dan kualitas maupun aspek ketepatan waktu penyediaan benih sehingga pertanaman dapat terpenuhi sesuai dengan jadwal tanam yang telah ditetapkan.

Perkembangan selanjutnya GERTAKPADUKA tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada musim tanam pertama (MT I) tahun 2012 dapat dipenuhi lebih dari 4.400 Ha luas tanam, namun pada musim tanam kedua (MT II) lahan sawah yang mengalami peningkatan IP hanya terealisasi seluas 945 Ha atau 21,47 % dari target yang ditetapkan seluas 4.400 Ha. Tidak tercapainya realisasi peningkatan IP tahun 2012 disebabkan oleh faktor-faktor antara lain : cuaca dan iklim yang tidak mendukung dimana musim penghujan berlangsung relatif singkat sedangkan musim kemarau terjadi dalam rentang waktu yang relatif lama sampai dengan bulan Nopember 2012. Pada musim tanam kedua (MT II), penyediaan benih masih bergantung pada BLBU yang berasal dari kegiatan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) dimana pengadaan benih melibatkan PT. Hidayah Nur Wahana (HNW) sebagai pemenang tender. Proses pengadaan hingga penyaluran benih BLBU ke tingkat lapangan



mengalami berbagai macam hambatan sehingga sebagian besar realisasi pertanaman SL-PTT Padi tahun 2012 terpaksa bergeser hingga ke awal tahun 2013.

Pada tahun 2013, realisasi peningkatan IP kembali meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dengan pencapaian seluas 6.200 Ha atau 93,94% dari target 6.600 Ha. Keberhasilan pencapaian peningkatan IP tahun 2013 selain didukung oleh iklim dan cuaca yang kondusif, juga disokong oleh terealisasinya kegiatan SL-PTT Padi Kawasan Pertumbuhan seluas 5.000 Ha, SL-PTT Kawasan Pengembangan 1.000 Ha serta swadaya petani 200 Ha.

Kombinasi ketiga faktor yang meliputi faktor alam (iklim dan cuaca), sosial budaya, serta teknis memberikan pukulan telak terhadap realisasi pertanaman Padi tahun 2014. Secara agregat total realisasi tanam Padi tahun 2014 hanya mencapai 9.351 Ha terdiri dari Padi Sawah 7.068 Ha dan Padi Ladang 2.283 Ha. Dari 7.068 Ha realisasi tanam Padi Sawah selama tahun 2014, hanya 210 Ha yang merupakan IP 200 atau 2,39 % dari target 8.800 Ha.

Tabel T.II.C.12. Luas Lahan dan Produktifitas Komoditi Pertanian Tahun 2014

| KECAMATAN | PADI | | JAGUNG | | KEDELAJ | |
|---------------|-------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|
| | Lahan | Produktivitas | Lahan | Produktivitas | Lahan | Produktivitas |
| | (Ha) | (Kw/Ha) | (Ha) | (Kw/Ha) | (Ha) | (Kw/Ha) |
| Tungkal Ilir | 229 | 40,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Bramitam | 386 | 40,70 | 60 | 31,31 | 0 | 0,00 |
| Sebrang Kota | 136 | 39,95 | 7 | 31,31 | 0 | 0,00 |
| Betara | 180 | 40,18 | 5 | 31,31 | 0 | 0,00 |
| Kuala Betara | 159 | 40,52 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Pengabuan | 2.408 | 39,86 | 19 | 31,31 | 0 | 0,00 |
| Senyerang | 3.571 | 39,77 | 74 | 31,31 | 0 | 0,00 |
| Tungkal Ulu | 43 | 41,54 | 0 | 0,00 | 0 | 13,30 |
| Batang Asam | 948 | 38,85 | 32 | 31,31 | 0 | 13,30 |
| Tebing Tinggi | 286 | 40,33 | 3 | 0,00 | 0 | 13,30 |



| | | | | | | |
|----------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|--------------|
| Merlung | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Muara Papalik | 0 | 0,00 | 7 | 31,31 | 0 | 0,00 |
| Renah Mendaluh | 897 | 36,00 | 275 | 31,31 | 0 | 0,00 |
| Jumlah | 9.243 | 39,03 | 486 | 31,31 | 0 | 13,30 |

Ket: Untuk padi luas lahan merupakan luas lahan sawah yang ditanami padi + luas lahan padi ladang tahun laporan
Untuk palawija luas lahan merupakan luas pertanaman tahun laporan

2.3.2.2. Peternakan

Peningkatan angka kelahiran ternak sapi tidak diiringi dengan peningkatan populasi, hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah ternak yang dipotong, dan banyaknya jumlah ternak yang dijual keluar daerah. Selain itu untuk perhitungan populasi sapi tidak hanya dipengaruhi oleh angka kelahiran tetapi dipengaruhi juga dengan pemotongan ternak, pengeluaran ternak, pemasukan ternak dan kematian ternak.

Tabel T.II.C.13. Perkembangan ternak menurut jenis, 2011 – 2015 (Ekor)

| Tahun | Sapi | Kerbau | Kambing | Domba | Ayam Buras | Itik |
|-------|-------|--------|---------|-------|------------|---------|
| 2011 | 6.510 | 444 | 36.745 | 1.029 | 556.689 | 58.500 |
| 2012 | 7.121 | 510 | 43.575 | 1.115 | 699.228 | 67.267 |
| 2013 | 6.488 | 530 | 46.603 | 1.244 | 763.475 | 95.136 |
| 2014 | 7.044 | 593 | 48.481 | 1.390 | 839.822 | 109.373 |
| 2015 | 7.193 | 607 | 40.195 | 634 | 913.464 | 84.447 |

Namun dalam hal pelaksanaan program kegiatan masih terkendala oleh beberapa faktor diantaranya : 1) Masih rendah dan terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur dan sumber daya peternak; 2) Masih rendahnya kualitas bibit ternak; 2) Masih rendahnya mutu produk hasil peternakan; 3) Belum memadainya sarana dan prasarana pasar ternak; 3)



Keterbatasan modal peternak untuk mengembangkan usaha peternakan; 4) Masih tingginya tingkat penularan penyakit hewan menular; 5) Sulitnya mencari sumber bibit ternak; 6) Masih kurangnya sarana dan prasarana petugas lapangan; 7) Masih Kurangnya tenaga medis dan paramedis

Sedangkan beberapa tindak lanjut yang diupayakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah : 1) Meningkatkan kualitas dan sumber daya aparatur dan sumberdaya peternak; 2) Mengoptimalkan kegiatan inseminasi buatan (IB); 3) Manfaatkan dan mengoptimalkan teknologi tepat guna; 3) Meningkatkan sarana dan prasarana pasar ternak; 4) Memfasilitasi kemudahan akses modal usaha bagi peternak dan mendorong peran swasta dalam pembangunan peternakan; 5) Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan; 6) Penetapan Rekanan yang benar-benar berpengalaman dalam hal pengadaan ternak; 7) Perlu pengadaan kendaraan roda 2 (dua) untuk petugas lapangan; 8) Perlunya penambahan formasi untuk tenaga medis dan paramedis.

2.3.2.3. Perkebunan

Komoditi perkebunan yang mengalami trend kenaikan secara linier baik produksinya maupun luasannya semenjak tahun 2011 sampai dengan 2014 adalah komoditi Kelapa Sawit, namun apabila kita lihat secara keseluruhan semua komoditi yang ada juga mengalami kenaikan, walaupun terjadi secara fluktuatif baik dalam skala luasan maupun produksi.



Tabel T.II.C.14.Perkembangan Komoditi Perkebunan Tahun 2011-2015

| Komoditi | 2011 | | | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | |
|--------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| | Luas (Ha) | Prod (ton) | Petani (KK) | Luas (Ha) | Prod (ton) | Petani (KK) | Luas (Ha) | Prod (ton) | Petani (KK) | Luas (Ha) | Prod (ton) | Petani (KK) | Luas (Ha) | Prod (ton) | Petani (KK) |
| Karet | 16.019 | 7.793 | 5.764 | 16.176 | 7.009 | 5.913 | 16.115 | 7.639 | 5.960 | 16.631 | 7.243 | 6.395 | 14.806 | 6.57 | 6.078 |
| Kelapa Sawit | 104.718 | 285.289 | 17.199 | 106.025 | 287.435 | 17.874 | 107.101 | 312.675 | 18.351 | 110.962 | 317.675 | 20.259 | 61.96 | 131.235 | 22.317 |
| Kelapa Dalam | 53.206 | 59.499 | 19.657 | 53.601 | 56.249 | 19.992 | 53.724 | 53.382 | 20.349 | 54.324 | 54.766 | 20.873 | 54.908 | 54.608 | 21.247 |
| Pinang | 8.508 | 10.030 | 6.501 | 8.619 | 9.762 | 6.561 | 8.712 | 9.843 | 6.718 | 8.902 | 10.237 | 6.929 | 9.882 | 7.363 | 7.485 |
| Kopi LTC | 2.540 | 1.114 | 2.247 | 2.766 | 1.609 | 2.347 | 2.710 | 1.230 | 2.351 | 2.952 | 1.535 | 2.455 | 2.882 | 1.225 | 2.436 |



Dinas Perkebunan pada sejak tahun 2012 sampai tahun 2015 telah merealisasikan bantuan bibit tanaman sebanyak 5 komoditi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel T.II.C.15. Realisasi Bantuan Bibit Tanaman Tahun 2012-2015

| No | Komoditi | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
|----|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Realisasi | | Realisasi | | Realisasi | | Realisasi | |
| | | Σ Bibit (buah/batang) | Luas Lahan (Ha) | Σ Bibit (buah/batang) | Luas Lahan (Ha) | Σ Bibit (buah/batang) | Luas Lahan (Ha) | Σ Bibit (buah/batang) | Luas Lahan (Ha) |
| 1 | Karet | 35.000 | 70 | 85.000 | 150 | 125.000 | 250 | 125.000 | 200 |
| 2 | Kelapa sawit subsidi | 12.880 | 103 | 27.625 | 221 | 22.315 | 175,5 | 11.250 | 75 |
| 3 | Kakao | - | - | 7.000 | 20 | 17.500 | 50 | - | - |
| 4 | Kelapa Dalam | 52.000 | 400 | 78.000 | 600 | 65.000 | 500 | 26.000 | 200 |
| 5 | Kopi | 200.000 | 250 | 24.000 | 30 | 24.000 | 30 | 7.500 | 10 |

Namun dalam pelaksanaan kegiatan, masih ditemui beberapa permasalahan antara lain : 1) Tidak semua pemilik kebun memiliki izin usaha dan memberi laporan produksi sehingga berdampak pada penilaian usaha; 2) Belum adanya pabrik kelapa sawit dikawasan ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 3) Petani masih banyak menggunakan bibit tidak unggul atau bibit asalan sehingga kualitas TBS rendah; 4) Gangguan kebun kelapa dalam dari insterusi air laut; 5) Belum ada industri pengolahan kepala dalam secara terpadu dalam skala industri; 6) Gangguan hama babi dan monyet terutama untuk komoditi kelapa dalam.

Dari beberapa masalah yang ditemui tersebut, dilaksanakan beberapa alternatif pemecahan masalah antara lain : 1) Inventarisasi kepala sawit; 2) Sosialisasi Permentan No 98 Tahun 2013 dan mewajibkan pemilik melaporkan perkembangannya; 3) Menarik investor pabrik pengolahan kelapa sawit; 4) Pengadaan kecambah kepala sawit unggul dan pengawasan peredaran kecambah; 5) Menarik investor



pabrik pengelolaan kelapa dalam; 6) Pembuatan kanal/parit untuk akses sekaligus sebagai tata air mikro kebun kelapa dalam.

2.3.2.4. Kehutanan

Kebakaran lahan dan hutan yang terjadi pada setiap musim kemarau di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mampu dikendalikan sejak tahun 2012 setelah Dinas Kehutanan meningkatkan kapasitas Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan (SATGAS DALKARLAHUT) dari satu regu menjadi dua regu serta pemenuhan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan kualitas dan kuantitas yang memadai.

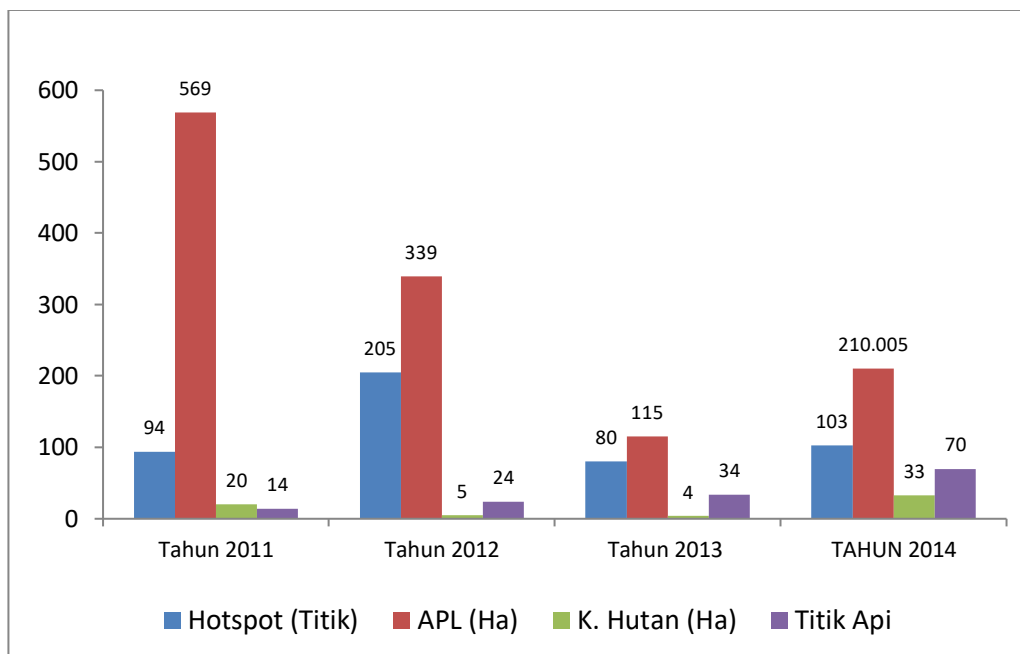
Selain upaya pemadaman juga dilakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat melalui kegiatan sosialisasi di desa dan kegiatan pembinaan kader konservasi di sekolah secara berkelanjutan setiap tahunnya serta pemasangan papan larangan pada daerah-daerah rawan kebakaran. Berikut disajikan tabel kegiatan sosialisasi dan pembinaan kader konservasi tahun 2011-2015 dan tabel rekapitulasi data hotspot, titik api dan luas kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015.

Tabel T.II.C.16. Rekapitulasi Data Hostpot, Titik Api dan Luas Kebakaran Lahan dan Hutan di Kab. Tanjung Jabung Barat 2011-2015

| No. | Uraian | Tahun | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
| | | Kawasan | Apl | Kawasan | Apl | Kawasan | Apl | Kawasan | Apl | Kawasan | Apl |
| 1. | Jumlah Titik Panas (Hot Spot) | 42 | 52 | 140 | 89 | 61 | 20 | 63 | 40 | 108 | 35 |
| 2. | Luas Kebakaran (Ha) | 20 | 569 | 74,5 | 339 | 4 | 117 | 33 | 210 | 40 | 211 |
| 3. | Jumlah Titik Api (Pemadaman) | 1 | 13 | 11 | 13 | 1 | 33 | 15 | 55 | 17 | 70 |



Grafik G.II.62. Hotspot, Titik Api dan Luas Kebakaran Lahan dan Hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015



Masih adanya gangguan keamanan hutan berupa *illegal logging* dan perambahan, maka Dinas Kehutanan telah melakukan kegiatan pengamanan hutan yang difokuskan pada areal yang tidak dibebani izin dalam bentuk patroli rutin dan patroli gabungan. Dari hasil kegiatan patroli tersebut, Dinas Kehutanan telah berhasil mengamankan barang bukti berupa *chain saw* sebanyak 14 (empat belas) unit, gergaji piring 1 (satu) unit, buldozer 1 (satu) unit, dan kayu olahan sebanyak 97 keping = 1,8848 M³.

Luasan kawasan hutan yang tidak berimbang dengan tenaga Polisi Kehutanan (Polhut) menyebabkan terjadinya gangguan keamanan hutan sehingga diperlukan adanya penambahan tenaga polhut dan PPNS.

Minat masyarakat yang masih rendah terhadap komoditi kehutanan, lebih dikarenakan oleh jangka waktu mulai dari penanaman sampai dengan menghasilkan cukup lama, persoalan ini disikapi dengan program rehabilitasi hutan dan lahan dengan pemberian bibit tanaman kehutanan



dan *Multi Purpose Trees Species* (MPTS), serta melakukan penanaman turus jalan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Jumlah bibit yang telah disalurkan ke masyarakat sejak tahun 2012 – 2014 meliputi hampir seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 343.500 batang dengan jenis, yaitu Jelutung, Jabon, Mahoni, Gaharu, Angsana, Pulai, Glodokan, Bintaro, Roda-Roda, Trembesi, Flamboyan, Pidada, Bakau, Menyirih, Biola Cantik, Kedondong Hutan, Sawo Kecil, Dadap Merah dan Jenis MPTS, yaitu bibit Mangga, Durian, Manggis, Duku dan Sirsak.

Selain upaya tersebut di atas, Dinas Kehutanan telah melaksanakan rehabilitasi hutan lindung gambut (HLG) dengan menanam tanaman jelutung rawa (*Dyera lowii*) di sela-sela tanaman kelapa sawit. Adapun luas kawasan yang telah direhabilitasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel T.II.C.17. Realisasi Rehabilitasi Hutan Lindung Gambut Dengan Tanaman Jelutung

| No. | Tahun Rehabilitasi | Luas (Ha) | Lokasi | Sumber Dana | Keterangan |
|-----|--------------------|-----------|----------------------|---------------------------|---|
| 1. | 2009 | 500 | Desa Bram Itam Kanan | DBH-DR Kabupaten | Proses Pembentukan Hutan Kemasyarakatan (HKm) |
| 2. | 2010 | 425 | Desa Mekar jaya | DBH-DR Kabupaten | |
| 3. | 2011 | 415 | Desa Bram Itam Raya | BPDAS Batanghari Jambi | |
| | | 52 | Desa Sri Menanti | PetroChina Int.Jabung Ltd | |

Upaya rehabilitasi pada kawasan hutan lindung gambut dengan menanam tanaman jelutung di sela-sela tanaman kelapa sawit saat ini terhenti kelanjutannya dikarenakan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.09/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan rehabilitasi Hutan dan Lahan. Peraturan tersebut dianggap kurang sesuai dengan kondisi yang



ada di lapangan sehingga Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melakukan upaya agar permenhut tersebut dapat direvisi melalui surat Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 522/1518/Dishut/2014 tanggal 19 Juni 2014.

Sejak tahun 2010 Dinas Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat bekerjasama dengan lembaga penelitian ICRAF (*International Centre for Research in Agroforestry*) yang juga melibatkan Litbang Kementerian Kehutanan telah melakukan upaya-upaya agar kelompok masyarakat yang berada di hutan lindung gambut dapat memperoleh legalitas pengelolaan hutan melalui pola hutan kemasyarakatan (HKm). Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan, yaitu study banding pengelolaan HKm di Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung, pembentukan kelompok tani hutan, pendataan masyarakat yang telah mengelola HLG, inventarisasi tanaman dan pemetaan partisipatif.

Belum adanya keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengelolaan hutan, sehingga pada tahun 2009 telah dicadangkan areal seluas 2.280 Ha untuk kegiatan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sesuai SK Menhut Nomor: SK. 70/Menhut-II/2009. BP2HP Wilayah IV Jambi telah memberikan rekomendasi untuk diterbitkan izin HTR kepada KTH Wana Tirta Lestari seluas 68,24 Ha dan Koperasi Produsen Mandiri Maju Bersama seluas 403,70 Ha, namun sampai saat ini belum dapat diterbitkan IUPHHK-HTR oleh Bupati Tanjung Jabung Barat dikarenakan masa berlaku izin areal pencadangan HTR dari Kementerian Kehutanan telah berakhir. Untuk itu, telah diajukan permohonan perpanjangan pencadangan areal HTR kepada Menteri Kehutanan melalui surat Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 522/110/Dishut/2014 tanggal 21 Januari 2014.

Dalam rangka pengawasan dan pembinaan produksi hasil hutan serta bahan baku industri, Dinas Kehutanan memiliki 8 (delapan) orang



petugas pengawas tenaga teknis (Wasganis) yang tugas dan fungsi pokoknya adalah melakukan pengawasan, pengukuran dan pengujian produksi hasil hutan. Dari laporan produksi hasil hutan tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Data produksi hasil hutan dan penerimaan PSDH dan DR kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel T.II.C.18. Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015

| No. | Penerimaan | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | DR (USD) | 30.223,74 | 23.033,86 | 6.945,56 | 9.814,31 | 2.441,68 |
| 2. | PSDH (Rp) | 2.035.974.507 | 8.623.746.063 | 4.029.101.993 | 4.695.626.785 | 4.862.569.660 |

2.3.2.5. Energi dan sumberdaya mineral

Potensi Pertambangan di Tanjung Jabung Barat demikian dominan, ini dapat dilihat perannya sebagai kontributor utama dalam PDRB sampai pada Tahun 2012. Dalam kaitan ini dapat dilihat ada beberapa perusahaan yaitu PETROCHINA, RANHILL, PAN ORIENT ENERGY, MONTD'OR OIL dan PT. HEXINDO GEMILANG JAYA yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi gas dan minyak bumi di wilayah ini. Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki cadangan minyak bumi \pm 250 juta Barrel sedangkan gas alam cair potensinya 2 Milyard Feed Qubic Gas sebagai potensi sumber daya non hayati. Untuk periode Desember 2011 sampai dengan November 2013 lifting minyak bumi Petrochina Jabung Ltd. mencapai 1.653.570 barrel atau rata-rata per hari \pm 4.593 barrel. Sedangkan lifting gas bumi Petrochina Jabung Ltd. tahun 2013 mencapai 26.370.100 MMBTU.



Sebagai upaya pencapaian rasio 75/100 electricity pada akhir tahun 2015 bersamaan dengan pencapaian pembangunan millenium (*Millenium Development Goal's*). Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas EDSM sampai dengan tahun 2013 telah berhasil mencapai *Rasioelectricity* untuk kecamatan sebesar 69,23 %, untuk desa / kelurahan 75 %, sedangkan untuk rumah tangga 73 %.

Tabel T.II.C.19.Capaian Bidang Sumber Daya Mineral dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015

| NO | URAIAN | CAPAIAN | | | | |
|----|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| I | BIDANG SUMBER DAYA MINERAL | | | | | |
| 1 | Lifting minyak bumi | 495.875.94 | 362.301.88 | 408.274.56 | 4.245.476 | 1.909.943 |
| 2 | Lifting Gas Bumi | 869.105.72 | 698.374.08 | 841.791.75 | 62.524.593 | 32.199.603 |
| 3 | Air Bersih (Sumur Bor) | 126 | 91 | 191 | 129 | 113 |

2.3.2.6. Kelautan dan perikanan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi yang memiliki Wilayah Pesisir dan Laut, dimana secara geografis Kabupaten Tanjung Jabung Barat terletak pada daerah yang sangat strategi, yaitu berhadapan langsung dengan kawasan SIJORI (Singapura, Johor dan Riau). Oleh karena itu pengembangan Bidang Perikanan dan Kelautan sangat penting sekali, dimana potensi perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup besar untuk dikembangkan, baik perikanan tangkap, budidaya maupun pengolahannya.



Tabel T.II.C.20. Capaian Kinerja Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2015

| No | Uraian | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1 | Jumlah Produksi Perikanan (Ribuan Ton) | | | | | |
| | - Perikanan Tangkap (Laut dan Umum) | 21,889.30 | 24,078.23 | 24,456.85 | 24.798,5 | 21.473,9 |
| | - Perikanan Budidaya | 2,605.80 | 2,852.60 | 2,416.30 | 2.761,60 | 1.812,2 |
| 2 | Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat Kabupaten Tanjung jabung Barat | 30.00 | 31.87 | 31.88 | 32,73 | 34.23 |
| 3 | Berkurangnya Pelanggaran Penangkapan Ikan | 70.30 | 77.00 | 82.00 | 86,00 | 87.00 |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Wilayah Pesisir dan Laut | 7.40 | 8.50 | 9.00 | 10,23 | 10.00 |
| 5 | Meningkatnya Kesejahteraan Nelayandan Pembudidaya Ikan | 5.00 | 5.90 | 6.10 | 6,75 | 7.00 |
| 6 | Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelatihan Pemberdayaan Bidang Kelautan dan Perikanan | 500 | 835 | 1,45 | 1.430 | 1,500 |
| 7 | Meningkatnya Jumlah Produksi Benih Ikan di BBI | 107,452 | 167,395 | 133,05 | 423.720 | 1.700.000 |

Target-target yang tidak tercapai pada jumlah produksi perikanan tangkap (Laut dan Perairan umum) ini dikarenakan peralatan yang digunakan oleh nelayan masih bersifat tradisional, selain itu jangkauan penangkapan ikan masih dalam jalur 1 (laut kabupaten) dan faktor kondisi alam yang tidak dapat diprediksi, sehingga nelayan tidak bisa melaut, sedangkan target selanjutnya yang tidak tercapai adalah peningkatan jumlah produksi benih ikan di BBI, hal ini dikarenakan tidak semua jenis ikan yang dapat dipijahkan di BBI, hanya ikan-ikan tertentu yang memiliki kemampuan beradaptasi pada kondisi lingkungan perairan yang fluktuatif, selain itu juga jumlah tenaga teknis pembenihan yang ada



saat ini masih sangat terbatas, sehingga peningkatan jumlah produksi benih ikan sangatlah kecil.

Berbagai sarana dan prasana dalam mendukung peningkatan Produksi perikanan telah diadakan dan memperhatikan kondisi geografis Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memiliki potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang cukup besar. Untuk diketahui pada tahun 2013 pengadaan pompong di bawah 3 GT di perairan pantai sudah tidak lagi dianggarkan, akan tetapi program tersebut diganti dengan pengadaan kapal lebih dari 5 GT, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang himbuan penghentian bantuan kapal dibawah 3 GT. Akan tetapi walau demikian secara keseluruhan capaian program tersebut memenuhi target.

Tabel T.II.C.21. Perkembangan Produksi Ikan Menurut Sub Sektor di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015

| No | SUB SEKTOR | SATUAN | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------|-----------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Perairan Laut | Ton | 21.107,2 | 23.217,92 | 23.648 | 23.986,83 | 20.718,80 |
| 2 | Perairan Umum | Ton | 782,1 | 860,31 | 808,85 | 811,67 | 755,1 |
| 3 | Kolam | Ton | 1.024,80 | 1.512,60 | 2.035,70 | 2.108,30 | 1.345,10 |
| 4 | Tambak | Ton | 1.501,70 | 1.017,30 | 266 | 473,7 | 426,40 |
| 5 | Kerambah Jaring Apung (KJA) | Ton | 73,1 | 297 | 94,40 | 110,7 | 40,70 |
| 6 | Benih Ikan | Ekor | 107.452 | 167.395 | 133.050 | 423.720 | 493.296 |
| J U M L A H | | | 24.596,35 | 27.229,52 | 26.986,00 | 27.914,92 | 23.286,1 |

Beberapa kendala/hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang perikanan dan kelautan adalah : 1) Masih sering terjadinya pelanggaran jalur penangkapan; 2) Minimnya



pengetahuan dan keterampilan secara teknis baik nelayan umum petani ikan dalam budidaya usaha perikanan; 3) Kurangnya permodalan yang dapat disediakan dan belum dapat berkembangnya investor yang berusaha dibidang perikanan secara profesional; 4) Seringnya masyarakat yang menggunakan bahan penangkap ikan yang merusak lingkungan (*destruktif*); 5) Penanganan masalah pelanggaran hukum seperti perizinan, peraturan daerah, dan peraturan lainnya.

Berbagai solusi sebagai tindak lanjut dalam menanggulangi masalah-masalah di bidang perikanan dan kelautan, perlu mempertimbangkan agar dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: 1) Pengadaan kapal yang mempunyai kemampuan melaut pada jalur 2 (laut Provinsi); 2) Memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dibidang perikanan; 3) Memberikan bantuan secara berkala; 4) Pengawasan secara rutin dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan sumberdaya perikanan; 5) Memberikan pengertian kepada masyarakat tentang masalah perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan.

2.3.2.7. Perdagangan

Jumlah pasar (tradisional) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terbanyak adalah di Kecamatan Betara, sedangkan untuk 3 (tiga) Kecamatan tanpa pasar (tradisional) di atas maka transaksi jual beli barang, jasa dan informasi di lakukan pada kawasan tertentu dan menyatu dengan pemukiman penduduk dan dari 28 (dua puluh delapan) kepemilikan pasar yang ada, maka sebagian besar (71%) adalah pasar desa dan hanya sebagian kecil (7,1%) merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten sehingga berpengaruh pada pengalokasian anggaran pemeliharaan pasar tersebut.



Tabel T.II.C.22. Jumlah Pasar (Unit) Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015

| Kecamatan | Jumlah Pasar |
|----------------|--------------|
| Tungkal Ilir | 5 |
| Tungkal Ulu | 4 |
| Betara | 7 |
| Kuala Betara | 0 |
| Merlung | 4 |
| Bram Itam | 5 |
| Muara Papalik | 6 |
| Tebing Tinggi | 6 |
| Batang Asam | 7 |
| Renah Mendaluh | 6 |
| Senyerang | 5 |
| Pengabuan | 5 |
| Seberang Kota | 7 |
| Jumlah | 67 |

2.3.2.8. Industri

Dapat dilihat bahwa IKM potensial di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tumbuh 3,5% dari 1.144 pada tahun 2011 menjadi 1.184 pada tahun 2014 dengan pertumbuhan serapan tenaga kerja IKM Potensial 1,4% dan diiringi dengan peningkatan nilai produksi serta investasi yang tentu saja akan berpengaruh positif terhadap transaksi jual/beli yang menguntungkan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tabel T.II.C.23. Perkembangan Industri di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 sampai dengan 2014

| No | Jenis Industri | Jumlah Industri | Jumlah Tenaga Kerja | 2015 | | |
|----|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | | Nilai Investasi (Rp 000) | Nilai Produksi (Rp 000) | Nilai Bahan Baku (Rp 000) |
| 1 | IKM potensial | 1.236 | 3.080 | 3.407.567 | 170.949.867 | 10.242.512 |
| 2 | Industri Menengah Besar | 3 | 198 | 2.398.000 | 182.354.160 | 11.573.020 |



| JUMLAH | | 1.239 | 3.278 | 5.805.567 | 353.304.027 | 21.815.532 |
|--------|-------------------------|-------|-------|-----------|-------------|------------|
| 2014 | | | | | | |
| 1 | IKM potensial | 1.184 | 2.969 | 3.285.613 | 169.512.187 | 9.735.476 |
| 2 | Industri Menengah Besar | 3 | 180 | 2.180.000 | 165.776.509 | 10.520.927 |
| JUMLAH | | 1.187 | 3.149 | 5.465.613 | 335.288.696 | 20.256.403 |
| 2013 | | | | | | |
| 1 | IKM potensial | 1.164 | 2.909 | 3.055.620 | 166.188.419 | 9.248.702 |
| 2 | Industri Menengah Besar | 3 | 163 | 2.180.000 | 138.147.091 | 9.994.881 |
| JUMLAH | | 1.167 | 3.072 | 5.235.620 | 304.335.510 | 19.243.583 |
| 2012 | | | | | | |
| 1 | IKM potensial | 1.184 | 2.766 | 2.750.058 | 163.140.480 | 8.786.267 |
| 2 | Industri Menengah Besar | 3 | 122 | 2.176.425 | 132.115.048 | 9.595.085 |
| JUMLAH | | 1.187 | 2.888 | 4.926.483 | 295.255.528 | 18.381.352 |
| 2011 | | | | | | |
| 1 | IKM potensial | 1.144 | 2.925 | 2.695.057 | 73.833.742 | 8.346.954 |
| 2 | Industri Menengah Besar | 3 | 91 | 2.133.750 | 134.152.716 | 9.307.233 |
| JUMLAH | | 1.147 | 3.016 | 4.828.807 | 207.986.458 | 17.654.187 |

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa permasalahan yaitu 1) Minimnya kegiatan sosialisasi sehingga Kemampuan/daya pikir masyarakat dan pelaku tentang hak mereka serta tata niaga yang berlaku di Pasar masih sangat lemah; 2) Belum maksimalnya penerapan sistem perlindungan Konsumen.

Solusi yang dilakukan guna meminimalisir permasalahan diatas, antara lain : 1) Peningkatan kapasitas sosialisasi yang lebih intensif dan tepat sasaran; 2) Penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan konsumen; 3) Meningkatkan kemampuan Aparatur Negara; 4) Meningkatkan dukungan dan koordinasi dari berbagai pihak dalam



penegakan UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2.3.2.9. Ketransmigrasian

Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan salah satu instrumen untuk mendorong pembangunan desa melalui pemenuhan standar pelayanan minimum, khususnya desa-desa dan kawasan perdesaan di daerah tertinggal dan perbatasan, pulau-pulau terluar, kepulauan, dan pesisir serta pengembangan keterkaitan desa dan kota di kawasan yang dipersiapkan sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB).

Berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15/1997 Tentang Ketransmigrasian, kebijakan penyelenggaraan transmigrasi diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan kawasan, serta memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya. Dengan demikian, pembangunan kawasan transmigrasi mencakup penataan kembali kawasan perdesaan, melalui kegiatan penempatan transmigran, baik transmigran lokal penduduk setempat, maupun penduduk dari daerah lain. Selain itu, pembangunan kawasan transmigrasi bersifat lintas sektor, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, kebijakan pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya membentuk satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Pembangunan kawasan transmigrasi sekaligus untuk mengintegrasikan upaya penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya tampung alam



dan lingkungan. Dengan demikian, pembangunan transmigrasi merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan kota-kota kecil terutama di luar pulau jawa, untuk meningkatkan motor penggerak pembangunan daerah.

Kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang merupakan salah satu instrumen pembangunan desa dan kawasan pedesaan diharapkan mampu menjadi pengungkit pengembangan ekonomi wilayah di sekitarnya. Satuan Permukiman (SP) atau desa dari Program Transmigrasi Baru dibangun pada lokasi yang dekat dengan desa yang sudah berkembang sebelumnya untuk membentuk Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) transmigrasi atau kawasan pedesaan. Dalam upaya mendorong pengembangan ekonomi wilayah, desa-desa tersebut berfungsi sebagai pusat produksi primer dan industri pengolahan ringan yang terbagi menjadi 2 jenis desa yaitu desa pendukung sebagai pusat produksi primer dan desa utama sebagai pusat industri pengolahan ringan dan pusat pelayanan kawasan pedesaan.

Pada suatu kawasan transmigrasi yang terdiri dari beberapa Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) transmigrasi, dapat diarahkan menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB) sebagai pusat kegiatan lokal dan embrio kota kecil yang mempunyai karakteristik perkotaan, seperti berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan. Dalam upaya meningkatkan hulu dan hilir, KPB tersebut akan memasarkan hasil-hasil produksi di wilayahnya di kota kecil/ kota menengah di sekitarnya.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

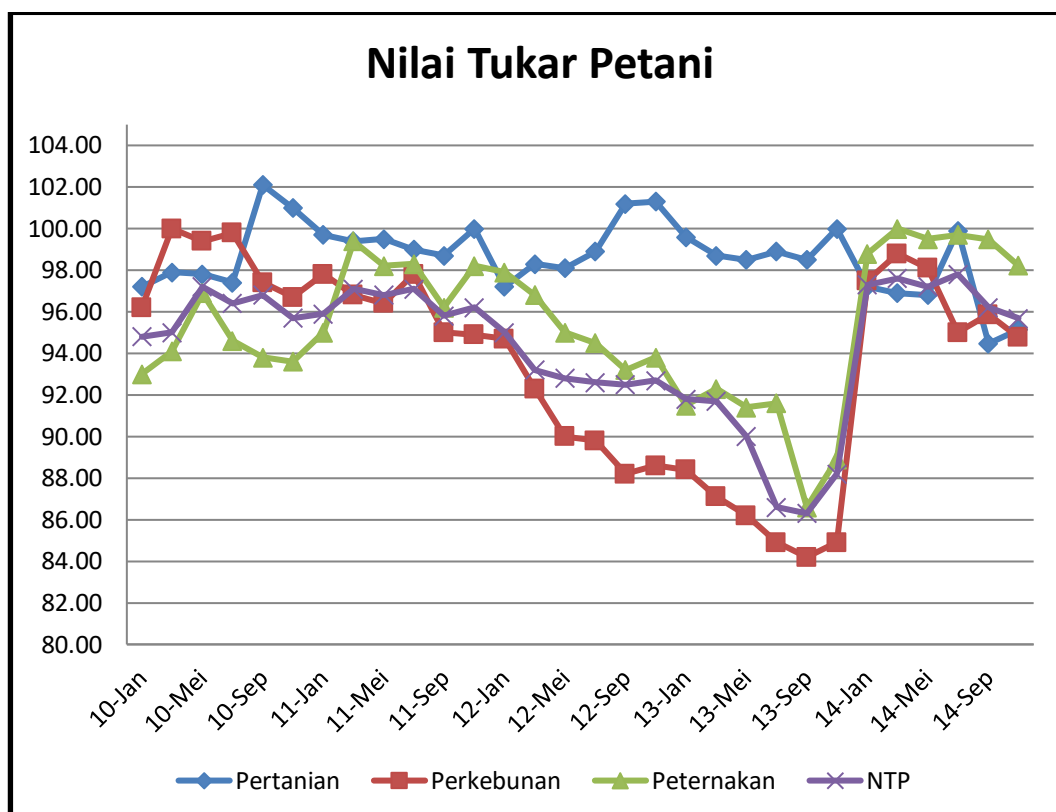
2.4.1. FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

2.4.1.1. Nilai Tukar Petani (NTP)

Salahsatu indikator yang biasa digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan petani di pedesaan pada tahun tertentu dibandingkan dengan kondisi pada tahun dasar. Nilai tukar petani adalah persentase



dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). Nilai tukar petani juga merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan atau kemampuan daya beli petani



2.4.1.2. . Pengeluaran rata-rata per kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Rata-rata pengeluaran per kapita diperoleh dari hasil pengolahan raw data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Berdasarkan hasil SUSENAS tahun 2015 disimpulkan bahwa 97,96 persen penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk



kedalam golongan pengeluaran 1.500.000+ rupiah, Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk sebulan untuk makanan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 393.723 rupiah. Sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk sebulan untuk bukan makanan sebesar 358.927 rupiah.

Pengeluaran terbesar untuk kelompok makanan dalam sebulan berasal dari kelompok makanan dan minuman jadi sebesar 80.062 rupiah. Sementara, pengeluaran terbesar untuk kelompok bukan makanan berasal dari kelompok perumahan dan fasilitas perumahan sebesar 180.137 rupiah.

| Kelompok Makanan Food Class | Rata-Rata Pengeluaran Average Expenditure |
|---|--|
| (1) | (2) |
| Padi-Padian <i>Paddy</i> | 57.808 |
| Umbi-Umbian <i>Tubers</i> | 4.587 |
| Ikan/UDang/Cumi/Kerang <i>Fish/Shrimp/Squid/Cockle Shells</i> | 41.140 |
| Daging <i>Meat</i> | 12.981 |
| Telur dan Susu <i>Egg and Milk</i> | 22.537 |
| Sayuran <i>Vegetables</i> | 30.553 |
| Kacang-Kacangan <i>Nuts</i> | 6.562 |
| Buah-Buahan <i>Fruits</i> | 19.075 |
| Minyak dan Kelapa <i>Oil and Coconut</i> | 14.908 |
| Bahan Minuman <i>Drink</i> | 17.509 |
| Bumbu-Bumbuan <i>Cooking Spices</i> | 8.414 |
| Konsumsi Lainnya <i>Others</i> | 10.266 |
| Makanan dan Minuman Jadi <i>Food and Beverage</i> | 80.062 |
| Rokok <i>Cigarette</i> | 67.320 |
| Jumlah/Total | 393.722 |

Sumber/Source: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret/National Socioeconomic Survey, March



| Kelompok Makanan <i>Food Class</i> | Rata-Rata Pengeluaran <i>Average Expenditure</i> |
|--|---|
| (1) | (2) |
| Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga <i>Housing and Household Facility</i> | 180.137 |
| Aneka Barang dan Jasa <i>Goods and Services</i> | 70.294 |
| Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala <i>Clothes, Foot Wear, Headgear</i> | 29.352 |
| Barang Tahan Lama <i>Durable goods</i> | 62.414 |
| Pajak, Pungutan, dan Asuransi <i>Tax and Insurances</i> | 7.538 |
| Keperluan Pesta, dan Upacara <i>Party and Ceremony Necessity</i> | 9.192 |
| Jumlah/Total | 358.927 |

Sumber/Source: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret/National Socioeconomic Survey, March

2.4.2. FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR

Tabel T.II.C.24. Rasio panjang jalan menurut jenis permukaan

| NO | URAIAN / KONDISI JALAN | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | Km | Km | Km | Km | Km |
| I | JENIS PERMUKAAN | | | | | |
| A | Diaspal | 627,86 | 753,77 | 826,18 | 860,35 | 0 |
| B | Kerikil | 531,85 | 455,44 | 672,78 | 630,64 | 646,84 |
| C | Tanah | 576,68 | 580,36 | 294,39 | 330,62 | 317,63 |
| | JUMLAH I | 1.736,40 | 1.789,58 | 1.806,11 | 1.821,61 | 964,47 |

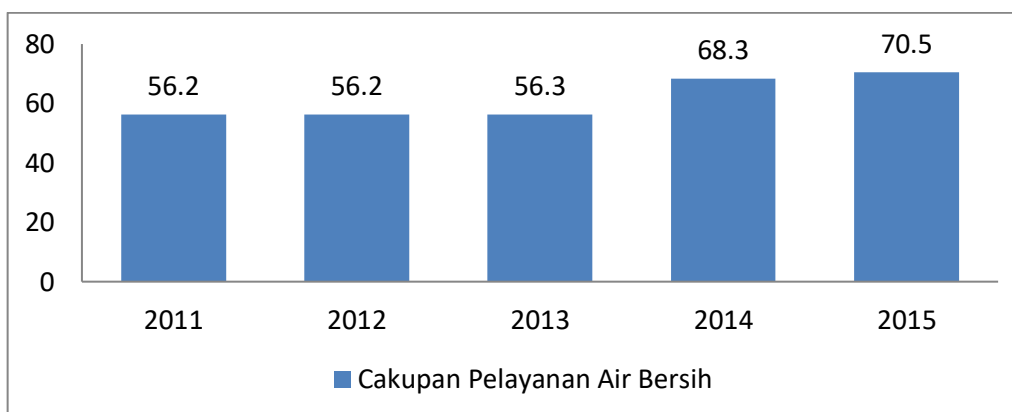
2.4.2.2. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih

Cakupan pelayanan air bersih mengalami peningkatan pada tahun 2015 dari tahun 2014 sebesar 70.5% disebabkan karena pesatnya



pembangunan fisik sarana air bersih baik yang didanai oleh APBN maupun APBD serta adanya peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hidup bersih dan sehat.

Grafik G.II.63 Cakupan Pelayanan Air Bersih



Berdasarkan uraian di atas dan sejalan dengan implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat optimis dapat mencapai target MDG's (tujuan pembangunan millenium) pada tahun 2015, karena program yang dilaksanakan selama ini sudah dalam jalur yang tepat, dan tetap dilaksanakan secara berkesinambungan.

2.4.2.11. Rasio ketersediaan daya listrik

Tabel T.II.C.25. Panjang Jaringan Listrik Di Kecamatan 2011-2015

| No. | Pekerjaan | Lokasi (kecamatan) | Volume (Km) | | | | |
|---------------|------------|--------------------|--------------|------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Pemasangan | Tebing Tinggi | 1,5 | - | - | - | - |
| | | Tungkal Ilir | 3,145 | 0,2 | 5 | 3,492 | 2.945 |
| | | Bram Itam | 1,3 | - | 2,4 | - | 1.027 |
| | | Betara | - | 1,5 | 6,05 | 0,390 | 4.939 |
| | | Muara Papalik | - | - | 1 | - | - |
| | | Merlung | - | - | 2 | - | 0,165 |
| | | Senyerang | - | - | 3,1 | 8,900 | 3,18 |
| | | Batang Asam | - | - | 1,55 | 3,700 | 1,05 |
| | | Pengabuan | - | - | - | 5,500 | 1,06 |
| | | Renah Mendaluh | - | - | - | 11,500 | - |
| Jumlah | | | 5,945 | 1,7 | 21,1 | 33,482 | 14,366 |



Tabel T.II.C.26. **Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik**

| NO | URAIAN | CAPAIAN | | | | |
|----|----------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Ratio Electricity Kecamatan | 69,23 | 69,23 | 69,23 | 76,92 | 92,3 |
| 2 | Ratio Electricity Desa/Kelurahan | - | 51,57 | 51,57 | 56,72 | 65,67 |
| 3 | Ratio Electricity Rumah Tangga | 30,97 | 37,88 | 43,19 | 44,58 | 50,96 |
| 4 | PLTS | - | - | 93 | 12 | - |

2.4.3. FOKUS IKLIM BERINVESTASI

2.4.3.1. Angka Kriminalitas

Permasalahan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara keseluruhan masuk dalam kategori aman dan terkendali, namun demikian persoalan yang sering muncul dalam masa 5 tahun terakhir adalah konflik sengketa lahan, konflik buruh, konflik daerah perbatasan dan terakhir sejumlah kekerasan dalam rumah tangga, Imigran gelap dan kriminalitas sedangkan kekerasan mengatasnamakan agama, radikalisme dan terorisme sebagaimana yang terjadi di daerah lain belum kelihatan kepermukaan

2.4.3.2. Jumlah Demo

Kondisi umum kemajemukan masyarakat Jambi yang sebagian kecil masih memiliki tingkat kerawanan konflik, dampak implementasi otonomi daerah masih ada yang belum tuntas, kebijakan publik secara keseluruhan belum menyentuh kepentingan publik, masih terjadi kesenjangan sosial ekonomi secara signifikan, masih rendahnya kondisi hukum dan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum, pelanggaran HAM, dampak negatife dari keterbukaan ditandai dengan unjuk rasa yang



berakibat anarkhisme di sebagian daerah, merosotnya etika dan moral, menguatnya fenomena korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang berdampak terhambatnya perwujudan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) disamping permasalahan diatas, kondisi kehidupan masyarakat masih dihadapkan makin rendahnya kesadaran masyarakat untuk memahami pentingnya kelestarian lingkungan, tingginya angka kriminalitas, illegal logging dan sebagainya yang semuanya ini memberikan gambaran tentang semakin beratnya tugas petayanan yang akan diemban aparaturnya Pemerintah Daerah khususnya aparaturnya Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.4.3.3. Lama proses perijinan

Ada penurunan jumlah perijinan dan non perijinan yang dikeluarkan oleh KPPT, hal ini dimungkinkan karena rendah dan kurangnya pengertian masyarakat akan pentingnya legalitas perijinan dan Non Perijinan yang mereka miliki dan masih minimnya kami melakukan kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran.

Tabel T.II.C.27. Jenis – jenis izin

| NO | JENIS IZIN | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|---|------|------|------|------|------|
| | I. PERIJINAN | | | | | |
| 1 | Surat Ijin Tempat Usaha (SITU); | 486 | 934 | 305 | 306 | 306 |
| 2 | Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet; | 47 | 193 | 23 | 25 | 25 |
| 3 | Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); | 225 | 254 | 44 | 96 | 96 |
| 4 | Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah; | 31 | 59 | 13 | 24 | 24 |
| 5 | Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); | 314 | 680 | 282 | 346 | 346 |
| 6 | Ijin Undang Undang Gangguan/Hider Ordonatic (HO); | 502 | 529 | 283 | 320 | 320 |
| 7 | Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC); | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | Ijin Pemanfaatan Air Limbah (Land Application); | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ijin Mengadakan Riset/Penelitian; | 17 | 38 | 58 | 52 | 52 |
| 10 | Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); | 374 | 524 | 238 | 212 | 212 |
| 11 | Ijin Usaha Industri (IUI); | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| | | | | | | |
|----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12 | Tanda Daftar Perusahaan (TDP); | 372 | 588 | 247 | 219 | 219 |
| 13 | Tanda Daftar Gudang (TDG); | 10 | 20 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Tanda Daftar Industri (TDI); | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Ijin Prakter Dokter; | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ijin Praktek Dokter Gigi; | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ijin Kerja Perawat; | 59 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ijin Perawat Gigi; | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ijin Praktek Bidan; | 44 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ijin Praktek ahli Gizi; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ijin Pengobatan Tradisional Menetap; | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ijin Pengobatan Tradisional yang tidak menetap; | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ijin Kerja Asisten Apoteker; | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ijin Kerja Apoteker; | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ijin Trayek Angkot/Angdes dalam kabupaten; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ijin Penggunaan Jalan diluar kepentingan lalu lintas; | 118 | 172 | 117 | 104 | 104 |
| 27 | Ijin Usaha Ketenaga Listrikan untuk kepentingan sendiri; | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Ijin Usaha Ketenaga Listrikan untuk kepentingan umum; | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah; | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 30 | Ijin Pengambilan Air Permukaan; | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | Ijin Mendirikan Bangunan Menara; | 0 | 21 | 5 | 5 | 5 |
| 32 | Ijin Usaha Perikanan (IUP) Penangkapan; | 0 | 19 | 18 | 41 | 41 |
| 35 | Ijin Praktek Perawat; | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ijin Optical; | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Ijin Toko Obat; | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Ijin Apotek; | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 40 | Ijin Klinik Bersalin; | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 43 | Ijin Kerja Bidan; | 20 | 30 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Ijin Usaha Dunia Fantasi; | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 56 | Ijin Hotel Bintang dan Melati; | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 57 | Ijin Usaha Rumah Makan, Bar, dan Restoran; | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Ijin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata; | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 83 | Ijin Reklame; | 7 | 12 | 9 | 6 | 6 |
| 84 | Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); | 0 | 48 | 56 | 46 | 0 |
| 85 | Ijin Lokasi | 0 | 0 | 0 | 24 | 46 |
| | b. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasional Produksi | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | JUMLAH | 2.671 | 4.343 | 1.717 | 1.856 | 1.828 |

Sumber : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Tanjung Jabung Barat



Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu selama tahun 2015, diantaranya : 1) Masih terbatasnya kemampuan SDM aparatur Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melakukan proses pelayanan perizinan; 2) Kelembagaan yang masih berstatus kantor sehingga koordinasi dengan SKPD teknis berkaitan dengan perizinan masih belum optimal; 3) Aturan/regulasi daerah yang berkaitan dengan perizinan yang masih lemah; 4) Kurang optimalnya peran tim teknis dalam proses pelayanan perizinan; 5) Kondisi Geografis yang masih sulit terjangkau sehingga masyarakat yang jauh untuk mengurus perizinan menjadi kendala; 6) Letak bangunan KPPT yang kurang strategis. KPPT merupakan salah satu instansi pelayanan publik di bidang perizinan yang idealnya secara administratif mudah dipahami, jelas, transparan, pasti dan secara tata letak kantor juga mudah dilihat publik, dengan sarana parkir yang lebih luas.

2.4.3.4. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah,

Tabel T.II.C.28. Realisasi Pajak Daerah Berdasarkan Jenis Penerimaan Kabupaten Tanjung jabung Barat tahun 2011-2015

| No. | Jenis Penerimaan Pajak Daerah | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | Pajak Hotel | 94.942.000 | 158.963.800 | 193.616.100 | 204.790.000 | 110.673.000,00 |
| 2 | Pajak Restoran | 616.814.210 | 1.014.616.117 | 1.014.292.600 | 1.866.235.915 | 2.033.101.636,38 |
| 3 | Pajak Hiburan | 11.952.500 | 3.603.000 | 81.477.000 | 13.295.000 | 3.390.000,00 |
| 4 | Pajak Reklame | 201.499.205 | 287.203.100 | 253.773.362 | 272.278.740 | 298.982.438,00 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | 1.962.729.161 | 3.187.076.674 | 8.794.917.972 | 8.504.007.974 | 9.813.131.246,00 |
| 6 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 1.510.716.118 | 2.149.796.874 | 1.373.925.094 | 800.997.937,95 | 400.863.780,25 |
| 7 | Pajak Air Bawah Tanah | 5.465.959 | 7.922.275 | 18.814.400 | 17.113.525 | 16.895.690,00 |
| 8 | Pajak Sarang Walet | 323.096.000 | 237.520.000 | 133.960.000 | 98.250.000 | 140.495.000,00 |
| 9 | PBB P2 | | | | 4.372.359.029 | 4.635.475.076,00 |
| 10 | Pajak BPHTB | 3.727.334.328 | 939.855.623 | 240.821.650 | 4.556.278.620 | 2.199.833.385,00 |
| | Jumlah Pajak Daerah | 8.454.549.481 | 7.986.557.463 | 12.105.598.178 | 20.705.606.741 | 19.652.841.251,63 |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



**Realisasi Retribusi Daerah Berdasarkan Jenis Penerimaan Kabupaten
Tanjung jabung Barat tahun 2011-2015**

| No | Jenis Penerimaan Retribusi Daerah | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Retribusi Jasa Umum | 4.588.969.005 | 6.843.010.126 | 7.377.806.677 | 16.395.275.679 | 19.001.524.066,- |
| 2 | Retribusi Jasa Usaha | 227.039.350 | 213.939.233 | 303.000.940 | 234.599.900 | 620.261.710,- |
| 3 | Retribusi Perizinan Tertentu | 515.756.798 | 1.508.110.331 | 1.122.508.263 | 1.247.556.436 | 1.230.391.096,- |
| Jumlah Retribusi Daerah : | | 5.331.765.153 | 8.565.059.690 | 8.803.315.881 | 17.877.432.015 | 20.852.176.872,- |

Tabel T.II.C.29
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat

| No | Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interprestasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>) |
|-----------|---|-----------------|------------|------------|------------|------------|---------|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 1) | KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | | | | |
| 1.1. | Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi | | | | | | | |
| 1.1.1. | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Pertumbuhan PDRB (dengan migas) | 7,64 | 4,95 | 5,73 | 5,85 | 3,98 | | |
| 1.1.1.2 | Pertumbuhan PDRB (non migas) | 8,51 | 7,47 | 8,25 | 9,42 | 6,02 | | |
| 1.1.1.2 | Laju inflasi | 2,76 | 4,30 | 2,50 | 3,37 | 3,50 | | |
| 1.2. | Kesejahteraan Sosial | | | | | | | |
| 1.2.1 | Pendidikan | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Angka melek huruf | - | 97,93 | 98,17 | 98,21 | 97,25 | | |
| 1.2.1.2 | Angka rata-rata lama sekolah | 11,11 | 11,27 | 11,42 | 11,58 | 11,,19 | | |
| 2) | PELAYANAN UMUM | | | | | | | |
| 2.1 | Pelayanan Urusan Wajib | | | | | | | |
| 2.1.1 | Pendidikan | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | Pendidikan dasar | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1 | Angka partisipasi sekolah 7-12 | - | - | 99,15 | 99,40 | 100 | | |
| 2.1.1.1.2 | Angka partisipasi sekolah 13-15 | - | - | 86,90 | 91,10 | 95,79 | | |
| 2.1.1.1.3 | Angka partisipasi sekolah 16-18 | - | - | 51,50 | 71,76 | 64,69 | | |
| 2.1.1.1.4 | Rasio ketersediaan Sekolah Dasar (SD)/penduduk usia sekolah | - | 171,4 | 172,7 | 176,5 | 210 | | |
| 2.1.1.1.5 | Rasio ketersediaan sekolah Menengah Pertama (SMP)/penduduk usia sekolah | - | 270,5 | 264,9 | 272,0 | 273,8 | | |
| 2.1.1.1.6 | Rasio guru SD terhadap murid | - | 15,2 | 16,6 | 15,5 | 15,1 | | |
| 2.1.1.1.7 | Rasio guru SMP terhadap murid | - | 10,8 | 11,8 | 12,2 | 13,4 | | |
| 2.1.2 | Kesehatan | | | | | | | |
| 2.1.2.1 | Rasio posyandu per satuan balita (kelahiran) | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | | |
| 2.1.2.2 | Rasio puskesmas per satuan penduduk | 17,87 5 | 18,37 5 | 18,84 2 | 19,34 9 | 19,43 2 | | |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| | | | | | | | | |
|---------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| 2.1.2.3 | Rasio poliklinik per satuan penduduk | 22.00 0 | 21.00 0 | 23.19 0 | 23.81 4 | 23.91 6 | | |
| 2.1.2.4 | Rasio pustu per satuan penduduk | 4269 | 4388 | 4500 | 4621 | 4442 | | |
| 2.2 | Pelayanan Urusan Pilihan | | | | | | | |
| 2.2.1 | Pertanian | | | | | | | |
| 2.2.1.1 | Produktivitas padi sawah per hektar (kw / Ha) | 37,82 | 38,85 | 39,62 | 40,10 | 40,35 | | |
| 2.2.1.2 | Produktivitas padi ladang per hektar (kw / Ha) | 24,12 | 24,75 | 35,00 | 32,46 | 35,88 | | |
| 2.2.1.3 | Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB | | 18,68 | 20,37 | 22,11 | 35,52 | | |
| 3) | DAYA SAING DAERAH | | | | | | | |
| 3.1 | Kemampuan Ekonomi | | | | | | | |
| 3.1.1 | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | | | | | | | |
| 3.1.1.1 | Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (per bulan) | - | - | - | - | 393.7 22 | | |
| 3.1.1.2 | Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (per bulan) | - | - | - | - | 358.9 27 | | |
| 3.1.1.3 | Produktivitas total daerah | - | - | - | - | - | | |
| 3.1.2 | Pertanian | | | | | | | |
| 3.1.2.1 | Nilai tukar petani | - | - | - | - | - | | |
| 3.2 | Fasilitas Wilayah/Infrastruktur | | | | | | | |
| 3.2.1 | Perhubungan | | | | | | | |
| 3.2.1.1 | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (yang datang dan berangkat melalui terminal pembengis) | 0,65 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,55 | | |
| 3.2.1.2 | Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (kapal) | 441.3 78 | 473.2 45 | 383.4 12 | 332.1 28 | 342.9 38 | | |
| 3.2.1.3 | Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (kapal) | 9.608 | 12.24 0 | 10.05 5 | 6.802 | 7.551 | | |
| 3.2.2 | Penataan Ruang | | | | | | | |
| 3.2.2.1 | Ketaatan terhadap RTRW | - | - | - | - | - | | |
| 3.2.2.2 | Luas wilayah produktif | - | - | - | - | - | | |



BAB III

Gambaran Keuangan Daerah

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD pada hakikatnya merupakan salah satu instrument kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat didaerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas - tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil dimasyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam : (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan



terdiri dari Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, Aspek Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dan Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.



**Tabel T.III.C.1. Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2011 – 2015
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

| No | Uraian | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Rata-rata Pertumbuha n (%) |
|-------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| 1. | Pendapatan | | | | | | |
| 1.1. | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | | | | |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | 8.454.549.481 | 7.986.557.463 | 12.105.598.178 | 20.705.606.741 | 19.652.841.251 | 28,00% |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah | 5.331.765.153 | 8.565.059.690 | 8.803.315.881 | 17.877.432.015 | 17.201.000.018 | 40,68% |
| 1.1.3 | Hasil Pengelola Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 3.096.606.734 | 3.456.463.122 | 3.885.492.330 | 7.600.111.256 | 9.137.022.728 | 34,96% |
| 1.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah | 27.128.968.732 | 32.768.169.639 | 38.750.848.587 | 44.765.725.381 | 22.033.623.774 | 0,95% |
| 1.2 | Dana Perimbangan | 779.209.669.564 | 874.142.279.305 | 959.691.444.356 | 908.800.115.384 | 716.830.046.715 | -1,11% |
| 1.3 | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 75.682.871.711 | 71.022.806.975 | 87.789.365.779 | 115.683.019.772 | 146.472.442.041 | 18,96% |
| 2 | Belanja | | | | | | |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | | | | | | |
| 2.1.1 | Belanja pegawai | 36.345.371.641 | 41.728.237.650 | 66.048.365.000 | 81.588.937.498 | 64.425.690.390 | 18,90% |
| 2.1.2 | Belanja Bunga | - | - | - | - | - | |
| 2.1.3 | Belanja Subsidi | 2.124.240.000 | 2.253.000.000 | 2.802.233.700 | 2.803.000.000 | 7.000.000.000 | 45,05% |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 16.303.369.500 | 1.060.000.000 | 8.923.500.000 | - | 3.712.710.000 | 196,65% |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten TanjungPabungBaratTahun2016-2021**

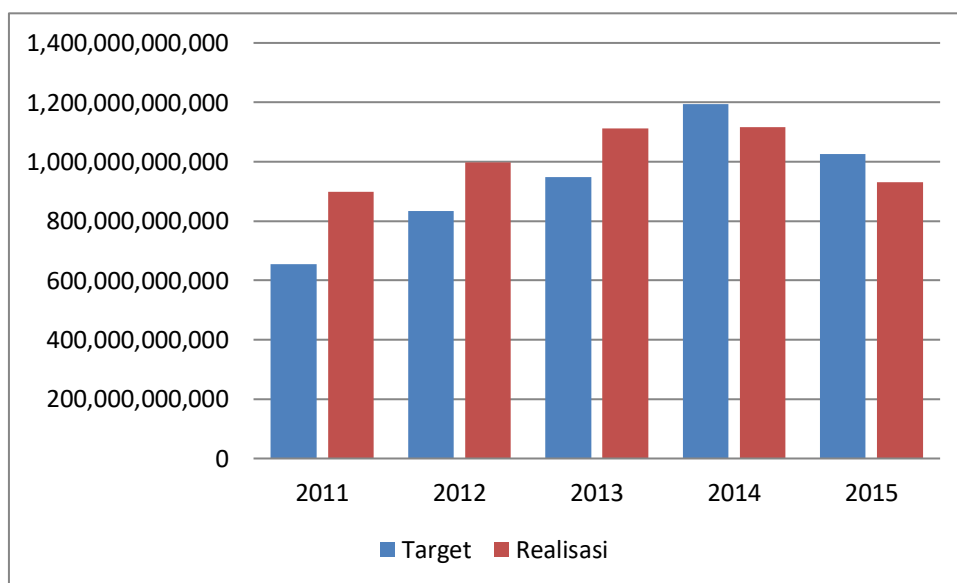


| No | Uraian | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Rata-rata Pertumbuha n (%) |
|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 10.605.428.100 | 10.615.340.000 | 2.128.750.000 | 3.464.750.000 | - | -5,70% |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah, Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa | 270.750.600 | 571.584.600 | 571.584.600 | 571.584.600 | 628.749.000 | 30,28% |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan pada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa & Partai Politik | 13.499.998.800 | 17.727.389.375 | 20.543.776.100 | 62.032.908.093 | 128.006.032.340 | 88,88% |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 205.120.400 | 905.221.000 | 340.500.000 | 536.000.000 | 2.513.378.353 | 176,31% |
| | | | | | | | |
| 2.2 | Belanja Langsung | | | | | | |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 36.345.371.641 | 41.728.237.650 | 66.048.365.000 | 81.588.937.498 | 64.425.690.390 | 18,90% |
| 2.2.2 | Belanja barang dan jasa | 149.688.993.894 | 212.884.239.061 | 236.391.227.654 | 219.708.693.594 | 165.872.208.201 | 5,42% |
| 2.2.3 | Belanja modal | 231.974.352.931 | 272.130.430.518 | 555.954.513.196 | 597.803.375.739 | 225.111.185.556 | 16,70% |
| | | | | | | | |
| 3 | Pembiayaan | | | | | | |
| 3.1.1 | Pembiayaan daerah | | | | | | |



Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan target Pendapatan meningkat rata - rata sebesar 22,34% setiap tahun selama kurun waktu tahun 2011 - 2015. Secara lebih rinci yaitu, pada tahun 2011, ditetapkan target Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar Rp.654.237.648.490,-, kemudian pada tahun 2012 meningkat sebesar 27,28% menjadi Rp.832.703.489.579,-. Selanjutnya pada tahun 2013, terjadi peningkatan target Pendapatan Daerah sebesar 13,92% menjadi Rp.948.584.111.796,-, dan pada tahun 2014 meningkat 25,81% menjadi Rp.1.193.420.339.203,-, kemudian pada tahun 2015 sedikit mengalami penurunan sehingga menjadi Rp.1.024.895.044.261,-

Grafik G.III.1. Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 - 2015



Pada periode yang sama, realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus meningkat yaitu rata - rata 7,58% per tahun. Untuk lebih rinci penjelasannya yaitu: Pada tahun 2011 realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah Rp.898.904.431.375,-, kemudian tahun 2012 terjadi peningkatan 11,02% menjadi Rp.997.941.536.194,-. Selanjutnya pada tahun 2013 naik sebesar



11,33% menjadi Rp.1.111.026.065.111,- dan menjadi Rp.1.115.432.010.50,- pada tahun 2014 atau meningkat 0,40%. Namun pada tahun 2015, realisasi pendapatan daerah mengalami penurunan sehingga menjadi Rp 931.326.976.528,87.

Perbandingan antara realisasi suatu pendapatan dengan target yang ditetapkan disebut efektifitas (Halim, 2007). Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri N0.690.900-327 Tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, Standarisasi Tingkat Efektivitas ditetapkan sebagai berikut (Medi, 1996 dalam Lalu Karyawan, 2002):

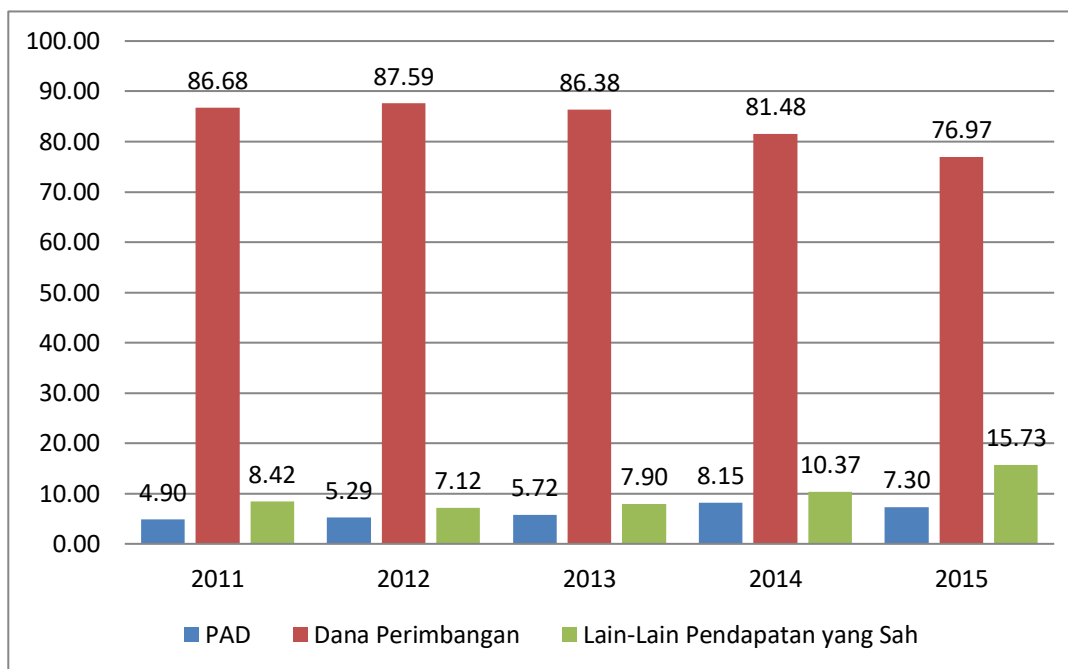
- a. Koefisien efektifitas bernilai di atas 100% berarti sangat efektif.
- b. Koefisien efektifitas bernilai antara 90- 100% berarti efektif
- c. Koefisien efektifitas bernilai antara 80- 90% berarti cukup efektif.
- d. Koefisien efektifitas bernilai antara 60- 80% berarti kurang efektif.
- e. Koefisien efektifitas bernilai di bawah 60% berarti tidak efektif.

Pendapatan Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011 - 2014 memiliki tingkat efektifitas yang sangat efektif kecuali pada tahun 2014 tingkat efektifitas Pendapatan Daerah adalah efektif (93,47%).

Pendapatan Daerah dibagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sepanjang tahun 2011-2015 selalu didominasi oleh Dana Perimbangan yaitu rata - rata sebesar 85,53% per tahun. Meskipun demikian, proporsi Dana Perimbangan dalam Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011 - 2014 terus mengecil yaitu dari 86,68% tahun 2011 menjadi 81,48% tahun 2014. Tahun 2015 proporsi komponen dana perimbangan sebesar 76,97%.



**Grafik G.III.2. Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015**



Komponen penyumbang Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedua sepanjang tahun 2011 - 2015 adalah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah, yaitu rata - rata sebesar 8,45% per tahun. Selama tahun 2011 - 2014, proporsi Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berfluktuasi dengan kecenderungan naik yaitu tahun 2011 sebesar 8,42% menjadi 7,12% tahun 2012 dan 7,90% tahun 2013 serta menjadi 10,37% tahun 2014. Tahun 2015 meningkat menjadi 15,73%.

Selanjutnya, komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sepanjang tahun 2011 - 2014 yang terkecil adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu rata - rata hanya sebesar 6,01% per tahun. Namun demikian, proporsi PAD dalam Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011 - 2015 meningkat setiap tahun yaitu mulai dari 4,90 % tahun 2011 menjadi 8,15% tahun 2014. Pada tahun 2015 proporsi PAD sebesar 7,30%



A. Pendapatan Asli Daerah

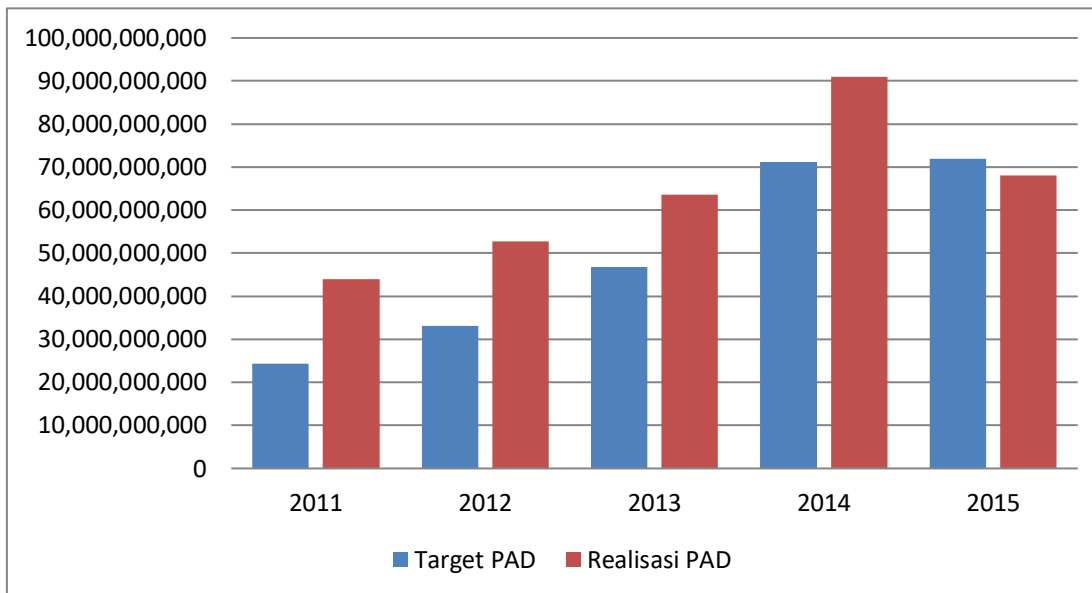
Berdasarkan Undang - undang Nomor 23 tahun 2014, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun sumber Pendapatan Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain - lain Pendapatan Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Daerah yang sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah pelaksanaannya diorientasikan dan berbasiske pada potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian otonomi suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (*fiscal gap*).

Setiap tahun selama tahun 2011 - 2015, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan penerimaan PAD selalu meningkat, yaitu rata - rata sebesar 43,27% pertahun, seperti terlihat pada Grafik berikut ini.



Grafik G.III.3. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015

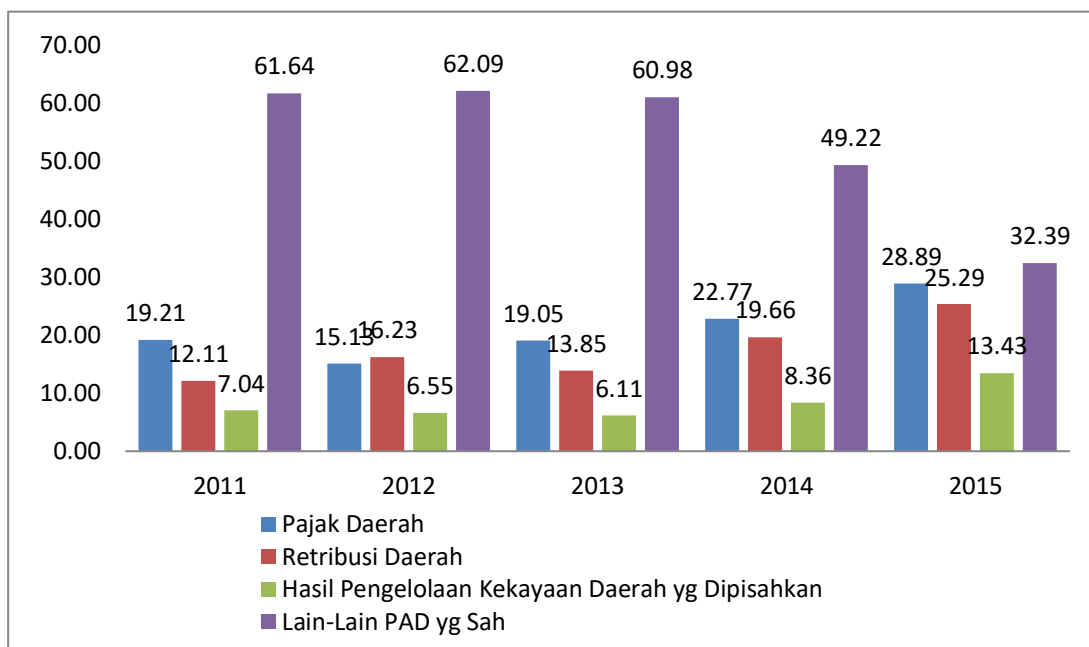


Begitu pula dengan realisasi PAD, setiap tahun selama tahun 2011-2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berhasil merealisasikan penerimaan PAD yang selalu meningkat, yaitu dari Rp.44.011.890.100,- tahun 2011 meningkat menjadi Rp.68.024.094.647,- tahun 2015 atau rata - rata naik sebesar 35,23% pertahun. Selain itu, realisasi PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011 - 2015 selalui melebihi target yang ditetapkan yaitu rata - rata sebesar 139,77 % atau kategori sangat efektif.

Komponen PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sepanjang tahun 2011-2015 selalu didominasi oleh lain - lain Pendapatan Asli Daerah yaitu rata - rata sebesar 58,48% per tahun. Meskipun demikian, proporsi Lain - lain Pendapatan Asli Daerah dalam PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011 - 2015 mengecil yaitu 61,64 % tahun 2011 menjadi 32,39% tahun 2015.



Grafik G.III.4. Proporsi Komponen PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015



Pajak Daerah menempati posisi kedua sebagai komponen penyumbang PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu tahun 2011 - 2015, yaitu rata - rata sebesar 19,04% per tahun. Meskipun sedikit berfluktuasi, namun kecendrungan naik yaitu 19,21% tahun 2011 meningkat menjadi 28,89% tahun 2015.

Kemudian sebagai komponen penyumbangan PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat selanjutnya adalah Retribusi Daerah dengan rata - rata 15,46% pertahun. Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sepanjang tahun tersebut berfluktuasi dengan kecendrungan meningkat yaitu pada tahun 2011 sebesar 12,11% meningkat pada tahun 2015 menjadi 25,29%. Selanjutnya komponen penyumbangan PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terkecil adalah Hasil Pengelola Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan rata-ratas ebesar 7,01%.

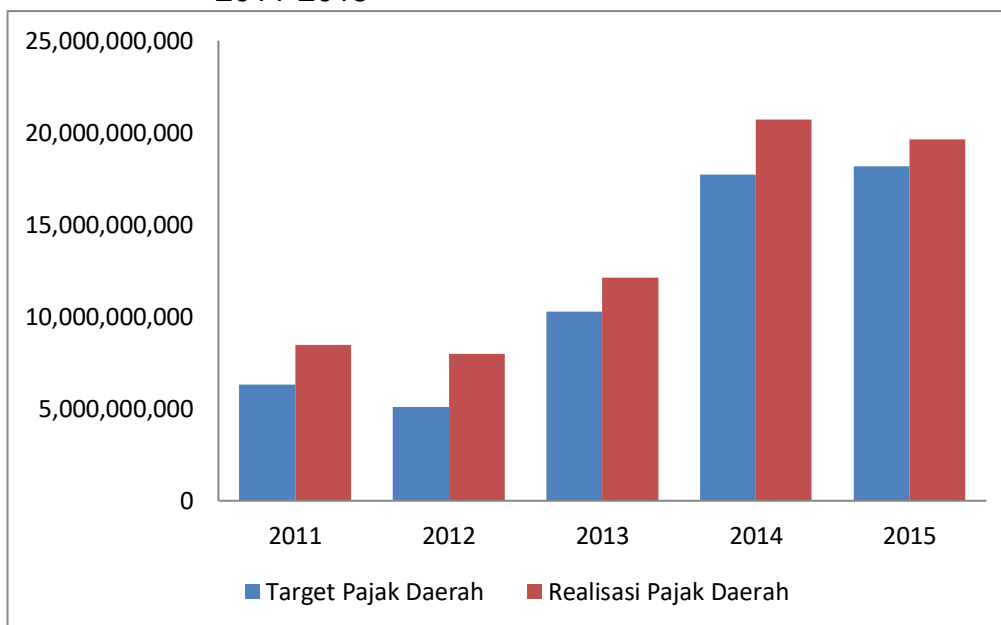


A.1.Pajak Daerah

Dalam menentukan targetnya ini, Pemerintah Daerah menempuh berbagai cara dalam menetapkan target pendapatan Pajak Daerah. Adapun cara - cara tersebut antara lain adalah:

1. Melihat potensi wajib Pajak Daerah yang ada di wilayah tersebut.
2. Pertumbuhan perolehan Pajak Daerah dari tahun ke tahun.
3. Rata-rata penerimaan Pajak Daerah pada periode-periode sebelumnya.
4. Prediksi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang yang memiliki dampak langsung terhadap pemungutan Pajak Daerah.

Grafik G.III.5.Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015



Target yang ditetapkan untuk Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat setiap tahun meningkat selama tahun 2011 - 2015 kecuali tahun 2012 dimana targetnya malah menurun. Adapun target Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2011 sebesar Rp. 6.322.850.000,- meningkat menjadi Rp. 18.183.200.000,- pada tahun 2015 atau meningkat signifikan rata-rata sebesar 51,65%per tahun.



Begitu pula dengan realisasi Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat setiap tahun meningkat selama tahun 2011 - 2015 kecuali tahun 2012 realisasinya menurun. Pada tahun 2011, realisasi Pajak Daerah sebesar Rp.8.454.549.481,- meningkat pada tahun 2015 menjadi Rp.19.652.841.251,- atau meningkat rata - rata sebesar 39,03% pertahun. Selain itu, realisasi Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011 - 2015 selalu melebihi target yang ditetapkan, berarti setiap tahun pemungutan Pajak Daerah sangat efektif.

Pajak daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah.

Dari beragam jenis Pajak Daerah tersebut, selama periode tahun 2011-2014 ternyata Pajak Penerangan Jalan memberi kontribusi sangat dominan terhadap Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu rata - rata 44,21% pertahun. Selanjutnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah memberi kontribusi terbesar kedua terhadap Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu rata - rata 19,96% per tahun, dan selanjutnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar rata - rata 15,00% per tahun.

A.2. Retribusi Daerah

Pemerintah Daerah menetapkan target pendapatan Retribusi Daerah dengan cara - cara antara lain adalah:

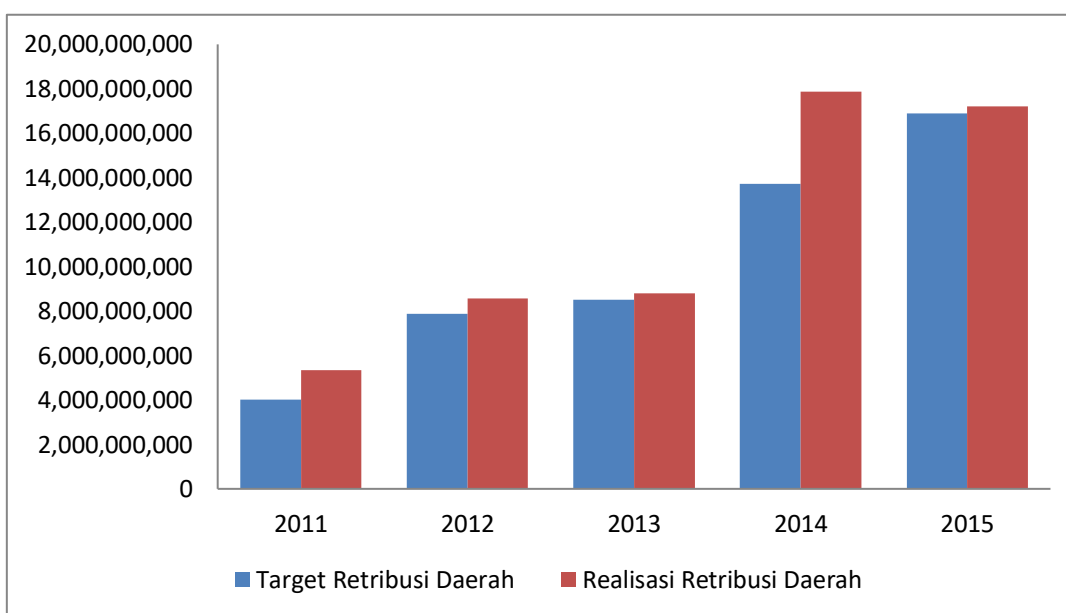
1. Melihat potensi wajib Retribusi Daerah yang ada di wilayah tersebut
2. Pertumbuhan perolehan Retribusi Daerah dari tahun ketahun
3. Rata - rata penerimaan Retribusi Daerah pada periode - periode sebelumnya



4. Prediksi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang yang memiliki dampak langsung terhadap pemungutan Retribusi Daerah

Setiap tahun target Retribusi Daerah Kabupaten TanjungJabung Barat ditetapkan meningkat signifikan selama tahun 2011 - 2015 dengan rata - rata sebesar 55,36% pertahun. Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp.4.002.000.000,- sedangkan pada tahun 2015 menjadi Rp.16.902.831.912,-

Grafik G.III.6. Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015



Selanjutnya, untuk capaian realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011 - 2015 selalu meningkat signifikan yaitu rata - rata sebesar 55,50% pertahun. Capaian realisasi retribusi Daerah Kabupaten TanjungJabung Barat tahun 2011 sebesar Rp.5.331.765.153,- sedangkan pada tahun 2015 naik menjadi Rp.17.201.000.018,-. Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011 - 2015 selalu lebih tinggi dari target yang



ditetapkan, yang berarti tingkat efektivitas Retribusi Daerah adalah sangat efektif.

Pada tahun 2011 - 2015, Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dari beragam jenis Retribusi Daerah tersebut, ternyata Retribusi Jasa Umum kontribusinya sangat dominan terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu rata - rata 85,37% pertahun. Selanjutnya Retribusi Perizinan Tertentu memberi kontribusi terbesar kedua terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu rata - rata 11,75% per tahun, dan terakhir adalah Retribusi Jasa Usaha memberi kontribusi rata - rata 2,88 % per tahun.

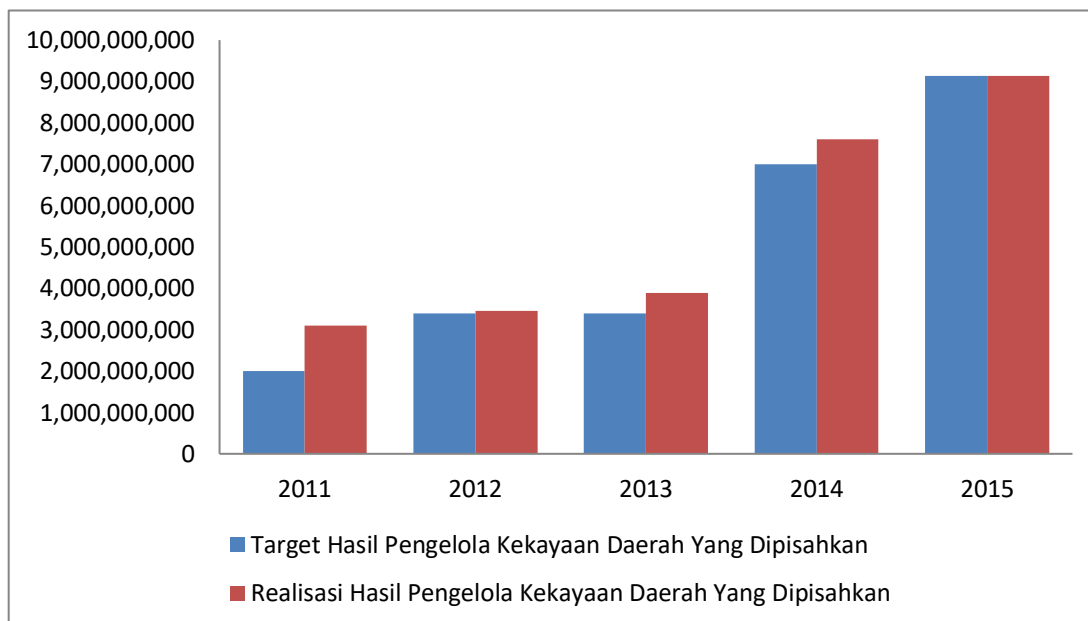
A.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat setiap tahun ditargetkan meningkat signifikan selama tahun 2011 - 2015 dengan rata - rata sebesar 58,64% pertahun. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011 ditargetkan Rp.2.000.000.000,- sedangkan pada tahun 2015 naik menjadi Rp.9.913.657.757,-

Selama tahun 2011 - 2015, setiap tahun capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selalu meningkat yaitu rata - rata 39,88% pertahun. Capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2015 sebesar Rp. 9.137.022.728,- lebih besar dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp.3.096.606.734,-. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011 - 2015 selalu melampaui dari target yang ditetapkan, yang berarti tingkat efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sangat efektif.



Grafik G.III.7. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 - 2015

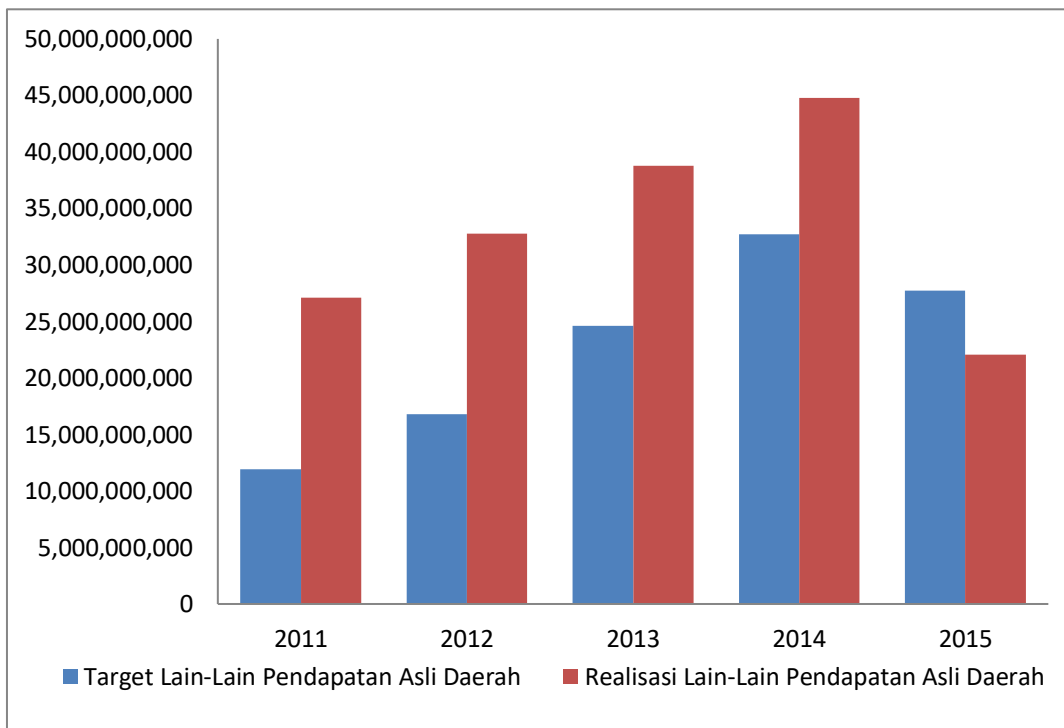


A.4. Lain-lain PAD

Salah satu sumber utama PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Lain - lain PAD. Pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Lain - lain PAD setiap tahun ditargetkan meningkat selama tahun 2011-2014 dengan rata - rata sebesar 40,03% per tahun. Target Lain - lain PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011 sebesar Rp.11.936.700.000, sedangkan pada tahun 2014 bertambah menjadi sebesar Rp. 32.700.579.491,-



Grafik G.III.8. Lain - lain PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2015



Kemudian untuk realisasi Lain - lain PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011 - 2015 selalu naik setiap tahun dengan rata - rata kenaikan sebesar 18,19% pertahun. Pada tahun 2011 realiasasi Lain - lain PAD sebesar Rp. 27.128.968.732,- naik pada tahun 2015 menjadi Rp.22.033.623.774,-. Sepanjang tahun 2011-2015, realisasi Lain-lain PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat selalu diatas target yang ditetapkan, yang berarti tingkat efektivitas Lain - lain PAD adalah sangat efektif.

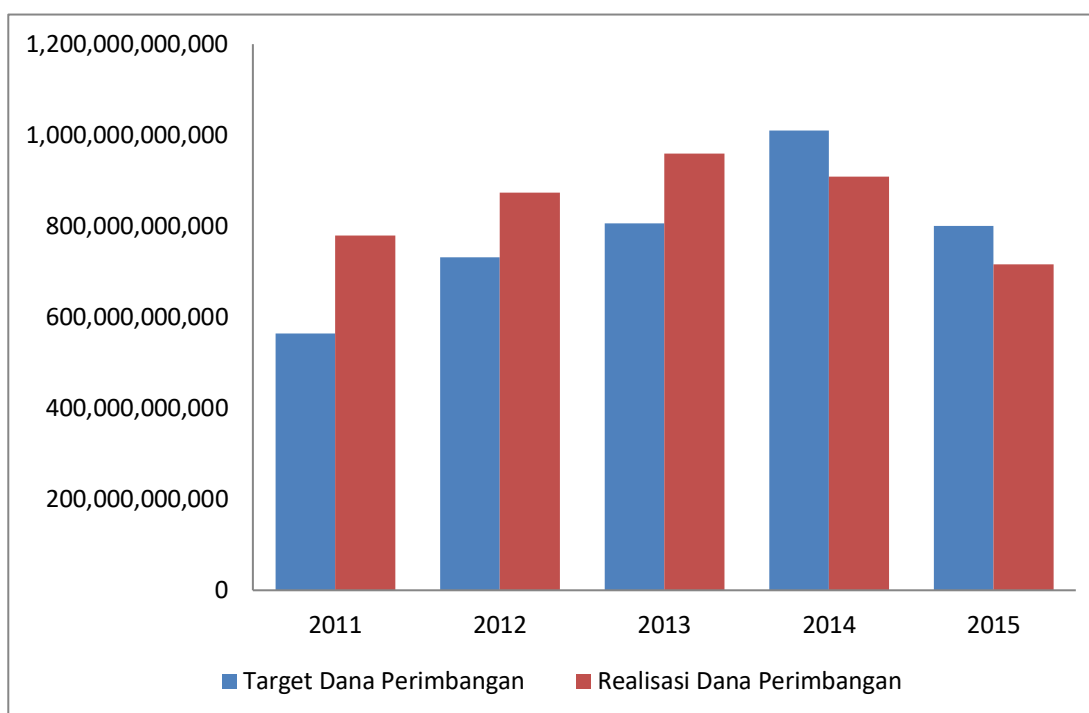
B. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan selalu sebagai sumber utama Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode waktu tahun 2011 - 2015. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menargetkan Dana Perimbangan setiap tahun selalu naik. Target Dana Perimbangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk tahun 2015 sebesar Rp.800.436.245.351,- jauh meningkat dibandingkan target



Dana Perimbangan tahun 2011 yang sebesar Rp.564.552.286.686,-, yang berarti rata - rata meningkat 21,73% per tahun.

**Grafik G.III.9. Dana Perimbangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2011 - 2015**



Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berhasil meningkat setiap tahunnya mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Realisasi Dana Perimbangan untuk tahun 2015 berhasil mencapai Rp. 716.830.046.715,- menurun dibandingkan dengan realisasi Dana Perimbangan tahun 2011 (Rp.779.209.669.564,-) atau secara rata - rata bertambah 5,56% pertahun. Jika dibandingkan antara target dan realisasi, maka tingkat efektivitas Dana Perimbangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011 – 2015 adalah sangat efektif, kecuali pada tahun 2015 dimana realisasi Dana Perimbangan dibawah target yang ditetapkan dengan kategori cukup efektif (89,55%).

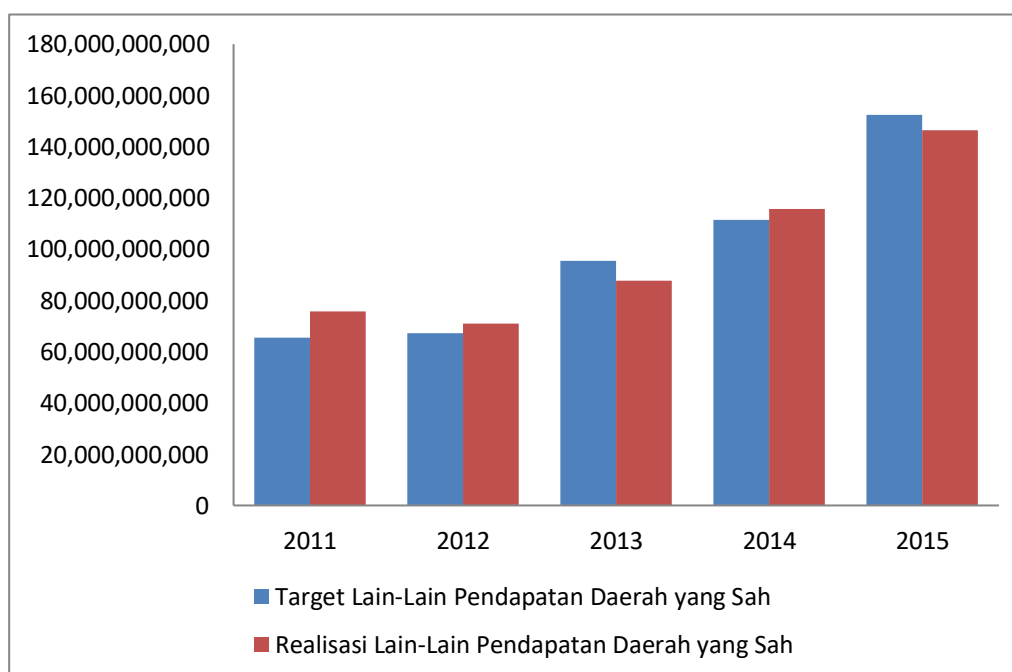


C. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menargetkan setiap tahun untuk Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah selalu naik. Dimana target Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2015 sebesar Rp.152.514.704.263,- sangat besar dibandingkan target Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2011 yaitu Rp.65.423.811.804,-. Secara rata - rata Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Barat meningkat sebesar 20,50% per tahun selama periode tahun 2011 - 2015.

Untuk realisasi Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga naik setiap tahunnya mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Adapun realisasi Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk tahun 2015 mencapai Rp.146.472.442.041,- meningkat tajam dibandingkan dengan realisasi Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2011 yang hanya sebesar Rp.75.682.871.711,- atau secara rata - rata meningkat 16,41% pertahun.

**Grafik G.III.10. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 - 2015**





Jika dibandingkan antara target dan realisasi, maka tingkat efektivitas Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011 - 2015 adalah sangat efektif, kecuali pada tahun 2013 dimana realisasi Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah dibawah target yang ditetapkan dengan kategori efektif (91,88%).

3.1.1.2. Belanja Daerah

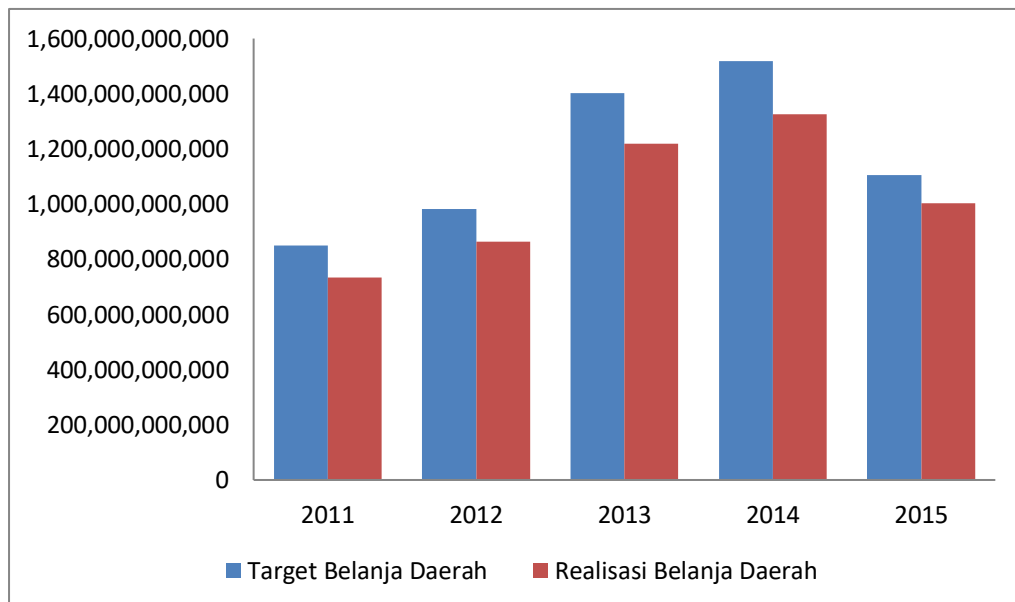
Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang - undangan.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.



Pada periode waktu tahun 2011 - 2015, Belanja Daerah untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditargetkan tiap tahunnya selalu bertambah. Target Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2015 sebesar Rp.1.104.258.808.882,-jauh lebih besar dibandingkan target Belanja Daerah tahun 2011 yang hanya Rp.850.862.567.808,-. Secara rata - rata Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat meningkat sebesar 22,18% pertahun selama periode tahun 2011 - 2015.

Grafik G.III.11. Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 - 2015

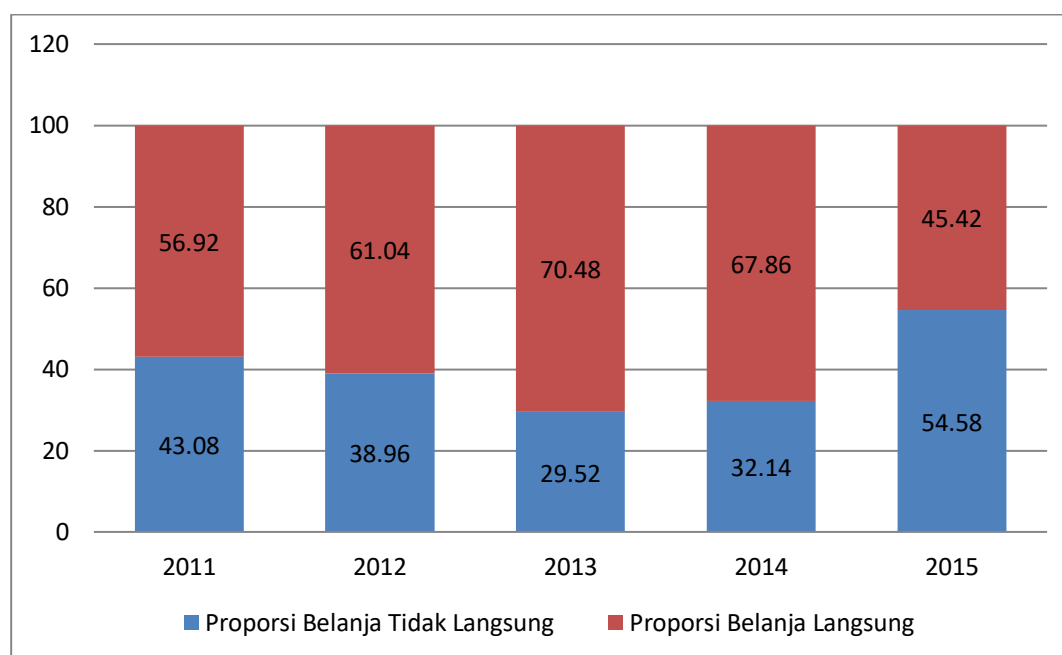


Untuk realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga selalu naik setiap tahunnya mulai tahun 2011 - 2015. Adapun realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk tahun 2015 mencapai Rp.1.002.765.518.262,- meningkat tajam dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah tahun 2011 yang sebesar Rp.734.435.264.423,- atau secara rata – rata meningkat 22,48% pertahun. Namun demikian, jika dibandingkan antara target dan realisasi, maka realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011 - 2015 selalu



dibawah target. Berdasarkan kondisi ini, maka tingkat efektivitas Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011-2015 adalah cukup efektif dengan capaian sebesar 87,84%.

**Grafik G.III.12 Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 - 2015**



Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Proporsi Belanja Langsung di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011 - 2015 selalu lebih besar setiap tahunnya dibandingkan dengan Belanja Tidak Langsung. Proporsi Belanja Langsung di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011-2015 terdapat kecenderungan menurun, yaitu tahun 2011 sebesar 56,92% menurun menjadi 45,42% tahun 2015. Sedangkan proporsi Belanja Tidak Langsung kecenderungan naik, yaitu 43,08% tahun 2011 menurun menjadi 54,58% tahun 2015. Secara rata - rata Belanja Langsung di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011-2015 adalah 60,34% pertahun sedangkan Belanja Tidak Langsung rata - rata sebesar 39,66% pertahun.



A. Belanja Tidak Langsung

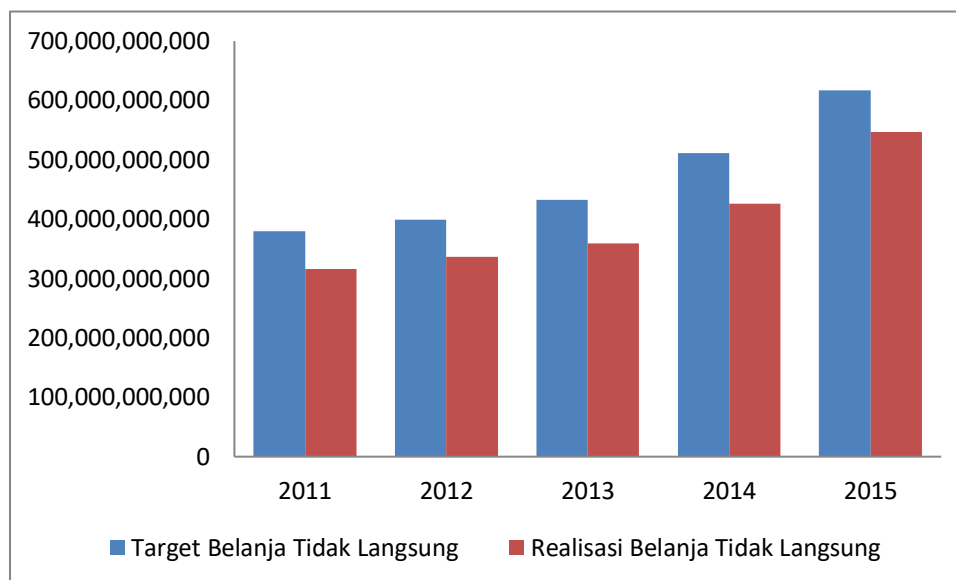
Perkembangan target Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode tahun 2011 - 2015 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2011, target Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebesar Rp.379.379.915.593,- kemudian target tersebut bertambah menjadi Rp.617.281.901.463,- pada tahun 2015, atau rata - rata target Belanja Tidak Langsung setiap tahunnya bertambah sebesar 10,59%.

Selanjutnya, perkembangan realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada waktu yang sama juga menunjukkan peningkatan. Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2015 adalah sebesar Rp. 547.356.434.115,- lebih besar dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 yaitu Rp. 316.426.545.957,- atau secara rata - rata realisasi Belanja Tidak Langsung setiap tahunnya bertambah sebesar 10,55%.

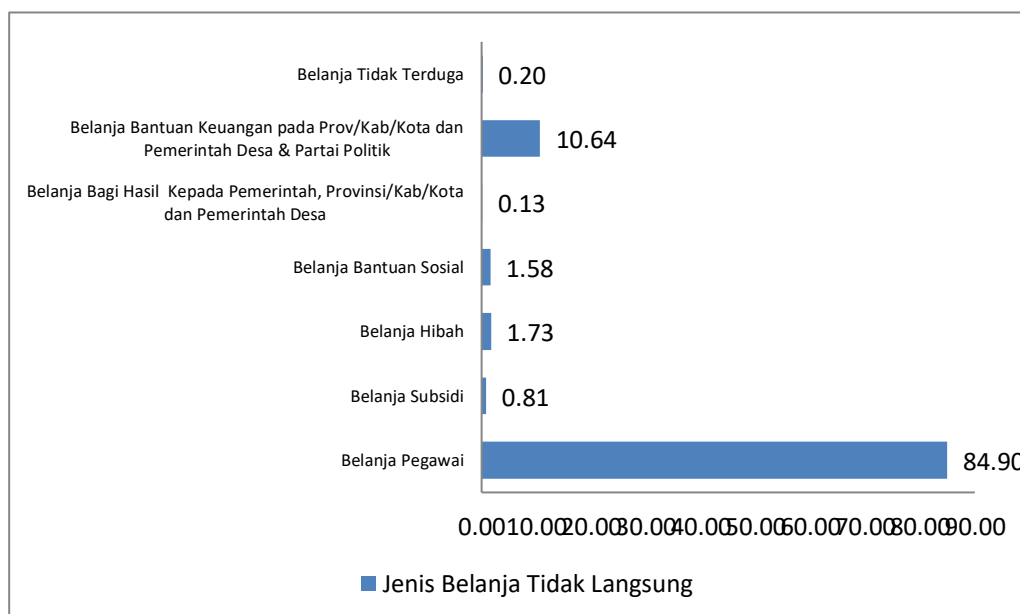
Namun jika dibandingkan target dengan realisasi, maka terlihat bahwa realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat sepanjang tahun 2011 - 2015 selalu tidak pernah mencapai target. Berarti tingkat efektivitas Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada periode tersebut rata - rata adalah 84,53% yaitu masuk kategori cukup efektif.



**Grafik G.III.13. Belanja Tidak Langsung
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 - 2015**



**Grafik G.III.14. Proporsi Jenis Belanja Tidak Langsung
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 - 2015**



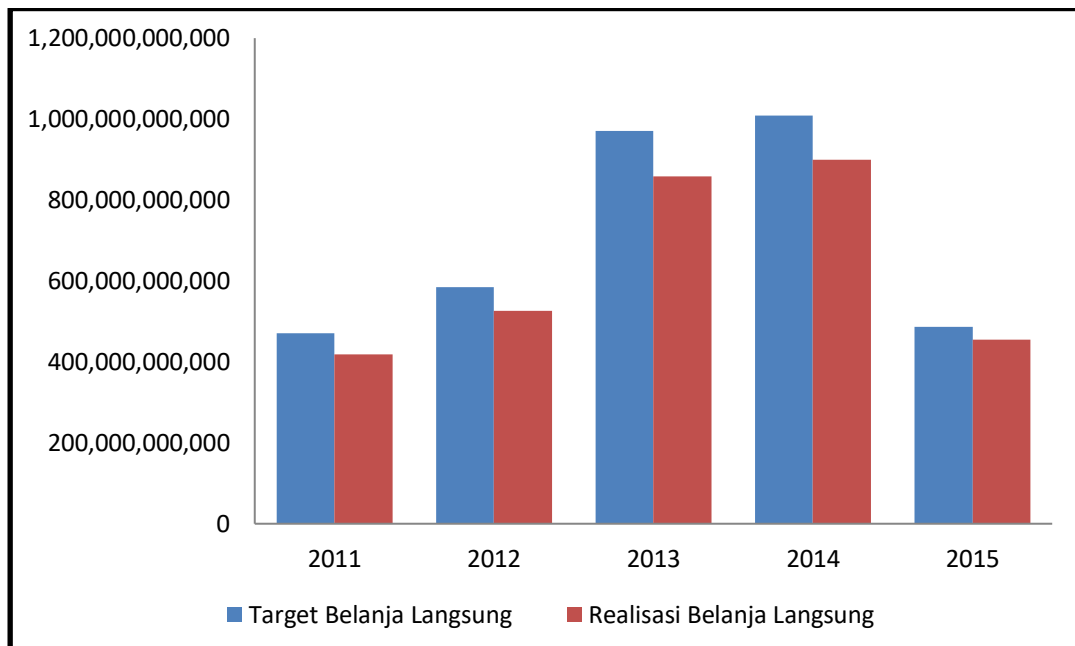


Selama tahun 2011 - 2015, jenis Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terbesar adalah Belanja Pegawai yaitu rata - rata sebesar 84,90% pertahun, sedangkan sisanya untuk Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah, Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik, dan Belanja Tidak Terduga

B. Belanja Langsung

Perkembangan target Belanja Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada periode tahun 2011 - 2015 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2011, target Belanja Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Rp.471.482.652.215,- kemudian bertambah menjadi Rp. 486.976.907.419,- pada tahun 2015, atau rata - rata target Belanja Langsung setiap tahunnya bertambah sebesar 28,35%.

Grafik G.III.15. Belanja Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 - 2015

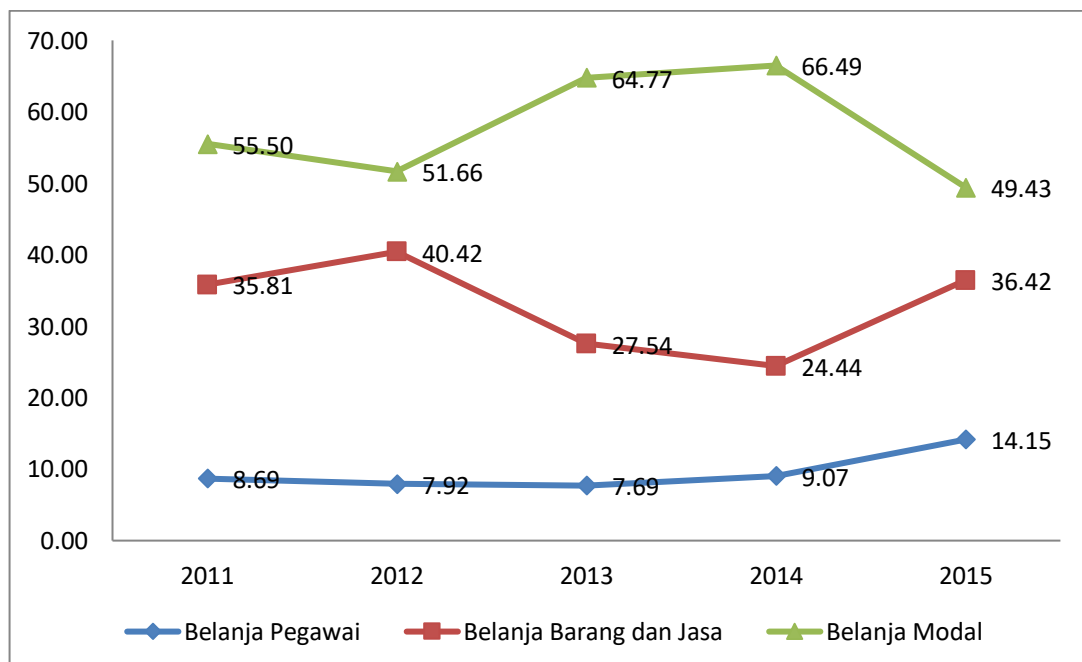




Selanjutnya, perkembangan realisasi Belanja Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada waktu yang sama juga mengalami peningkatan. Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2015 adalah Rp.455.409.084.147,- lebih besar dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 yaitu Rp.418.008.718.466,- atau secara rata - rata realisasi Belanja Langsung setiap tahunnya bertambah sebesar 31,24%.

Jika dibandingkan target dengan realisasi, maka terlihat bahwa realisasi Belanja Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat sepanjang tahun 2011 – 2015 selalu dibawah target. Berarti tingkat efektivitas Belanja Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada periode tersebut rata – rata adalah 90,01% yaitu masuk kategori efektif.

**Grafik G.III.16. Proporsi Jenis Belanja Langsung
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2015**





Selama tahun 2011 - 2015, jenis Belanja Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terbesar adalah Belanja Modal yaitu rata - rata sebesar 57,57% pertahun, sedangkan sisanya untuk Belanja Barang dan Jasa rata - rata sebesar 32,92% pertahun, dan Belanja Pegawai rata - rata 9,51% pertahun.

3.1.2 Neraca Daerah

3.1.2.1 Analisis Neraca

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing - masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber - sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat dimasa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang.



Tabel T.III.C.2. Neraca Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 - 2015

| NO | URAIAN | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Rata-rata Pertumbuhan |
|----|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | A S E T | | | | | | |
| 2 | ASET LANCAR | | | | | | |
| 3 | Kas di Kas Daerah | 359.810.294.042,74 | 481.788.969.896,97 | 453.669.196.816,39 | 113.838.423.227,73 | 9.994.693.986,44 | -34,52% |
| 4 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 705.909.949,00 | 608.584.288,00 | 1.323.959.605,00 | 461.141.809,00 | 370.110.508,00 | 4,71% |
| 5 | Kas Lainnya di Bendahara Keuangan | 0,00 | 0,00 | 11.544.679,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Kas di Bendahara Penerimaan | 0,00 | 376.052.679,00 | 157.207.098,00 | 4.956.000,00 | 15.524.000,00 | 19,40% |
| 7 | Investasi Jangka Pendek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Piutang Pajak | 54.484.094,00 | 4.757.134.510,00 | 3.654.802.034,00 | 12.520.157.910,00 | 14.020.606.038,00 | 2215,65% |
| 9 | Piutang Retribusi | 1.495.184.940,00 | 843.924.194,00 | 1.785.841.314,00 | 1.408.698.671,00 | 2.782.129.507,00 | 36,11% |
| 10 | Piutang Tranfer | 7.940.088.597,00 | 8.972.238.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00% |
| 10 | Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.649.750,00 | 62.649.750,00 | 0,00% |
| 11 | Piutang Lainnya | 120.502.800,00 | 74.509.750,00 | 5.486.934.986,00 | 11.261.200.976,00 | 2.294.615.850,00 | 1812,87% |
| 12 | Persediaan | 2.655.948.569,00 | 6.748.965.944,60 | 11.525.417.359,50 | 9.794.009.986,60 | 15.407.162.380,00 | 66,79% |
| 13 | Jumlah Aset Lancar | 372.782.412.991,74 | 504.170.379.760,57 | 477.614.903.891,89 | 149.351.238.330,33 | 45.324.973.337,15 | -27,10% |
| 14 | INVESTASI JANGKA PANJANG | | | | | | |
| 15 | Investasi Non Permanen | 2.819.786.100,00 | 2.819.786.100,00 | 3.233.480.000,00 | 3.660.780.000,00 | 3.660.780.000,00 | 6,97% |
| 16 | Investasi Permanen | 50.578.896.500,00 | 58.167.378.814,00 | 80.868.109.049,87 | 91.918.859.377,57 | 91.918.859.377,57 | 16,92% |
| 17 | Jumlah Investasi Jangka Panjang | 53.398.682.600,00 | 60.987.164.914,00 | 84.101.589.049,87 | 95.579.639.377,57 | 95.579.639.377,57 | |
| 18 | ASET TETAP | | | | | | |
| 19 | Tanah | 508.720.169.040,00 | 513.272.972.890,00 | 129.528.283.102,50 | 131.857.389.102,50 | 131.230.014.102,50 | -18,14% |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| NO | URAIAN | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Rata-rata Pertumbuhan |
|----|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 20 | Peralatan dan Mesin | 162.098.417.822,00 | 225.576.118.517,00 | 270.123.411.693,00 | 311.404.769.328,00 | 346.368.785.638,55 | 21,35% |
| 21 | Gedung dan Bangunan | 358.181.739.151,41 | 436.599.938.971,92 | 561.781.256.473,92 | 668.532.029.092,06 | 688.202.180.019,05 | 18,13% |
| 22 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 998.634.673.976,73 | 1.135.685.691.120,74 | 1.508.059.749.766,54 | 1.944.650.034.487,76 | 2.336.310.715.318,99 | 23,90% |
| 23 | Aset Tetap Lainnya | 62.251.115.946,00 | 64.496.279.246,00 | 65.620.504.046,00 | 55.700.068.824,00 | 17.091.836.075,75 | -19,77% |
| 24 | Konstruksi dalam Pengerjaan | 275.007.977.241,23 | 267.661.289.541,23 | 274.319.896.126,23 | 296.979.971.326,23 | 295.686.699.879,56 | 1,91% |
| 25 | Akumulasi Penyusutan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.093.739.096.910,99) | - |
| 26 | Jumlah Aset Tetap | 2.364.894.093.177,37 | 2.643.292.290.286,89 | 2.809.433.101.208,19 | 3.409.124.262.160,55 | 2.721.151.134.123,41 | 4,81% |
| 27 | DANA CADANGAN | | | | | | |
| 28 | Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 29 | Jumlah Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 30 | ASET LAINNYA | | | | | | |
| 31 | Aset Tidak Berwujud | 49.874.000,00 | 49.874.000,00 | 913.374.000,00 | 913.374.000,00 | 913.374.000,00 | 432,84% |
| 32 | Aset Lain-lain | 105.681.750,00 | 0,00 | 74.509.750,00 | 0,00 | | -29,50% |
| 33 | Jumlah Aset Lainnya | 155.555.750,00 | 49.874.000,00 | 987.883.750,00 | 913.374.000,00 | 913.374.000,00 | 451,32% |
| 34 | JUMLAH ASET | 2.791.230.744.519,11 | 3.208.499.708.961,46 | 3.372.137.477.899,95 | 3.654.968.513.868,45 | 2.862.969.120.838,13 | 1,69% |
| 35 | K E W A J I B A N | | | | | | |
| 36 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | | | | |
| 37 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 0,00 | 5.449.778.760,00 | 15.429.742.425,00 | 4.531.142.045,00 | 141.929.657,00 | 5,21% |
| 38 | Utang Kepada Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 102.692.351.732,10 | 12.138.241.558,80 | 27.654.978.871,10 | 19,83% |
| 39 | Utang Bunga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 40 | Bagian Lancar Utang Dalam Negeri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | 0,00 | 5.449.778.760,00 | 118.122.094.157,10 | 16.669.383.603,80 | 27.796.908.528,10 | 682,78% |
| 42 | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | | | | | |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| NO | URAIAN | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Rata-rata Pertumbuhan |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 43 | Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 44 | Jumlah Kewajiban Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | JUMLAH KEWAJIBAN | 0,00 | 5.449.778.760,00 | 118.122.094.157,10 | 16.669.383.603,80 | 27.796.908.528,10 | 682,78% |
| 46 | EKUITAS DANA | | | | | | |
| 47 | JUMLAH EKUITAS DANA | 2.791.230.744.519,11 | 3.203.049.930.200,86 | 3.254.015.383.742,85 | 3.638.299.130.264,65 | 2.835.172.212.310,03 | 1,52% |
| 48 | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | 2.791.230.744.519,11 | 3.208.499.708.960,86 | 3.372.137.477.899,95 | 3.654.968.513.868,45 | 2.862.969.120.838,13 | 1,69% |



3.1.2.2 Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan terhadap neraca Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011-2014 dilakukan dengan menggunakan 4 rasio keuangan. Keempat rasio keuangan tersebut adalah.

- a. Rasio Lancar (*Current Ratio*) merupakan rasio asset lancar terhadap kewajiban jangka pendek.
- b. Rasio Quick (*Quick Ratio*) merupakan rasio asset lancar dikurangi persediaan terhadap kewajiban jangka pendek.
- c. Rasio Hutang terhadap Asset merupakan rasio kewajiban terhadap asset.
- d. Rasio Hutang terhadap Modal merupakan rasio kewajiban terhadap ekuitas dana.

Berdasarkan hasil perhitungan, maka keempat rasio keuangan tersebut dimuat pada tabel berikut ini.

Rasio Keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2011 - 2015

| No | Uraian | Rasio Keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat | | | | |
|----|-----------------------------|---|-------|------|------|--------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Rasio Lancar | 0 | 92,51 | 4,04 | 8,96 | 163,08 |
| 2 | Rasio Quick | 0 | 91,27 | 3,95 | 8,37 | 107,63 |
| 3 | Rasio Hutang terhadap Asset | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 |
| 4 | Rasio Hutang terhadap Modal | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 |



Paparan keempat rasio keuangan diatas dapat pula diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Rasio Lancar

Rasio lancar pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 4 tahun menunjukkan trend yang mengecil dimana tahun 2012 rasio lancer sebesar 92,51 kemudian menurun menjadi 4,04 untuk tahun 2013 dan 8,96 untuk tahun 2014. Akan tetapi rasio lancer tersebut masih diatas normal yaitu diatas 2,0. Artinya kemampuan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memenuhi kewajiban jangka pendek dengan jaminan asset lancar amat tinggi.

b. Rasio *Quick*

Rasio Quick pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 4 tahun terakhir juga menunjukkan trend yang sama dengan rasio lancar yaitu cenderung mengecil tetapi masih rendah, yang aman dimana rasio quick masih diatas 2,5. Maknanya adalah kemampuan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memenuhi kewajiban jangka pendek minus persediaan dengan jaminan asset lancar masih baik.

c. Rasio Hutang Terhadap Asset

Rasio hutang terhadap asset untuk pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu 4 tahun terakhir mendekati nol. Artinya hutang yang dimiliki pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat relatif kecil dibandingkan jumlah asset yang dimilikinya.

d. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal yang dimiliki pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 4 tahun sebelumnya juga mendekati nol. Maknanya adalah jumlah hutang yang dimiliki dibanding jumlah modal yang dimiliki pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah amat kecil



3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Anggaran pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan namun lebih dari itu harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai, sehingga anggaran dapat dijadikan tolak ukur pencapaian kinerja, dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah.

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD pada dasarnya merupakan instrumen untuk terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah dengan mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang - Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Anggaran yang digunakan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 5 tahun terakhir (2011 - 2015) menunjukkan trend yang meningkat secara signifikan. Jika tahun 2011 total belanja sebesar 734,44 milyar, meningkat menjadi 1.002,76 milyar pada tahun 2015.

Jika dilihat penggunaan anggaran diatas dari segi proporsi penggunaan maka terlihat proporsi belanja langsung cenderung meningkat. Pada tahun 2011, belanja langsung mendapat proporsi sebesar 56, 92% kemudian naik menjadi 62,04% pada tahun 2012. Naik lagi ditahun 2013 menjadi 70,48% dan sedikit turun proporsinya sehingga



menjadi 67,86% pada tahun 2014. Terakhir pada tahun 2015 proporsinya mencapai 45,42%.

Proporsi penggunaan belanja langsung oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dinilai telah sesuai dengan ketentuan dimana yang diinginkan adalah proporsi belanja langsung diatas 60%. Untuk belanja tidak langsung, proporsinya juga telah menunjukkan proporsi yang ideal terutama setelah tahun 2012 dimana belanja tidak langsung mendapat proporsi dibawah 40%. Kecuali tahun 2011 masih diatas 40% proporsi belanja tidak langsung. Kemudian tahun 2012 sebesar 38,96% dan lalu tahun 2013 sebesar 29,52% serta tahun 2014 telah menjadi 32,14%. Tahun 2015 proporsi belanja tidak langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencapai 54,58%.

Deskripsi proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung atas penggunaan anggaran oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu 2011 - 2015 dimuat pada tabel dibawah ini :



Tabel T.III.C.3. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tanjung Jabung Barat

| No. | Uraian | Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur | Total pengeluaran (Belanja + pembiayaan pengeluaran) | Prosentase |
|-----|---------------------|--|--|------------------|
| | | (a) | (b) | (a) / (b) X 100% |
| 1 | Tahun Anggaran 2013 | 390.252.222.438 | 1.217.908.307.688 | 32,04% |
| 2 | Tahun Anggaran 2014 | 438.063.946.745 | 1.324.984.258.771 | 33,06% |
| 3 | Tahun Anggaran 2015 | 469.921.254.812 | 1.002.765.518.262 | 46,86% |

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SILPA tahun sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan penyertaan modal/ investasi dan pembayaran pokok utang.

Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan *netto* dan selisih antara penerimaan daerah dengan belanja daerah merupakan surplus/ defisit belanja. Berdasarkan konsep pembiayaan tersebut maka analisis pembiayaan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 5 tahun terakhir (2009 - 2013) dapat dilakukan. Hasil perhitungan komponen pembiayaan tersebut dimuat pada tabel berikut ini.

Tabel T.III.C.4. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat

| No | Uraian | 2013 (Rp) | 2014 (Rp) | 2015 (Rp) |
|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Realisasi pendapatan daerah | 1.111.026.065.111 | 1.115.432.010.549 | 931.326.976.527 |
| | Dikurangi : | | | |
| 2 | Belanja daerah + Pengeluaran pembiayaan daerah | 1.217.908.307.688 | 1.217.908.307.688 | 1.217.908.307.688 |
| | Defisit riil | -106.882.242.577 | -102.476.297.139 | -286.581.331.161 |



**Tabel T.III.C.5 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

| No. | Uraian | Proporsi dari total defisit riil | | |
|-----|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya | 476.931.220.000 | 439.574.960.000 | 109.768.420.000 |
| 2. | Pencairan Dana Cadangan | - | - | - |
| 3. | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan | - | - | - |
| 4. | Penerimaan Pinjaman Daerah | - | - | - |
| 5. | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | - | - | - |
| 6. | Penerimaan Piutang Daerah | - | - | - |

**Tabel T.III.C.6 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

| No. | Uraian | (n-3) | | (n-2) | | (n-1)**) | |
|-----|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | Rp | % dari SiLPA | Rp | % dari SiLPA | Rp | % dari SiLPA |
| 1. | Jumlah SiLPA | 476.931.220.000 | | 439.574.960.000 | | 109.768.420.000 | |
| 2. | Pelampauan penerimaan PAD | - | - | - | | - | - |
| 3. | Pelampauan penerimaan dana perimbangan | - | - | - | | - | - |
| 4. | Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah | - | - | - | | - | - |
| 5. | Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya | - | - | - | | - | - |
| 6. | Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan | - | - | - | | - | - |
| 7. | Kegiatan lanjutan | - | - | - | | - | - |

Tabel diatas memperlihatkan bahwa selama 5 tahun tersebut pembiayaan netto pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah positif atau surplus. Hal ini terjadi karena SiLPA tahun lalu terus meningkat tiap tahun. peningkatan SiLPA tahun lalu dapat dinilai pula tidak optimalnya penggunaan anggaran pada tahun berjalan. Seperti yang tergambar pada SiLPA tahun 2011 sebesar Rp 203.620,67 juta, kemudian turun menjadi Rp109.768,42 juta pada tahun 2015. Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan hanya peningkatan



penyertaan modal pada BUMD oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selama tahun 2011 hingga 2015 terjadi peningkatan setiap tahunnya penyertaan modal pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada BUMD. Dari Rp 1 Milyar pada tahun 2010 dan tahun 2013 ditingkatkan lagi setoran penyertaan modal sebesar Rp 22,5 milyar pada tahun 2010. Akan tetapi peningkatan penyertaan modal pada BUMD tidak diikuti oleh pemerintah deviden dari BUMD. Penerimaan atas penyertaan modal selama 5 tahun tersebut hanya pada tahun 2009 saja yang menghasilkan deviden sebesar Rp 500 juta. Sedangkan pada tahun 2011 - 2015 tidak ada penerimaan deviden dari BUMD yang masuk kedalam penerimaan pembiayaan.

3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Total belanja yang dimiliki Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011 - 2014 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, total belanja yang dimilikinya senilai Rp 734,44 milyar dan tahun 2012 menjadi Rp 862,88 milyar serta tahun 2013 meningkat menjadi Rp 1,22 triliyun. Kemudian tahun 2014 telah mencapai Rp 1,32 triliyun nilai total belanja pemerintah Tanjung Jabung Barat.

Deskripsi perkembangan total belanja beserta deskripsinya dimuat pada tabel berikut ini.

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



**T.III.C.7 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2016 s/d Tahun 2021**

| No | Uraian | Pertumbuhan (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Pendapatan | | | | | | | |
| 1.1. | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | | | | | |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | | 27.471.080.669 | 27.828.204.718 | 28.189.971.379 | 33.556.441.007 | 38.992.674.740 | 47.499.579.512 |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah | | 20.852.176.872 | 21.123.255.171 | 21.397.857.489 | 26.676.029.636 | 30.022.818.021 | 37.413.114.655 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelola Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | | 8.712.576.330 | 8.825.839.822 | 8.940.575.740 | 10.056.803.225 | 12.187.541.667 | 19.345.979.708 |
| 1.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah | | 28.855.833.906 | 29.230.959.747 | 29.610.962.223 | 33.995.904.732 | 37.437.851.494 | 44.924.543.563 |
| | Bagi hasil pajak | | 137.284.107.290 | 139.068.800.685 | 140.876.695.094 | 147.708.092.130 | 159.628.297.328 | 174.703.465.193 |
| | Bagi hasil bukan pajak / SDA | | 293.123.323.566 | 296.933.926.772 | 300.794.067.820 | 314.704.390.702 | 328.795.547.781 | 338.316.314.912 |
| 1.2 | Dana Perimbangan / DAU | | 507.980.253.000 | 514.583.996.289 | 521.273.588.241 | 543.538.212.787 | 563.412.411.883 | 571.736.773.238 |
| | DAK | | 111.078.502.110 | 112.522.522.637 | 111.243.000.000 | 112.689.159.000 | 114.154.118.067 | 115.638.121.602 |
| 1.3 | Dana bagi hasil provinsi | | 33.848.239.999 | 34.288.267.119 | 34.734.014.592 | 35.185.556.781 | 37.642.969.019 | 40.132.327.617 |
| 2 | Belanja | | | | | | | |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | | | | | | | |
| 2.1.1 | Belanja pegawai | | 405.495.560.000 | 446.045.116.000 | 490.649.627.600 | 515.182.108.980 | 528.061.661.705 | 535.982.586.630 |
| 2.1.2 | Belanja Bunga | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3. | Belanja Subsidi | | 7.000.000.000 | 7.700.000.000 | 8.470.000.000 | 8.893.500.000 | 9.115.837.500 | 9.252.575.063 |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | | 3.712.710.000 | 4.083.981.000 | 4.492.379.100 | 4.716.998.055 | 4.834.923.006 | 4.907.446.851 |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah, Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa | | 628.750.000 | 691.625.000 | 760.787.500 | 798.826.875 | 818.797.547 | 831.079.510 |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan pada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa & Partai Politik | | 128.006.030.000 | 140.806.633.000 | 154.887.296.300 | 162.631.661.115 | 166.697.452.643 | 169.197.914.433 |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | | 2.513.380.000 | 27.647.180.000 | 30.411.898.000 | 31.932.492.900 | 32.730.805.223 | 33.221.767.301 |
| | | | | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Belanja Langsung | | | | | | | |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | | 64.425.690.000 | 70.868.259.000 | 77.955.084.900 | 81.852.839.145 | 83.899.160.124 | 85.157.647.525 |
| 2.2.2 | Belanja barang dan jasa | | 165.872.210.000 | 182.459.431.000 | 200.705.374.100 | 210.740.642.805 | 216.009.158.875 | 219.249.296.258 |
| 2.2.3 | Belanja modal | | 225.111.180.000 | 247.622.298.000 | 272.384.527.800 | 286.003.754.190 | 293.153.848.045 | 297.551.155.765 |
| 3 | Pembiayaan | | | | | | | |
| 3.1.1 | Pembiayaan daerah | | | | | | | |



Dari paparan tabel diatas terlihat bahwa pada belanja tidak langsung masih didominasi oleh belanja pegawai. Belanja pegawai pada tahun 2011 mencapai 37,23% dari total belanja. Kemudian setiap tahunnya mengalami peningkatan hingga mencapai 40,44% dari total belanja pada tahun 2015. Akan tetapi belanja pegawai pada belanja langsung mengalami peningkatan atau berlawanan arah dengan belanja pegawai pada belanja tidak langsung yang mengalami penurunan. Hal ini terlihat dimana belanja pegawai pada belanja langsung mencapai 4,95% dari total belanja pada tahun 2011. Lalu terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 14,15% dari total belanja pada tahun 2015.

Kondisi yang berbeda terjadi pada belanja barang dan jasa selama tahun 2011 - 2015 persentasenya terhadap total belanja mengalami peningkatan. Hal ini tergambar dimana belanja barang dan jasa mendapat bagian sebesar 20,38% dari total belanja pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 36,42% pada tahun 2015. Namun, belanja modal nilai baik perkembangannya karena alokasi belanja modal mencapai 31,59% dari total belanja tahun 2011. Kemudian tahun 2015 meningkat drastis menjadi 49,42% dari total belanja pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Mengacu kepada data perkembangan pembiayaan khususnya penerimaan maka dilakukan perhitungan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam mendanai pembangunan daerah. Dalam melakukan perhitungan proyeksi digunakan asumsi bahwa kenaikan pendapatan daerah turut dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah. Oleh karena itu, proyeksi pendapatan daerah setiap tahun kedepan akan tergantung pula oleh faktor pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Khusus untuk dana cadangan diasumsi tidak ada pencairan dana cadangan karena tidak ada pula pembentukan dana cadangan sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sedangkan



SILPA di proyeksikan meningkat pula karena diperkirakan belum optimalnya penggunaan anggaran oleh SKPD dan meningkatnya unsur kehati-hatian dalam penggunaan anggaran oleh SKPD sehingga dan SILPA cenderung meningkat pula.

Belanja dan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama lebih dominan ditentukan oleh belanja pegawai. Belanja pegawai pada belanja tidak langsung yang membiayai gaji pegawai negeri Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi prioritas utama untuk menentukan besaran proyeksi kedepan.

Deskripsi hasil perhitungan proyeksi kapasitas Riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk tahun 2017 - 2021 dimuat pada tabel dibawah ini.



Tabel T.III.C.8. Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2017 – 2021 (Dalam Jutaan)

| No | Uraian | Proyeksi | | | | |
|----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Pendapatan | 1.184.445,87 | 1.197.060,51 | 1.258.110,59 | 1.322.274,23 | 1.389.710,22 |
| 2 | Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran | 31.786,80 | 33.980,09 | 36.392,68 | 39.085,74 | 42.017,17 |
| | Total Penerimaan | 1.216.232,67 | 1.231.040,60 | 1.294.503,27 | 1.361.359,97 | 1.431.727,39 |
| | Dikurangi: | | | | | |
| 4 | Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama | 524.186,02 | 560.354,86 | 600.140,06 | 644.550,42 | 692.891,70 |
| | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan | 692.046,65 | 670.685,74 | 694.363,21 | 716.809,55 | 738.835,69 |



Dari sajian pada tabel diatas dapat dilihat pula bahwa total kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus meningkat. Diproyeksikan pada tahun 2017, kapasitas riil kemampuan keuangan sebesar Rp 0,878 triliun dan tahun 2021 diproyeksikan telah menjadi Rp1,537 triliun atau meningkat sebesar 75,06% atau juga peningkatannya setara dengan 18,76% pertahun, dan apabila dikomposisikan kedalam proyeksi pendapatan dengan asumsi proporsi linear sebagaimana periode sebelumnya, maka proyeksi proporsi pendapatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel T.III.C.09 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

| No | Uraian | Proyeksi | | | | |
|----|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2017 (Rp) | 2018 (Rp) | 2019 (Rp) | 2020 (Rp) | 2021 (Rp) |
| 1 | Kapasitas riil kemampuan keuangan | 692.046.650.000 | 670.685.740.000 | 694.363.210.000 | 716.809.550.000 | 738.835.690.000 |
| 2 | Pembangunan jaringan air bersih | 33.000.000.000 | 107.000.000.000 | 65.000.000.000 | 35.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| 3 | Pembangunan jalan dan jembatan | 115.000.000.000 | 96.000.000.000 | 208.600.000.000 | 164.000.000.000 | 110.100.000.000 |
| 4 | Pembangunan / peningkatan puskesmas, pasar, dan sarana pendidikan | 42.000.000.000 | 62.600.000.000 | 105.000.000.000 | 50.000.000.000 | 10.000.000.000 |



BAB IV

Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah

4.1 Permasalahan Pembangunan

4.1.1 Permasalahan Kebutuhan Dasar

Pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan masih dihadapkan pada permasalahan. Adapun permasalahan tersebut adalah :

A. Pendidikan

1. Masih didapati kondisi fisik sekolah yang tidak layak digunakan.
2. Proses belajar mengajar kualitasnya masih rendah karena mutu sumberdaya manusia juga rendah.
3. Kualitas dan Kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan belum merata khususnya di pedesaan.
4. Wajib belajar 12 tahun belum terlaksana dengan berkualitas.

B. Kesehatan

1. Kualitas layanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah masih rendah.
2. Kualitas layanan kesehatan pada puskesmas dan puskesmas pembantu masih rendah.



3. Kualitas tenaga para bidan desa dan perawat puskesmas masih rendah.
4. Ketersediaan obat dan peralatan medis yang berkualitas di puskesmas dan bidan desa masih rendah.

4.1.2 Permasalahan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Dalam membangun kebudayaan dan pemuda dihadapkan pada permasalahan berikut ini :

A. Kebudayaan

1. Pengembangan nilai-nilai lokal yang menunjang pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah masih terbatas.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana budaya untuk pelestarian dan pengembangan budaya masih minimal.
3. Pengembangan dan pelestarian budayalokal yang terpadu dengan dunia bisnis masih terbatas.

B. Pemuda dan Olahraga

1. Kurangnya minat pemuda untuk menjadi wirausaha muda dan mandiri.
2. Pengembangan olah raga berprestasi dan bisnis pada masyarakat masih terbatas.
3. Masih kecilnya peran swasta dalam mendukung prestasi olah raga daerah.
4. Pemuda yang terlibat dalam kasus Narkoba makin meningkat jumlahnya.



4.1.3 Permasalahan Infrastruktur Daerah

Dalam membangun infrastruktur daerah dihadapkan pada permasalahan seperti berikut :

1. Jalan tanah gambut dalam keadaan rusak masih didapati.
2. Kondisifisik dermaga untuk transportasi sungai belum semuanya permanen dan baik.
3. Jalan aspal dan jembatanyang berkualitas belum merata untuk setiap daerah.
4. Rasio kelistrikan dan ketersediaan air bersih masih rendah.

4.1.4 Permasalahan Pertanian, Pertambangan dan Lingkungan Hidup

Dalam membangun pertanian, pertambangan dan lingkungan hidup didapati permasalahan seperti berikut ini:

A. Pertanian

1. Infrastruktur pertanian berupa jalan usahatani, bibit unggul, irigasi dan mesin pertanian masih belum berkualitas.
2. Produktivitas hasil pertanian masih rendah karena mutu input yang digunakan petani juga rendah.
3. Masih didapati semakin berkurangnya lahan pertanian tanaman pangan karena tingginya intensitas alih fungsi lahan khususnya lahan perkebunan sawit.
4. Permodalan petani sangat tergantung pada bantuan modal dari pemerintah.

B. Pertambangan dan Lingkungan Hidup

1. Mutu sumber daya dukung lingkungan menurun akibatnya ketersediaan sumberdaya alam juga menurun.



2. Pertambangan batubara masih mengabaikan kelestarian lingkungan hidup.
3. Kebakaran hutan dan lahan gambut meningkat akibatnya kabut asap juga meningkat.

4.1.5 Permasalahan Perekonomian Daerah

Pengembangan ekonomi daerah masih dihadapkan pada permasalahan seperti berikut ini:

A. Makro Ekonomi Daerah

1. Pengangguran terdidik meningkat akibat daya serap tenaga kerja dan kompetensi tenaga kerjajuga rendah.
2. Kesejahteraan petani tanaman pangan masih rendah akibatnya kemiskinan petani tanaman panganmeningkat.
3. Investasi daerah belum optimal pengembangannya karena ketersediaan infrastruktur terbatas.
4. Jumlah penduduk miskin yangcenderung meningkatakibat inflasi meningkat dan pertumbuhan ekonomi menurun.
5. Kontribusi Koperasi dalam ekonomi daerah masih rendah karena kemampuan sumberdaya manusia juga rendah.
6. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) populasinya banyak tetapi kemampuannya rendah.
7. Semakin menjamurnya pasar modern (swalayan) yang berpotensi menekan pertumbuhan usaha kecil/mikro dan pedagang asongan.



B. Keuangan Daerah

1. Besaran kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah masih belum optimal digunakan.
2. Kemandirian keuangan daerah masih rendah akibatnya ketergantungan pada APBN jadi tinggi.
3. Pendayagunaan asset daerah untuk peningkatan PAD belum optimal dilakukan.

4.1.6 Permasalahan Pemerintah dan Politik

Dalam membangun politik dan pemerintahan, didapati pointer permasalahan seperti berikut ini:

A. Pemerintahan Umum

1. Pengawasan internal oleh inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah masih belum maksimal.
2. Kualitas pelayanan publik oleh aparatur pemerintah daerah pada OPD masih rendah.
3. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah terutama dalam mentaati peraturan daerah.
4. Peran Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam sistem pelayanan perizinan dan meningkatkan daya tarik investor masih rendah.

B. Politik

1. Partisipasi masyarakat dalam politik masih rendah.
2. Pengetahuan politik dan kemampuan berpolitik masyarakat masih rendah.



4.2 Isu Strategis

4.2.1 Isu Strategis Kebutuhan Dasar

Isu strategis untuk kebutuhan dasar adalah:

A. Pendidikan

1. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas masih terbatas.
2. Mutu pendidikan masih rendah karena masih rendahnya kompetensi guru, dan kualitas infrastruktur pendidikan.
3. Minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi masih rendah karena terbatasnya pendapatan dan aksesibilitas.
4. Infrastruktur pendidikan yang berkualitas masih terbatas jumlahnya.

B. Kesehatan

1. Mutu tenaga kesehatan dan infrastruktur kesehatan masih rendah.
2. Pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh masyarakat meningkat tetapi belum diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
3. Derajat kesehatan masyarakat masih rendah akibatnya Indeks pembangunan Manusia (IPM) jugamasih rendah.

4.2.2 Isu Strategis Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Dalam mengembangkan kebudayaan, pemuda dan olahraga didapati isu strategis sebagai berikut:

A. Kebudayaan

1. Kearifan lokal masih terbatas digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.



2. Pengembangan budaya daerah belum optimal dilakukan sehingga belum dapat dijadikan objek dunia usaha.
3. Pemanfaatan nilai-nilai budaya tradisional untuk membangun daerah masih terbatas dilakukan.

B. Pemuda dan Olahraga

1. Pemuda kurang tertarik pada usaha mandiri tetapi lebih tertarik pada pekerjaan sektor formal.
2. Dukungan dunia usaha terhadap kegiatan olahraga masih rendah.
3. Budaya berolahraga pada masyarakat masih minimal.
4. Pemuda yang terlibat narkoba dan kriminal cenderung meningkat karena menganggur.

4.2.3 Isu Strategis Infrastruktur Daerah

Untuk membangun infrastruktur daerah perlu diperhatikan isu strategis berikut ini:

1. Jalan aspal yang berkualitas masih terbatas dan belum merata di setiap daerah.
2. Jalan dan jembatan yang rusak masih didapati khususnya di pedesaan dan daerah tertinggal.
3. Kanal dan pintu air pada daerah tanah gambut didapati banyak yang rusak.
4. Kebutuhan listrik dan air yang berkualitas untuk masyarakat belum terpenuhi.
5. Kota Kuala Tungkal terkesan kumuh dengan adanya pelanggaran sempadan sungai/parit sehingga mengurangi daya tampung dan fungsi sungai/parit sebagai saluran drainase primer maupun sekunder.



4.2.4 Isu Strategis Pertanian, Pertambangan Dan Lingkungan Hidup

Yang menjadi isu strategis pertanian, pertambangan dan lingkungan hidup adalah:

A. Pertanian

1. Pengembangan perkebunan kelapa sawit berlebihan akibatnya terjadi alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan.
2. Pengembangan potensi daerah untuk perikanan sangat besar tetapi belum optimal dilakukan.
3. Nilai Tukar Petani (NTP) masih rendah disebabkan kualitas produk rendah dan biaya produksi tinggi.
4. Lemahnya jaminan hukum untuk status kepemilikan lahan sehingga masih banyak didapati sengketa lahan pertanian/perkebunan.

B. Pertambangan dan Lingkungan Hidup

1. Kegiatan pertambangan belum optimal mensejahterakan masyarakat sekitarnya.
2. Pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan masih terabaikan akibatnya kerusakan lingkungan hidup meningkat.

4.2.5 Isu Strategis Perekonomian Daerah

Dalam menumbuhkembangkan perekonomian daerah didapati isu strategis berikut ini:

1. Ketersediaan infrastruktur dasar guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan investor masih terbatas.
2. Kompetensi tenaga kerja daerah yang sesuai dengan kebutuhan pasar masih rendah.



3. Peningkatan investasi daerah masih didominasi oleh belanja pemerintah daerah.
4. Alih fungsi lahan tanaman pangan ke perkebunan sawit telah mengurangi produksi tanaman pangan.
5. Pengembangan produk unggulan daerah berbasis potensi daerah masih belum optimal dilakukan.
6. Kesejahteraan petani rendah akibatnya kemiskinan petani meningkat.
7. Usaha mikro, kecil dan menengah belum berkembang maksimal karena daya saingnya sumberdaya manusia masih rendah.
8. Kualitas lembaga koperasi masih sangat rendah karena sumberdaya manusia kualitasnya juga rendah.

4.2.6 Isu Strategis Pemerintah dan Politik

Membangun politik dan pemerintahan dihadapkan kepada isu strategis berikut ini:

A. Pemerintahan Umum

1. Mutu pelayanan perizinan yang cepat dan murah belum didapati untuk mendukung peningkatan investasi.
2. Mutu pelayanan publik masih rendah dan belum sesuai dengan permintaan masyarakat dan dunia usaha.
3. Kesadaran hukum masyarakat dan aparatur pemerintah masih rendah sehingga masih didapati pelanggaran hukum.
4. Pengelolaan keuangan daerah dan pengawasannya masih belum baik sehingga masih didapati penyalahgunaan dan penyelewengan.
5. Kinerja OPD belum optimal akibatnya kinerja pemerintah daerah juga masih rendah.



B. Politik

1. Partisipasi wanita dalam partai politik dan pemerintah daerah masih minimal padahal peluangnya masih besar.
2. Kontribusi partai politik dalam pendidikan politik masyarakat masih rendah karena kemampuan manajerial partai politik juga rendah.



BAB V

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

5.1 Visi Daerah

Visi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah **‘Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas’**.

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah:

MAJU berarti daerah yang memiliki standar hidup relatif tinggi serta ekonomi merata. Pendapatan masyarakat meningkat melalui pengembangan industri dan ekonomi kerakyatan.

ADIL berarti kondisi yang ideal secara moral dan material. Anggaran daerah yang pro rakyat meningkat. Terwujudnya pemerataan pembangunan sesuai dengan pengembangan potensi daerah. Penciptaan ruang pembangunan yang lebih adil bagi rakyat. Pelayanan informasi publik yang berimbang dan transparan.

MAKMUR berarti kehidupan masyarakat sejahtera yang terlihat dari menurunnya rasio kemiskinan dan terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.



BERMARTABAT berarti suatu kondisi manusia ideal dimana terpenuhinya penghargaan dan segala hak asasi manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan derajat, kelengkapan itu mampu mewujudkan cipta rasa dan karyanya yang nyata.

BERKUALITAS berarti meningkatnya taraf hidup masyarakat yang tergambar pada peningkatan pendapatan dan terjamin pelestarian lingkungan hidup.

5.2 Misi Daerah

Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai Visi Daerah adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan.
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

5.3 Tujuan dan Sasaran

5.3.1 Tujuan Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :



1. Meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas
2. Terciptanya kawasan khusus produksi dan sentra pengembangan ekonomi
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup
6. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui investasi daerah dan daya serap tenaga kerja
7. Meningkatkan daya saing agroindustri dan perikanan melalui ekonomi kerakyatan
8. Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat dalam beragama dan berbudaya
9. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan
10. Meningkatkan kepastian hukum dan demokrasi.

5.3.2 Sasaran Pembangunan

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan diatas, maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni:

1. Meningkatnya pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk meningkatkan aksesibilitas dan daya saing daerah
2. Meningkatnya pembangunan pusat pembangkit listrik dan jejaring listrik
3. Meningkatnya pembangunan instalasi pengelolaan air bersih
4. Meningkatnya pelayanan Publik berbasis TIK di Semua Kecamatan



5. Meningkatnya sistem administrasi kearsipan dan layanan informasi daerah
6. Meningkatnya pelayanan perpustakaan Daerah
7. Meningkatnya pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas permukiman
8. Tersedianya kawasan khusus untuk Industri dan agroindustri
9. Tersedianya kawasan produksi sentra tanaman pangan dan perikanan
10. Berkembangnya wilayah administrasi dan tata kelola pemerintahan.
11. Tersedianya sentra ekonomi pada Kecamatan
12. Meningkatnya kualitas pendidikan melalui ketersediaan infrastruktur pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas
13. Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dan bersertifikasi melalui proses pendidikan yang berkualitas
14. Tersedianya pendidikan menengah umum dan kejuruan yang berbasis pada teknologi
15. Meningkatnya kualitas infrastruktur kesehatan fisik dan non fisik
16. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
17. Meningkatnya kualitas gizi keluarga dan pemberantasan penyakit menular maupun tidak menular
18. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup
19. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat
20. Meningkatnya kearifan lokal dalam menjamin keberlanjutan ekosistem
21. Meningkatnya investasi daerah melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas



22. Meningkatnya daya serap tenaga kerja pada sektor ekonomi kerakyatan
23. Meningkatnya daya saing agroindustri dan perikanan
24. Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam pengelolaan agroindustri dan perikanan
25. Meningkatnya kesejahteraan pekerja agroindustri dan perikanan untuk pengurangan kesenjangan dan kemiskinan
26. Meningkatnya jaminan mutu dan pemasaran barang serta jasa bagi masyarakat
27. Meningkatnya pemasaran produk unggulan daerah
28. Meningkatnya PDRB ADHK
29. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya
30. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui sistem online dan transparan
31. Meningkatnya kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas
32. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
33. Meningkatnya mutu dan jangkauan pelayanan publik
34. Meningkatnya kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha
35. Meningkatnya peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah.



Tabel T.V C-11
Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

| VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat Dan Berkualitas | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--------------|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| No | MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR PENILAIAN | KONDISI AWAL | TARGET CAPAIAN | | | | | | TARGET AKHIR |
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | MISI I : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN UMUM MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN KAWASAN EKONOMI YANG BERKUALITAS | 1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar yang berkualitas | 1. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan serta konektivitas | Persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik | 43,90 | 50,20 | 54,50 | 60,00 | 67,50 | 74,00 | 80,10 | 80,10 |
| | | | 2. Menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh melalui pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas | Luasan kawasan permukiman kumuh | 250 ha | 140 ha | 112 ha | 84 ha | 56 ha | 28 ha | 0 ha | 0 ha |
| | | | 3. Terdapatnya aksesibilitas dan pelayanan air bersih sampai ke daerah | Persentase kecamatan mendapatkan aksesibilitas / terlayani air bersih | 45% | 53% | 61% | 69% | 84% | 92% | 100% | 100% |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| | | | 4. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olahraga | Jumlah gedung dan lapangan olahraga yang memenuhi standar nasional | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | 2. Terciptanya kawasan khusus produksi dan sentra pengembangan ekonomi | 1. Tersedianya kawasan khusus untuk Industri dan agroindustri | Jumlah kawasan Industri dan kawasan agroindustri | 0% | 10% | 30% | 50% | 70% | 90% | 100% | 100% / 1 kawasan |
| | | | 2. Tersedianya sentra produksi hortikultura dan perikanan | Jumlah Sentra produksi Holtikultura dan perikanan | 2 Sentra | 3 Sentra | 5 Sentra | 7 Sentra | 9 Sentra | 11 Sentra | 13 Sentra | 13 Sentra |
| | | | 3. Tersedianya kawasan agropolitan / minapolitan | Jumlah kawasan agropolitan / minapolitan | 0 kawasan | 0 kawasan | 1 kawasan | 2 kawasan | 3 kawasan | 4 kawasan | 5 kawasan | 5 kawasan |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat Dan Berkualitas | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| No | MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR PENILAIAN | KONDISI AWAL | Target Capaian | | | | | | KONDISI AKHIR |
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 2 | MISI II : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP | 1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas | 1. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui ketersediaan infrastruktur pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas | Persentase SD dan SMP dengan akreditasi B | SD 11% SMP 15% | SD 20% SMP 25% | SD 25% SMP 35% | SD 30% SMP 45% | SD 40% SMP 50% | SD 50% SMP 60% | SD 60% SMP 70% | SD 60% SMP 70% |
| | | | 2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan / pelatihan | Besaran tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan | 450 orang | 172 orang | 300 orang | 300 orang | 300 orang | 300 orang | 300 orang | 1572 orang |
| | | 2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis | 1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas fasilitas | Jumlah RS terakreditasi | - | 1 RS | 1 RS | 1 RS | 1 RS | 1 RS | 1 RS | 1 RS |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|
| | | pada pelayanan kesehatan yang berkualitas | pelayanan kesehatan | Persentase puskesmas yang ditingkatkan dari Non PRI menjadi PRI | 0% | 0% | 19% | 28% | 55% | 82% | 100% | 100% |
| | | | 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat | Indeks Kepuasan Pelanggan | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4 | 4 | 4,2 | 4,5 | 4,5 |
| | | | 3. Meningkatkan kualitas gizi keluarga dan pemberantasan penyakit menular maupun tidak menular | Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Balita | 19,7% | 19% | 18,5% | 18% | 17,5% | 17% | 16,5% | 16,5% |
| | | | | Prevalensi Stunting Pada Baduta | 37% | 36% | 35% | 33% | 31% | 29% | 29% | 29% |
| | | | | Cakupan pencegahan akibat buruk dari penyakit menular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | Cakupan pencegahan akibat buruk dari penyakit tidak menular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup | 1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup | Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga SDA dan pelestarian lingkungan | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 65% |
| | | | 2. Menurunnya dampak lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam | Persentase kegiatan / usaha yang memanfaatkan sumber daya alam sesuai peraturan | 75% | 80% | 84% | 90% | 92% | 94% | 96% | 96% |
| | | | 3. Meningkatnya kearifan lokal dalam menjamin keberlanjutan ekosistem | Jumlah kearifan lokal yang menjaga keberlanjutan ekosistem yang dilestarikan | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 |



| VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat Dan Berkualitas | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| No | MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR PENILAIAN | KONDISI AWAL | TARGET CAPAIAN | | | | | | KONDISI AKHIR |
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 3 | MISI III : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI AGROINDUSTRI DAN PERIKANAN. | 1. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui investasi daerah dan daya serap tenaga kerja | 1. Meningkatnya investasi daerah | Nilai Investasi | 16,8 triliun | 17 triliun | 17,4 triliun | 18 triliun | 18,6 triliun | 19,2 triliun | 19,8 triliun | 19,8 triliun |
| | | | 2. Meningkatnya daya serap tenaga kerja | Tingkat partisipasi angkatan kerja | 67,12 | 68,20 | 68,60 | 69,00 | 69,40 | 69,80 | 70,20 | 70,20 |
| | | 2. Meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat | 1. Meningkatnya daya saing agroindustri dan perikanan | Nilai ekspor agroindustri | USD 16,244,005.50 | USD 19,693,267.50 | USD 11,549,655.07 | USD 14,000,000.00 | USD 15,000,000.00 | USD 16,500,000.00 | USD 18,000,000.00 | USD 18,000,000.00 |
| | | | | Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan | 876.326 kg | 943.834 kg | 1.049.168 kg | 1.059.659 kg | 1.071.748 kg | 1.084.884 kg | 1.099.759 kg | 1.099.759 kg |
| | | | 2. Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam pengelolaan | Jumlah koperasi aktif | 133 | 155 | 176 | 198 | 223 | 234 | 249 | 249 |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | agroindustri dan perikanan | Jumlah UMKM berkelanjutan | 145 | 150 | 159 | 170 | 195 | 220 | 245 | 245 |
| | | 3. Meningkatnya kesejahteraan pekerja untuk pengurangan kesenjangan dan kemiskinan | Upah Minimum Kabupaten | Rp.1.808.201,41 | Rp.1.926.000,00 | Rp.2.084.895,00 | Rp.2.280.249,66 | Rp.2.394.262,14 | Rp.2.556.048,84 | Rp.2.682.132,44 | Rp.2.682.132,44 |
| | | | Indeks Gini Rasio | 0,332 | 0,328 | 0,325 | 0,320 | 0,319 | 0,315 | 0,30 | 0,30 |
| | | 4. Meningkatnya produk lokal yang terdaftar legalitasnya | Persentase produk lokal yang terdaftar legalitasnya | 42% | 45% | 50% | 55% | 68% | 75% | 80% | 80% |
| | | 5. Meningkatnya pemasaran produk unggulan daerah | Persentase pemasaran produk unggulan daerah ke pasaran | 65% | 70% | 73% | 75% | 78% | 80% | 85% | 85% |
| | | 6. Berkembangnya potensi wisata agar menjadi objek wisata yang dikenal luas masyarakat | Jumlah potensi wisata yang dikembangkan menjadi objek wisata terkenal | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |



| VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat Dan Berkualitas | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|----------------|------|------|-------|--------|-------|--------------|
| No | MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR PENILAIAN | KONDISI AWAL | TARGET CAPAIAN | | | | | | TARGET AKHIR |
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 4 | MISI IV: MENINGKATKAN PERSATUAN DAN KESATUAN DAERAH MELALUI HARMONISASI KEHIDUPAN BERAGAMA DAN BERBUDAYA, SUPREMASI HUKUM DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK | 1. Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat dalam beragama dan berbudaya | 1. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya | Indeks kerukunan umat beragama (KUB Kemenag) | 85% | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% | 90% |
| | | | 2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan | 1. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | 74,5% | 78% | 80% | 81,5% | 82,25% | 83,5% | 85% |
| | | | 2. Meningkatkan kualitas aparatur pelayanan publik | Persentase aparatur pelayanan publik yang memenuhi kompetensi | 15% | 25% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 90% |
| | | | 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan | Opini laporan keuangan pemerintah | Disclaimer | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | aset daerah | | | | | | | | | |
| | | | 4. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | Tingkat keselarasan dokumen perencanaan | 76% | 80% | 90% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% |
| | | | 5. Meningkatnya pelayanan perpustakaan Daerah | Jumlah pengunjung perpustakaan | 10.500 pengunjung | 11.186 pengunjung | 18.720 pengunjung | 26.254 pengunjung | 33.788 pengunjung | 41.322 pengunjung | 48.858 pengunjung | 48.858 pengunjung |
| | | 3. Meningkatnya kepastian hukum dan kualitas pembinaan / pengawasan | 1. Meningkatnya kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha | Peraturan / kebijakan yang jelas dan logis terkait urusan khalayak ramai yang dikeluarkan | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| | | | 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah (Tipe A / B) Kab. Tanjung Barat | Persentase Perangkat Daerah (Tipe A/B) dengan akuntabilitas kinerja bernilai B (Nilai AKIP Tanjung Barat) | 62% | 72% | 80% | 88% | 90% | 95% | 100% | 100% |



BAB VI

Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah

6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan daerah memuat program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dari kepala daerah yang terpilih. Strategi tersebut diperlukan guna memperinci arah pengembangan program prioritas kepala daerah yang terpilih tersebut.

Strategi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 merupakan strategi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun strategi tersebut adalah:

1. Melaksanakan percepatan pembangunan daerah yang diarahkan untuk pengembangan sektor ekonomi unggulan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berbasis pada agroindustri dan perikanan.
2. Melaksanakan pembangunan daerah yang selaras antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pembangunan dan terjaminnya kelestarian lingkungan hidup sehingga dapat diperoleh pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas.



3. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh aparatur pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang didasarkan prinsip *good government* dan *clean government* serta memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tumbuhkembangnya daerah.

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat diarahkan kepada usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalahjabaran dari kebijakan pembangunan Nasional dan pembangunan Provinsi Jambi dengan mempertimbangkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas yang tergambar dari pengurangan penduduk miskin dan pengurangan jumlah pengangguran melalui program yang terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat.



2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, taat dan kepastian hukum, keadilan, dan partisipatif. Tata kelola pemerintahan daerah yang baik mempunyai peranan penting untuk tercapainya sasaran pembangunan daerah.
3. Meningkatkan pembangunan daerah yang berkeadilan melalui pengurangan kesenjangan pendapatan antar golongan masyarakat, pengurangan ketimpangan pembangunan antar daerah, dan peningkatan peranserta wanita dalam pembangunan daerah.

Penetapan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat lebih memprioritaskan pada sinergitas dari kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jambi dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2005 – 2025 juga menjadi acuan guna mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimasa datang. Adapun arah dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Pembangunan infrastruktur dasar diarahkan pada usaha mempercepat pembangunan kawasan ekonomi khusus cepat



tumbuh dan meningkatkan aksesibilitas antar daerah serta meminimalisir keterisoliran daerah tertinggal.

2. Pembangunan ekonomi daerah diarahkan kepada pengembangan sektor ekonomi unggulan yang ditumbuhkembangkan sesuai potensi sumberdaya yang dimiliki daerah.
3. Pemanfaatan tata ruang diarahkan untuk keseimbangan pengelolaan antara kebutuhan ruang dengan potensi sumberdaya alam guna menjamin pelestarian lingkungan hidup.
4. Pembangunan kawasan strategis yang cepat tumbuh diarahkan pada pemanfaatan potensi daerah dan penataan tata ruang yang dinamis.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah adalah acuan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 5 (lima) tahun mendatang. Adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 berdasarkan Misi pembangunan daerah dimuat pada tabel berikut :



**Tabel T.VI.C.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

| Visi : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas | | |
|---|--|---|
| Misi I : Meningkatkan pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar dan kawasan khusus yang berkualitas | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI |
| 1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar yang berkualitas | 1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan konektivitas | a. Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk pengembangan kawasan ekonomi strategis |
| | | b. Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan pengembangan daerah |
| | 2. Menurunnya luasan kawasan pemukiman kumuh melalui pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas | a. Peningkatan dan pembangunan jalan lingkungan dan saluran air permukiman penduduk terutama di kawasan permukiman kumuh di perkotaan |
| | | b. Perbaikan sanitasi permukiman penduduk terutama di kawasan permukiman kumuh di perkotaan |
| | 3. Terdapatnya aksesibilitas dan pelayanan air bersih sampai ke daerah | a. Pembangunan instalasi pengolahan air untuk seluruh kecamatan |
| | | b. Pembangunan jaringan pipa air minum untuk seluruh kecamatan |
| | 4. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olahraga | a. Pemenuhan dan peningkatan kualitas gedung dan lapangan olah raga sesuai standar nasional |



| Visi : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas | | |
|---|---|--|
| Misi I : Meningkatkan pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar dan kawasan khusus yang berkualitas | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI |
| | | b. Pembangunan gedung dan lapangan olah raga baru |
| 2.Terciptanya kawasan khusus produksi dan sentra pengembangan ekonomi | 1. Tersedianya kawasan khusus untuk Industri dan agroindustri | a. Pembangunan kawasan khusus untuk komoditas unggulan perkebunan |
| | | b. Penyiapan sumberdaya manusia dan infrastruktur untuk kawasan agroindustri |
| | 2. Tersedianya sentra produksi hortikultura dan perikanan | a. Pembangunan kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan |
| | | b. Pembangunan kawasan sentra produksi produk perikanan |
| | 3. Tersedianya kawasan agropolitan / minapolitan | a. Fasilitasi pembentukan kawasan agropolitan / minapolitan |
| | | b. Penyiapan infrastruktur pendukung kawasan agropolitan dan / minapolitan |



| MISI II : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup | | |
|--|--|---|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas | 1. Meningkatnya kualitas pendidikan melalui ketersediaan infrastruktur pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas | a. Pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan |
| | | b. Peningkatan kompetensi pendidik |
| | | c. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan |
| | 2. Meningkatnya kualitas tenaga kerja melalui pendidikan / pelatihan | a. Peningkatan mutu tenaga kerja melalui pendidikan / pelatihan |
| | | b. Pembangunan Balai Latihan Kerja |
| 2. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas | 1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan | a. Peningkatan mutu infrastruktur kesehatan sampai tingkat pedesaan |
| | | b. Peningkatan kompetensi paramedis dan dokter puskesmas |
| | | c. Penyediaan obat-obatan yang berkualitas |
| | 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat | a. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan |
| | | b. Peningkatan mutu jaminan kesehatan masyarakat |
| | | c. Peningkatan derajat kesehatan lingkungan pedesaan dan perkotaan |
| | | d. Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan di rumah sakit |
| | | |



| MISI II : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup | | |
|--|--|--|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI |
| 1 | 2 | 3 |
| | 3. Meningkatnya kualitas gizi keluarga dan pemberantasan penyakit menular maupun tidak menular | a. Peningkatan mutu gizi keluarga b. Peningkatan pemberantasan penyakit menular |
| 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup | 1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup | a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ketersediaan SDA |
| | | b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup |
| | 2. Menurunnya dampak lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam | a. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat |
| | | b. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat |
| | 3. Meningkatnya kearifan lokal dalam menjamin keberlanjutan ekosistem | a. Peningkatan pemanfaatan norma sosial lokal untuk menjaga kelestarian ekosistem |
| | | b. Peningkatan pemanfaatan kearifan lokal dalam menjamin pelestarian sumberdaya lingkungan hidup |
| c. Peningkatkan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan non hayati berwawasan lingkungan | | |



| Misi III: Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan | | | |
|---|--|--|--|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. Meningkatnya pembangunan ekonomi masyarakat melalui investasi daerah dan daya serap tenaga kerja | 1. Meningkatnya investasi daerah | a. Penyiapan kawasan khusus untuk investasi agroindustri dan perikanan | |
| | | b. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk kawasan investasi agroindustri dan perikanan | |
| | 2. Meningkatnya daya serap tenaga kerja | | a. Peningkatan kegiatan ekonomi produktif untuk ekonomi kerakyatan |
| | | | b. Peningkatan kompetensi tenaga kerja agar siap kerja |
| 2. Meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat | 1. Meningkatnya daya saing agroindustri dan perikanan | a. Pengembangan komoditas unggulan agroindustri dan perikanan | |
| | | b. Pengembangan komoditas unggulan agroindustri berbasis nilai tambah produk tinggi dan ekonomi kerakyatan | |
| | 2. Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam pengelolaan agroindustri dan perikanan | a. Peningkatan produktifitas koperasi dan UMKM melalui kemitraan usaha dalam agroindustri dan perikanan | |
| | | b. Peningkatan kerjasama antara koperasi dengan dunia usaha dalam pengelolaan agroindustri dan perikanan | |
| | 3. Meningkatnya kesejahteraan pekerja agroindustri dan perikanan untuk | a. Peningkatan produksi dan efiseinsi usaha petani dalam agribisnis dan kemaritiman | |



| Misi III: Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan | | |
|---|--|---|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI |
| 1 | 2 | 3 |
| | pengurangan kesenjangan dan kemiskinan | b. Peningkatan kemitraan usaha antara pekerja dengan perusahaan dalam pengembangan agroindustri dan perikanan |
| | 4. Meningkatnya produk lokal yang terdaftar legalitasnya | a. Inventarisasi usaha kecil dan menengah dalam daerah b. Kemudahan dan insentif bagi usaha kecil dan menengah dalam pengurusan legalitasnya |
| | 5. Meningkatnya pemasaran produk unggulan daerah | Peningkatan kegiatan pemasaran produk unggulan daerah |
| | 6. Berkembangnya potensi wisata agar menjadi objek wisata yang dikenal luas masyarakat | a. Peningkatan aksesibilitas melalui pembangunan / peningkatan jalan b. Pemenuhan sarana pendukung objek wisata |



| Misi IV : Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. | | |
|---|---|--|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya | 1. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya | a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menumbuhkembangkan norma sosial kearifan lokal |
| | | b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan budaya lokal asli |
| 2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan | 1. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik | a. Pengembangan sistem pelayanan publik online dan transparan |
| | | b. Peningkatan kapasitas jangkauan layanan publik berbasis online |
| | 2. Meningkatnya kualitas aparatur pelayanan publik | Peningkatan kompetensi aparatur pelayanan publik |
| | 3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah | a. Pengembangan sistem pengelolaan keuangan berbasis online (<i>e-budgetting</i>) |
| | | b. Peningkatan kompetensi pengelola keuangan daerah |
| | | c. Inventarisasi aset daerah |
| | 4. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | a. Peningkatan keselarasan perencanaan pembangunan daerah terhadap rencana kerja anggaran perangkat daerah |
| | | b. Perencanaan pembangunan daerah berorientasi dampak dan hasil |
| | 5. Meningkatnya pelayanan perpustakaan Daerah | a. Peningkatan sarana perpustakaan |



| Misi IV : Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. | | |
|---|---|---|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI |
| 1 | 2 | 3 |
| | | b. Peningkatan jangkauan pelayanan perpustakaan hingga ke daerah |
| 3. Meningkatnya kepastian hukum dan kualitas pembinaan / pengawasan kinerja pemerintah daerah | 1. Meningkatnya kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha | a. Meningkatkan jaminan kepastian penerapan hukum bagi seluruh masyarakat |
| | | b. Meningkatkan jaminan kepastian penerapan hukum bagi pelaku dunia usaha |
| | 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah (Tipe A / B) Kab. Tanjung Jabung Barat | a. Peningkatan pembinaan terhadap akuntabilitas kinerja perangkat daerah |
| | | b. Peningkatan pengetahuan aparatur dan penerapan akuntabilitas dalam perencanaan |



**Tabel T.VI.C.2
Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

| Misi I : Meningkatkan pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar dan kawasan khusus yang berkualitas | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | | | | | |
| | | | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
| 1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar yang berkualitas | 1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan konektivitas | a. Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk pengembangan kawasan ekonomi strategis | Peningkatan / Pembagunan jembatan beton di ruas jalan utama | Pembagunan jalan konektivitas | Pembagunan jalan konektivitas | Pembagunan jalan konektivitas | Pembagunan jalan konektivitas | Pembagunan jalan konektivitas |
| | | p. Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan pengembangan daerah | Peningkatan / Pembagunan jembatan beton di ruas jalan aksesibilitas desa | Pembangunan jalan aksesibilitas desa | Pembangunan jalan aksesibilitas desa | Pembangunan jalan aksesibilitas desa | Pembangunan jalan aksesibilitas desa | Pembangunan jalan aksesibilitas desa |
| | 2. Menurunnya luasan kawasan pemukiman kumuh melalui pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas | a. Peningkatan dan pembangunan jalan lingkungan dan saluran air permukiman penduduk terutama di kawasan permukiman kumuh di perkotaan | Pembangunan dan peningkatan jalan, saluran air, dan fasilitas umum | Pembangunan dan peningkatan jalan, saluran air, dan fasilitas umum | Pembangunan dan peningkatan jalan, saluran air, dan fasilitas umum | Pembangunan dan peningkatan jalan, saluran air, dan fasilitas umum | Pembangunan dan peningkatan jalan, saluran air, dan fasilitas umum | Pembangunan dan peningkatan jalan, saluran air, dan fasilitas umum |



| Misi I : Meningkatkan pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar dan kawasan khusus yang berkualitas | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | | | | | |
| | | b. Perbaikan sanitasi permukiman penduduk terutama di kawasan permukiman kumuh di perkotaan | Pembangunan Septic tank massa, dan sambungan rumah untuk akses air bersih | Pembangunan Septic tank massa, dan sambungan rumah untuk akses air bersih | Pembangunan Septic tank massa, dan sambungan rumah untuk akses air bersih | Pembangunan Septic tank massa, dan sambungan rumah untuk akses air bersih | Pembangunan Septic tank massa, dan sambungan rumah untuk akses air bersih | Pembangunan Septic tank massa, dan sambungan rumah untuk akses air bersih |
| | 3. Terdapatnya aksesibilitas dan pelayanan air bersih sampai ke daerah | 1. Pembangunan instalasi pengolahan air untuk seluruh kecamatan | Membangun instalasi pengolahan air di daerah ulu | - Lanjut pembangunan instalasi pengolahan air di daerah ulu | Pembangunan instalasi pengolahan di kecamatan | Pembangunan instalasi pengolahan di kecamatan | Pembangunan instalasi pengolahan di kecamatan | Pembangunan instalasi pengolahan di kecamatan |
| | | 2. Pembangunan jaringan pipa air minum untuk seluruh kecamatan | Perluasan jaringan perpipaan air bersih perkotaan | Perluasan jaringan perpipaan air bersih perkotaan | Perluasan jaringan perpipaan air bersih perkotaan dan kecamatan | Perluasan jaringan perpipaan air bersih perkotaan dan kecamatan | Perluasan jaringan perpipaan air bersih perkotaan dan kecamatan | Perluasan jaringan perpipaan air bersih perkotaan dan kecamatan |
| | 4. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olahraga | a. Pemenuhan dan peningkatan kualitas gedung dan lapangan olah raga sesuai standar nasional | Pengadaan dan penggantian sarana olah raga sesuai standar | Pengadaan dan penggantian sarana olah raga sesuai standar | Pengadaan dan penggantian sarana olah raga sesuai standar | Pengadaan dan penggantian sarana olah raga sesuai standar | Pengadaan dan penggantian sarana olah raga sesuai standar | Pengadaan dan penggantian sarana olah raga sesuai standar |
| | | b. Pembangunan gedung dan lapangan olah raga baru | Pembangunan gedung GOR baru, dan perbaikan / peningkatan kualitas gedung | Pembangunan gedung GOR baru, dan perbaikan / peningkatan kualitas gedung | Pembangunan gedung GOR baru, dan perbaikan / peningkatan kualitas gedung | Pembangunan gedung GOR baru, dan perbaikan / peningkatan kualitas gedung | Pembangunan gedung GOR baru, dan perbaikan / peningkatan kualitas gedung | Pembangunan gedung GOR baru, dan perbaikan / peningkatan kualitas gedung |



| Misi I : Meningkatkan pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar dan kawasan khusus yang berkualitas | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | | | | | |
| 2. Terciptanya kawasan khusus produksi dan sentra pengembangan ekonomi | 1. Tersedianya kawasan khusus untuk Industri dan agroindustri | 1. Pembangunan kawasan khusus untuk komoditas unggulan perkebunan | Penyiapan kawasan khusus komoditas unggulan perkebunan | Pembangunan infrastruktur penunjang kawasan | Pembangunan infrastruktur penunjang kawasan | Pembangunan infrastruktur penunjang kawasan | Pembangunan infrastruktur penunjang kawasan | Pembangunan infrastruktur penunjang kawasan |
| | | 2. Penyiapan sumberdaya manusia dan infrastruktur untuk kawasan agroindustri | Pelatihan sumber daya manusia | Pelatihan sumber daya manusia | Pelatihan sumber daya manusia | Pelatihan sumber daya manusia | Pelatihan sumber daya manusia | Pelatihan sumber daya manusia |
| | 2. Tersedianya kawasan produksi sentra hortikultura dan perikanan | 1. Membangun kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan | Penyiapan kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan | Pembangunan sarana dan prasarana sentra | Pembangunan sarana dan prasarana sentra | Pelengkapan sarana sentra | Pelengkapan sarana sentra | Pelengkapan sarana sentra |
| | | 2. Membangun kawasan sentra produksi produk perikanan | Penyiapan kawasan sentra produksi produk perikanan | Pembangunan sarana dan prasarana sentra | Pembangunan sarana dan prasarana sentra | Pelengkapan sarana sentra | Pelengkapan sarana sentra | Pelengkapan sarana sentra |
| | 3. Tersedianya kawasan agropolitan / minapolitan | 1. Fasilitasi pembentukan pusat pengembangan ekonomi pada kecamatan potensial | Menyiapkan kemudahan dalam perizinan dan insentif untuk daya tarik investor pariwisata dan kemaritimanserta wilayah tertinggal | Menyiapkan kemudahan dalam perizinan dan insentif untuk daya tarik investor pariwisata dan kemaritimanserta wilayah tertinggal | Menyiapkan kemudahan dalam perizinan dan insentif untuk daya tarik investor pariwisata dan kemaritimanserta wilayah tertinggal | Menyiapkan kemudahan dalam perizinan dan insentif untuk daya tarik investor pariwisata dan kemaritimanserta wilayah tertinggal | Menyiapkan kemudahan dalam perizinan dan insentif untuk daya tarik investor pariwisata dan kemaritimanserta wilayah tertinggal | Menyiapkan kemudahan dalam perizinan dan insentif untuk daya tarik investor pariwisata dan kemaritimanserta wilayah tertinggal |
| | | | 2. Penyiapan infrastruktur untuk pusat | Pembangunan infrastruktur pusat | Pembangunan infrastruktur pusat | Pembangunan infrastruktur pusat | Pembangunan infrastruktur pusat | Pembangunan infrastruktur pusat |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| Misi I : Meningkatkan pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar dan kawasan khusus yang berkualitas | | | | | | | | |
|--|---------|----------|----------------|--|---|---|---|---|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | | | | | |
| | | | | | pengembangan ekonomi pada kecamatan potensial | pengembangan ekonomi di kecamatan potensial | pengembangan ekonomi di kecamatan potensial | pengembangan ekonomi di kecamatan potensial |

| MISI II : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | | | | | |
| | | | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 |
| 1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas | 1. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui ketersediaan infrastruktur pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas | 1. Peningkatan mutu infrastruktur pendidikan | - Pembangunan prasaranan sekolah dasar, mendorong pembangunan SMP, SMU, SMK, dan Sekolah Tinggi - Pelengkapan sarana penunjang pendidikan sekolah dasar | - Pembangunan prasaranan sekolah dasar, mendorong pembangunan SMP, SMU, SMK, dan Sekolah Tinggi - Pelengkapan sarana penunjang pendidikan sekolah dasar | - Pembangunan prasaranan sekolah dasar, mendorong pembangunan SMP, SMU, SMK, dan Sekolah Tinggi - Pelengkapan sarana penunjang pendidikan sekolah dasar | - Pembangunan prasaranan sekolah dasar, mendorong pembangunan SMP, SMU, SMK, dan Sekolah Tinggi - Pelengkapan sarana penunjang pendidikan sekolah dasar | - Pembangunan prasaranan sekolah dasar, mendorong pembangunan SMP, SMU, SMK, dan Sekolah Tinggi - Pelengkapan sarana penunjang pendidikan sekolah dasar | - Pembangunan prasaranan sekolah dasar, mendorong pembangunan SMP, SMU, SMK, dan Sekolah Tinggi - Pelengkapan sarana penunjang pendidikan sekolah dasar |



| MISI II : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | | | | | |
| | | | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 |
| | | 2. Peningkatan kompetensi pendidik | Pelatihan dan sertifikasi pendidik | Pelatihan dan sertifikasi pendidik | Pelatihan dan sertifikasi pendidik | Pelatihan dan sertifikasi pendidik | Pelatihan dan sertifikasi pendidik | Pelatihan dan sertifikasi pendidik |
| | | 3. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan | Pelatihan dan sertifikasi tenaga kependidikan | Pelatihan dan sertifikasi tenaga kependidikan | Pelatihan dan sertifikasi tenaga kependidikan | Pelatihan dan sertifikasi tenaga kependidikan | Pelatihan dan sertifikasi tenaga kependidikan | Pelatihan dan sertifikasi tenaga kependidikan |
| | 2.Meningkatnya kualitas tenaga kerja melalui pendidikan / pelatihan | 1. Peningkatan mutu tenaga kerja melalui pelatihan / pendidikan | Pelatihan dan pengujian sertifikasi profesi | Pelatihan dan pengujian sertifikasi profesi | Pelatihan dan pengujian sertifikasi profesi | Pelatihan dan pengujian sertifikasi profesi | Pelatihan dan pengujian sertifikasi profesi | Pelatihan dan pengujian sertifikasi profesi |
| | | 2. Pembagunan Balai Latihan Kerja | - | Perencanaan pembangunan BLK | Pembangunan BLK | Lanjutan pembangunan BLK | Pemenuhan sarana / fasilitas BLK | Pemenuhan sarana / fasilitas BLK |
| 2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas | 1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan | 1. Peningkatan mutu infrastruktur kesehatan sampai tingkat pedesaan | Meningkatkan kualitas gedung dan peralatan kesehatan sampai tingkat pedesaan | Meningkatkan kualitas gedung dan peralatan kesehatan sampai tingkat pedesaan | Meningkatkan kualitas gedung dan peralatan kesehatan sampai tingkat pedesaan | Meningkatkan kualitas gedung dan peralatan kesehatan sampai tingkat pedesaan | Meningkatkan kualitas gedung dan peralatan kesehatan sampai tingkat pedesaan | Meningkatkan kualitas gedung dan peralatan kesehatan sampai tingkat pedesaan |
| | | | Meningkatkan Mutu dan Jangkauan Pelayanan serta Rujukan Kesehatan | Meningkatkan Mutu dan Jangkauan Pelayanan serta Rujukan Kesehatan | Meningkatkan Mutu dan Jangkauan Pelayanan serta Rujukan Kesehatan | Meningkatkan Mutu dan Jangkauan Pelayanan serta Rujukan Kesehatan | Meningkatkan Mutu dan Jangkauan Pelayanan serta Rujukan Kesehatan | Meningkatkan Mutu dan Jangkauan Pelayanan serta Rujukan Kesehatan |



| MISI II : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | | | | | |
| | | | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 |
| | | 2. Peningkatan kompetensi paramedis dan dokter puskesmas | Pelatihan peningkatan kompetensi paramedis dan dokter puskesmas | Pelatihan peningkatan kompetensi paramedis dan dokter puskesmas | Pelatihan peningkatan kompetensi paramedis dan dokter puskesmas | Pelatihan peningkatan kompetensi paramedis dan dokter puskesmas | Pelatihan peningkatan kompetensi paramedis dan dokter puskesmas | Pelatihan peningkatan kompetensi paramedis dan dokter puskesmas |
| | | 3. Penyediaan obat-obatan yang berkualitas | Meningkatkan ketersediaan obat-obatan yang bermutu | Meningkatkan ketersediaan obat-obatan yang bermutu | Meningkatkan ketersediaan obat-obatan yang bermutu | Meningkatkan ketersediaan obat-obatan yang bermutu | Meningkatkan ketersediaan obat-obatan yang bermutu | Meningkatkan ketersediaan obat-obatan yang bermutu |
| | 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat | 1. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan | - Pengembangan sistem layanan kesehatan bermutu - Peningkatan kompetensi petugas kesehatan lini depan (Puskesmas) | - Pengembangan sistem layanan kesehatan bermutu - Peningkatan kompetensi petugas kesehatan lini depan (Puskesmas) | - Pengembangan sistem layanan kesehatan bermutu - Peningkatan kompetensi petugas kesehatan lini depan (Puskesmas) | - Pengembangan sistem layanan kesehatan bermutu - Peningkatan kompetensi petugas kesehatan lini depan (Puskesmas) | - Pengembangan sistem layanan kesehatan bermutu - Peningkatan kompetensi petugas kesehatan lini depan (Puskesmas) | - Pengembangan sistem layanan kesehatan bermutu - Peningkatan kompetensi petugas kesehatan lini depan (Puskesmas) |
| | | 2. Peningkatan mutu jaminan kesehatan masyarakat | Menetapkan jaminan kesehatan masyarakat yang murah dan berkualitas | Menetapkan jaminan kesehatan masyarakat yang murah dan berkualitas | Menetapkan jaminan kesehatan masyarakat yang murah dan berkualitas | Menetapkan jaminan kesehatan masyarakat yang murah dan berkualitas | Menetapkan jaminan kesehatan masyarakat yang murah dan berkualitas | Menetapkan jaminan kesehatan masyarakat yang murah dan berkualitas |



| MISI II : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | | | | | |
| | | | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 |
| | | 3. Peningkatan Derajat Kesehatan Lingkungan Pedesaan dan Perkotaan | Meningkatkan kondisi dan sarana penunjang kesehatan lingkungan pedesaan dan perkotaan | Meningkatkan kondisi dan sarana penunjang kesehatan lingkungan pedesaan dan perkotaan | Meningkatkan kondisi dan sarana penunjang kesehatan lingkungan pedesaan dan perkotaan | Meningkatkan kondisi dan sarana penunjang kesehatan lingkungan pedesaan dan perkotaan | Meningkatkan kondisi dan sarana penunjang kesehatan lingkungan pedesaan dan perkotaan | Meningkatkan kondisi dan sarana penunjang kesehatan lingkungan pedesaan dan perkotaan |
| | | 4. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit | <ul style="list-style-type: none"> - Perluasan jangkauan pelayanan dokter spesialis - Peningkatan standar Pelayanan Rumah Sakit - Meningkatkan Jangkauan Rujukan Medik | <ul style="list-style-type: none"> - Perluasan jangkauan pelayanan dokter spesialis - Peningkatan standar Pelayanan Rumah Sakit - Meningkatkan Jangkauan Rujukan Medik | <ul style="list-style-type: none"> - Perluasan jangkauan pelayanan dokter spesialis - Peningkatan standar Pelayanan Rumah Sakit - Meningkatkan Jangkauan Rujukan Medik | <ul style="list-style-type: none"> - Perluasan jangkauan pelayanan dokter spesialis - Peningkatan standar Pelayanan Rumah Sakit - Meningkatkan Jangkauan Rujukan Medik | <ul style="list-style-type: none"> - Perluasan jangkauan pelayanan dokter spesialis - Peningkatan standar Pelayanan Rumah Sakit - Meningkatkan Jangkauan Rujukan Medik | <ul style="list-style-type: none"> - Perluasan jangkauan pelayanan dokter spesialis - Peningkatan standar Pelayanan Rumah Sakit - Meningkatkan Jangkauan Rujukan Medik |
| | 3. Meningkatnya kualitas gizi keluarga dan pemberantasan penyakit menular maupun tidak menular | 1. Peningkatan mutu gizi keluarga | Peningkatan kesadaran terhadap pemenuhan gizi | Peningkatan kesadaran terhadap pemenuhan gizi | Peningkatan kesadaran terhadap pemenuhan gizi | Peningkatan kesadaran terhadap pemenuhan gizi | Peningkatan kesadaran terhadap pemenuhan gizi | Peningkatan kesadaran terhadap pemenuhan gizi |
| | | 2. Peningkatan mutu pemberantasan penyakit menular dan tidak | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi kader pemberantasan penyakit menular | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi kader pemberantasan penyakit menular | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi kader pemberantasan penyakit menular | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi kader pemberantasan penyakit menular | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi kader pemberantasan penyakit menular | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi kader pemberantasan penyakit menular |



| MISI II : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | | | | | |
| | | | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 |
| | | menular | - Kegiatan Gerakan hidup sehat, dan penguatan peran pusat kesehatan | - Kegiatan Gerakan hidup sehat, dan penguatan peran pusat kesehatan | - Kegiatan Gerakan hidup sehat, dan penguatan peran pusat kesehatan | - Kegiatan Gerakan hidup sehat, dan penguatan peran pusat kesehatan | - Kegiatan Gerakan hidup sehat, dan penguatan peran pusat kesehatan | - Kegiatan Gerakan hidup sehat, dan penguatan peran pusat kesehatan |
| 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup | 1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup | 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ketersediaan SDA | Meningkatkan peran tokoh masyarakat dan organisasi sosial lokal dalam menjaga keberlanjutan tersedianya sumberdaya alam (SDA) khususnya yang tidak terbarukan | Meningkatkan peran tokoh masyarakat dan organisasi sosial lokal dalam menjaga keberlanjutan tersedianya sumberdaya alam (SDA) khususnya yang tidak terbarukan | Meningkatkan peran tokoh masyarakat dan organisasi sosial lokal dalam menjaga keberlanjutan tersedianya sumberdaya alam (SDA) khususnya yang tidak terbarukan | Meningkatkan peran tokoh masyarakat dan organisasi sosial lokal dalam menjaga keberlanjutan tersedianya sumberdaya alam (SDA) khususnya yang tidak terbarukan | Meningkatkan peran tokoh masyarakat dan organisasi sosial lokal dalam menjaga keberlanjutan tersedianya sumberdaya alam (SDA) khususnya yang tidak terbarukan | Meningkatkan peran tokoh masyarakat dan organisasi sosial lokal dalam menjaga keberlanjutan tersedianya sumberdaya alam (SDA) khususnya yang tidak terbarukan |
| | | 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup | Meningkatkan peran tokoh masyarakat dan organisasi sosial-budaya dalam menjamin pelestarian lingkungan hidup | Meningkatkan peran tokoh masyarakat dan organisasi sosial-budaya dalam menjamin pelestarian lingkungan hidup | Meningkatkan peran tokoh masyarakat dan organisasi sosial-budaya dalam menjamin pelestarian lingkungan hidup | Meningkatkan peran tokoh masyarakat dan organisasi sosial-budaya dalam menjamin pelestarian lingkungan hidup | Meningkatkan peran tokoh masyarakat dan organisasi sosial-budaya dalam menjamin pelestarian lingkungan hidup | Meningkatkan peran tokoh masyarakat dan organisasi sosial-budaya dalam menjamin pelestarian lingkungan hidup |
| | 2. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya alam | 1. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam | Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya | Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya | Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya | Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya | Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya | Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya |



| MISI II : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | | | | | |
| | | | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 |
| | dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat | untuk kesejahteraan masyarakat | alam yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat | alam yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat | alam yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat | alam yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat | alam yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat | alam yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat |
| | | 2. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat | Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya lingkungan hidup dan Potensi Lokal kedalam kepariwisataan untuk kesejahteraan masyarakat | Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya lingkungan hidup dan Potensi Lokal kedalam kepariwisataan untuk kesejahteraan masyarakat | Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya lingkungan hidup dan Potensi Lokal kedalam kepariwisataan untuk kesejahteraan masyarakat | Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya lingkungan hidup dan Potensi Lokal kedalam kepariwisataan untuk kesejahteraan masyarakat | Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya lingkungan hidup dan Potensi Lokal kedalam kepariwisataan untuk kesejahteraan masyarakat | Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya lingkungan hidup dan Potensi Lokal kedalam kepariwisataan untuk kesejahteraan masyarakat |
| | 3. Meningkatkan kearifan lokal dalam menjamin keberlanjutan ekosistem | 1. Peningkatan pemanfaatan norma sosial lokal untuk menjaga kelestarian ekosistem | Meningkatkan pendayagunaan norma sosial lokal untuk menjamin kelestarian ekosistem | Meningkatkan pendayagunaan norma sosial lokal untuk menjamin kelestarian ekosistem | Meningkatkan pendayagunaan norma sosial lokal untuk menjamin kelestarian ekosistem | Meningkatkan pendayagunaan norma sosial lokal untuk menjamin kelestarian ekosistem | Meningkatkan pendayagunaan norma sosial lokal untuk menjamin kelestarian ekosistem | Meningkatkan pendayagunaan norma sosial lokal untuk menjamin kelestarian ekosistem |
| | | 2. Peningkatan pemanfaatan kearifan lokal dalam menjamin pelestarian sumberdaya lingkungan hidup | Mendorong peningkatan pendayagunaan kearifan sosial lokal untuk menjamin pelestarian sumberdaya lingkungan hidup | Mendorong peningkatan pendayagunaan kearifan sosial lokal untuk menjamin pelestarian sumberdaya lingkungan hidup | Mendorong peningkatan pendayagunaan kearifan sosial lokal untuk menjamin pelestarian sumberdaya lingkungan hidup | Mendorong peningkatan pendayagunaan kearifan sosial lokal untuk menjamin pelestarian sumberdaya lingkungan hidup | Mendorong peningkatan pendayagunaan kearifan sosial lokal untuk menjamin pelestarian sumberdaya lingkungan hidup | Mendorong peningkatan pendayagunaan kearifan sosial lokal untuk menjamin pelestarian sumberdaya lingkungan hidup |



| MISI II : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup | | | | | | | | |
|--|---------|---|--|--|--|--|--|--|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | | | | | |
| | | | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 |
| | | 3. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Non Hayati Berwawasan Lingkungan | Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Non Hayati Berwawasan Lingkungan | Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Non Hayati Berwawasan Lingkungan | Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Non Hayati Berwawasan Lingkungan | Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Non Hayati Berwawasan Lingkungan | Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Non Hayati Berwawasan Lingkungan | Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Non Hayati Berwawasan Lingkungan |
| | | | Meningkatkan Komitmen Partisipasi Pelaku Usaha Eksploitasi SDA Terhadap Pembangunan Daerah | Meningkatkan Komitmen Partisipasi Pelaku Usaha Eksploitasi SDA Terhadap Pembangunan Daerah | Meningkatkan Komitmen Partisipasi Pelaku Usaha Eksploitasi SDA Terhadap Pembangunan Daerah | Meningkatkan Komitmen Partisipasi Pelaku Usaha Eksploitasi SDA Terhadap Pembangunan Daerah | Meningkatkan Komitmen Partisipasi Pelaku Usaha Eksploitasi SDA Terhadap Pembangunan Daerah | Meningkatkan Komitmen Partisipasi Pelaku Usaha Eksploitasi SDA Terhadap Pembangunan Daerah |

| Misi III : Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | | | | | |
| | | | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 |
| 1. Meningkatnya pembangunan ekonomi masyarakat melalui investasi daerah dan daya serap tenaga kerja | 1. Meningkatnya investasi daerah | 1. Penyiapan kawasan khusus untuk investasi agroindustri dan perikanan | Menetapkan kawasan investasi agroindustri dan perikanan | Menetapkan kawasan investasi agroindustri dan perikanan | | | | |
| | | 2. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk | Pembangunan infrastruktur dasar dan | Pembangunan infrastruktur dasar dan | Pembangunan infrastruktur dasar dan | Pembangunan infrastruktur dasar dan | Pembangunan infrastruktur dasar dan | Pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang |



Misi III : Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | | | | | |
|--------|---|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 |
| | | kawasan investasi agroindustri dan perikanan | penunjang kawasan investasi agroindustri dan perikanan | penunjang kawasan investasi agroindustri dan perikanan | penunjang kawasan investasi agroindustri dan perikanan | penunjang kawasan investasi agroindustri dan perikanan | penunjang kawasan investasi agroindustri dan perikanan | kawasan investasi agroindustri dan perikanan |
| | 2. Meningkatnya daya serap tenaga kerja | 1. Peningkatan kegiatan ekonomi produktif untuk ekonomi kerakyatan | - Mengembangkan agribisnis berbasis padat karya - Mengembangkan ekonomi kreatif untuk kepariwisataan | - Mengembangkan agribisnis berbasis padat karya - Mengembangkan ekonomi kreatif untuk kepariwisataan | - Mengembangkan agribisnis berbasis padat karya - Mengembangkan ekonomi kreatif untuk kepariwisataan | - Mengembangkan agribisnis berbasis padat karya - Mengembangkan ekonomi kreatif untuk kepariwisataan | - Mengembangkan agribisnis berbasis padat karya - Mengembangkan ekonomi kreatif untuk kepariwisataan | - Mengembangkan agribisnis berbasis padat karya - Mengembangkan ekonomi kreatif untuk kepariwisataan |
| | | 2. Peningkatan kompetensi tenaga kerja agar siap kerja | Mendorong program siap kerja bagi lulusan SMK Teknologi agroindustri | Mendorong program siap kerja bagi lulusan SMK Teknologi agroindustri | Mendorong program siap kerja bagi lulusan SMK Teknologi agroindustri | Mendorong program siap kerja bagi lulusan SMK Teknologi agroindustri | Mendorong program siap kerja bagi lulusan SMK Teknologi agroindustri | Mendorong program siap kerja bagi lulusan SMK Teknologi agroindustri |
| | | | | | | | Pembangunan BLK dengan teknologi tepat guna dan bermutu | |



| Misi III : Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | | | | | |
| | | | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 |
| 2. Meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat | 1. Meningkatnya daya saing agroindustri dan perikanan | 1. Pengembangan komoditas unggulan agroindustri dan perikanan | - Menumbuhkan bangkan sentra komoditas unggulan perkebunan dan perikanan | - Menumbuhkan bangkan sentra komoditas unggulan perkebunan dan perikanan | - Menumbuhkan bangkan sentra komoditas unggulan perkebunan dan perikanan | - Menumbuhkan bangkan sentra komoditas unggulan perkebunan dan perikanan | - Menumbuhkan bangkan sentra komoditas unggulan perkebunan dan perikanan | - Menumbuhkan bangkan sentra komoditas unggulan perkebunan dan perikanan |
| | | | - Menumbuh kembangkan teknologi unggulan komoditas perkebunan dan perikanan | - Menumbuh kembangkan teknologi unggulan komoditas perkebunan dan perikanan | - Menumbuh kembangkan teknologi unggulan komoditas perkebunan dan perikanan | - Menumbuh kembangkan teknologi unggulan komoditas perkebunan dan perikanan | - Menumbuh kembangkan teknologi unggulan komoditas perkebunan dan perikanan | - Menumbuh kembangkan teknologi unggulan komoditas perkebunan dan perikanan |
| | 2. Pengembangan komoditas unggulan agroindustri berbasis nilai tambah produk tinggi dan ekonomi kerakyatan | Mengembangk an teknologi ramah lingkungan untuk peningkatan produksi agroindustri dan perikanan | Mengembangk an teknologi ramah lingkungan untuk peningkatan produksi agroindustri dan perikanan | Mengembangk an teknologi ramah lingkungan untuk peningkatan produksi agroindustri dan perikanan | Mengembangk an teknologi ramah lingkungan untuk peningkatan produksi agroindustri dan perikanan | Mengembangk an teknologi ramah lingkungan untuk peningkatan produksi agroindustri dan perikanan | Mengembangk an teknologi ramah lingkungan untuk peningkatan produksi agroindustri dan perikanan | Mengembangk an teknologi ramah lingkungan untuk peningkatan produksi agroindustri dan perikanan |
| | 2. Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam pengelolaan agroindustri dan perikanan | 1. Peningkatan produktifitas koperasi dan UMKM melalui kemitraan usaha dalam agroindustri dan perikanan | - Mengembangk an koperasi dan UMKM dengan pendidikan kluster untuk agroindustri dan perikanan | - Mengembangk an koperasi dan UMKM dengan pendidikan kluster untuk agroindustri dan perikanan | - Mengembangk an koperasi dan UMKM dengan pendidikan kluster untuk agroindustri dan perikanan | - Mengembangk an koperasi dan UMKM dengan pendidikan kluster untuk agroindustri dan perikanan | - Mengembangk an koperasi dan UMKM dengan pendidikan kluster untuk agroindustri dan perikanan | - Mengembangk an koperasi dan UMKM dengan pendidikan kluster untuk agroindustri dan perikanan |



| Misi III : Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | | | | | |
| | | | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 |
| | | | - Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia koperasi dan UMKM dalam agroindustri dan perikanan | - Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia koperasi dan UMKM dalam agroindustri dan perikanan | - Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia koperasi dan UMKM dalam agroindustri dan perikanan | - Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia koperasi dan UMKM dalam agroindustri dan perikanan | - Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia koperasi dan UMKM dalam agroindustri dan perikanan | - Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia koperasi dan UMKM dalam agroindustri dan perikanan |
| | | 2. Peningkatan kerjasama usaha koperasi dengan perusahaan besar untuk membangun pariwisata dan kemaritiman | - Mengembangkan kemitraan usaha antara koperasi dan pengusaha besar dalam membangun pariwisata dan kemaritiman | - Mengembangkan kemitraan usaha antara koperasi dan pengusaha besar dalam membangun pariwisata dan kemaritiman | - Mengembangkan kemitraan usaha antara koperasi dan pengusaha besar dalam membangun pariwisata dan kemaritiman | - Mengembangkan kemitraan usaha antara koperasi dan pengusaha besar dalam membangun pariwisata dan kemaritiman | - Mengembangkan kemitraan usaha antara koperasi dan pengusaha besar dalam membangun pariwisata dan kemaritiman | - Mengembangkan kemitraan usaha antara koperasi dan pengusaha besar dalam membangun pariwisata dan kemaritiman |
| | | | - Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia koperasi dalam pariwisata dan kemaritiman | - Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia koperasi dalam pariwisata dan kemaritiman | - Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia koperasi dalam pariwisata dan kemaritiman | - Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia koperasi dalam pariwisata dan kemaritiman | - Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia koperasi dalam pariwisata dan kemaritiman | - Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia koperasi dalam pariwisata dan kemaritiman |
| | 3. Meningkatnya kesejahteraan pekerja | 1. Peningkatan produksi dan efiseinsi usaha | - Meningkatkan penggunaan teknologi dalam | - Meningkatkan penggunaan teknologi dalam | - Meningkatkan penggunaan teknologi dalam | - Meningkatkan penggunaan teknologi dalam | - Meningkatkan penggunaan teknologi dalam | - Meningkatkan penggunaan teknologi dalam |



Misi III : Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | | | | | |
|--------|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 |
| | agroindustri dan perikanan untuk pengurangan kesenjangan dan kemiskinan | petani dalam agribisnis dan kemaritiman | agroindustri dan perikanan - Meningkatkan efisien usaha petani melalui subsidi input dan jaminan harga output untuk agroindustri dan perikanan - Meningkatkan Produksi Hasil Peterenakan - Menekan angka kematian dan kesakitan hewan | agroindustri dan perikanan - Meningkatkan efisien usaha petani melalui subsidi input dan jaminan harga output untuk agroindustri dan perikanan - Meningkatkan Produksi Hasil Peterenakan - Menekan angka kematian dan kesakitan hewan | agroindustri dan perikanan - Meningkatkan efisien usaha petani melalui subsidi input dan jaminan harga output untuk agroindustri dan perikanan - Meningkatkan Produksi Hasil Peterenakan - Menekan angka kematian dan kesakitan hewan | agroindustri dan perikanan - Meningkatkan efisien usaha petani melalui subsidi input dan jaminan harga output untuk agroindustri dan perikanan - Meningkatkan Produksi Hasil Peterenakan - Menekan angka kematian dan kesakitan hewan | agroindustri dan perikanan - Meningkatkan efisien usaha petani melalui subsidi input dan jaminan harga output untuk agroindustri dan perikanan - Meningkatkan Produksi Hasil Peterenakan - Menekan angka kematian dan kesakitan hewan | agroindustri dan perikanan - Meningkatkan efisien usaha petani melalui subsidi input dan jaminan harga output untuk agroindustri dan perikanan - Meningkatkan Produksi Hasil Peterenakan - Menekan angka kematian dan kesakitan hewan |
| | | 2. Peningkatan kemitraan usaha antara pekerja dengan perusahaan dalam pengembangan agroindustri dan perikanan | - Menumbuhkembangkan kemitraan yang saling menguntungkan antara pekerja dengan pengusaha agroindustri dan perikanan | - Menumbuhkembangkan kemitraan yang saling menguntungkan antara pekerja dengan pengusaha agroindustri dan perikanan | - Menumbuhkembangkan kemitraan yang saling menguntungkan antara pekerja dengan pengusaha agroindustri dan perikanan | - Menumbuhkembangkan kemitraan yang saling menguntungkan antara pekerja dengan pengusaha agroindustri dan perikanan | - Menumbuhkembangkan kemitraan yang saling menguntungkan antara pekerja dengan pengusaha agroindustri dan perikanan | - Menumbuhkembangkan kemitraan yang saling menguntungkan antara pekerja dengan pengusaha agroindustri dan perikanan |



| Misi III : Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | | | | | |
| | | | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 |
| | | | - Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Berbasis Kebutuhan Pasar Tenaga Kerja Lokal | - Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Berbasis Kebutuhan Pasar Tenaga Kerja Lokal | - Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Berbasis Kebutuhan Pasar Tenaga Kerja Lokal | - Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Berbasis Kebutuhan Pasar Tenaga Kerja Lokal | - Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Berbasis Kebutuhan Pasar Tenaga Kerja Lokal | - Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Berbasis Kebutuhan Pasar Tenaga Kerja Lokal |
| | 4. Meningkatnya produk lokal yang terdaftar legalitasnya | a. Inventarisasi usaha kecil dan menengah serta produknya dalam daerah | Pelaksanaan inventarisasi dan produk UKM daerah | Mendorong legalitas usaha dan produk UKM | Mendorong legalitas usaha dan produk UKM | Mendorong legalitas usaha dan produk UKM | Mendorong legalitas usaha dan produk UKM | Mendorong legalitas usaha dan produk UKM |
| | | b. Kemudahan dan insentif bagi usaha kecil dan menengah dalam pengurusan legalitasnya | Memperioritas pelayanan yang mudah dan insentif bagi pelaku usaha | Memperioritas pelayanan yang mudah dan insentif bagi pelaku usaha | Memperioritas pelayanan yang mudah dan insentif bagi pelaku usaha | Memperioritas pelayanan yang mudah dan insentif bagi pelaku usaha | Memperioritas pelayanan yang mudah dan insentif bagi pelaku usaha | Memperioritas pelayanan yang mudah dan insentif bagi pelaku usaha |
| | c. Meningkatnya Pemasaran Produk Unggulan Daerah | Peningkatan kegiatan pemasaran produk unggulan daerah | Pemasaran lewat event – event promosi | Pemasaran lewat event – event promosi | Pemasaran lewat event – event promosi | Pemasaran lewat event – event promosi | Pemasaran lewat event – event promosi | Pemasaran lewat event – event promosi |
| | d. Berkembangnya potensi wisata agar menjadi objek wisata yang dikenal luas | a. Peningkatan aksesibilitas melalui pembangunan / peningkatan jalan | Pembangunan peningkatan jalan menuju tempat - tempat | Pembangunan peningkatan jalan menuju tempat - tempat | Pembangunan peningkatan jalan menuju tempat - tempat | Pembangunan peningkatan jalan menuju tempat - tempat | Pembangunan peningkatan jalan menuju tempat - tempat | Pembangunan peningkatan jalan menuju tempat - tempat wisata |



| Misi III : Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan | | | | | | | | |
|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | | | | | |
| | | | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 |
| | masyarakat | | wisata | wisata | wisata | wisata | wisata | |
| | | b. Pemenuhan sarana pendukung objek wisata | Peningkatan fasilitas umum tempat wisata | Peningkatan fasilitas umum tempat wisata | Peningkatan fasilitas umum tempat wisata | Peningkatan fasilitas umum tempat wisata | Peningkatan fasilitas umum tempat wisata | Peningkatan fasilitas umum tempat wisata |

| Misi IV : Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | | | | | |
| | | | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 |
| 1. Meningkatnya kualitas tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya | 1. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya | 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menumbuh kembangkan norma sosial kearifan lokal | Meningkatkan peran tokoh masyarakat dalam pengembangan norma dan kearifan sosial lokal | Meningkatkan peran tokoh masyarakat dalam pengembangan norma dan kearifan sosial local | Meningkatkan peran tokoh masyarakat dalam pengembangan norma dan kearifan sosial lokal | Meningkatkan peran tokoh masyarakat dalam pengembangan norma dan kearifan sosial lokal | Meningkatkan peran tokoh masyarakat dalam pengembangan norma dan kearifan sosial lokal | Meningkatkan peran tokoh masyarakat dalam pengembangan norma dan kearifan sosial lokal |
| | | 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan | Meningkatkan peran tokoh masyarakat | Meningkatkan peran tokoh masyarakat | Meningkatkan peran tokoh masyarakat | Meningkatkan peran tokoh masyarakat | Meningkatkan peran tokoh masyarakat | Meningkatkan peran tokoh masyarakat dalam |



| Misi IV : Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | | | | | |
| | | | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 |
| | | budaya lokal asli | dalam pengembangan sosial budaya lokal dalam event regional dan nasional | dalam pengembangan sosial budaya lokal dalam event regional dan nasional | dalam pengembangan sosial budaya lokal dalam event regional dan nasional | dalam pengembangan sosial budaya lokal dalam event regional dan nasional | dalam pengembangan sosial budaya lokal dalam event regional dan nasional | pengembangan sosial budaya lokal dalam event regional dan nasional |
| | | 3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam keharmonisan beragama | - Mengikutsertakan tokoh lintas agama dalam kegiatan bakti sosial pemerintah daerah - Memberikan tunjangan bagi tokoh agama dalam upaya peningkatan pendidikan agama | - Mengikutsertakan tokoh lintas agama dalam kegiatan bakti sosial pemerintah daerah - Memberikan tunjangan bagi tokoh agama dalam upaya peningkatan pendidikan agama | - Mengikutsertakan tokoh lintas agama dalam kegiatan bakti sosial pemerintah daerah - Memberikan tunjangan bagi tokoh agama dalam upaya peningkatan pendidikan agama | - Mengikutsertakan tokoh lintas agama dalam kegiatan bakti sosial pemerintah daerah - Memberikan tunjangan bagi tokoh agama dalam upaya peningkatan pendidikan agama | - Mengikutsertakan tokoh lintas agama dalam kegiatan bakti sosial pemerintah daerah - Memberikan tunjangan bagi tokoh agama dalam upaya peningkatan pendidikan agama | - Mengikutsertakan tokoh lintas agama dalam kegiatan bakti sosial pemerintah daerah - Memberikan tunjangan bagi tokoh agama dalam upaya peningkatan pendidikan agama |
| 2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan | 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis TIK dan transparan | 1. Pengembangan sistem pelayanan publik online dan transparan | - Membangun sistem informasi dan layanan publik online dan transparan | - Membangun sistem informasi dan layanan publik online dan transparan | - Membangun sistem informasi dan layanan publik online dan transparan | - Membangun sistem informasi dan layanan publik online dan transparan | | |



| Misi IV : Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | | | | | |
| | | | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 |
| | | | | - Membangun sistem perencanaan dan pelaporan publik online dan transparan | - Membangun sistem perencanaan dan pelaporan publik online dan transparan | | | |
| | | 1. Peningkatan kapasitas jangkauan layanan publik berbasis online | Memperluas jangkauan layanan publik online yang berkualitas | Memperluas jangkauan layanan publik online yang berkualitas | Memperluas jangkauan layanan publik online yang berkualitas | Memperluas jangkauan layanan publik online yang berkualitas | Memperluas jangkauan layanan publik online yang berkualitas | Memperluas jangkauan layanan publik online yang berkualitas |
| | | | Meningkatkan Sistim Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi | Meningkatkan Sistim Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi | | | | |
| | | | Meningkatkan Kualitas Sistem Birokrasi dan Pelayanan Publik | Meningkatkan Kualitas Sistem Birokrasi dan Pelayanan Publik | Meningkatkan Kualitas Sistem Birokrasi dan Pelayanan Publik | Meningkatkan Kualitas Sistem Birokrasi dan Pelayanan Publik | Meningkatkan Kualitas Sistem Birokrasi dan Pelayanan Publik | Meningkatkan Kualitas Sistem Birokrasi dan Pelayanan Publik |
| | 2. Meningkatnya kualitas aparatur | Peningkatan kompetensi aparatur pelayanan publik | Meningkatkan pendidikan dan latihan aparatur | Meningkatkan pendidikan dan latihan aparatur | Meningkatkan pendidikan dan latihan aparatur | Meningkatkan pendidikan dan latihan aparatur | Meningkatkan pendidikan dan latihan aparatur | Meningkatkan pendidikan dan latihan aparatur |



| Misi IV : Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | | | | | |
| | | | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 |
| | pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas | | layanan publik bersertifikasi secara profesional | layanan publik bersertifikasi secara profesional | layanan publik bersertifikasi secara profesional | layanan publik bersertifikasi secara profesional | layanan publik bersertifikasi secara profesional | layanan publik bersertifikasi secara profesional |
| | 3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah | 1. Pengembangan sistem pengelolaan keuangan berbasis online (<i>e-budgetting</i>) | | | Penerapan aplikasi e-budgetting / SABK | | | |
| | | 2. Peningkatan kompetensi pengelola keuangan daerah | Meningkatkan pendidikan dan latihan pengelola keuangan publik bersertifikasi | Meningkatkan pendidikan dan latihan pengelola keuangan publik bersertifikasi | Meningkatkan pendidikan dan latihan pengelola keuangan publik bersertifikasi | Meningkatkan pendidikan dan latihan pengelola keuangan publik bersertifikasi | Meningkatkan pendidikan dan latihan pengelola keuangan publik bersertifikasi | Meningkatkan pendidikan dan latihan pengelola keuangan publik bersertifikasi |
| | | 3. Inventarisasi aset daerah | Inventarisasi aset daerah | Penanganan aset bermasalah, penyusunan laporan aset perangkat daerah yang sinkron dengan laporan aset daerah (BMD) | Penanganan aset bermasalah, penyusunan laporan aset perangkat daerah yang sinkron dengan laporan aset daerah (BMD) | Penanganan aset bermasalah, penyusunan laporan aset perangkat daerah yang sinkron dengan laporan aset daerah (BMD) | Penanganan aset bermasalah, penyusunan laporan aset perangkat daerah yang sinkron dengan laporan aset daerah (BMD) | Penanganan aset bermasalah, penyusunan laporan aset perangkat daerah yang sinkron dengan laporan aset daerah (BMD) |
| | 4. Meningkatnya kualitas perencanaan | a. Peningkatan keselarasan perencanaan | Peningkatan evaluasi dan pengendalian | Peningkatan evaluasi dan pengendalian | Peningkatan evaluasi dan pengendalian | Peningkatan evaluasi dan pengendalian | Peningkatan evaluasi dan pengendalian | Peningkatan evaluasi dan pengendalian |



| Misi IV : Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | | | | | |
| | | | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 |
| | pembangunan daerah | pembangunan daerah terhadap rencana kerja anggaran perangkat daerah | perencanaan pembangunan daerah | perencanaan pembangunan daerah | perencanaan pembangunan daerah | perencanaan pembangunan daerah | perencanaan pembangunan daerah | perencanaan pembangunan daerah |
| | | b. Perencanaan pembangunan daerah berorientasi dampak dan hasil | Penguatan sistem perencanaan dan pemahaman bagi bagian perencanaan | Penguatan sistem perencanaan dan pemahaman bagi bagian perencanaan | Penguatan sistem perencanaan dan pemahaman bagi bagian perencanaan | Penguatan sistem perencanaan dan pemahaman bagi bagian perencanaan | Penguatan sistem perencanaan dan pemahaman bagi bagian perencanaan | Penguatan sistem perencanaan dan pemahaman bagi bagian perencanaan |
| | 5. Meningkatnya pelayanan perpustakaan Daerah | a. Peningkatan sarana perpustakaan | Peningkatan sarana kelengkapan dan kenyamanan perpustakaan | Peningkatan sarana kelengkapan dan kenyamanan perpustakaan | Peningkatan sarana kelengkapan dan kenyamanan perpustakaan | Peningkatan sarana kelengkapan dan kenyamanan perpustakaan | Peningkatan sarana kelengkapan dan kenyamanan perpustakaan | Peningkatan sarana kelengkapan dan kenyamanan perpustakaan |
| | | b. Peningkatan jangkauan pelayanan perpustakaan hingga ke daerah | Memperluas cakupan layanan perpustakaan hingga ke desa | Memperluas cakupan layanan perpustakaan hingga ke desa | Memperluas cakupan layanan perpustakaan hingga ke desa | Memperluas cakupan layanan perpustakaan hingga ke desa | Memperluas cakupan layanan perpustakaan hingga ke desa | Memperluas cakupan layanan perpustakaan hingga ke desa |



| Misi IV : Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | | | | | |
| | | | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 |
| 4. Meningkatkan kepastian hukum dan kualitas pembinaan / pengawasan kinerja pemerintah daerah | 1. Meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha | 1. Meningkatkan jaminan kepastian penerapan hukum bagi seluruh masyarakat | Menjamin pelaksanaan perundang-undangan dan peraturan yang adil bagi seluruh masyarakat | Menjamin pelaksanaan perundang-undangan dan peraturan yang adil bagi seluruh masyarakat | Menjamin pelaksanaan perundang-undangan dan peraturan yang adil bagi seluruh masyarakat | Menjamin pelaksanaan perundang-undangan dan peraturan yang adil bagi seluruh masyarakat | Menjamin pelaksanaan perundang-undangan dan peraturan yang adil bagi seluruh masyarakat | Menjamin pelaksanaan perundang-undangan dan peraturan yang adil bagi seluruh masyarakat |
| | | 2. Meningkatkan jaminan kepastian penerapan hukum bagi pelaku dunia usaha | Menjamin penerapan perundang-undangan dan peraturan yang adil bagi seluruh pelaku dunia usaha | Menjamin penerapan perundang-undangan dan peraturan yang adil bagi seluruh pelaku dunia usaha | Menjamin penerapan perundang-undangan dan peraturan yang adil bagi seluruh pelaku dunia usaha | Menjamin penerapan perundang-undangan dan peraturan yang adil bagi seluruh pelaku dunia usaha | Menjamin penerapan perundang-undangan dan peraturan yang adil bagi seluruh pelaku dunia usaha | Menjamin penerapan perundang-undangan dan peraturan yang adil bagi seluruh pelaku dunia usaha |
| | 3. Meningkatkan akutanbilas kinerja perangkat daerah (Tipe A / B) Kab. Tanjung Jabung Barat | a. Peningkatan pembinaan terhadap akutanbilas kinerja perangkat daerah | Peningkatan pembinaan akutanbilas kinerja perangkat daerah | Peningkatan pembinaan akutanbilas kinerja perangkat daerah | Peningkatan pembinaan akutanbilas kinerja perangkat daerah | Peningkatan pembinaan akutanbilas kinerja perangkat daerah | Peningkatan pembinaan akutanbilas kinerja perangkat daerah | Peningkatan pembinaan akutanbilas kinerja perangkat daerah |
| | | b. Peningkatan pengetahuan aparatur dan penerapan akutanbilas dalam perencanaan | Pelatihan / sosialisasi pemahaman kepada aparatur perencanaan | Peningkatan penerapan akutanbilas kinerja | Pelatihan / sosialisasi pemahaman kepada aparatur perencanaan | Peningkatan penerapan akutanbilas kinerja | Peningkatan penerapan akutanbilas kinerja | Peningkatan penerapan akutanbilas kinerja |



Tabel T.VI.C.3
Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|--|---|---------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|--|-------------------|-----------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| Misi I : Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar dan kawasan ekonomi yang berkualitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tujuan 1 | Meningkatnya infrastruktur dasar yang berkualitas | Persentase pemenuhan infrastruktur dasar | 57% | 61% | 16.094.585.000 | 65% | 342.757.145.500 | 67% | 465.673.687.750 | 69% | 567.648.677.788 | 72% | 355.341.455.677 | 75% | 232.181.417.261 | 75% | 1.979.696.968.976 | |
| Sasaran I.1.1 | Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan konektivitas | Persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik | 43,90% | 50,20% | 87.000.000 | 54,50% | 281.000.000.000 | 60,00% | 242.500.000.000 | 67,50% | 348.450.000.000 | 74,00% | 213.500.000.000 | 80,10% | 157.300.000.000 | 80,10% | 1.329.750.000.000 | |
| 1.01.03.15 | Program pembangunan jalan dan jembatan. | Pembangunan Jalan Konektivitas dan Peningkatan Panjang Jembatan 101 Unit | 18,7 Km dan 60% | 0 dan 5 Unit | 20.000.000.000 | 12 Km dan 36 Unit | 145.000.000.000 | 12 Km dan 30 Unit | 109.500.000.000 | 11 Km dan 30 Unit | 107.850.000.000 | 10 Km | 10.500.000.000 | 11 Km | 10.200.000.000 | 56 Km dan 101 unit | 403.050.000.000 | PUPR |
| 1.01.03.16 | Program Pemeliharaan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan | Rasio Panjang Jalan dalam kondisi baik | 41% | 42% | 67.000.000.000 | 45% | 115.000.000.000 | 55% | 96.000.000.000 | 58% | 208.600.000.000 | 59% | 164.000.000.000 | 62% | 110.100.000.000 | 62% | 760.700.000.000 | PUPR |
| 1.01.03.18 | Program Penataan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Meningkatnya persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik | 47% | - | - | 50% | 21.000.000.000 | 55% | 37.000.000.000 | 58% | 32.000.000.000 | 60% | 39.000.000.000 | 65% | 37.000.000.000 | 65% | 166.000.000.000 | Perumkim |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|----------------|--|--|---|---------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|-----------------|-----------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | |
| Sasaran I. 1.2 | Menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh melalui pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas | Luasan kawasan permukiman kumuh | 250 ha | 140 ha | 12.150.000.000 | 112 ha | 4.150.000.000 | 84 ha | 9.250.000.000 | 56 ha | 9.000.000.000 | 28 ha | 9.400.000.000 | 0 ha | 9.450.000.000 | 0 ha | 53.400.000.000 | |
| 1.01.03.16 | Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong. | Meengurangi genangan dikawasan kumuh perkotaan | 0 ha | 110 ha | 12.000.000.000 | 28 ha | 2.000.000.000 | 28 ha | 7.000.000.000 | 28 ha | 7.000.000.000 | 28 ha | 7.000.000.000 | 28 ha | 7.000.000.000 | 250 ha | 42.000.000.000 | PUPR |
| 1.01.04.17 | Program Pengembangan Perumahan | Menurunnya Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak memiliki rumah | 16,76% | - | - | 16,5% | 2.000.000.000 | 16,2% | 2.000.000.000 | 16% | 2.000.000.000 | 15,7% | 2.000.000.000 | 15,5% | 2.000.000.000 | 15,5% | 10.000.000.000 | Perumkim |
| 1.01.02.21 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Meningkatnya Persentase Rumah tangga dengan jamban sehat (Bersanitasi Baik) | 30 % | 35% | 150.000.000 | 40 % | 150.000.000 | 60 % | 250.000.000 | 70 % | 350.000.000 | 80 % | 400.000.000 | 85 % | 450.000.000 | 85 % | 1.750.000.000 | DINKES |
| Sasaran I. 1.3 | Terdapatnya aksesibilitas dan pelayanan air bersih sampai ke daerah | Persentase kecamatan mendapatkan aksesibilitas / terlayani air bersih | 45% | 53% | 3.500.000.000 | 61% | 54.150.000.000 | 69% | 147.150.000.000 | 84% | 100.150.000.000 | 92% | 77.000.000.000 | 100% | 50.000.000.000 | 100% | 431.950.000.000 | |
| 1.01.03.31 | Program penyediaan dan pengelolaan air baku. | Jumlah desa yang memperoleh air baku | 20 desa | 10 desa | 3.500.000.000 | 15 desa | 150.000.000 | 15 desa | 3.150.000.000 | 15 desa | 3.150.000.000 | 15 desa | 3.000.000.000 | 15 desa | 3.000.000.000 | 105 desa | 15.950.000.000 | PUPR |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|-----------------------|---|---|---|---------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|-----------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | |
| 1.01.03.32 | Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum. | Meningkatnya jumlah sambungan rumah (SR) | 6200 Sambungan rumah | - | - | 500 sambungan rumah | 33.000.000.000 | 5300 sambungan rumah | 107.000.000.000 | 2.000 sambungan rumah | 65.000.000.000 | 2.000 Sambungan rumah | 35.000.000.000 | 2.000 sambungan rumah | 10.000.000.000 | 18.000 Sambungan rumah | 250.000.000.000 | PUPR |
| 1.01.04.15 | Program Penataan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Meningkatnya persentase sambungan SR air bersih MBR | 32% | - | - | 32% | 21.000.000.000 | 40% | 37.000.000.000 | 47% | 32.000.000.000 | 53% | 39.000.000.000 | 57% | 37.000.000.000 | 57% | 166.000.000.000 | Perumkim |
| Sasaran I. 1.4 | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olahraga | Jumlah gedung dan lapangan olah raga yang memenuhi standar nasional | 1 lapangan/GOR | 1 lapangan/GOR | 357.585.000 | 2 lapangan/GOR | 3.457.145.500 | 2 lapangan/GOR | 66.773.687.750 | 2 lapangan/GOR | 110.048.677.788 | 2 lapangan/GOR | 55.441.455.677 | 2 lapangan/GOR | 15.431.417.261 | 2 lapangan/GOR | 251.509.968.976 | |
| 1.02.13.21 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | Jumlah lapangan dan gedung olahraga yang memenuhi standar nasional | 1 lapangan/GOR | 1 lapangan/GOR | 1.836.734.260 | 2 lapangan/GOR | 2.323.540.621 | 2 lapangan/GOR | 836.908.250 | 2 lapangan/GOR | 878.753.663 | 2 lapangan/GOR | 922.691.346 | 2 lapangan/GOR | 968.825.913 | 2 lapangan/GOR | 7.767.454.053 | Disparpora |
| 1.02.13.20 | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga | Jumlah pelaksanaan kegiatan keolahragaan | 8 | 8 | 357.585.000 | 8 | 3.457.145.500 | 10 | 4.173.687.750 | 10 | 5.048.677.788 | 12 | 5.441.455.677 | 12 | 5.431.417.261 | 12 | 23.909.968.976 | Disparpora |
| | Program pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, sosial, dan budaya | Jumlah sarana dan prasarana ekonomi, sosial, dan budaya yang dibangun, ditingkatkan, dan dipelihara | 0 unit | - | - | - | - | 10 Unit | 62.600.000.000 | 7 Unit | 105.000.000.000 | 7 Unit | 50.000.000.000 | 3 Unit | 10.000.000.000 | 30 Unit | 227.600.000.000 | PUPR |
| Tujuan 2 | Terciptanya kawasan khusus produksi dan | Tersedianya kawasan khusus produksi dan | 0 | 2 sentra | 242.000.000 | 2 sentra | 1.197.200.000 | 2 sentra | 9.450.000.000 | 5 sentra | 4.442.000.000 | 3 sentra | 5.020.050.000 | 1 kawasan / 3 | 2.839.355.000 | 1 kawasan / 12 | 23.190.605.000 | |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|---------------|---|---|---|---------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------------|---------------|--|----------------|--|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | |
| | sentra pengembangan ekonomi | sentra – sentra ekonomi | | | | | | | | | | | | sentra | | sentra | | |
| Sasaran I.2.1 | Tersedianya kawasan khusus untuk Industri dan agroindustri | Jumlah kawasan Industri dan kawasan agroindustri | 0% | 10% | - | 30% | - | 50% | - | 70% | 800.000.000 | 90% | 1.670.000.000 | 100% (1 kawasan) | - | 100% (1 kawasan) | 2.470.000.000 | |
| | Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | Tercakupnya perencanaan pembangunan Kawasan Agropolitan, Minapolitan, Kawasan Industri dan Wisata dalam Rencana Pembangunan | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 dokumen | 800.000.000 | 3 Dokumen | 1.670.000.000 | - | - | 5 dokumen | 2.470.000.000 | Bappeda |
| Sasaran I.2.2 | Tersedianya kawasan produksi sentra produksi hortikultura dan perikanan | Jumlah Sentra produksi Hortikultura dan perikanan | 2 Sentra | 3 Sentra | 121.000.000 | 5 Sentra | 598.600.000 | 7 Sentra | 4.725.000.000 | 9 Sentra | 1.821.000.000 | 11 Sentra | 1.675.000.000 | 13 Sentra | 1.419.677.500 | 13 Sentra | 10.360.277.500 | |
| 2.01.03.17 | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan | Tersedianya sentra agrobisnis produk unggulan hortikultura | 0 sentra | - | - | 0 sentra | 218.900.000 | 0 sentra | 270.000.000 | 3 sentra | 731.000.000 | 3 sentra | 755.050.000 | 1 sentra | 429.677.500 | 7 sentra | 2.404.627.500 | DTPH |
| 2.01.07.19 | Program pengembangan sentra-sentra industri potensial | Meningkatnya pembinaan pelaku IKM di Sentra Industri | 2 sentra IKM | 2 sentra IKM | 121.000.000 | 2 sentra IKM | 379.700.000 | 2 sentra IKM | 4.455.000.000 | 2 sentra IKM | 1.090.000.000 | 2 sentra IKM | 920.000.000 | 2 sentra IKM | 990.000.000 | 12 Sentra IKM | 7.955.700.000 | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|-----------------|---|--|---|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|--|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | |
| Sasaran 1.2.3 | Tersedianya kawasan agropolitan / minapolitan | Jumlah kawasan agropolitan / minapolitan | 0 kawasan | 0 kawasan | 121.000.000 | 1 kawasan | 598.600.000 | 2 kawasan | 4.725.000.000 | 3 kawasan | 1.821.000.000 | 4 kawasan | 1.675.050.000 | 5 kawasan | 1.419.677.500 | 5 kawasan | 10.360.327.500 | |
| 2.01.03.17 | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan | Tersedianya sentra agrobisnis produk unggulan hortikultura | 0 sentra | - | - | 0 sentra | 218.900.000 | 0 sentra | 270.000.000 | 3 sentra | 731.000.000 | 3 sentra | 755.050.000 | 1 sentra | 429.677.500 | 7 sentra | 2.404.627.500 | DTPH |
| 2.01.07.19 | Program pengembangan sentra-sentra industri potensial | Meningkatnya pembinaan pelaku IKM di Sentra Industri | 2 sentra IKM | 2 sentra IKM | 121.000.000 | 2 sentra IKM | 379.700.000 | 2 sentra IKM | 4.455.000.000 | 2 sentra IKM | 1.090.000.000 | 2 sentra IKM | 920.000.000 | 2 sentra IKM | 990.000.000 | 12 Sentra IKM | 7.955.700.000 | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan |
| | Misi II | Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tujuan 1 | Meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas | Indeks Pembangunan Manusia | 65,03 | 65,91 | 11.445.000.000 | 66,26 | 7.603.123.000 | 66,90 | 71.787.840.000 | 67,28 | 125.012.850.000 | 67,50 | 65.920.850.000 | 67,83 | 26.919.850.000 | 67,83 | 308.689.513.000 | |
| Sasaran II.1.1. | Meningkatnya kualitas pendidikan melalui ketersediaan infrastruktur pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas | Persentase SD dan SMP dengan akreditasi B | SD 11% SMP 15% | SD 20% SMP 25% | 11.445.000.000 | SD 25% SMP 35% | 7.255.000.000 | SD 30% SMP 45% | 71.128.000.000 | SD 40% SMP 50% | 114.276.000.000 | SD 50% SMP 60% | 60.181.000.000 | SD 60% SMP 70% | 21.178.000.000 | SD 60% SMP 70% | 285.463.000.000 | |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | SKPD PENANGGUNG JAWAB | |
|------------|---|---|---|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|----------------|--|----------------|-----------------------|--|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | Rp | 12 | |
| 1.01.01.20 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan | Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki indeks kinerja minimal baik | 360 org | 360 org | | 480 org | | 420 org | | 420 org | | 420 org | | 420 org | | 420 org | | | |
| | | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi keahlian khusus | 0 | 0 | | 0 | | 90 org | | 80 org | | 80 org | | 80 org | | 80 org | | | |
| | | Persentase GTK Dikdas memperoleh penghargaan dan perlindungan | 0 | 100% | 11.445.000.000 | 100% | 7.255.000.000 | 100% | 8.528.000.000 | 100% | 9.276.000.000 | 100% | 10.181.000.000 | 100% | 11.178.000.000 | 100,00% | 57.863.000.000 | Dikbud | |
| | | Persentase GTK Dikdas meningkat karirnya | 100% | 100% | | 100% | | 436 org | | 436 org | | 436 org | | 436 org | | 436 org | | | |
| | | Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh jaminan hidup | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100,00% | | | |
| | | Persentase SD/SDLB dan SMP/SMPPLB yang memiliki GTK sesuai dengan SNP | 62,30% | 66,80% | | 69,30% | | 71,40% | | 77,50% | | 78,20 % | | 80,10% | | 80,10% | | | |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|-----------------|---|---|---|---------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|---------------|----------------|------------|----------------|--|-----------------|-----------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | |
| | Program pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, sosial, dan budaya | Jumlah sarana dan prasarana ekonomi, sosial, dan budaya yang dibangun, ditingkatkan, dan dipelihara | 0 unit | - | - | - | - | 10 Unit | 62.600.000.000 | 7 Unit | 105.000.000.000 | 7 Unit | 50.000.000.000 | 3 Unit | 10.000.000.000 | 30 Unit | 227.600.000.000 | PUPR |
| Sasaran II. 1.2 | Meningkatnya kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan | Jumlah tenaga kerja terampil | 75 orang | - | - | 30 orang | 348.123.000 | 30 orang | 659.840.000 | 30 orang | 10.736.850.000 | 30 orang | 5.739.850.000 | 30 orang | 5.741.850.000 | 170 orang | 23.226.513.000 | |
| 1.02.01.15 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Jumlah tenaga kerja terampil | 75 orang | - | - | 30 orang | 348.123.000 | 30 orang | 659.840.000 | 30 orang | 10.736.850.000 | 30 orang | 5.739.850.000 | 30 orang | 5.741.850.000 | 170 orang | 23.226.513.000 | Naker |
| | | Tersusunnya dokumen pendukung persiapan pembangunan BLK | 0 | - | - | 1 dokumen | | - | | - | | 5.741.850.000 | | 1 dokumen | | 23.226.513.000 | | |
| | | Terbangunnya gedung BLK dan operasional BLK | 0 | - | - | - | | 50% | | 25% | | 25% | | 100% | | | | |
| Tujuan 2 | Meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas | Indeks kepuasan pelanggan (Bidang Kesehatan) | 3,8 | 3,8 | 32.830.593.816 | 4 | 52.400.946.816 | 4 | 99.478.542.000 | 4 | 96.463.144.000 | 4,2 | 96.817.156.000 | 4,5 | 95.554.860.000 | 4,5 | 473.545.242.632 | |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | SKPD PENANGGUNG JAWAB | |
|-----------------|---|---|---|---|----------------|---|----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|--|-----------------|-----------------------|------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | |
| Sasaran II. 2.1 | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan | Jumlah RS terakreditasi | - | 1 RS | | 1 RS | | 1 RS | | 1 RS | | 1 RS | | 1 RS | | 1 RS | | 91.933.797.000 | |
| | | Persentase puskesmas yang ditingkatkan dari Non PRI menjadi PRI | 0% | 0% | 1.947.797.000 | 19% | 2.356.000.000 | 28% | 13.210.000.000 | 55% | 21.310.000.000 | 82% | 26.460.000.000 | 100% | 26.650.000.000 | 100% | | | |
| 1.01.02.26 | Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit | Terpenuhinya standar pelayanan Rumah Sakit tipe C | 46% | 46% | | 51% | | 58% | | 60% | | 65% | | 70% | | 70% | | 84.533.597.000 | RSUD |
| | | 1. BOR (65%) 2. TOI (2,5 hari) 3. GDR (2,5%) 4. NDR (1,5%) 5. Jumlah TT 200 | 44,35% 3,9 hari 4,3% 1,4% 101 | 44,35% 3,9 hari 4,3% 1,4% 110 | 1.227.597.000 | 52,45% 3 hari 4,3% 1,4% 120 | 1.306.000.000 | 62% 3 hari 3,7% 1,4% 130 | 12.000.000.000 | 63% 3 hari 3,5% 1,4% 150 | 20.000.000.000 | 65% 2,5 hari 3% 1,4% 170 | 25.000.000.000 | 65% 2,5 hari 3% 1,4% 200 | 25.000.000.000 | 65% 2,5 hari 3% 1,4% 200 | | | |
| 1.01.02.27 | Program Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit | Kualitas sarana dan prasarana kesehatan RSUD | 3 gedung dan 8 unit alkes | 3 gedung dan 8 unit alkes | 720.200.000 | 3 gedung dan 8 unit alkes | 1.050.000.000 | 3 gedung dan 8 unit alkes | 1.210.000.000 | 3 gedung dan 8 unit alkes | 1.310.000.000 | 3 gedung dan 8 unit alkes | 1.460.000.000 | 3 gedung dan 8 unit alkes | 1.650.000.000 | 3 gedung dan 8 unit alkes | 7.400.200.000 | RSUD | |
| Sasaran II. 2.2 | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat | Indeks Kepuasan Pelanggan | 3,8 | 3,8 | 29.957.796.816 | 3,8 | 48.694.946.816 | 4 | 84.668.542.000 | 4 | 73.303.144.000 | 4,2 | 68.282.156.000 | 4,5 | 66.629.860.000 | 4,5 | 371.536.445.632 | | |
| 1.01.02.15 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di kabupaten berdasarkan indikator | 50% | 60% | 10.706.000.000 | 60% | 11.576.000.000 | 60% | 12.183.000.000 | 70% | 12.624.000.000 | 70% | 13.748.000.000 | 75% | 14.469.000.000 | 75% | 75.306.000.000 | DINKES | |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|------------|--|--|---|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--|-----------------|-----------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | |
| | | ketersediaan Kementerian Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan kesehatan lanjutan sesuai dengan kebutuhan | 132.993 resep | 405.500 resep | | 455.000 resep | | 180.000 resep | | 185.000 resep | | 200.000 resep | | 210.000 resep | | 1.635.500 Resep | | RSUD |
| 1.01.02.15 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Meningkatnya Kualitas Pelayanan RSUD BLUD | 0 | 0 | | 100% | | 80% | | 80% | | 90% | | 100% | | 100% | | RSUD |
| | | Frekwensi pelayanan Dokter Spesialis ke Puskesmas | 12 kali | 384 kali | | 12 kali | | 12 kali | | 18 kali | | 20 kali | | 20 kali | | 478 kali | | RSUD |
| | | Indeks kepuasan pelanggan | 3,8 | 3,8 | 12.888.946.816 | 4 | 30.918.946.816 | 4 | 62.780.000.000 | 4 | 49.900.000.000 | 4,2 | 42.480.000.000 | 4,5 | 42.980.000.000 | 4,5 | 241.947.893.632 | |
| | | Persentase jangkauan dan kualitas pelayanan Puskesmas, rumah sakit dan jaringannya | 31% | 31% | | 37% | | 43% | | 55% | | 60% | | 65% | | 65% | | DINKES |
| 1.01.02.23 | Program standarisasi pelayanan kesehatan | Persentase Kunjungan Pelayanan Kesehatan ke Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk | 41,49% | 55% | 3.000.000.000 | 60% | 6.200.000.000 | 62% | 6.200.000.000 | 70% | 7.200.000.000 | 72% | 8.400.000.000 | 75% | 5.450.000.000 | 75% | 36.450.000.000 | DINKES |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|-----------------|--|--|---|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|-----------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | |
| | | Persentase Kecamatan yang mempunyai Puskesmas Terakreditasi | 0 | 30,76% | | 69,23% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | | RSUD Kabupaten yang Terakreditasi | 0 | 1 RS | | 1 RS | | 1 RS | | 1 RS | | 2 RS | | 2 RS | | 2 RS | | |
| | | Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 9 jenis tenaga kesehatan | 5 Puskesmas | 16 Puskesmas | | 16 Puskesmas | | 16 Puskesmas | | 16 Puskesmas | | 16 Puskesmas | | 16 Puskesmas | | 16 Puskesmas | | |
| | | Peningkatan Layanan Dokter Spesialis (orang) | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 10 | | 10 | | |
| | | Jumlah sistem informasi manajemen rumah sakit (SIM RS base) | 2 | 2 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | RSUD |
| 1.01.02.24 | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | Jumlah (jiwa) masyarakat miskin mendapat jaminan kesehatan dasar | 11.000 | 11.925 | 3.362.850.000 | 12.175 | 3.433.350.000 | 12.431 | 3.505.542.000 | 12.692 | 3.579.144.000 | 12.958 | 3.654.156.000 | 13.230 | 3.730.860.000 | 13.230 jiwa | 21.265.902.000 | DINKES |
| Sasaran II. 2.3 | Meningkatnya kualitas gizi keluarga dan pemerantasan penyakit menular maupun tidak menular | Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Balita | 19,7% | 19% | 925.000.000 | 18,5% | 1.350.000.000 | 18% | 1.600.000.000 | 17,5% | 1.850.000.000 | 17% | 2.075.000.000 | 16,5% | 2.275.000.000 | 16,5% | 10.075.000.000 | |
| | | Prevalensi Stunting Pada Baduta | 37% | 36% | | 35% | | 33% | | 31% | | 29% | | 29% | | 29% | | |
| | | Cakupan pencegahan akibat buruk | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|------------|--|--|---|---------------------------------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|---------------|-----------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | |
| | | dari penyakit menular | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cakupan pencegahan akibat buruk dari penyakit tidak menular | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| 1.01.02.20 | Program Perbaikan Gizi masyarakat | Menurunnya Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Balita | 19,7% | 19% | | 18,5% | | 18% | | 17,5% | | 17% | | 16,5% | | 16,5% | | |
| | | Menurunnya Prevalensi Stunting Pada Baduta | 37,9% | 37% | 125.000.000 | 36% | 350.000.000 | 35% | 400.000.000 | 33% | 450.000.000 | 31% | 475.000.000 | 29% | 475.000.000 | 29% | 2.275.000.000 | |
| 1.01.02.22 | Program pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular | Persentase Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap (Desa UCI) | 93,28% | 85% | | 85% | | 90% | | 95% | | 96% | | 97% | | 97% | | |
| | | Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif (Case Detection Rate/ CDR) | 52,52% | 75% | | 75% | | 75% | | 75% | | 75% | | 75% | | 75% | | |
| | | Angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA positif (Success Rate/ SR) | 85% | 100% | 800.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | 100% | 1.400.000.000 | 100% | 1.600.000.000 | 100% | 1.800.000.000 | 100% | 7.800.000.000 | |
| | | Persentase angka kasus HIV yang diobati | 35% | 50% | | 52% | | 54% | | 56% | | 58% | | 60% | | 60% | | |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|-----------------|---|---|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|--|----------------|-----------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | |
| | | Prevalensi Tekanan Darah Tinggi (Persen) | 7,4 | 24 | | 23,8 | | 23,7 | | 23,6 | | 23,5 | | 23,4 | | 23,4 | | |
| | | Incidence Rate (IR) DBD per 100.000 penduduk | 44,7 per 100.000 penduduk | < 49 per 100.000 penduduk | | < 49 per 100.000 penduduk | | < 49 per 100.000 penduduk | | < 49 per 100.000 penduduk | | < 49 per 100.000 penduduk | | < 49 per 100.000 penduduk | | < 49 per 100.000 penduduk | | |
| | | Annual Parasite Incidence (API) Malaria per 1000 penduduk | 0,3 | < 1 per 1.000 penduduk | | < 1 per 1.000 penduduk | | < 1 per 1.000 penduduk | | < 1 per 1.000 penduduk | | < 1 per 1.000 penduduk | | < 1 per 1.000 penduduk | | < 1 per 1.000 penduduk | | |
| Tujuan 3 | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup | Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga SDA dan pelestarian lingkungan | 35% | 40% | 753.411.600 | 45% | 674.385.600 | 50% | 1.722.738.952 | 55% | 2.067.286.742 | 60% | 2.480.744.091 | 65% | 2.604.780.495 | 65% | 10.303.347.480 | |
| Sasaran II. 3.1 | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup | Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga SDA dan pelestarian lingkungan | 35% | 40% | 498.462.000 | 45% | 252.410.000 | 50% | 948.468.000 | 55% | 1.138.161.600 | 60% | 1.365.793.920 | 65% | 1.434.083.616 | 65% | 5.637.379.136 | |
| 1.02.05.15 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Persentase usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencemaran lingkungan | 80% | 85% | 498.462.000 | 90% | 252.410.000 | 95% | 948.468.000 | 100% | 1.138.161.600 | 100% | 1.365.793.920 | 100% | 1.434.083.616 | 100% | 5.637.379.136 | DLH |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|-----------------|--|---|---|---------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--|-----------------|-----------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | |
| Sasaran II. 3.2 | Menurunnya dampak lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam | Persentase kegiatan / usaha yang memanfaatkan sumber daya alam sesuai peraturan | 75% | 80% | 234.949.600 | 84% | 337.225.600 | 90% | 392.870.952 | 92% | 471.445.142 | 94% | 565.734.171 | 96% | 594.020.879 | 96% | 2.596.246.344 | |
| 1.02.05.16 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | Deteksi dini potensi pencemaran lingkungan (spot/titik) | 46 | 52 | 234.949.600 | 78 | 337.225.600 | 86 | 392.870.952 | 92 | 471.445.142 | 96 | 565.734.171 | 100 | 594.020.879 | 100 | 2.596.246.344 | DLH |
| Sasaran II. 3.3 | Meningkatnya kearifan lokal dalam menjamin keberlanjutan ekosistem | Jumlah kearifan lokal yang menjaga keberlanjutan ekosistem yang dilestarikan | 1 | 2 | 20.000.000 | 4 | 84.750.000 | 6 | 381.400.000 | 8 | 457.680.000 | 9 | 549.216.000 | 10 | 576.676.000 | 10 | 2.069.722.800 | |
| 1.02.05.18 | Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup. | Meningkatnya akses dan jejaring lingkungan hidup | 10% | 15% | 20.000.000 | 30% | 84.750.000 | 60% | 381.400.000 | 70% | 457.680.000 | 80% | 549.216.000 | 80% | 576.676.800 | 80% | 2.069.722.800 | DLH |
| | Misi III | Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tujuan 1 | Meningkatnya pembangunan ekonomi masyarakat melalui investasi daerah dan daya serap tenaga kerja | Nilai PDRB ADHK | 25.982,7 milyar | 26.245,2 milyar | 21.216.436.300 | 26.800,8 milyar | 147.665.440.461 | 27.128,4 milyar | 113.068.911.450 | 27.950,0 milyar | 113.140.272.000 | 28.201,9 milyar | 15.578.629.000 | 29.066,2 milyar | 15.651.292.000 | 29.066,2 milyar | 419.916.147.200 | |
| Sasaran III.1.1 | Meningkatnya investasi daerah | Nilai Investasi | 16,8 triliun | 17 triliun | 20.000.000.000 | 17,4 triliun | 146.288.633.500 | 18 triliun | 111.529.245.500 | 18,6 triliun | 110.833.572.000 | 19,2 triliun | 13.176.629.000 | 19,8 triliun | 13.184.292.000 | 19,8 triliun | 415.770.797.000 | |
| 1.01.03.15 | Program pembangunan jalan dan jembatan. | Pembangunan Jalan Konektifitas dan | 18,7 Km dan 60 % | 0 dan 5 Unit | 20.000.000.000 | 12 Km dan 36 Unit | 145.000.000.000 | 12 Km dan 30 Unit | 109.500.000.000 | 11 Km dan 30 Unit | 107.850.000.000 | 10 Km | 10.500.000.000 | 11 Km | 10.200.000.000 | 56 Km 101 unit | 403.050.000.000 | PUPR |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|------------------------|---|--|---|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|--|----------------------|-----------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | |
| | | Peningkatan Panjang Jembatan 101 Unit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.12.15 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. | Jumlah IKM yang menjalin kerja sama Investasi dan Perdagangan (Pelaku Usaha Komoditi Lokal) | 4 IKM | - | - | 5 IKM | 1.053.453.000 | 3 IKM | 1.471.279.000 | 3 IKM | 1.958.000.000 | 3 IKM | 1.690.000.000 | 2 IKM | 1.835.000.000 | 16 IKM | 8.007.732.000 | DPM-PTSP |
| | | Jumlah jalinan kerjasama pameran investasi | 2 jalinan kerjasama pameran investasi | - | | 2 jalinan kerjasama pameran investasi | | 2 jalinan kerjasama pameran investasi | | 2 jalinan kerjasama pameran investasi | | 2 jalinan kerjasama pameran investasi | | 2 jalinan kerjasama pameran investasi | | 10 jalinan kerjasama pameran investasi | | |
| 1.01.12.15 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. | Jumlah daerah yang dijangkau untuk menjalin kerjasama dengan Pemda kab. Tanjung Jabung barat | 10 daerah | - | - | 2 daerah | 110.180.500 | 2 daerah | 145.974.500 | 2 daerah | 160.572.000 | 2 daerah | 176.629.000 | 2 daerah | 194.292.000 | 10 daerah | 787.648.000 | SETDA Bag. Ekonomi |
| 1.01.12.16 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Meningkatnya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | 16,8 Triliun | - | - | 17,4 Triliun | 125.000.000 | 18 Triliun | 411.992.000 | 18,6 Triliun | 865.000.000 | 19,2 Triliun | 810.000.000 | 19,8 Triliun | 955.000.000 | 19,8 Triliun | 3.925.417.000 | DPM-PTSP |
| Sasaran III.1.2 | Meningkatnya daya serap tenaga kerja | Tingkat partisipasi angkatan kerja | 67,12 | 68,20 | 1.216.436.300 | 68,60 | 1.376.806.961 | 69,00 | 1.539.665.950 | 69,40 | 2.306.700.000 | 69,80 | 2.402.000.000 | 70,20 | 2.467.000.000 | 70,20 | 4.145.350.200 | |
| 1.02.01.16 | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | Meningkatnya jumlah pelayanan pencari kerja | 200 orang | 200 orang | 269.700.000 | 200 orang | 512.040.711 | 300 orang | 959.700.000 | 300 orang | 639.700.000 | 300 orang | 639.000.000 | 300 orang | 639.000.000 | 1400 orang | 3.655.140.711 | Naker |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|-----------------|---|--|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | |
| | | dan tenaga kerja yang ditempatkan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.07.16 | Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan | Penguatan lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri dan unggul | 34 BUM desa | 60 BUM desa | 279.875.000 | 95 BUM desa | 443.876.250 | 100 BUM desa | 343.598.950 | 105 BUM desa | 962.000.000 | 110 BUM desa | 1.028.000.000 | 114 BUM desa | 1.088.000.000 | 114 BUM desa | 4.145.350.200 | PMD |
| 1.02.07.17 | Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Terbentuknya 1 BUM desa bersama di setiap kecamatan | 1 BUM desa bersama | 1 BUM desa bersama | 666.861.300 | 2 BUM desa bersama | 420.890.000 | 2 BUM desa bersama | 236.367.000 | 2 BUM desa bersama | 705.000.000 | 2 BUM desa bersama | 735.000.000 | 3 BUM desa bersama | 740.000.000 | 13 BUM desa bersama | 3.504.118.300 | PMD |
| Tujuan 2 | Meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat | Laju Pertumbuhan PDRB | 3,64% | 3,14% | 3.962.975.700 | 3,25 | 11.263.899.000 | 3,50 | 15.067.884.644 | 3,79% | 16.894.093.379 | 4,00% | 15.193.068.945 | 4,28% | 17.584.602.320 | 4,28% | 79.966.523.988 | |
| Sasaran III.2.1 | Meningkatnya daya saing agroindustri dan perikanan | Nilai ekspor agroindustri | USD 16,244,005.50 | USD 19,693,267.50 | 981.165.000 | USD 11,549,655.07 | 2.247.735.000 | USD 14,000,000.00 | 6.905.887.000 | USD 15,000,000.00 | 5.821.140.700 | USD 16,500,000.00 | 6.094.557.500 | USD 18,000,000.00 | 5.926.713.700 | USD 18,000,000.00 | 27.977.198.900 | |
| | | Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan | 876.326 kg | 943.834 kg | | 1.049.168 kg | | 1.059.659 kg | | 1.071.748 kg | | 1.084.884 kg | | 1.099.759 kg | | 1.099.759 kg | | |
| 2.01.07.16 | Program pengembangan industri kecil dan menengah | Meningkatnya pertumbuhan IKM Formal dan Nonformal yang berdaya saing | 350 IKM | 50 IKM | 349.450.000 | 50 IKM | 418.515.000 | 50 IKM | 4.100.000.000 | 50 IKM | 1.975.000.000 | 50 IKM | 2.225.000.000 | 50 IKM | 2.200.000.000 | 300 IKM | 11.267.965.000 | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan |
| 2.01.01.20 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | Meningkatnya produksi perikanan budidaya | 1.828 ton | 1.934 ton | 301.430.000 | 2.102 ton | 1.829.220.000 | 1.985 ton | 1.275.687.000 | 2.084 ton | 1.403.255.700 | 2.150 ton | 1.555.669.500 | 2.250 ton | 1.709.025.700 | 14.333 ton | 8.074.287.900 | Dinas Perikanan |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|------------------------|--|---|---|---------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--|-----------------------|--|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | |
| | | Meningkatnya produksi benih ikan | 445.000 ekor | 476.000 ekor | | 550.000 ekor | | 630.000 ekor | | 680.000 ekor | | 710.000 ekor | | 750.000 ekor | | 750.000 ekor | | |
| Sasaran III.2.2 | Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam pengelolaan agroindustri dan perikanan | Jumlah koperasi aktif | 133 | 155 | | 176 | | 198 | | 223 | | 234 | | 249 | | 249 | | 9.204.622.000 |
| | | Jumlah UMKM berkelanjutan | 145 | 150 | 330.285.000 | 159 | 569.676.000 | 170 | 1.530.200.000 | 195 | 2.442.885.000 | 220 | 2.313.888.000 | 245 | 2.017.688.000 | 245 | 9.204.622.000 | |
| 1.02.11.15 | Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif. | Meningkatnya Jumlah UMKM yang berkelanjutan | 10 Kop/KSP /USP dan 145 UMKM | - | - | - | - | 15 Kop/KSP/USP / 25 UMKM | 497.700.000 | 10 Kop/KSP/USP / 25 UMKM | 1.341.885.000 | 10 Kop/KSP/USP / 25 UMKM | 1.351.888.000 | 10 Kop/KSP/USP / 25 UMKM | 927.688.000 | 55Kop/KSP/USP dan 245 UMKM | 4.119.161.000 | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan |
| 1.02.11.18 | Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi | Meningkatnya jumlah koperasi aktif | 133 | 20 kop | 330.285.000 | 21 kop | 569.676.000 | 22 kop | 1.032.500.000 | 25 kop | 1.101.000.000 | 28 kop | 962.000.000 | 30 kop | 1.090.000.000 | 279 kop | 5.085.461.000 | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan |
| Sasaran III.2.3 | Meningkatnya kesejahteraan pekerja untuk pengurangan kesenjangan dan kemiskinan | Upah Minimum Kabupaten | Rp.1.808.201,41 | Rp.1.926.000,00 | 1.079.030.200 | Rp.2.084.895,00 | 1.966.300.000 | Rp.2.280.249,66 | 2.032.515.000 | Rp.2.394.262,14 | 2.515.903.000 | Rp.2.556.048,84 | 2.670.903.000 | Rp.2.682.132,44 | 2.825.903.000 | Rp.2.682.132,44 | 13.090.554.200 | |
| | | Indeks Gini Rasio | 0,332 | 0,328 | | 0,325 | | 0,320 | | 0,319 | | 0,315 | | 0,30 | | 0,30 | | |
| 2.01.03.15 | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | Pertumbuhan Insentif dan disinsentif bagi Kelompok Tani | 1.422 Kelpk Tani | 1.422 Kelpk Tani | 845.750.000 | 1.472 Kelpk Tani | 1.610.000.000 | 1.500 Kelpk Tani | 1.765.000.000 | 1.525 Kelpk Tani | 1.920.000.000 | 1.550 Kelpk Tani | 2.075.000.000 | 1.575 Kelpk Tani | 2.230.000.000 | 1.575 Kelpk Tani | 10.445.750.000 | BP4K |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|-----------------|---|--|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|--|----------------|-----------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | |
| 1.02.01.17 | Program perlindungan dan pengembangan Lembaga ketenagakerjaan | Jumlah perusahaan yang dilakukan pembinaan, pengembangan, dan penyelesaian serta pendataan perusahaan dan tenaga kerja | 30 perusahaan | 30 perusahaan | 233.280.200 | 30 perusahaan | 356.300.000 | 30 perusahaan | 267.515.000 | 30 perusahaan | 595.903.000 | 30 perusahaan | 595.903.000 | 30 perusahaan | 595.903.000 | 180 perusahaan | 2.644.804.200 | Naker |
| Sasaran III.2.4 | Meningkatnya produk lokal yang terdaftar legalitasnya | Persentase produk lokal yang terdaftar legalitasnya | 42% | 45% | 358.483.500 | 50% | 444.400.000 | 55% | 558.970.000 | 68% | 547.367.000 | 75% | 644.953.700 | 80% | 734.024.070 | 80% | 3.288.198.270 | |
| 1.02.11.17 | Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | Jumlah Kop/KSP/USH dan UMKM yang mempunyai SDM sesuai kompetensi berkualitas | 15 Kop/KSP /USP / 25 UMKM | 10 Kop/KS P/USP / 25 UMKM | 263.202.000 | 15 Kop/KS P/USP / 25 UMKM | 326.360.000 | 15 Kop/KSP/USP / 25 UMKM | 490.000.000 | 10 Kop/KSP/ USP / 25 UMKM | 471.500.000 | 10 Kop/KS P/USP / 25 UMKM | 561.500.000 | 10 Kop/KSP/ USP / 25 UMKM | 642.225.000 | 70 Kop/KS P/USP /150UM KM | 2.754.787.000 | DTPH |
| | | Terpenuhinya promosi produk unggulan perkebunan | 4 kali | 4 kali | 95.281.500 | 3 kali | 118.040.000 | 2 kali | 68.970.000 | 2 kali | 75.867.000 | 2 kali | 83.453.700 | 2 kali | 91.799.070 | 15 kali | 533.411.270 | Disbunak |
| Sasaran III.2.5 | Meningkatnya pemasaran produk unggulan daerah | Persentase pemasaran produk unggulan daerah ke pasaran | 65% | 70% | 122.800.000 | 73% | 1.477.023.000 | 75% | 1.904.778.050 | 78% | 2.414.722.287 | 80% | 2.171.663.795 | 85% | 2.343.477.839 | 85% | 10.434.464.971 | |
| 2.01.03.25 | Program pengembangan agribisnis | Jumlah komoditi yang dikerjasama-mitirkan antara | 1 komoditi | 1 komoditi | 122.800.000 | 1 komoditi | 313.389.500 | 1 komoditi | 287.524.550 | 1 komoditi | 296.150.287 | 1 komoditi | 305.034.795 | 1 komoditi | 314.185.839 | 5 komoditi | 1.639.084.971 | Disbunak |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|-----------------|---|---|---|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|--|----------------|-----------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | |
| | perkebunan | perusahaan dengan lembaga/asosiasi petani | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.12.15 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. | Jumlah Jalinan kerja sama Investasi dan Perdagangan (Pelaku Usaha Komoditi Lokal) | 4 IKM | - | | 5 IKM | | 3 IKM | | 3 IKM | | 3 IKM | | 2 IKM | | 16 IKM | | DPM-PTSP |
| | | Jumlah promosi penanaman modal | 2 jalinan kerjasama pameran investasi | - | - | 2 jalinan kerjasama pameran investasi | 1.053.453.000 | 2 jalinan kerjasama pameran investasi | 1.471.279.000 | 2 jalinan kerjasama pameran investasi | 1.958.000.000 | 2 jalinan kerjasama pameran investasi | 1.690.000.000 | 2 jalinan kerjasama pameran investasi | 1.835.000.000 | 10 jalinan kerjasama pameran investasi | 8.007.732.000 | |
| | | Jumlah daerah yang dijajaki untuk menjalin kerjasama dengan Pemda kab. Tanjung Jabung barat | 10 daerah | - | - | 2 daerah | 110.180.500 | 2 daerah | 145.974.500 | 2 daerah | 160.572.000 | 2 daerah | 176.629.000 | 2 daerah | 194.292.000 | 10 daerah | 787.648.000 | SETDA Bag. Ekonomi |
| Sasaran III.2.6 | Berkembangnya potensi wisata agar menjadi objek wisata yang dikenal luas masyarakat | Jumlah kunjungan wisatawan | 1100 orang | 1240 orang | 1.091.212.000 | 1340 orang | 4.558.765.000 | 1410 orang | 2.135.534.594 | 1520 orang | 3.152.075.392 | 1620 orang | 3.468.766.745 | 1800 orang | 3.736.795.711 | 1800 orang | 13.322.052.428 | |
| 2.01.02.15 | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. | Jumlah kunjungan wisatawan | 1100 orang | 1240 orang | 780.132.000 | 1340 orang | 4.459.060.000 | 1410 orang | 1.474.441.250 | 1520 orang | 1.030.323.713 | 1620 orang | 1.104.339.898 | 1800 orang | 1.159.556.893 | 1800 orang | 10.007.853.754 | Disparpora |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|--|---|---------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--|----------------|-----------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | |
| 2.01.02.17 | Program pengembangan kemitraan | Jumlah lembaga / organisasi / pelaku pariwisata yang dibina | 0 | 0 | - | 3 | 99.705.000 | 3 | 109.675.844 | 4 | 938.011.429 | 5 | 1.031.812.572 | 5 | 1.134.993.829 | 5 | 3.314.198.674 | Disparpora |
| 2.01.02.16 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Jumlah potensi wisata yang dikelola | 1 potensi wista | 1 potensi wisata | 311.080.000 | 0 potensi wisata | - | 3 potensi wisata | 551.417.500 | 3 potensi wisata | 1.183.740.250 | 4 potensi wisata | 1.332.614.275 | 4 potensi wisata | 1.442.244.989 | 4 potensi wisata | 4.821.097.014 | Disparpora |
| <p>Misi IV Meningkatkan persatuan dan kesatuan daerah melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tujuan 1 | Meningkatnya kualitas tatanan masyarakat dalam beragama dan berbudaya | Tidak adanya konflik sosial terkait agama dan budaya | 0 | 0 | 3.082.726.700 | 0 | 3.943.790.504 | 0 | 4.798.831.074 | 0 | 5.743.241.208 | 0 | 6.192.423.949 | 0 | 6.330.185.549 | 0 | 25.491.822.484 | |
| Sasaran IV.1.1 | Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya | Indeks kerukunan umat beragama (KUB Kemenag) | 85% | 85% | 3.082.726.700 | 86% | 3.943.790.504 | 87% | 4.798.831.074 | 88% | 5.743.241.208 | 89% | 6.192.423.949 | 90% | 6.330.185.549 | 90% | 25.491.822.484 | |
| 1.02.16.15 | Program Pengembangan Nilai Budaya | Jumlah pengelola kelembagaan agama dan budaya | 0 | 0 | 0 | 1 lembaga & 1 sanggar | 445.000.000 | 1 lembaga & 1 sanggar | 746.000.000 | 2 lembaga & 2 sanggar | 816.000.000 | 2 lembaga & 3 sanggar | 886.000.000 | 3 lembaga & 3 sanggar | 972.000.000 | 3 lembaga & 3 sanggar | 3.865.000.000 | Dikbud |
| 1.02.16.19 | Program Pelestarian Nilai Budaya | Jumlah budaya yang dilestarikan | 1 budaya | - | - | 2 budaya | 417.000.000 | 3 budaya | 625.000.000 | 4 budaya | 1.246.000.000 | 5 budaya | 1.350.000.000 | 6 budaya | 1.464.000.000 | 6 budaya | 5.102.000.000 | Dikbud |
| 1.20.01 | Program keagamaan dan kemasyarakatan | Meningkatnya prestasi keagamaan kecamatan di kompetisi tingkat kabupaten | Peringkat | Peringkat | 3.082.726.700 | Peringkat | 3.081.790.504 | Peringkat | 3.427.831.074 | Peringkat | 3.681.241.208 | Peringkat | 3.956.423.949 | Peringkat | 3.894.185.549 | Peringkat | 16.524.822.484 | Seluruh Kecamatan |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | SKPD PENANGGUNG JAWAB | | | | | | |
|----------------|---|--|---|---------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | | | | | | | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | | | | | | |
| Tujuan 2 | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan | Opini Laporan Keuangan pemerintah | Disclaimer | WDP | 123.666.130.168 | WDP | 200.183.516.100 | WDP | 202.220.328.464 | WDP | 104.200.736.357 | WTP | 55.027.068.108 | WTP | 64.925.753.005 | WTP | 750.223.532.202 | | | | | | | |
| Sasaran IV.2.1 | Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik | Indeks Kualitas Pelayanan Publik | 74,5 | 74,5 | 608.568.700 | 74,5 | 1.465.247.750 | 74,5 | 4.347.951.350 | 75 | 6.130.160.000 | 75 | 5.991.361.000 | 80 | 5.567.687.100 | 85 | 24.110.975.900 | | | | | | | |
| 1.20.31 | Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Ketepatan waktu penetapan APBD | Tidak tepat waktu | Tepat waktu | 7.722.912.900 | Tepat waktu | 11.000.000.000 | Tepat waktu | 7.828.879.020 | Tepat waktu | 11.597.997.829 | Tepat waktu | 12.220.719.909 | Tepat waktu | 13.193.399.970 | Tepat waktu | 63.563.909.628 | BPKAD | | | | | | |
| | | Kelancaran pelayanan belanja tidak langsung dan langsung | 12 bulan | 12 bulan | | 12 bulan | | 12 bulan | | 12 bulan | | 12 bulan | | 12 bulan | | 12 bulan | | | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | | | |
| | | Jumlah laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu | 1 dokumen | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen |
| | | Jumlah dokumen data barang milik daerah yang akurat | 1 dokumen | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen |
| 1.20.20 | Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | Persentase ketaatan OPD dalam penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan | 100% | 100% | 2.652.125.400 | 100% | 2.810.645.000 | 100% | 2.810.645.000 | 100% | 2.810.645.000 | 100% | 2.810.645.000 | 100% | 2.810.645.000 | 100% | 16.705.350.400 | Inspektora t | | | | | | |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|----------------|---|---|---|---------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--|-----------------|-----------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | |
| | | hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) dan ekstern | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan | Indeks Kualitas Pelayanan Publik | 74,5 | 74,5 | 608.568.700 | 74,5 | 761.887.750 | 74,5 | 1.084.669.000 | 75 | 1.621.750.000 | 75 | 1.427.500.000 | 80 | 1.496.750.000 | 85 | 7.001.125.450 | SETDA Bag. Organisasi |
| | Program layanan pengelolaan informasi, komunikasi dan opini publik | Jumlah layanan informasi dan komunikasi publik | 0 | - | - | 4 media komunikasi | 703.360.000 | 4 media komunikasi | 1.838.696.750 | 4 media komunikasi | 2.493.410.000 | 4 media komunikasi | 2.888.861.000 | 4 media komunikasi | 3.045.937.100 | 4 media komunikasi | 10.970.264.850 | Kominfo |
| | | Jumlah informasi melalui media komunikasi | 0 | - | 1000 berita | 1200 berita | 1500 berita | 1700 berita | 2000 berita | 2000 berita | | | | | | | | |
| | Program Peningkatan Pelayanan Publik | Meningkatnya pelayanan perizinan yang akutanbel dan transparan sesuai peraturan | 1500 izin | - | - | - | - | 2100 izin | 1.424.585.600 | 2200 izin | 2.015.000.000 | 2300 izin | 1.675.000.000 | 2400 izin | 1.025.000.000 | 9.000 izin | 6.139.585.600 | DPM-PTSP |
| Sasaran IV.2.2 | Meningkatnya kualitas aparatur pelayanan publik | Persentase aparatur pelayanan publik yang memenuhi kompetensi | 15% | 25% | 57.081.007.034 | 50% | 93.238.003.990 | 60% | 40.045.260.182 | 70% | 42.996.015.135 | 80% | 33.740.581.858 | 90% | 22.433.832.172 | 90% | 289.534.700.371 | |
| 1.20.29 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Meningkatnya persentase aparatur yang | 70% | 73% | 677.594.500 | 75% | 1.253.739.630 | 80% | 1.119.143.250 | 85% | 2.432.458.913 | 85% | 2.484.581.858 | 85% | 1.867.810.951 | 85% | 9.835.329.102 | BKPSDM |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|----------------|--|---|---|---------------------------------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|-----------------|-----------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | |
| | | memenuhi standar kompetensi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya Kelengkapan dan Kualitas Pelayanan Birokrasi | 90% | 90% | 56.403.412.534 | 95% | 91.984.264.360 | 100% | 38.926.116.932 | 100% | 40.563.556.222 | 100% | 31.256.000.000 | 100% | 20.566.021.221 | 100% | 279.699.371.269 | Seluruh SKPD |
| Sasaran IV.2.3 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah | Opini laporan keuangan pemerintah | Disclaimer | WDP | 63.497.500.434 | WDP | 103.053.264.360 | WTP | 155.565.116.932 | WTP | 52.869.361.222 | WTP | 12.962.305.250 | WTP | 34.135.031.733 | WTP | 453.338.579.931 | |
| | Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Disclaimer | WDP | 7.094.087.900 | WDP | 11.069.000.000 | WTP | 11.663.900.000 | WTP | 12.305.805.000 | WTP | 12.962.305.250 | WTP | 13.569.010.512 | WTP | 173.639.208.662 | BPKAD |
| 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya Kelengkapan dan Kualitas Pelayanan Birokrasi | 90% | 90% | 56.403.412.534 | 95% | 91.984.264.360 | 100% | 38.926.116.932 | 100% | 40.563.556.222 | 100% | 31.256.000.000 | 100% | 20.566.021.221 | 100% | 279.699.371.269 | Seluruh SKPD |
| Sasaran IV.2.4 | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | Tingkat keselarasan dokumen perencanaan | 76% | 80% | 2.230.660.000 | 90% | 2.085.000.000 | 90% | 2.004.000.000 | 90% | 1.829.000.000 | 95% | 1.919.000.000 | 100% | 2.334.000.000 | 100% | 10.068.350.000 | |
| | Program perencanaan pembangunan daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu | 40% | 50% | 2.230.660.000 | 70% | 2.085.000.000 | 80% | 2.004.000.000 | 90% | 1.829.000.000 | 100% | 1.919.000.000 | 100% | 2.334.000.000 | 100% | 10.068.350.000 | Bappeda |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|----------------|--|---|---|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|--|----------------|-----------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | |
| | | Tingkat kelengkapan dokumen perencanaan sesuai peraturan | 15% | 20% | | 40% | | 60% | | 80% | | 90% | | 90% | | 90% | | |
| | | Tingkat pelaksanaan evaluasi / review dokumen perencanaan | 10% | 10% | | 30% | | 60% | | 80% | | 90% | | 95% | | 95% | | |
| Sasaran IV.2.5 | Meningkatnya pelayanan perpustakaan | Jumlah pengunjung perpustakaan | 10.500 pengunjung | 11.186 pengunjung | 248.394.000 | 18.720 pengunjung | 342.000.000 | 26.254 pengunjung | 258.000.000 | 33.788 pengunjung | 376.200.000 | 41.322 pengunjung | 413.820.000 | 48.858 pengunjung | 455.202.000 | 48.858 pengunjung | 2.093.616.000 | |
| 1.02.17.15 | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. | Meningkatnya Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan | 60 perpustakaan di desa/ kelurahan | 24 perpustakaan di desa/ kelurahan | 248.394.000 | 24 perpustakaan di desa/ kelurahan | 342.000.000 | 28 perpustakaan di desa/ kelurahan | 258.000.000 | 30 perpustakaan di desa/ kelurahan | 376.200.000 | 32 perpustakaan di desa/ kelurahan | 413.820.000 | 36 perpustakaan di desa/ kelurahan | 455.202.000 | 174 perpustakaan di desa/ kelurahan | 2.093.616.000 | Dinas Pustaka |
| | | Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Per tahun | 10.500 pengunjung | 11.186 pengunjung | | 18.720 pengunjung | | 26.254 pengunjung | | 33.788 pengunjung | | 41.322 pengunjung | | 48.858 pengunjung | | 48.858 pengunjung | | |
| Tujuan 3 | Meningkatnya kepastian hukum dan kualitas pembinaan / pengawasan kinerja pemerintah daerah | Peraturan / kebijakan yang jelas dan logis terkait urusan khalayak ramai yang dikeluarkan | 2 | 0 | 4.124.644.100 | 2 | 4.599.762.750 | 2 | 5.065.666.000 | 2 | 5.719.782.200 | 1 | 5.654.270.920 | 1 | 5.865.133.512 | 7 | 30.165.309.482 | |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|----------------|--|--|---|---------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|----------------|-----------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | |
| | | Level kapabilitas APIP | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | |
| Sasaran IV.3.1 | Meningkatnya kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha | Peraturan / kebijakan yang jelas dan logis terkait urusan khalayak ramai yang dikeluarkan | 2 | 0 | 863,950,000 | 2 | 1.027.230.000 | 2 | 1.170.352.000 | 2 | 1.287.387.200 | 1 | 1.416.125.920 | 1 | 1.557.738.512 | 7 | 6.458.833.632 | |
| 1.20.23 | Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi | Meningkatnya jumlah masyarakat umum dalam mengakses produk hukum daerah | 425 orang | - | - | 500 orang | 184.570.000 | 600 orang | 203.027.000 | 600 orang | 223.329.700 | 600 orang | 245.662.670 | 700 orang | 270.228.937 | 700 orang | 1.126.818.307 | SETDA Bag. Hukum |
| 1.20.26 | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | Persentase penataan produk hukum daerah sesuai pedoman penyusunan produk hukum daerah | 100% | - | - | 100% | 842.660.000 | 100% | 967.325.000 | 100% | 1.064.057.500 | 100% | 1.170.463.250 | 100% | 1.287.509.575 | 100% | 5.332.015.325 | SETDA Bag. Hukum |
| | | Meningkatnya keselarasan perda terhadap peraturan perundangan di atasnya | 100% | 100% | 863,950,000 | 100% | 745,400,000 | 100% | 3,260,000,000 | 100% | 3,713,040,000 | 100% | 3,713,040,000 | 100% | 3,756,570,000 | 100% | 16,052,000,000 | Setwan DPRD |
| Sasaran IV.3.2 | Meningkatnya akutambilitas kinerja perangkat daerah (Tipe A / B) | Persentase Perangkat Daerah (Tipe A/B) dengan akutambilitas kinerja bernilai B (Nilai AKIP Tanjab Barat) | 62% | 72% | 3.260.694.100 | 80% | 3.572.532.750 | 88% | 3.895.314.000 | 90% | 4.432.395.000 | 95% | 4.238.145.000 | 100% | 4.307.395.000 | 100% | 23.706.475.850 | |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|---------|---|--|---|---------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|----------------|-----------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | |
| 1.20.22 | Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan | Persentase PD dengan akutanbilas kinerja yang bernilai B | 56% | 70% | 608.568.700 | 85% | 761.887.750 | 95% | 1.084.669.000 | 98% | 1.621.750.000 | 100% | 1.427.500.000 | 100% | 1.496.750.000 | 100% | 7.001.125.450 | SETDA Bag. Organisasi |
| 1.20.20 | Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | Persentase ketaatan OPD dalam penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) dan ekstern | 100% | 100% | 2.652.125.400 | 100% | 2.810.645.000 | 100% | 2.810.645.000 | 100% | 2.810.645.000 | 100% | 2.810.645.000 | 100% | 2.810.645.000 | 100% | 16.705.350.400 | Inspektora t |



BAB VII

Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah

Pemetaan urusan pemerintahan konkuren pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016–2021 disusun sebagaimana ditentukan dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada pasal–pasal sebagai berikut:

1. Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

2. Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;



- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan
 - f. masyarakat; dan
 - g. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.



3. Pasal 209

(1) Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas; dan
- e. badan.

(2) Perangkat Daerah kabupaten/ kota terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan; dan
- f. Kecamatan.

(3) Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.

4. Pasal 219

(1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1)huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. keuangan;
- c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- d. penelitian dan pengembangan; dan
- e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya mengaplikasikan program pembangunan beserta perkiraan biaya yang dibutuhkan, maka RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 – 2021 disusun sebagaimana tabel berikut:



Tabel T.VII.C.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

| Kode | Kapasitas Riil / Belanja | Proyeksi | | | | | |
|------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | KAPASITAS RIIL KEUANGAN | 625.843.250.000 | 692.046.650.000 | 670.685.740.000 | 694.363.210.000 | 716.809.550.000 | 738.835.690.000 |
| | BELANJA | | | | | | |
| | Belanja Tidak Langsung | | | | | | |
| | Belanja Pegawai | 405.495.560.000 | 446.045.116.000 | 490.649.627.600 | 515.182.108.980 | 528.061.661.705 | 535.982.586.630 |
| | Belanja Bunga | | | | | | |
| | Belanja Subsidi | 7.000.000.000 | 7.700.000.000 | 8.470.000.000 | 8.893.500.000 | 9.115.837.500 | 9.252.575.063 |
| | Belanja Hibah | 3.712.710.000 | 4.083.981.000 | 4.492.379.100 | 4.716.998.055 | 4.834.923.006 | 4.907.446.851 |
| | Belanja Bantuan Sosial | | | | | | |
| | Belanja Bagi Hasil | 628.750.000 | 691.625.000 | 760.787.500 | 798.826.875 | 818.797.547 | 831.079.510 |
| | Belanja Bantuan Keuangan | 128.006.030.000 | 140.806.633.000 | 154.887.296.300 | 162.631.661.115 | 166.697.452.643 | 169.197.914.433 |
| | Belanja Tidak Terduga | 2.513.380.000 | 7.647.180.000 | 30.411.898.000 | 31.932.492.900 | 32.730.805.223 | 33.221.767.301 |
| | Belanja Langsung | | | | | | |
| | Belanja Pegawai | 64.425.690.000 | 70.868.259.000 | 77.955.084.900 | 81.852.839.145 | 83.899.160.124 | 85.157.647.525 |
| | Belanja Modal | 165.872.210.000 | 182.459.431.000 | 200.705.374.100 | 210.740.642.805 | 216.009.158.875 | 219.249.296.258 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 225.111.180.000 | 247.622.298.000 | 272.384.527.800 | 286.003.754.190 | 293.153.848.045 | 297.551.155.765 |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



**Tabel T.VII.C.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**

| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB |
|----------------------|--|--|---|---------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|-----------------|---------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | | | |
| PROGRAM RUTIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.20.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Berjalannya pelayanan administrasi perkantoran dengan lancar (Rata - rata bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 42.035.377.766 | 12 bulan | 52.415.227.956 | 12 bulan | 67.766.210.305 | 12 bulan | 68.960.156.000 | 12 bulan | 69.045.568.000 | 12 bulan | 58.956.791.836 | 12 bulan | 359.179.331.863 | SELURUH PD |
| 1.20.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase kecukupan sarana dan prasarana layak guna Perangkat daerah | 58% | 60% | 56.403.412.534 | 62% | 91.984.264.360 | 64% | 38.926.116.932 | 66% | 40.563.556.222 | 68% | 31.256.000.000 | 70% | 20.566.021.221 | 72% | 279.699.371.269 | Seluruh PD |
| 1.20.03 | Program peningkatan disiplin aparatur | Tingkat disiplin aparatur | 70% | 75% | 2.696.690.300 | 80% | 3.646.325.000 | 85% | 3.676.132.000 | 90% | 3.755.520.410 | 95% | 3.534.810.885 | 100% | 3.782.247.647 | 100% | 21.091.726.242 | Seluruh PD |
| 1.20.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase ASN sesuai kompetensi | 65% | 70% | 3.023.321.600 | 72% | 3.076.467.425 | 75% | 2.484.538.045 | 78% | 2.002.844.000 | 80% | 3.962.957.890 | 82% | 4.240.364.942 | 85% | 18.790.493.902 | Seluruh PD |
| 1.20.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP "B" | 85% | 90% | 2.745.993.700 | 95% | 2.461.465.330 | 100% | 2.835.277.990 | 100% | 3.656.300.770 | 100% | 3.599.437.585 | 100% | 3.851.398.216 | 100% | 19.149.873.591 | Seluruh PD |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|---|---|---------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|----------------|---------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | Rp | 12 | | | | |
| FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TERKAIT PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01 | Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.01.15 | Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat | APK PAUD usia 3-6 tahun | 35,57% | 35,7% | 3.565.000.000 | 39,57% | 3.727.860.000 | 40,36% | 3.865.160.000 | 41,17% | 3.932.110.000 | 41,99% | 4.000.300.000 | 42,83% | 4.069.740.000 | 42,83% | 23.160.170.000 | Dikbud |
| | | Angka melek aksara penduduk usia dewasa diatas 15 tahun | 96,75% | 96,75% | | 97,73% | | 98,71% | | 99,69% | | 100,69% | | 101,70% | | | | |
| 1.01.01.16 | Program Wajib Belajar 9 tahun | APK SD/SDLB/Paket A | 115,77% | 115,77% | 6.333.170.000 | 115,77% | 11.245.090.000 | 115,95% | 12.249.270.000 | 115,98% | 13.829.330.000 | 116,14% | 15.053.360.000 | 116,32% | 16.353.710.000 | 116,32% | 75.063.930.000 | Dikbud |
| | | APM SD/SDLB | 88,63% | 88,63% | | 88,63% | | 88,77% | | 89,06% | | 89,30% | | 89,45% | | | | |
| | | APK SMP/SMPLB/Paket B | 95,15% | 95,15% | | 95,15% | | 95,41% | | 95,68% | | 96,19% | | 96,20% | | | | |
| | | APM SMP/SMPLB | 66,93% | 66,93% | | 66,93% | | 68,59% | | 69,22% | | 69,83% | | 70,20% | | | | |
| 1.01.01.20 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan | Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki indeks kinerja minimal baik | 18% | 36% | 11.445.000.000 | 60% | 7.255.000.000 | 81% | 8.528.000.000 | 100% | 9.276.000.000 | 100% | 10.181.000.000 | 100% | 11.178.000.000 | 100% | 57.863.000.000 | Dikbud |
| | | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi keahlian khusus | 0% | - | | - | | 19% | | 33% | | 49% | | 63% | | | | |
| | | Persentase GTK Dikdas memperoleh penghargaan dan perlindungan | 0 | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | | |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB | |
|----------------|--|---|---|---------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|-----------------|---------------------|---------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | Rp | 12 | |
| | | Persentase GTK Dikdas meningkat karirnya | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | |
| | | Persentase guru dan ketenaga kependidikan yang memperoleh jaminan hidup | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | 100,00% |
| | | Persentase SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang memiliki GTK sesuai dengan SNP | 62,30% | 66,80% | | 69,30% | | 71,40% | | 77,50% | | 78,20% | | 80,10% | | 80,10% | | | 80,10% |
| 1.01.01.2 2 | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | Cakupan akses manajemen pelayanan pendidikan | 11,02% | 19,18% | 615.950.000 | 27,35% | 573.140.000 | 35,51% | 587.080.000 | 43,67% | 602.220.000 | 51,84% | 617.570.000 | 60,00% | 633.120.000 | 60,00% | 3.629.080.000 | | Dikbud |
| | Program Beasiswa Daerah | Jumlah penerima beasiswa | 0 Orang | - | - | - | - | 16 orang | 1.000.000.000 | 32 orang | 2.000.000.000 | 48 orang | 3.000.000.000 | 64 orang | 4.000.000.000 | 160 orang | 10.000.000.000 | | Dikbud |
| 1.02.02 | Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.1 5 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di kabupaten berdasarkan indikator ketersediaan Kementerian Kesehatan | 50% | 60% | 10.706.000.000 | 60% | 11.576.000.000 | 60% | 12.183.000.000 | 70% | 12.624.000.000 | 70% | 13.748.000.000 | 75% | 14.469.000.000 | 75% | 75.306.000.000 | | DINKES |
| 1.01.02.1 6 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Frekwensi pelayanan Dokter Spesialis ke Puskesmas | 12 kali | 384 kali | 12.888.946.816 | 12 kali | 30.918.946.816 | 12 kali | 62.780.000.000 | 18 kali | 49.900.000.000 | 20 kali | 42.480.000.000 | 20 kali | 42.980.000.000 | 478 kali | 241.947.893.632 | | RSUD |
| | | Indeks kepuasan pelanggan | 3,8 | 3,8 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4,2 | | 4,5 | | | | | |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB |
|------------|--|--|---|---------------------------------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|---------------|---------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | Rp | 12 | | | | |
| | | Persentase jangkauan dan kualitas pelayanan Puskesmas, rumah sakit dan jaringannya | 31% | 31% | | 37% | | 43% | | 55% | | 60% | | 65% | 65% | | DINKES | |
| 1.01.02.19 | Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat | Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan | 0 | 4 dokumen | 117.000.000 | 2 dokumen | 4.300.000.000 | 2 dokumen | 800.000.000 | 2 dokumen | 900.000.000 | 2 dokumen | 1.100.000.000 | 2 dokumen | 1.100.000.000 | 14 dokumen | 8.317.000.000 | DINKES |
| | | Persentase jumlah desa / kelurahan siaga aktif | 80% | 80% | | 3,7% | | 7,5% | | 11,2% | | 15% | | 18,6% | 18,6% | | DINKES | |
| 1.01.02.20 | Program Perbaikan Gizi masyarakat | Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Balita | 19,7% | 19% | 125.000.000 | 18,5% | 350.000.000 | 18% | 400.000.000 | 17,5% | 450.000.000 | 17% | 475.000.000 | 16,5% | 475.000.000 | 16,5% | 2.275.000.000 | DINKES |
| | | Prevalensi Stunting Pada Baduta | 37,9% | 37% | | 36% | | 35% | | 33% | | 31% | | 29% | 29% | | DINKES | |
| 1.01.02.21 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Persentase Rumah tangga dengan jamban sehat (Bersanitasi Baik) | 30 % | 35% | 150.000.000 | 40 % | 150.000.000 | 60 % | 250.000.000 | 70 % | 350.000.000 | 80 % | 400.000.000 | 85 % | 450.000.000 | 85 % | 1.750.000.000 | DINKES |
| 1.01.02.22 | Program pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular | Persentase Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap | 88,28% | 91,5%% | 800.000.000 | 92% | 1.000.000.000 | 92,5% | 1.200.000.000 | 93% | 1.400.000.000 | 93,5% | 1.600.000.000 | 94% | 1.800.000.000 | 94% | 7.800.000.000 | DINKES |
| | | Persentase Desa UCI | 78% | 80% | | 85% | | 90% | | 95% | | 95% | | 95% | 95% | | DINKES | |
| | | Angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA positif (Success Rate/ SR) | 85% | 85% | | 85% | | 85% | | 85% | | 85% | | 85% | 85% | | DINKES | |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB |
|------------|---|---|---|---------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|--|----------------|---------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | Rp | 12 | | | | |
| | | Persentase angka kasus HIV yang diobati | 35% | 50% | | 52% | | 54% | | 56% | | 58% | | 60% | | 60% | | |
| | | Prevalensi Tekanan Darah Tinggi (Persen) | 7,4 | 24 | | 23,8 | | 23,7 | | 23,6 | | 23,5 | | 23,4 | | 23,4 | | |
| | | Incidence Rate (IR) DBD per 100.000 penduduk | 44,7 per 100.000 penduduk | < 49 per 100.000 penduduk | | < 49 per 100.000 penduduk | | < 49 per 100.000 penduduk | | < 49 per 100.000 penduduk | | < 49 per 100.000 penduduk | | < 49 per 100.000 penduduk | | < 49 per 100.000 penduduk | | |
| | | Annual Parasite Incidence (API) Malaria per 1000 penduduk | 0,3 | < 1 per 1.000 penduduk | | < 1 per 1.000 penduduk | | < 1 per 1.000 penduduk | | < 1 per 1.000 penduduk | | < 1 per 1.000 penduduk | | < 1 per 1.000 penduduk | | < 1 per 1.000 penduduk | | |
| 1.01.02.23 | Program standarisasi pelayanan kesehatan | Persentase Kecamatan yang mempunyai Puskesmas Terakreditasi | 0 | 30,76% | | 69,23% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | | Jumlah RSUD Kabupaten yang terakreditasi | 0 | 1 RS | | 1 RS | | 1 RS | | 1 RS | | 2 RS | | 2 RS | | 2 RS | | |
| | | Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 9 jenis tenaga kesehatan | 5 Puskesmas | 6Puskesmas | 3.000.000.000 | 8 Puskesmas | 6.200.000.000 | 10 Puskesmas | 6.200.000.000 | 12 Puskesmas | 7.200.000.000 | 14 Puskesmas | 8.400.000.000 | 16 Puskesmas | 5.450.000.000 | 16 Puskesmas | 36.450.000.000 | |
| | | Jumlah Layanan Dokter Spesialis (orang) | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 10 | | 10 | | |
| | | Jumlah sistem informasi manajemen rumah sakit (SIM RS base) | 2 | 2 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | |
| 1.01.02.24 | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | Persentase masyarakat miskin mendapat pelayanan difasilitas kesehatan | 30% | 30% | 3.362.850.000 | 30% | 3.433.350.000 | 30% | 3.505.542.000 | 30% | 3.579.144.000 | 30% | 3.654.156.000 | 30% | 3.730.860.000 | 30% | 21.265.902.000 | |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB |
|-------------|---|---|---|---------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|--|-----------------|---------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | Rp | 12 | | | | |
| 1.01.02.26 | Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit | Tingkat pemenuhan Rumah Sakit tipe C | 46% | 46% | 1.227.597.000 | 51% | 1.306.000.000 | 58% | 12.000.000.000 | 60% | 20.000.000.000 | 65% | 25.000.000.000 | 70% | 25.000.000.000 | 70% | 84.533.597.000 | RSUD |
| 1.01.02.27 | Program Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit | Jumlah sarana dan prasarana kesehatan RSUD layak digunakan | 3 gedung dan 8 unit alkes | 3 gedung dan 8 unit alkes | 720.200.000 | 3 gedung dan 8 unit alkes | 1.050.000.000 | 3 gedung dan 8 unit alkes | 1.210.000.000 | 3 gedung dan 8 unit alkes | 1.310.000.000 | 3 gedung dan 8 unit alkes | 1.460.000.000 | 3 gedung dan 8 unit alkes | 1.650.000.000 | 3 gedung dan 8 unit alkes | 7.400.200.000 | RSUD |
| | Program Pengembangan Data dan Informasi | Persentase ketersediaan data/informasi kesehatan yang valid dan upto date | 100% | - | - | - | - | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 600.000.000 | DINKES |
| | | Persentase data/informasi perencanaan yang valid dan upto date | 75% | 80% | 890.761.000 | 85% | 2.685.290.000 | 88% | 3.030.645.000 | 90% | 3.587.158.500 | 90% | 3.635.374.350 | 90% | 3.993.211.785 | 90% | 17.222.440.635 | Bappeda |
| | Program Pengawasan Obat dan Makanan | Cakupan pengawasan sarana Penyedia Obat dan Makanan | 30 % | 30 % | - | 80 % | 200.000.000 | 82 % | 220.000.000 | 84 % | 240.000.000 | 86 % | 260.000.000 | 90 % | 260.000.000 | 90 % | 1.180.000.000 | DINKES |
| 1.01.02.32 | Program peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak | Persentase Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan | 50% | 50,36% | 1.000.000.000 | 55% | 3.200.000.000 | 60% | 1.400.000.000 | 65% | 1.600.000.000 | 70% | 1.800.000.000 | 75% | 2.000.000.000 | 75% | 11.000.000.000 | DINKES |
| | | Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) | 87,51% | 90% | | 93% | | 96% | | 99% | | 100% | 100% | | 100% | | | |
| 1.03 | Pekerjaan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.03.15 | Program pembangunan jalan dan jembatan. | Panjang Jalan Konektifitas dan Meningkatnya Panjang Jembatan | 18,7 Km dan 60 % | 0 dan 5 Unit | 20.000.000.000 | 12 Km dan 36 Unit | 145.000.000.000 | 12 Km dan 30 Unit | 109.500.000.000 | 11 Km dan 30 Unit | 107.850.000.000 | 10 Km | 10.500.000.000 | 11 Km | 10.200.000.000 | 56 Km 101 unit | 403.050.000.000 | PUPR |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB |
|------------|---|---|---|---------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|-----------------|---------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | |
| 1.01.03.16 | Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong. | Luasan genangan saluran dikawasan kumuh perkotaan | 0 ha | 110 ha | 12.000.000.000 | 28 ha | 2.000.000.000 | 28 ha | 7.000.000.000 | 28 ha | 7.000.000.000 | 28 ha | 7.000.000.000 | 28 ha | 7.000.000.000 | 250 ha | 42.000.000.000 | PUPR |
| 1.01.03.18 | Program Pemeliharaan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan | Rasio Panjang Jalan dalam kondisi baik | 41% | 42% | 67.000.000.000 | 45% | 115.000.000.000 | 55% | 96.000.000.000 | 58% | 208.600.000.000 | 59% | 164.000.000.000 | 62% | 110.100.000.000 | 62% | 760.700.000.000 | PUPR |
| 1.01.03.23 | Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan | Jumlah alat berat dalam kondisi baik | 8 unit | - | - | 10 unit | 4.400.000.000 | 15 unit | 10.550.000.000 | 21 unit | 12.800.000.000 | 21 unit | 1.500.000.000 | 21 unit | 1.500.000.000 | 21 unit | 30.750.000.000 | PUPR |
| | | Jumlah Alat Berat | 0 unit | - | - | 2 unit | | 5 unit | | 6 unit | | - | | - | | 13 unit | | |
| 1.01.03.23 | Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. | Jumlah kecamatan teraliri air irigasi | 13 Kec | 13 Kec | 10.000.000.000 | 13 Kec | 15.000.000.000 | 13 Kec | 12.500.000.000 | 13 Kec | 13.050.000.000 | 13 Kec | 13.700.000.000 | 13 Kec | 15.000.000.000 | 13 Kec | 79.250.000.000 | PUPR |
| 1.01.03.31 | Program penyediaan dan pengelolaan air baku. | Jumlah desa yang memperoleh air baku | 20 desa | 10 desa | 3.500.000.000 | 15 desa | 150.000.000 | 15 desa | 3.150.000.000 | 15 desa | 3.150.000.000 | 15 desa | 3.000.000.000 | 15 desa | 3.000.000.000 | 105 desa | 15.950.000.000 | PUPR |
| | | | | - | - | | - | 1.400.000.000 | 1.400.000.000 | | 1.400.000.000 | 1.400.000.000 | 5.600.000.000 | | Perumkim | | | |
| 1.01.03.32 | Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum. | Jumlah sambungan rumah (SR) | 6200 Sambungan rumah | - | - | 500 sambungan rumah | 33.000.000.000 | 5300 sambungan rumah | 107.000.000.000 | 2.000 sambungan rumah | 65.000.000.000 | 2.000 Sambungan rumah | 35.000.000.000 | 2.000 sambungan rumah | 10.000.000.000 | 18.000 Sambungan rumah | 250.000.000.000 | PUPR |
| 1.01.04.15 | Program Penyehatan Lingkungan Permukiman. | Kondisi sanitasi lingkungan | 40% | 45% | 45.000.000.000 | - | - | 50% | 10.000.000.000 | 55% | 5.000.000.000 | 60% | 22.000.000.000 | 65% | 7.000.000.000 | 65% | 89.000.000.000 | PUPR |
| | | | | - | - | | - | 24.900.000.000 | 26.655.000.000 | | 29.400.000.000 | | 31.000.000.000 | | 111.955.000.000 | | Perumkim | |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB |
|----------------|---|---|---|---------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|-----------------|-----------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | Rp | 12 | | | | |
| 1.01.03 | Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.03.34 | Program perencanaan tata ruang | Jumlah dokumen tata ruang | 3 dokumen | 0 | 0 | 1 dokumen | 500.000.000 | 7 dokumen | 2.500.000.000 | 6 dokumen | 2.500.000.000 | 6 dokumen | 2.500.000.000 | 2 dokumen | 1.000.000.000 | 22 dokumen | 9.000.000.000 | PUPR |
| | | Ddokumen RTRW (Peninjauan Kembali) | 0 | - | - | - | - | 1 dokumen | 700.000.000 | - | - | - | - | - | - | 100% | 700.000.000 | Bappeda |
| 1.01.03.35 | Program Pemanfaatan Ruang | Rekomendasi pemanfaatan ruang | 60 dokumen | 0 | 0 | 45 dokumen | 500.000.000 | 45 dokumen | 600.000.000 | 45 dokumen | 645.000.000 | 45 dokumen | 690.000.000 | 45 dokumen | 725.000.000 | 300 dokumen | 3.160.000.000 | PUPR |
| | Program pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, sosial, dan budaya | Jumlah sarana dan prasarana ekonomi, sosial, dan budaya yang dibangun, ditingkatkan, dan dipelihara | 0 unit | - | - | - | - | 10 Unit | 62.600.000.000 | 7 Unit | 105.000.000.000 | 7 Unit | 50.000.000.000 | 3 Unit | 10.000.000.000 | 30 Unit | 227.600.000.000 | PUPR |
| 1.01.04 | Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.04.17 | Program Pengembangan Perumahan | Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak memiliki rumah | 16,76% | - | - | 16,5% | 2.000.000.000 | 16,2% | 2.000.000.000 | 16% | 2.000.000.000 | 15,7% | 2.000.000.000 | 15,5% | 2.000.000.000 | 15,5% | 10.000.000.000 | Perumkim |
| | | Jumlah izin administrasi Tata Bangunan yang diterbitkan sesuai peraturan | 1834 IMB | - | - | 200 IMB | 100.000.000 | 200 IMB | 1.000.000.000 | 200 IMB | 350.000.000 | 200 IMB | 1.350.000.000 | 200 IMB | 350.000.000 | 2834 IMB | 3.150.000.000 | PUPR |
| | Program pengembangan data dan informasi | Ketersediaan data dasar pengembangan infrastruktur yang valid | 10% | - | - | 25% | 1.300.000.000 | 40% | 2.000.000.000 | 60% | 2.000.000.000 | 80% | 1.500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 8.300.000.000 | PUPR |
| 1.01.04.18 | Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran | Layanan dasar sesuai SPM | 20% | 20% | 3.305.790.000 | 20% | 2.348.880.000 | 20% | 2.227.780.000 | 20% | 2.561.947.000 | 20% | 2.946.239.050 | 20% | 3.388.174.908 | 100% | 16.778.810.958 | Damkar & Penyelamatan |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB |
|----------------|---|---|---|---------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|-----------------|---------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | Rp | 12 | | | | |
| | Program Penataan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik | 47% | - | - | 50% | 21.000.000.000 | 55% | 37.000.000.000 | 58% | 32.000.000.000 | 60% | 39.000.000.000 | 65% | 37.000.000.000 | 65% | 166.000.000.000 | Perumkim |
| | | Persentase sambungan SR air bersih MBR | 32% | - | - | 32% | | 40% | | 47% | | 53% | | 57% | | 57% | | |
| | Program Peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas | Persentase pemanfaatan EBT di kawasan permukiman perkotaan | 0,05% | - | - | 0,05% | | 0,07% | | 1% | | 2% | | 5% | | 5% | | Perumkim |
| | | Persentase jalan utama yang diberi penerangan | 50% | - | - | 60% | 9.500.000.000 | 70% | 14.300.000.000 | 75% | 15.300.000.000 | 80% | 20.400.000.000 | 90% | 21.000.000.000 | 90% | 80.500.000.000 | |
| | | Persentase jalan lingkungan yang diberi penerangan | 12% | - | - | 15% | | 25% | | 30% | | 35% | | 40% | | 40% | | |
| 1.01.05 | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.05.15 | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Persentase Jumlah penanganan gangguan ketertiban umum bagi masyarakat | 100% | - | - | 100% | 3.770.631.250 | 100% | 4.233.429.810 | 100% | 4.500.000.000 | 90% | 4.500.000.000 | 100% | 4.500.000.000 | 100% | 21.504.061.060 | Pol PP |
| | | Tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan | 80% | 85% | 152.116.000 | 88% | 1.128.345.000 | 90% | 250.000.000 | 92% | 250.000.000 | 93% | 250.000.000 | 94% | 700.000.000 | 94% | 2.730.461.000 | Kesbangpol |
| 1.01.05.16 | Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal | Cakupan patroli petugas SATPOL PP terhadap luasan wilayah patroli | 70% | - | - | 75% | 2.000.000.000 | 80% | 2.000.000.000 | 85% | 2.000.000.000 | 90% | 2.000.000.000 | 90% | 2.000.000.000 | 90% | 10.000.000.000 | Pol PP |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB |
|------------|---|---|---|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|--|----------------|---------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| 3.01.01.20 | Program pengembangan wawasan kebangsaan | Tingkat kesadaran dalam beragama, berbangsa dan bernegara | 88% | 90% | 259.890.000 | 1.286.078.000 | 815.000.000 | 815.000.000 | 815.000.000 | 815.000.000 | 815.000.000 | 815.000.000 | 815.000.000 | 815.000.000 | 95% | 95% | 4.805.968.000 | Kesbangpol |
| | | | | | - | 184.030.300 | 595.903.400 | 605.953.400 | 615.854.500 | 625.245.300 | 2.626.986.900 | Bag. Pem Otda SETDA | | | | | | |
| | | | | | - | - | 31.700.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 171.700.000 | Kec. Pengabuan | | | | | | |
| | | | | | - | - | 14.250.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | 20.000.000 | 67.250.000 | Kec. Bram Itam | | | | | | |
| | | | | | - | - | 48.725.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 198.725.000 | Kec. Tungkal Ulu | | | | | | |
| | | | | | - | - | 48.725.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 198.725.000 | Kec. Merlung | | | | | | |
| | | | | | - | - | 48.725.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 198.725.000 | Kec. Kuala Betara | | | | | | |
| | | | | | - | - | 48.725.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 198.725.000 | Kec. Tebing Tinggi | | | | | | |
| 1.01.05.17 | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekati) | Frekwensi pengendalian penyakit PEKATI pertahun | 2 kali | - | 3 kali | 47.000.000 | 6 kali | 110.000.000 | 6 kali | 150.000.000 | 6 kali | 150.000.000 | 6 kali | 150.000.000 | 6 kali | 607.000.000 | Pol PP | |
| | | Tersedianya data Kominda yang valid dan up to date | 100% | 100% | 100% | 196.020.000 | 100% | 445.070.000 | 100% | 895.000.000 | 100% | 895.000.000 | 100% | 895.000.000 | 100% | 895.000.000 | 100% | 4.221.090.000 |
| 3.01.01.20 | Program pendidikan politik masyarakat | Tingkat pelaksanaan politik yang jujur, aman dan terkendali | 88% | 90% | 266.885.300 | 92% | 290.000.000 | 93% | 1.280.000.000 | 94% | 1.280.000.000 | 95% | 1.280.000.000 | 96% | 805.000.000 | 96% | 5.201.885.300 | Kesbangpol |
| 3.01.01.23 | Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. | Persentase upaya pencegahan, pengurangan resiko bencana, dan layanan penanggulangan bencana | 100% | 100% | 1.465.000.000 | 100% | 1.787.000.000 | 100% | 1.790.000.000 | 100% | 2.075.000.000 | 100% | 2.195.000.000 | 100% | 2.476.500.000 | 100% | 11.788.500.000 | BPBD |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB | |
|----------------|--|--|---|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|----------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | Rp | 12 | |
| 3.01.01.2 6 | Program Ketahanan Ekonomi | Cakupan pengendalian terhadap inflasi | 54% | - | | 60% | | 65% | | 70% | | 75% | | 80% | | 80% | | | SETDA Bag. Ekonomi |
| | | Persentase rencana hasil koordinasi penanganan permasalahan ekonomi yang timbul yang ditindaklanjuti | 85% | - | - | 87% | 468.664.000 | 90% | 914.437.500 | 92% | 1.008.597.000 | 94% | 1.106.468.000 | 96% | 1.217.113.000 | 96% | 4.715.279.500 | | |
| | | Persentase penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran | 100% | | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | |
| 1.01.06 | Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.06.1 5 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Persentase PMKS yang ditangani | 35% | - | - | 40% | 480.311.775 | 60% | 2.502.857.200 | 70% | 2.404.095.000 | 75% | 2.482.504.000 | 80% | 2.551.470.000 | 80% | 10.421.237.975 | | Dinsos |
| | | Persentase penyaluran Raskin | 100% | 100% | 179.184.000 | 100% | 252.600.000 | 100% | 277.860.000 | 100% | 305.646.000 | 100% | 336.210.600 | 100% | 369.891.650 | 100% | 1.721.392.250 | | Kec. Tungkal Ilir |
| | | | 100% | 100% | 70.000.000 | 100% | 78.000.000 | 100% | 78.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 466.000.000 | | Kec. Merlung |
| | | | 100% | 100% | 94.500.000 | 100% | 103.500.000 | 100% | 103.500.000 | 100% | 94.500.000 | 100% | 94.500.000 | 100% | 103.500.000 | 100% | 594.000.000 | | Kec. Bram Itam |
| | | | 100% | 100% | 111.500.000 | 100% | 111.500.000 | 100% | 123.409.304 | 100% | 115.500.000 | 100% | 115.500.000 | 100% | 115.500.000 | 100% | 692.909.304 | | Kec. Betara |
| | | | 100% | 100% | 74.000.000 | 100% | 78.000.000 | 100% | 105.000.000 | 100% | 115.000.000 | 100% | 120.000.000 | 100% | 125.000.000 | 100% | 543.000.000 | | Kec. Renah Mendaluh |
| | | | 100% | 100% | 99.300.000 | 100% | 117.900.000 | 100% | 164.500.000 | 100% | 174.500.000 | 100% | 185.000.000 | 100% | 205.000.000 | 100% | 946.200.000 | | Kec. Tungkal Ulu |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB |
|------------|---|---|---|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|---------------|---------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | Rp | 12 | | | | |
| | | | 100% | 100% | 90.300.000 | 100% | 81.300.000 | 100% | 101.600.000 | 100% | 155.000.000 | 100% | 180.000.000 | 100% | 205.000.000 | 100% | 813.200.000 | Kec.Seberang Kota |
| | | | 100% | 100% | 79.900.000 | 100% | 93.600.000 | 100% | 215.020.800 | 100% | 258.024.960 | 100% | 309.629.952 | 100% | 371.555.942 | 100% | 1.234.131.654 | Kec. Tebing Tinggi |
| | | | 100% | 100% | 111.000.000 | 100% | 115.800.000 | 100% | 140.000.000 | 100% | 154.000.000 | 100% | 169.000.000 | 100% | 185.900.000 | 100% | 875.700.000 | Kec.Senyering |
| | | | 100% | 100% | 96.000.000 | 100% | 95.000.000 | 100% | 142.700.000 | 100% | 155.000.000 | 100% | 180.000.000 | 100% | 205.000.000 | 100% | 873.700.000 | Kec.Pengabuan |
| | | | 100% | 100% | 87.600.000 | 100% | 96.600.000 | 100% | 123.804.000 | 100% | 148.564.800 | 100% | 178.277.760 | 100% | 178.277.760 | 100% | 813.124.320 | Kec.Kuala Betara |
| | | | 100% | 100% | 78.375.000 | 100% | 78.375.000 | 100% | 103.500.000 | 100% | 142.700.000 | 100% | 155.000.000 | 100% | 180.000.000 | 100% | 737.950.000 | Kec.Batang Asam |
| | | | 100% | 100% | 82.800.000 | 100% | 82.800.000 | 100% | 85.000.000 | 100% | 85.000.000 | 100% | 85.000.000 | 100% | 87.000.000 | 100% | 507.000.000 | Kec.Muara Papalik |
| 1.01.06.21 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Persentase Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang aktif | 30% | - | - | 40% | 703.345.329 | 60% | 1.347.245.000 | 65% | 1.504.000.000 | 70% | 1.610.000.000 | 75% | 1.370.000.000 | 75% | 6.534.590.329 | Dinsos |
| 1.01.06.16 | Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial | Persentase Jumlah PMKS | 10,5% | - | - | 10% | 200.000.000 | 9,5% | 200.000.000 | 9% | 475.000.000 | 8,5% | 550.000.000 | 8% | 740.000.000 | 8% | 2.165.000.000 | Dinsos |
| 1.01.06.18 | Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma | Persentase para penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia yang menerima jaminan sosial | 0% | - | - | 25% | 160.500.000 | 25% | 200.000.000 | 30% | 220.000.000 | 30% | 250.000.000 | 35% | 250.000.000 | 35% | 1.080.500.000 | Dinsos |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB |
|----------------|---|--|---|---------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|----------------|---------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | Rp | 12 | | | | |
| 2 | URUSAN WAJIB YANG TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.01 | Ketenagakerjaan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.01.15 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. | Jumlah tenaga kerja terampil | 75 orang | - | | 30 orang | | 30 orang | | 66 orang | | 40 orang | | 50 orang | | 216 orang | | Naker |
| | | Tersusunnya dokumen pendukung persiapan pembangunan BLK | 0 | - | - | - | 348.123.000 | 1 dokumen | 502.006.000 | - | 10.334.996.000 | - | 5.202.006.000 | - | 5.202.006.000 | 1 dokumen | 21.589.137.000 | |
| | | Gedung BLK dan operasional BLK | 0% (0 unit) | - | - | - | - | - | 50% | - | 25% | - | 25% | - | 100% (1 unit) | - | | |
| 1.02.01.16 | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | Jumlah pencari kerja dan tenaga kerja yang ditempatkan | 200 orang | 200 orang | 269.700.000 | 200 orang | 512.040.711 | 300 orang | 288.277.350 | 300 orang | 545.222.850 | 300 orang | 325.222.850 | 300 orang | 325.222.850 | 1400 orang | 2.265.686.611 | Naker |
| 1.02.01.17 | Program perlindungan dan pengembangan Lembaga ketenagakerjaan | Jumlah perusahaan yang dilakukan pembinaan, pengembangan, dan penyelesaian serta pendataan perusahaan dan tenaga kerja | 30 perusahaan | 30 perusahaan | 233.280.200 | 30 perusahaan | 356.300.000 | 30 perusahaan | 267.515.000 | 30 perusahaan | 595.903.000 | 30 perusahaan | 595.903.000 | 30 perusahaan | 595.903.000 | 180 perusahaan | 2.644.804.200 | Naker |
| 1.02.02 | Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.02.16 | Program penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender dan anak. | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 84.81% | 84.81% | | 85% | | 85,5% | | 86% | | 86,5% | | 87% | | 87% | | P3AP2KB |
| | | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD | 10% | 10% | 850.000.000 | 12% | 935.000.000 | 14% | 1.028.500.000 | 16% | 1.131.350.000 | 18% | 1.244.485.000 | 20% | 1.368.933.500 | 20% | 6.558.268.500 | |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB |
|------------|---|--|---|---------------------------------------|-------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|--|---------------|---------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | Rp | 12 | | | | |
| | | Status capaian pemanfaatan data gender dan anak | 10% | 12% | | 14% | | 16% | | 18% | | 20% | | 25% | | 25% | | |
| 1.02.02.17 | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO | 30% | 40% | 800.000.000 | 50% | 1.770.000.000 | 60% | 1.742.000.000 | 70% | 1.766.200.000 | 80% | 1.792.820.000 | 90% | 1.822.102.000 | 90% | 9.693.122.000 | P3AP2KB |
| 1.02.02.18 | Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan | Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) | 60,93% | 60,93% | | 60,95% | | 60,97% | | 60,99% | | 61,01% | | 61,03% | | 61,03% | | |
| | | Partisipasi keterlibatan perempuan di lembaga legislatif | 14,29% | 30% | 950.000.000 | 30% | 1.045.000.000 | 30% | 1.149.500.000 | 30% | 1.264.450.000 | 30% | 1.390.895.000 | 30% | 1.529.984.500 | 30% | 7.329.829.500 | P3AP2KB |
| | | Jumlah kelurahan yang telah dilakukan pembinaan PKK | 8 kelurahan / 2 desa | 8 kelurahan / 2 desa | 24.370.600 | 8 kelurahan / 2 desa | 83.976.950 | 8 kelurahan / 2 desa | 92.376.845 | 8 kelurahan / 2 desa | 101.614.530 | 8 kelurahan / 2 desa | 111.775.982 | 8 kelurahan / 2 desa | 122.953.581 | 8 kelurahan / 2 desa | 537.068.488 | Kec. Tungkal Ilir |
| | | Jumlah desa yang telah dilakukan pembinaan PKK | 9 desa, 1 kelurahan | 9 desa, 1 kelurahan | 20.000.000 | 9 desa, 1 kelurahan | 22.275.000 | 9 desa, 1 kelurahan | 62.265.350 | 9 desa, 1 kelurahan | 65.000.000 | 9 desa, 1 kelurahan | 75.000.000 | 9 desa, 1 kelurahan | 80.000.000 | 9 desa, 1 kelurahan | 278.540.350 | Kec. Bram Itam |
| | | | 11 desa, / 1 kelurahan | 11 desa, / 1 kelurahan | 19.800.100 | 11 desa, / 1 kelurahan | 18.036.300 | 11 desa, / 1 kelurahan | 59.000.000 | 11 desa, / 1 kelurahan | 100.000.000 | 11 desa, / 1 kelurahan | 120.000.000 | 11 desa, / 1 kelurahan | 120.000.000 | 11 desa, / 1 kelurahan | 436.836.400 | Kec. Betara |
| | | | 9 desa, / 1 kelurahan | 9 desa, / 1 kelurahan | 52.000.000 | 9 desa, / 1 kelurahan | 56.000.000 | 9 desa, / 1 kelurahan | 65.000.000 | 9 desa, / 1 kelurahan | 70.000.000 | 9 desa, / 1 kelurahan | 75.000.000 | 9 desa, / 1 kelurahan | 80.000.000 | 9 desa, / 1 kelurahan | 346.000.000 | Kec. Renah Mendaluh |
| | | | 9 desa, / 1 kelurahan | 9 desa, / 1 kelurahan | 32.000.000 | 9 desa, / 1 kelurahan | 56.000.000 | 9 desa, / 1 kelurahan | 60.000.000 | 9 desa, / 1 kelurahan | 60.000.000 | 9 desa, / 1 kelurahan | 60.000.000 | 9 desa, / 1 kelurahan | 60.000.000 | 9 desa, / 1 kelurahan | 298.130.350 | Kec. Merlung |
| | | | 9 desa, / 1 kelurahan | 9 desa, / 1 kelurahan | 18.000.000 | 9 desa, / 1 kelurahan | 20.000.000 | 9 desa, / 1 kelurahan | 25.000.000 | 9 desa, / 1 kelurahan | 25.000.000 | 9 desa, / 1 kelurahan | 25.000.000 | 9 desa, / 1 kelurahan | 25.000.000 | 9 desa, / 1 kelurahan | 139.000.000 | Kec. Muara papalik |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB |
|----------------|---|--|---|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--|----------------|---------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | | 9 desa, 1 kelurahan | 9 desa, 1 kelurahan | 27.775.000 | 9 desa, 1 kelurahan | 85.700.000 | 9 desa, 1 kelurahan | 88.500.000 | 9 desa, 1 kelurahan | 92.500.000 | 9 desa, 1 kelurahan | 95.000.000 | 9 desa, 1 kelurahan | 105.000.000 | 9 desa, 1 kelurahan | 494.475.000 | Kec. Tungkal Ulu |
| | | | 9 desa, 1 kelurahan | 9 desa, 1 kelurahan | 35.092.000 | 9 desa, 1 kelurahan | 83.087.000 | 9 desa, 1 kelurahan | 85.000.000 | 9 desa, 1 kelurahan | 86.000.000 | 9 desa, 1 kelurahan | 90.000.000 | 9 desa, 1 kelurahan | 92.300.000 | 9 desa, 1 kelurahan | 471.479.000 | Kec. Tebing Tinggi |
| | | | 7 desa, 1 kelurahan | 7 desa, 1 kelurahan | 41.306.550 | 7 desa, 1 kelurahan | 41.306.550 | 7 desa, 1 kelurahan | 41.306.550 | 7 desa, 1 kelurahan | 41.306.550 | 7 desa, 1 kelurahan | 42.112.396 | 7 desa, 1 kelurahan | 50.534.875 | 7 desa, 1 kelurahan | 257.873.471 | Kec. Seberang Kota |
| | | | 9 desa, 1 kelurahan | 9 desa, 1 kelurahan | 25.800.100 | 9 desa, 1 kelurahan | 41.436.200 | 9 desa, 1 kelurahan | 55.000.000 | 9 desa, 1 kelurahan | 60.500.000 | 9 desa, 1 kelurahan | 66.500.000 | 9 desa, 1 kelurahan | 73.100.000 | 9 desa, 1 kelurahan | 322.336.300 | Kec. Senyerang |
| | | | 9 desa, 1 kelurahan | 9 desa, 1 kelurahan | 24.370.000 | 9 desa, 1 kelurahan | 79.100.000 | 9 desa, 1 kelurahan | 94.920.000 | 9 desa, 1 kelurahan | 113.904.000 | 9 desa, 1 kelurahan | 136.684.800 | 9 desa, 1 kelurahan | 140.420.000 | 9 desa, 1 kelurahan | 589.398.800 | Kec. Kuala Betara |
| | | | 12 desa, 1 kelurahan | 12 desa, 1 kelurahan | 19.505.000 | 12 desa, 1 kelurahan | 31.236.150 | 12 desa, 1 kelurahan | 103.919.900 | 12 desa, 1 kelurahan | 120.000.000 | 12 desa, 1 kelurahan | 140.000.000 | 12 desa, 1 kelurahan | 105.000.000 | 12 desa, 1 kelurahan | 519.661.050 | Kec. Pengabuan |
| | | | 10 desa, 1 kelurahan | 10 desa, 1 kelurahan | 27.443.800 | 10 desa, 1 kelurahan | 27.443.800 | 10 desa, 1 kelurahan | 30.237.250 | 10 desa, 1 kelurahan | 103.919.900 | 10 desa, 1 kelurahan | 120.000.000 | 10 desa, 1 kelurahan | 140.000.000 | 10 desa, 1 kelurahan | 449.044.750 | Kec. Batang Asam |
| | Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak | Rasio kekerasan terhadap anak | 30% | 40% | | 50% | | 60% | | 70% | | 80% | | 90% | | 90% | | |
| | | Status capaian Kabupaten layak Anak | Skor 50 | Skor 100 | 1.900.000.000 | Skor 200 | 2.090.000.000 | Skor 300 | 2.299.000.000 | Skor 400 | 2.528.900.000 | Skor 500 | 2.781.790.000 | Skor 599 | 3.059.969.000 | Skor 599 | 14.659.659.000 | P3AP2KB |
| | | Persentase status perkawinan usia anak | 0,05% | 0,05% | | 0,04% | | 0,03% | | 0,02% | | 0,01% | | 0% | | 0% | | |
| 1.02.03 | Pangan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.03.15 | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Diversifikasi pola pangan harapan (Skor PPH) | 72 | 75 | 1.300.000.000 | 78 | 1.256.557.750 | 80 | 1.136.899.000 | 82 | 7.254.743.000 | 85 | 8.091.187.000 | 87 | 8.728.543.000 | 89 | 27.767.929.750 | Ketahan Pangan |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB |
|----------------|--|---|---|---------------------------------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|----------------|---------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | Rp | 12 | | | | |
| 1.02.05 | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.05.24 | Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan | Jumlah sampah domestik (kubik) yang dikelola | 18.000 | 18.000 | 200.490.000 | 22.000 | 2.174.360.000 | 24.000 | 5.105.530.000 | 26.000 | 6.126.636.000 | 28.000 | 6.432.967.800 | 30.000 | 6.754.616.190 | 30.000 | 26.794.599.990 | DLH |
| 1.02.05.15 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Presantase usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencemaran lingkungan | 80% | 85% | 498.462.000 | 90% | 252.410.000 | 95% | 948.468.000 | 100% | 1.138.161.600 | 100% | 1.365.793.920 | 100% | 1.434.083.616 | 100% | 5.637.379.136 | DLH |
| 1.02.05.16 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | Deteksi dini potensi pencemaran lingkungan (spot/titik) | 46 | 52 | 234.949.600 | 78 | 337.225.600 | 86 | 392.870.952 | 92 | 471.445.142 | 96 | 565.734.171 | 100 | 594.020.879 | 100 | 2.596.246.344 | DLH |
| | | Persentase pengaduan terkait lingkungan yang ditindaklanjuti (bila ada pengaduan) | 100% | 100% | 438.950.450 | 100% | 923.435.800 | 100% | 1.020.651.000 | 100% | 1.134.720.000 | 100% | 1.247.962.000 | 100% | 1.358.761.000 | 100% | 6.124.480.250 | SETDA Bag.SDA |
| | | Persentase pelaksanaan fasilitasi bidang SDA | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | | |
| 1.02.05.18 | Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup. | Besaran akses dan jejaring lingkungan hidup | 10% | 15% | 20.000.000 | 30% | 84.750.000 | 60% | 381.400.000 | 70% | 457.680.000 | 80% | 549.216.000 | 80% | 576.676.800 | 80% | 2.069.722.800 | DLH |
| 1.02.05.23 | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Persentase RTH Taman Kota yang tertata | 15% | - | - | 30% | 1.600.000.000 | 50% | 1.900.000.000 | 60% | 1.900.000.000 | 75% | 1.900.000.000 | 85% | 1.900.000.000 | 85% | 9.200.000.000 | Perumkim |
| | | Persentase Kelurahan yang mempunyai RTH | 12% | - | | 15% | | 50% | | 75% | | 85% | | 100% | | 100% | | |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB |
|----------------|---|--|---|---------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--|----------------|---------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | Rp | 12 | | | | |
| | | Persentase kecamatan yang mempunyai Taman Layak Anak | 7% | - | | 14,29% | | 33,33% | | 43% | | 57% | | 71,4% | | 71,4% | | |
| 1.02.06 | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.06.15 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Rasio Penduduk memiliki dokumen kependudukan | 75% | 80% | 1.500.000.000 | 82% | 1.500.000.000 | 85% | 1.500.000.000 | 87% | 2.500.000.000 | 90% | 2.500.000.000 | 90% | 2.500.000.000 | 90% | 12.000.000.000 | Dukcapil |
| 1.02.07 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.07.15 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | 40% | 45% | 2.155.379.006 | 50% | 2.947.814.211 | 60% | 2.708.138.900 | 70% | 4.443.000.000 | 80% | 2.678.000.000 | 90% | 2.679.000.000 | 90% | 17.611.332.117 | PMD |
| | | Jumlah desa swasembada | 9 desa | 10 des | | 11 desa | | 12 desa | | 13 desa | | 14 desa | | 15 desa | | | | |
| 1.02.07.16 | Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan | Jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri dan unggul | 34 BUM desa | 64 BUM desa | 279.875.000 | 85 BUM desa | 443.876.250 | 95 BUM desa | 343.598.950 | 100 BUM desa | 962.000.000 | 105 BUM desa | 1.028.000.000 | 114 BUM desa | 1.088.000.000 | 114 BUM desa | 4.145.350.200 | PMD |
| 1.02.07.17 | Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Jumlah BUM desa bersama yang terbentuk di setiap kecamatan | 1 BUM desa bersama | 1 BUM desa bersama | 666.861.300 | 2 BUM desa bersama | 420.890.000 | 2 BUM desa bersama | 236.367.000 | 2 BUM desa bersama | 705.000.000 | 2 BUM desa bersama | 735.000.000 | 3 BUM desa bersama | 740.000.000 | 13 BUM desa bersama | 3.504.118.300 | PMD |
| 1.02.07.01.18 | Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa | Jumlah Desa dengan perencanaan, penganggaran, pembendaharaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban yang baik | 114 Desa | 114 Desa | 574.758.000 | - | - | 114 Desa | 290.299.000 | 114 Desa | 499.000.000 | 114 Desa | 1.121.000.000 | 114 Desa | 1.261.000.000 | 114 Desa | 4.086.306.000 | PMD |
| 1.02.07.20 | Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | Jumlah desa dengan administrasi keuangan dan aset tertata | 11d desa | 114 desa | 380.163.000 | 114 desa | 340.249.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 desa | 720.412.000 | PMD |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB |
|----------------|--|--|---|---------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--|----------------|---------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | Rp | 12 | | | | |
| 1.02.08 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.08.15 | Program Kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga | Persentase laju pertumbuhan Penduduk (LPP) | 2,29 | 2,29 | | 2,29 | | 2,29 | | 2,29 | | 2,19 | | 1,93 | | 1,93 | 19.289.025.000 | P3AP2KB |
| | | Angka kelahiran total (total fertility rate /TFR) per WUS (15-49 tahun) | 2,63 | 2,62 | | 2,61 | | 2,60 | | 2,59 | | 2,58 | | 2,58 | | 2,58 | | |
| | | Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate (CPR) | 78,01 | 78,01 | | 78,01 | | 78,01 | | 78,01 | | 79,01 | | 80,16 | | 80,16 | | |
| | | Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet-need) | 27,05 | 27,05 | 2.500.000.000 | 27,05 | 2.750.000.000 | 27,05 | 27,05 | 27,05 | 27,05 | 27,05 | 27,05 | 27,05 | 27,05 | 27,05 | | |
| | | Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun) | 85,00 | 84,00 | | 83,00 | | 82,00 | | 81,00 | | 80,00 | | 79,00 | | 79,00 | | |
| | | Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun) | 26,70 | 25,50 | | 23,20 | | 21,58 | | 19,85 | | 17,90 | | 16,40 | | 16,40 | | |
| 1.02.09 | Perhubungan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.09.01 | Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan | Jumlah dokumen perencanaan peningkatan kualitas halte dan dermaga sungai | 21 dokumen | 3 dokumen | 1.483.305.000 | 2 dokumen | 133.000.000 | 2 dokumen | 128.380.000 | 2 dokumen | 280.000.000 | 2 dokumen | 250.000.000 | 2 dokumen | 160.000.000 | 13 dokumen | 2.434.685.000 | Dishub |
| 1.02.09.16 | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | Jumlah prasarana transportasi layak digunakan | 13 unit | - | - | 2 unit | 70.000.000 | 5 unit | 58.768.000 | 13 unit | 400.000.000 | 13 unit | 450.000.000 | 13 unit | 500.000.000 | 13 unit | 1.478.768.000 | Dishub |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB |
|----------------|---|---|---|---------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|----------------|---------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | Rp | 12 | | | | |
| 1.02.09.17 | Program peningkatan pelayanan angkutan. | Jumlah lokasi sarana angkutan dengan pelayanan yang nyaman | 16 lokasi | 16 lokasi | 1.078.800.000 | 18 lokasi | 1.325.810.000 | 18 lokasi | 1.646.813.000 | 22 lokasi | 1.893.000.000 | 23 lokasi | 2.026.000.000 | 21 lokasi | 1.911.000.000 | 21 lokasi | 9.881.423.000 | Dishub |
| 1.02.09.19 | Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas | Jumlah pelanggaran ketertiban lalu lintas | 22 unit | - | - | 27 unit | 664.600.000 | 25 unit | 708.360.000 | 23 unit | 1.010.000.000 | 20 unit | 1.030.000.000 | 15 unit | 1.045.000.000 | 15 unit | 4.457.960.000 | Dishub |
| 1.02.09.20 | Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan bermotor | Jumlah kendaraan yang lulus uji (unit) | 1044 | 1154 | 228.907.000 | 905 | 198.000.000 | 1300 | 8.800.000 | 1350 | 110.000.000 | 1400 | 120.000.000 | 1450 | 140.000.000 | 1450 | 805.707.000 | Dishub |
| 1.02.10 | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program pembangunan, pengawasan dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi | Terhubungnya jaringan komunikasi data antar OPD dalam Kb. Tanjab Barat | 8 OPD | 8 OPD | 777.400.000 | 8 OPD | 1.143.390.000 | 31 OPD | 3.366.000.000 | 44 OPD | 3.469.100.000 | 44 OPD | 3.559.310.000 | 44 OPD | 3.665.461.000 | 44 OPD | 15.980.661.000 | Kominfo |
| | | Jumlah sarana dan prasarana saluran komunikasi data antar OPD dalam Kab. Tanjung Jabung Barat | 0 | 0 | | 0 | | 1 Ruang data centre dan 1 ruang comand centre | | 1 Ruang data centre dan 1 ruang comand centre | | 1 Ruang data centre dan 1 ruang comand centre | | 1 Ruang data centre dan 1 ruang comand centre | | 4 Ruang data centre dan 4 ruang comand centre | | |
| | | Meningkatnya pengawasan menara telekomunikasi | 60 menara | - | | 96 menara | | 107 menara | | 130 menara | | 140 menara | | 150 menara | | 150 menara | | |
| | Program layanan pengelolaan informasi, komunikasi dan opini publik | Tersedianya layanan informasi dan komunikasi publik | 0 | - | - | 4 media komunikasi | 703.360.000 | 4 media komunikasi | 1.838.696.750 | 4 media komunikasi | 2.493.410.000 | 4 media komunikasi | 2.888.861.000 | 4 media komunikasi | 3.045.937.100 | 4 media komunikasi | 10.970.264.850 | Kominfo |
| | | Jumlah informasi melalui media komunikasi | 0 | - | | 1000 berita | | 1200 berita | | 1500 berita | | 1700 berita | | 2000 berita | | 2000 berita | | |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB |
|----------------|---|--|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|--|----------------|--|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | Rp | 12 |
| | Program peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik | Jumlah OPD dengan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik | 0 | 48 OPD | - | - | 44 OPD | 44 OPD | 1.214.040.000 | 44 OPD | 1.335.444.000 | 44 OPD | 1.468.987.800 | 44 OPD | 1.615.887.240 | 44 OPD | 5.634.359.040 | Kominfo |
| | | Jumlah sumber daya aparatur yang berbasis TIK | 0 | 0 | - | - | 0 | 12 orang | | 12 orang | | 13 orang | 13 orang | 13 orang | 50 orang | | | |
| | Program Kerjasama dengan media massa | Jumlah kerjasama informasi dan publikasi | 3 | - | - | 5 | 3.686.764.000 | 7 | 4.632.042.000 | 9 | 5.615.463.400 | 10 | 6.738.556.080 | 12 | 8.086.267.296 | 14 | 28.759.092.776 | Setda Bag. Komdok |
| 1.02.11 | Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.11.1 5 | Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif. | Jumlah koperasi/KSP/USP dan UMKM yang berkelanjutan | 10 Kop/KSP /USP dan 145 UMKM | - | - | - | - | 25 Kop/KS P/USP / 170 UMKM | 497.700.000 | 35 Kop/KS P/USP / 195 UMKM | 1.341.885.000 | 45 Kop/KSP/ USP / 220 UMKM | 1.351.888.000 | 55 Kop/KS P/USP / 245 UMKM | 927.688.000 | 55Kop/ KSP/US P dan 245 UMKM | 4.119.161.000 | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan |
| 1.02.11.1 6 | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif usaha kecil menengah | Jumlah wirausahawan baru yang berpotensi tumbuh yang mendapatkan pelatihan | 0 orang | - | - | 60 orang | 123.820.000 | 120 orang | 214.000.000 | 60 orang | 247.250.000 | 60 orang | 284.338.000 | 60 orang | 326.988.000 | 360 orang | 1.196.396.000 | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan |
| 1.02.11.1 7 | Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | Jumlah Kop/KSP/USH dan UMKM yang mempunyai SDM sesuai kompetensi berkualitas | 15 Kop/KSP /USP / 25 UMKM | 10 Kop/KS P/USP / 25 UMKM | 263.202.000 | 15 Kop/KS P/USP / 25 UMKM | 326.360.000 | 15 Kop/KS P/USP / 25 UMKM | 490.000.000 | 10 Kop/KS P/USP / 25 UMKM | 471.500.000 | 10 Kop/KSP/ USP / 25 UMKM | 561.500.000 | 10 Kop/KS P/USP / 25 UMKM | 642.225.000 | 70 Kop/KS P/USP /150UM KM | 2.754.787.000 | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan |
| 1.02.11.1 8 | Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi | Jumlah koperasi aktif | 133 | 20 kop | 330.285.000 | 21 kop | 569.676.000 | 22 kop | 1.032.500.000 | 25 kop | 1.101.000.000 | 28 kop | 962.000.000 | 30 kop | 1.090.000.000 | 279 kop | 5.085.461.000 | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB |
|----------------|---|--|---|---------------------------------------|----|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|---------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | Rp | 12 | | | | |
| 1.02.12 | Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.12.1 5 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. | Jumlah IKM yang menjalin kerja sama Investasi dan Perdagangan (Pelaku Usaha Komoditi Lokal) | 4 IKM | - | - | 5 IKM | 1.053.453.000 | 3 IKM | 940.802.280 | 3 IKM | 1.347.625.000 | 3 IKM | 1.260.000.000 | 2 IKM | 1.270.000.000 | 16 IKM | 5.871.880.280 | DPM-PTSP |
| | | Jumlah jalinan kerjasama pameran investasi | 2 jalinan kerjasama pameran investasi | - | - | 2 jalinan kerjasama pameran investasi | | 2 jalinan kerjasama pameran investasi | | 2 jalinan kerjasama pameran investasi | | 2 jalinan kerjasama pameran investasi | 2 jalinan kerjasama pameran investasi | 2 jalinan kerjasama pameran investasi | 10 jalinan kerjasama pameran investasi | | | |
| 1.01.12.1 5 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. | Jumlah daerah yang dijajaki untuk menjalin kerjasama dengan Pemda kab. Tanjung Jabung barat | 10 daerah | - | - | 2 daerah | 110.180.500 | 2 daerah | 145.974.500 | 2 daerah | 160.572.000 | 2 daerah | 176.629.000 | 2 daerah | 194.292.000 | 10 daerah | 787.648.000 | SETDA Bag.Ekonomi |
| 1.01.12.1 6 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Nilai Investasi | 16,8 Triliun | - | - | 17,4 Triliun | 883.425.000 | 18 Triliun | 1.081.660.500 | 18,6 Triliun | 2.465.000.000 | 19,2 Triliun | 2.315.000.000 | 19,8 Triliun | 2.755.000.000 | 19,8 Triliun | 9.500.085.500 | DPM-PTSP |
| | | Persentase penyelesaian pelayanan administrasi / perizinan yang diajukan masyarakat | 100% | - | - | 100% | 97.910.000 | 100% | 107.701.000 | 100% | 118.471.100 | 100% | 130.318.210 | 100% | 143.350.031 | 100% | 597.750.341 | Kec. Tungkal Ilir |
| | | | 100% | - | - | - | - | - | - | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 300.000.000 | Kec. Betara |
| | | | 100% | - | - | 100% | 22.500.000 | 15% | 24.000.000 | 15% | 25.000.000 | 15% | 27.500.000 | 15% | 30.000.000 | 15% | 129.000.000 | Kec. Renah Mendaluh |
| | | | 100% | - | - | - | - | - | - | 100% | 41.000.000 | 100% | 45.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 209.500.000 | Kec. Muara Papalik |
| | | | 100% | - | - | 100% | 53.721.750 | 100% | 73.721.000 | 100% | 75.000.000 | 100% | 77.850.000 | 100% | 80.850.000 | 100% | 363.871.750 | Kec. Tungkal Ulu |
| | | | 100% | - | - | 100% | 22.500.000 | 100% | 24.000.000 | 100% | 24.000.000 | 100% | 24.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 120.500.000 | Kec. Merlung |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB |
|----------------|---|---|---|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--|----------------|---------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | Rp | 12 | | | | |
| | | | 100% | - | - | - | - | - | - | 100% | 10.000.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 20.000.000 | 100% | 45.000.000 | Kec. Seberang Kota |
| | | | 100% | - | - | 100% | 25.650.000 | 100% | 60.999.900 | 100% | 65.650.000 | 100% | 75.000.000 | 100% | 80.650.000 | 100% | 307.949.900 | Kec. Pengabuan |
| | | | 100% | - | - | - | - | - | - | 100% | 41.000.000 | 100% | 45.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 209.500.000 | Kec. Bram Itam |
| | | | 100% | - | - | - | - | 100% | 15.000.000 | 100% | 60.999.900 | 100% | 65.650.000 | 100% | 75.000.000 | 100% | 216.649.900 | Kec. Batang Asam |
| | | | 100% | - | - | 100% | 35.250.000 | 100% | 38.250.000 | 100% | 41.000.000 | 100% | 45.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 209.500.000 | Kec. Tebing Tinggi |
| | | | 100% | - | - | 100% | 35.250.000 | 100% | 38.250.000 | 100% | 41.000.000 | 100% | 45.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 209.500.000 | Kec. Kuala Betara |
| | Program Peningkatan Pelayanan Publik | Jumlah izin yang diterbitkan sesuai peraturan | 1500 izin | - | - | - | - | - | - | 2200 izin | 1.540.000.000 | 2300 izin | 1.675.000.000 | 2400 izin | 1.975.000.000 | 6.900 izin | 5.415.000.000 | DPM-PTSP |
| 1.02.12.18 | Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) | Jumlah dokumen TJSLP pendukung data perencanaan | 1 dokumen | 1 dokumen | 348.965.000 | 1 dokumen | 300.000.000 | 1 dokumen | 222.515.000 | 1 dokumen | 244.746.500 | 1 dokumen | 269.243.150 | 1 dokumen | 296.167.465 | 1 dokumen | 1.681.637.115 | Bappeda |
| 1.02.13 | Kepemudaan dan Olah Raga | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.13.15 | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | Jumlah kegiatan berbasis kepemudaan | 6 | 6 | 956.512.500 | 6 | 1.368.453.100 | 7 | 1.410.965.005 | 7 | 1.773.929.830 | 7 | 1.887.631.967 | 8 | 1.979.598.032 | 8 | 9.377.090.434 | Disparpora |
| 1.02.13.20 | Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah raga | Jumlah pelaksanaan kegiatan keolahragaan | 7 | 7 | 357.585.000 | 7 | 3.457.145.500 | 8 | 4.173.687.750 | 8 | 5.048.677.788 | 8 | 5.441.455.677 | 9 | 5.431.417.261 | 9 | 23.909.968.976 | Disparpora |
| | | Tingkat prestasi kecamatan di kompetisi olah raga tingkat kabupaten | Peringkat 1 | Peringkat 2 | 47.745.000 | Peringkat 3 | 154.274.250 | Peringkat 2 | 169.701.675 | Peringkat 1 | 186.671.843 | Peringkat 1 | 205.339.027 | Peringkat 1 | 225.872.929 | Peringkat 1 | 989.604.724 | Kec. Tungkal Ilir |
| | | | Peringkat 8 | Peringkat 2 | 102.000.000 | Peringkat 5 | 150.950.000 | Peringkat 4 | 155.000.000 | Peringkat 3 | 160.000.000 | Peringkat 2 | 160.000.000 | Peringkat 1 | 160.000.000 | Peringkat 1 | 785.950.000 | Kec. Merlung |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB |
|------------|---|--|---|---------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--|---------------|---------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | Rp | 12 | | | | |
| | | | Peringkat 6 | Peringkat 5 | 77.835.000 | Peringkat 8 | 80.000.000 | Peringkat 7 | 85.000.000 | Peringkat 6 | 85.000.000 | Peringkat 5 | 90.000.000 | Peringkat 4 | 90.000.000 | Peringkat 4 | 507.835.000 | Kec. Muara Papalik |
| | | | Peringkat 4 | Peringkat 3 | 96.495.000 | Peringkat 6 | 166.995.000 | Peringkat 5 | 170.000.000 | Peringkat 4 | 100.000.000 | Peringkat 3 | 160.000.000 | Peringkat 2 | 170.000.000 | Peringkat 2 | 863.490.000 | Kec. Bram Itam |
| | | | Peringkat 2 | Peringkat 1 | 87.145.000 | Peringkat 4 | 141.825.000 | Peringkat 3 | 141.825.000 | Peringkat 4 | 180.000.000 | Peringkat 4 | 200.000.000 | Peringkat 4 | 220.000.000 | Peringkat 4 | 970.795.000 | Kec. Betara |
| | | | Peringkat 13 | Peringkat 11 | 79.795.000 | Peringkat 11 | 128.736.000 | Peringkat 8 | 154.483.200 | Peringkat 6 | 185.379.840 | Peringkat 4 | 222.455.808 | Peringkat 2 | 136.000.000 | Peringkat 2 | 645.350.000 | Kec. Kuala Betara |
| | | | Peringkat 10 | Peringkat 8 | 79.250.000 | Peringkat 7 | 150.950.000 | Peringkat 6 | 155.000.000 | Peringkat 5 | 175.000.000 | Peringkat 4 | 180.000.000 | Peringkat 3 | 190.000.000 | Peringkat 3 | 850.950.000 | Kec. Renah Mendaluh |
| | | | Peringkat 5 | Peringkat 3 | 77.695.000 | Peringkat 4 | 165.870.000 | Peringkat 3 | 57.525.000 | Peringkat 2 | 69.030.000 | Peringkat 1 | 82.836.000 | Peringkat 1 | 99.403.000 | Peringkat 1 | 552.359.000 | Kec. Tebing Tinggi |
| | | | Peringkat 3 | Peringkat 6 | 109.575.000 | Peringkat 4 | 190.775.000 | Peringkat 3 | 198.745.000 | Peringkat 3 | 210.000.000 | Peringkat 3 | 225.000.000 | Peringkat 3 | 240.000.000 | Peringkat 3 | 1.174.095.000 | Kec. Tungkal Ulu |
| | | | Peringkat 13 | Peringkat 10 | 171.450.000 | Peringkat 9 | 171.450.000 | Peringkat 5 | 171.450.000 | Peringkat 4 | 180.340.000 | Peringkat 3 | 180.340.000 | Peringkat 3 | 180.340.000 | Peringkat 3 | 883.920.000 | Kec. Seberang Kota |
| | | | Peringkat 7 | Peringkat 5 | 91.170.000 | Peringkat 12 | 158.235.000 | Peringkat 10 | 174.058.000 | Peringkat 7 | 191.458.000 | Peringkat 5 | 210.603.800 | Peringkat 2 | 231.669.600 | Peringkat 2 | 1.057.194.400 | Kec. Senyerang |
| | | | Peringkat 6 | Peringkat 4 | 57.925.000 | Peringkat 4 | 126.015.000 | Peringkat 3 | 198.745.000 | Peringkat 3 | 210.000.000 | Peringkat 2 | 225.000.000 | Peringkat 1 | 240.000.000 | Peringkat 1 | 1.057.685.000 | Kec. Pengabuan |
| | | | Peringkat 9 | Peringkat 6 | 78.265.000 | - | - | Peringkat 2 | 86.665.000 | Peringkat 1 | 138.515.000 | Peringkat 1 | 198.745.000 | Peringkat 1 | 210.000.000 | Peringkat 1 | 790.455.000 | Kec. Batang Asam |
| 1.02.13.21 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | Jumlah lapangan dan gedung olahraga yang memenuhi standar nasional | 1 lapangan/ GOR | 1 lapangan/ GOR | 1.836.734.260 | 2 lapangan/ GOR | 2.323.540.621 | 2 lapangan/ GOR | 836.908.250 | 2 lapangan/ GOR | 878.753.663 | 2 lapangan/ GOR | 922.691.346 | 2 lapangan/ GOR | 968.825.913 | 2 lapangan/ GOR | 7.767.454.053 | Disparpora |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB |
|----------------|--|---|---|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|--|---------------|---------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | Rp | 12 | | | | |
| 1.02.16 | Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.16.15 | Program Pengembangan Nilai Budaya | Jumlah pengelola kelembagaan agama dan budaya | 1 lembaga & 1 sanggar | - | - | 1 lembaga & 1 sanggar | 445.000.000 | 1 lembaga & 1 sanggar | 746.000.000 | 2 lembaga & 2 sanggar | 816.000.000 | 2 lembaga & 3 sanggar | 886.000.000 | 3 lembaga & 3 sanggar | 972.000.000 | 3 lembaga & 3 sanggar | 3.865.000.000 | Dikbud |
| 1.02.16.19 | Program Pelestarian Nilai Budaya | Jumlah budaya yang dilestarikan | 5 budaya | - | - | 6 budaya | 417.000.000 | 7 budaya | 625.000.000 | 7 budaya | 1.246.000.000 | 7 budaya | 1.350.000.000 | 7 budaya | 1.464.000.000 | 7 budaya | 5.102.000.000 | Dikbud |
| 1.02.17 | Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.17.15 | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. | Jumlah perpustakaan yang di bina | 60 perpustakaan di desa/ kelurahan | 24 perpustakaan di desa/ kelurahan | 248.394.000 | 24 perpustakaan di desa/ kelurahan | 342.000.000 | 28 perpustakaan di desa/ kelurahan | 258.000.000 | 30 perpustakaan di desa/ kelurahan | 376.200.000 | 32 perpustakaan di desa/ kelurahan | 413.820.000 | 36 perpustakaan di desa/ kelurahan | 455.202.000 | 174 perpustakaan di desa/ kelurahan | 2.093.616.000 | Dinas Pustaka |
| | | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Per tahun | 10.500 pengunjung | 11.186 pengunjung | | 18.720 pengunjung | | 26.254 pengunjung | | 33.788 pengunjung | | 41.322 pengunjung | | 48.858 pengunjung | | 48.858 pengunjung | | |
| 1.02.18 | Kearsipan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.18.15 | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah | Jumlah arsip/ dokumen daerah yang dilestarikan dan diselamatkan | 2.741 arsip | 8.048 arsip | 277.202.000 | 5000 arsip | 356.705.000 | 5000 arsip | 317.069.000 | 5000 arsip | 392.376.000 | 5000 arsip | 431.614.000 | 5000 arsip | 474.775.000 | 33.048 arsip | 2.249.741.000 | Dinas Pustaka |
| II | FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.01 | Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.01.20 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | Jumlah produksi perikanan budidaya | 1.828 ton | 1.934 ton | 301.430.000 | 2.102 ton | 1.829.220.000 | 1.985 ton | 1.275.687.000 | 2.084 ton | 1.403.255.700 | 2.150 ton | 1.555.669.500 | 2.250 ton | 1.709.025.700 | 14.333 ton | 8.074.287.900 | Dinas Perikanan |
| | | Jumlah produksi benih ikan | 445.000 ekor | 476.000 ekor | | 550.000 ekor | | 630.000 ekor | | 680.000 ekor | | 710.000 ekor | | 750.000 ekor | | 750.000 ekor | | |
| 2.01.01.21 | Program pengembangan perikanan tangkap | Jumlah produksi perikanan tangkap (laut dan umum) | 20,718 Ton | 21.734 ton | 150.050.000 | 22.790 ton | 509.950.000 | 23.929 ton | 760.500.000 | 26.125 ton | 836.550.000 | 26.884 ton | 881.850.000 | 28.901 ton | 955.200.000 | 170.082 ton | 4.094.100.000 | Dinas Perikanan |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB |
|------------|---|--|---|---------------------------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|--|----------------|---------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | |
| 2.01.01.23 | Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan | Jumlah konsumsi ikan | 32,07 kg/Kpl/Thn | 32,07 kg/Kpl/Thn | 45.000.000 | 32,80 kg/Kpl/Thn | 220.500.000 | 33,00 kg/Kpl/Thn | 178.536.000 | 33,45 kg/Kpl/Thn | 196.389.000 | 33,93 kg/Kpl/Thn | 241.450.000 | 34,00 kg/Kpl/Thn | 280.300.000 | 198.53 kg/Kpl/Thn | 1.162.175.000 | Dinas Perikanan |
| 2.01.01.25 | Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian sumber daya Kelautan dan Perikanan | Jumlah kelompok masyarakat yang menerapkan teknologi perikanan | 50 kelompok | - | - | 10 kelompok | 826.057.500 | 10 kelompok | 201.200.000 | 10 kelompok | 221.320.000 | 10 kelompok | 246.800.000 | 10 kelompok | 280.950.000 | 60 kelompok | 1.776.327.500 | Dinas Perikanan |
| 2.01.02 | Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.02.15 | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. | Jumlah pengunjung wisatawan | 2510 orang | 3032 orang | 780.132.000 | 3150 orang | 4.459.060.000 | 3480 orang | 1.474.441.250 | 3520 orang | 1.030.323.713 | 3589 orang | 1.104.339.898 | 3690 orang | 1.159.556.893 | 3690 orang | 10.007.853.754 | Disparpora |
| 2.01.02.17 | Program pengembangan kemitraan | Jumlah lembaga / organisasi / pelaku pariwisata yang dibina | 0 | 0 | - | 3 | 99.705.000 | 3 | 109.675.844 | 4 | 938.011.429 | 5 | 1.031.812.572 | 5 | 1.134.993.829 | 5 | 3.314.198.674 | Disparpora |
| 2.01.02.16 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Jumlah potensi wisata yang dikembangkan menjadi objek wisata | 1 potensi wista | 2potensi wisata | 311.080.000 | 2 potensi wisata | - | 2 potensi wisata | 551.417.500 | 3 potensi wisata | 1.183.740.250 | 3 potensi wisata | 1.332.614.275 | 3 potensi wisata | 1.442.244.989 | 3 potensi wisata | 4.821.097.014 | Disparpora |
| 2.01.03 | Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.03.15 | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | Rrasio antara pendapatan petani dengan biaya usaha tani | 1 | 1 | 845.750.000 | 1 | 1.414.560.000 | 1,25 | 1.918.750.000 | 1,50 | 2.014.687.500 | 1,75 | 3.115.421.875 | 2 | 2.221.192.969 | 2 | 11.530.362.344 | DTPH |
| 2.01.03.17 | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan | Jumlah sentra agrobisnis produk unggulan yang tercipta | 0 sentra | 0 sentra | 180.000.000 | 0 sentra | 218.900.000 | 0 sentra | 270.000.000 | 3 sentra | 231.000.000 | 3 sentra | 242.550.000 | 1 sentra | 429.677.500 | 7 sentra | 1.572127.000 | DTPH |
| | Jmlah pameran pemasaran dan promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah | 4 kali | 4 kali | 4 kali | | 4 kali | | 4 kali | | 4 kali | | 4 kali | | 4 kali | | 20 kali | | |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB | |
|------------|--|---|---|---------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--|----------------|---------------------|----------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | |
| 2.01.03.17 | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan | Jumlah promosi produk unggulan perkebunan | 4 kali | 4 kali | 95.281.500 | 3 kali | 118.040.000 | 2 kali | 68.970.000 | 2 kali | 75.867.000 | 2 kali | 83.453.700 | 2 kali | 91.799.070 | 15 kali | 533.411.270 | Disbunak | |
| 2.01.03.15 | Program pengembangan agribisnis perkebunan | Jumlah komoditi yang dikerjasama-mitirakan antara perusahaan dengan lembaga/asosiasi petani | 1 komoditi | 1 komoditi | 122.800.000 | 1 komoditi | 313.389.500 | 1 komoditi | 287.524.550 | 1 komoditi | 296.150.287 | 1 komoditi | 305.034.795 | 1 komoditi | 314.185.839 | 5 komoditi | 1.639.084.971 | Disbunak | |
| 2.01.03.18 | Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan | Jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian | 30 kelompok | 50 kelompok | 1.216.187.900 | 20 kelompok | 1.297808.046 | 20 kelompok | 1.739.629.290 | 20 kelompok | 2.283.309.554 | 20 kelompok | 2.405.685.638 | 20 kelompok | 2.501.162.731 | 150 kelompok | 11.443.783.158 | DTPH | |
| | | Jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi perkebunan dan peternakan | 21 Kelompok Tani | 6 Kelompok tani | 272.201.000 | 10 Kelompok Tani | 356.000.000 | 10 Kelompok Tani | 290.560.000 | 10 Kelompok Tani | 1.794.700.000 | 10 Kelompok Tani | 1.896.020.000 | 10 Kelompok Tani | 2.203.627.500 | 77 Kelompok Tani | 6.813.108.500 | Disbunak | |
| 2.01.03.19 | Program peningkatan produksi pertanian /perkebunan | Persentase kenaikan produksi Tanaman Pangan | 0% | 2,5% | 3.654.104.450 | 2,5% | 3.925.468.000 | 2,5% | 10.782.728.000 | 2,5% | 11.195.267.388 | 2,5% | 11.627.831.377 | 2,5% | 12.061.418.184 | 15% | 40.644.930.913 | DTPH | |
| | | Persentase kenaikan produksi Tanaman Hortikultura | 0% | 2,5% | | 2,5% | | 2,5% | | 2,5% | | 2,5% | | 5% | | | | | |
| | | Produksi Sawit (ton) | 131.234 | 133.858 | 1.333.282.100 | 136.535 | 1.603.505.500 | 139.267 | 1.712.703.750 | 142.051 | 2.064.462.353 | 144.893 | 2.143.044.809 | 147.790 | 2.225.021.497 | 147.790 | 11.082.020.009 | 61.635 | Disbunak |
| | | Produksi Karet (ton) | 14.806 | 6.575 | | 6.772 | | 6.975 | | 7.185 | | 7.400 | | 7.622 | | | | | |
| | | Produksi Kelapa dalam (ton) | 54.908 | 55.824 | | 56.941 | | 58.080 | | 59.241 | | 60.426 | | 61.635 | | | | | |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB |
|------------|---|--|---|---------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|----------------|---------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | Rp | 12 |
| | | Produksi Kopi (ton) | 1.214 | 1.238 | | 1.263 | | 1.288 | | 1.314 | | 1.340 | | 1.367 | | 1.367 | | |
| | | Produksi Pinang (ton) | 10.989 | 11.208 | | 11.432 | | 11.662 | | 11.895 | | 12.133 | | 12.375 | | 12.375 | | |
| 2.01.03.30 | Program pengembangan Data/informasi pertanian | Persentase ketersediaan data pertanian yang valid dan up to date | 100% | 100% | 610.000.000 | 100% | 912.545.500 | 100% | 738.562.775 | 100% | 755.073.375 | 100% | 782.867.269 | 100% | 812.050.857 | 100% | 4.611.099.776 | DTPH |
| 2.01.03.29 | Program pengembangan Data/informasi perkebunan | Persentase ketersediaan data perkebunan / peternakan yang valid dan up to date | 100% | 100% | 554.302.940 | 100% | 634.145.000 | 100% | 624.338.750 | 100% | 643.068.913 | 100% | 662.360.000 | 100% | 662.231.809 | 100% | 3.780.447.412 | Disbunak |
| 2.01.03.20 | Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan | Persentase PPL dengan Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap (PKS) yang baik | 75% | 80% | 845.790.000 | 80% | 2.471.338.000 | 85% | 1.393.186.500 | 90% | 1.607.845.825 | 95% | 1.688.236.116 | 165 PPL | 1.772.650.022 | 165 PPL / | 9.779.0448.463 | DTPH |
| | | Persentase pelaksanaan koordinasi antar penyuluh dan instansi terkait | 100% | - | - | 100% | 154.310.000 | 100% | 75.310.000 | 100% | 77.569.000 | 100% | 79.896.300 | 100% | 82.293.270 | 100% | 469.378.570 | Disbunak |
| 2.01.03.26 | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan | Persentase kecukupan sarana dan prasarana penyuluhan | 50% | 60% | 1.775.450.000 | - | - | 70% | 2.340.000.000 | 80% | 3.457.000.000 | 90% | 3.629.850.000 | 100% | 3.811.342.500 | 100% | 15.013.642.500 | DTPH |
| 2.01.03.27 | Program Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit ternak | Aangka kematian ternak | 2% | 2% | 556.071.000 | 1,9% | 562.149.000 | 1,8% | 498.161.930 | 1,7% | 548.106.788 | 1,6% | 565.249.992 | 1,5% | 582.942.491 | 1,5% | 3.312.681.201 | Disbunak |
| 2.01.03.22 | Program peningkatan produksi hasil peternakan | Jumlah Populasi Ternak Sapi (ekor) | 7.193 | 7.336 | 813.778.000 | 7.482 | 832.270.000 | 7.631 | 876.174.000 | 7.783 | 2.342.482.700 | 7.938 | 2.476.656.835 | 8.096 | 2.614.576.177 | 8.096 | 9.955.937.712 | Disbunak |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB | |
|------------|---|---|---|---------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--|---------------|---------------------|--|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | Rp | 12 | |
| | | Jumlah Populasi Ternak Kerbau (ekor) | 607 | 613 | | 619 | | 625 | | 632 | | 639 | | 646 | | 646 | | | |
| | | Jumlah Populasi Ternak Kambing (ekor) | 40.195 | 40.235 | | 40.275 | | 40.315 | | 40.355 | | 40.395 | | 40.435 | | 40.435 | | | |
| | | Jumlah Populasi Ternak Domba (ekor) | 634 | 640 | | 646 | | 652 | | 658 | | 664 | | 670 | | 670 | | | |
| | | Jumlah Populasi Ternak Unggas (ekor) | 913.464 | 1.046.758 | | 1.099.095 | | 1.054.050 | | 1.211.753 | | 1.272.340 | | 1.335.957 | | 1.335.957 | | | |
| 2.01.03.24 | Program peningkatan penerapan teknologi peternakan | Jumlah kelompok peternak yang menerapkan teknologi peternakan | 30 Kelompok Tani | 10 kelompok | 118.514.600 | 2 Kelompok Tani | 67.409.000 | 2 Kelompok Tani | 69.431.270 | 2 Kelompok Tani | 72.902.834 | 2 Kelompok Tani | 76.547.975 | 2 Kelompok Tani | 80.375.374 | 20 Kelompok Tani | 485.181.053 | | Disbunak |
| 2.01.05 | Energi dan Sumberdaya Mineral | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.05.15 | Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dan Energi | Persentase jumlah pengaduan bidang pertambangan dan energi yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 104.350.000 | 100% | 226.170.000 | 100% | 208.404.000 | 100% | 262.450.000 | 100% | 288.695.000 | 100% | 310.564.000 | 100% | 1.400.633.000 | | SETDA Bag. SDA |
| 2.01.06 | Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.06.15 | Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan | Jumlah alat – alat UTTP yang bertanda terasah | 1200 unit | 100 unit | 226.555.000 | 100 unit | 250.000.000 | 100 unit | 400.000.000 | 100 unit | 400.000.000 | 100 unit | 450.000.000 | 100 unit | 450.000.000 | 1800 unit | 2.176.555.000 | | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan |
| 2.01.06.15 | Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri | Persentase peningkatan ketersediaan barang | 80% | 85 % | 390.660.000 | 2% | 471.911.000 | 2% | 700.000.000 | 2% | 700.000.000 | 2% | 755.000.000 | 2% | 765.000.000 | 92% | 3.782.571.000 | | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|--|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | |
| 2.01.06.17 | Program peningkatan dan pengembangan Ekspor | Persentase pertumbuhan nilai ekspor dan impor | 6,72% / 15,60% | 7% / 17% | 197.500.000 | 7% / 17% | 194.157.000 | 8% / 17% | 400.000.000 | 8% / 17% | 420.000.000 | 8% / 18% | 450.000.000 | 9% / 18% | 470.000.000 | 9% / 18% | 2.131.657.000 | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan |
| 2.01.06.19 | Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan | Persentase peningkatan sarana perdagangan | 5% | - | - | 7,14% | 2.595.719.000 | 5% | 3.600.000.000 | 5% | 3.800.000.000 | 5% | 2.300.000.000 | 5% | 2.300.000.000 | 32,14% | 14.595.719.000 | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan |
| | | Persentase capaian retribusi pasar | 100% | - | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | | |
| 2.01.17 | Perindustrian | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.07.16 | Program pengembangan industri kecil dan menengah | Jumlah IKM yang tumbuh dan berkembang | 350 IKM | 50 IKM | 349.450.000 | 50 IKM | 418.515.000 | 50 IKM | 4.100.000.000 | 50 IKM | 1.975.000.000 | 50 IKM | 2.225.000.000 | 50 IKM | 2.200.000.000 | 300 IKM | 11.267.965.000 | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan |
| 2.01.07.17 | Program peningkatan kemampuan teknologi industri | Jumlah SDM (bidang industri) terampil | 376 orang | 20 orang | 150.650.000 | 20 orang | 142.800.000 | 20 orang | 690.000.000 | 20 orang | 1.040.000.000 | 20 orang | 1.040.000.000 | 20 orang | 1.040.000.000 | 120 orang | 4.103.450.000 | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan |
| 2.01.07.19 | Program pengembangan sentra-sentra industri potensial | Jumlah IKM yang terbina | 2 sentra IKM | 2 sentra IKM | 121.000.000 | 2 sentra IKM | 379.700.000 | 2 sentra IKM | 4.455.000.000 | 2 sentra IKM | 1.090.000.000 | 2 sentra IKM | 920.000.000 | 2 sentra IKM | 990.000.000 | 12 Sentra IKM | 7.955.700.000 | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan |
| FOKUS FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.06 | Perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.15 | Program pengembangan data dan Informasi | Persentase ketersediaan data dasar pengembangan infrastruktur | 10% | - | - | 25% | 1.300.000.000 | 40% | 2.000.000.000 | 60% | 2.000.000.000 | 80% | 1.500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 8.300.000.000 | PUPR |
| | Program Kerjasama Pembangunan | Jumlah jalinan kerjasama pembangunan | 2 MoU | - | - | 3 MoU | 250.000.000 | 3 MoU | 200.000.000 | 3 MoU | 200.000.000 | 3 MoU | 200.000.000 | 3 MoU | 200.000.000 | 15 MoU | 1.050.000.000 | Bappeda |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB |
|------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--|-------------|---------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | Jumlah desa/kelurahan dengan kategori desa / kelurahan berkembang | 1 desa | 1 desa | 12.925.000 | 1 desa | 12.848.750 | 1 desa | 20.951.900 | 1 desa | 23.000.000 | 1 desa | 25.000.000 | 1 desa | 25.000.000 | 6 desa | 119.725.650 | Kec. Betara |
| | | | 2 desa | 1 desa | 14.325.000 | 1 desa | 16.500.000 | 1 desa | 19.000.000 | 1 desa | 20.000.000 | 1 desa | 22.000.000 | 1 desa | 25.000.000 | 6 desa | 102.500.000 | Kec. Renah Mendaluh |
| | | | 1 desa | 1 desa | 16.395.800 | 1 desa | 16.900.000 | 1 desa | 29.500.000 | 1 desa | 33.500.000 | 1 desa | 35.000.000 | 1 desa | 30.000.000 | 6 desa | 161.295.800 | Kec. Tungkal Ulu |
| | | | 1 desa | 1 desa | 17.250.000 | 1 desa | 16.500.000 | 1 desa | 17.000.000 | 1 desa | 17.500.000 | 1 desa | 18.000.000 | 1 desa | 18.500.000 | 1 desa | 87.500.000 | Kec. Merlung |
| | | | 1 desa | 1 desa | 15.295.650 | 1 desa | 17.749.265 | 1 desa | 17.749.265 | 1 desa | 20.000.000 | 1 desa | 25.000.000 | 1 desa | 30.000.000 | 1 desa | 125.794.180 | Kec. Seberang Kota |
| | | | 1 desa | 1 desa | 12.950.000 | 1 desa | 12.685.800 | 1 desa | 18.000.000 | 1 desa | 19.800.000 | 1 desa | 21.780.000 | 1 desa | 23.958.000 | 1 desa | 109.173.800 | Kec. Senyerang |
| | | | 1 desa | 1 desa | 7.850.000 | 1 desa | 10.872.000 | 1 desa | 26.750.000 | 1 desa | 30.000.000 | 1 desa | 35.000.000 | 1 desa | 30.000.000 | 1 desa | 140.472.000 | Kec. Pengabuan |
| | | | 1 desa | 1 desa | 13.000.000 | 1 desa | 13.000.000 | 1 desa | 13.000.000 | 1 desa | 26.750.000 | 1 desa | 30.000.000 | 1 desa | 30.000.000 | 1 desa | 125.750.000 | Kec. Batang Asam |
| | | | 1 desa | 1 desa | 5.875.000 | 1 desa | 5.875.000 | 1 desa | 6.000.000 | 1 desa | 6.000.000 | 1 desa | 6.000.000 | 1 desa | 6.000.000 | 1 desa | 35.750.000 | Kec. Muara Papalik |
| | | | 1 desa | 1 desa | 29.325.000 | 1 desa | 68.702.650 | 1 desa | 75.572.915 | 1 desa | 83.130.207 | 1 kelurahan | 91.443.228 | 1 kelurahan | 100.587.551 | 2desa / 2 kelurahan | 448.761.551 | Kec. Tungkal Ilir |
| | | | 1 desa | 1 desa | 9.250.000 | 1 desa | 9.000.000 | 1 desa | 10.800.000 | 1 desa | 12.960.000 | 1 desa | 15.552.000 | 1 desa | 17.840.000 | 1 desa | 75.402.000 | Kec. Kuala Betara |
| | | | 1 desa | 1 desa | 7.850.000 | 1 desa | 10.872.000 | 1 desa | 26.750.000 | 1 desa | 30.000.000 | 1 desa | 35.000.000 | 1 desa | 30.000.000 | 1 desa | 140.472.000 | Kec. Tebing Tinggi |
| | | | 1 desa | 1 desa | 11.527.100 | 1 desa | 10.825.000 | 1 desa | 12.850.000 | 1 desa | 15.000.000 | 1 desa | 30.025.000 | 1 desa | 30.025.000 | 1 desa | 110.252.100 | Kec. Bram Itam |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB |
|------|--|--|---|---------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|----------------|---------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | Rp | 12 | | | | |
| | Program perencanaan pembangunan daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu | 40% | 50% | | 70% | | 80% | | 90% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | | Tingkat kelengkapan dokumen perencanaan sesuai peraturan | 15% | 20% | 2.230.660.000 | 40% | 2.085.690.000 | 60% | 2.004.000.000 | 80% | 1.829.000.000 | 90% | 1.919.000.000 | 90% | 2.334.000.000 | 90% | 12.402.350.000 | Bappeda |
| | | Tingkat pelaksanaan evaluasi / review dokumen perencanaan | 10% | 10% | | 30% | | 60% | | 80% | | 90% | | 95% | | 95% | | |
| | | Persentase usulan pembangunan daerah sesuai pedoman pembangunan desa | 100% | 100% | 6.750.000 | 100% | 7.366.900 | 100% | 20.591.900 | 100% | 35.000.000 | 100% | 40.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 159.708.800 | Kec. Betara |
| | | | 100% | 100% | 8.566.000 | 100% | 13.750.000 | 100% | 17.500.000 | 100% | 20.000.000 | 100% | 22.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 98.250.000 | Kec. Renah Mendaluh |
| | | | 100% | 100% | 8.125.000 | 100% | 14.725.000 | 100% | 31.871.000 | 100% | 35.200.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 199.921.000 | Kec. Tungkal Ulu |
| | | | 100% | 100% | 25.049.265 | 100% | 25.049.265 | 100% | 25.049.265 | 100% | 42.699.265 | 100% | 50.956.400 | 100% | 60.808.320 | 100% | 204.562.515 | Kec. Seberang Kota |
| | | | 100% | 100% | 9.350.000 | 100% | 9.957.800 | 100% | 20.000.000 | 100% | 22.000.000 | 100% | 24.200.000 | 100% | 26.620.000 | 100% | 112.127.800 | Kec. Senyerang |
| | | | 100% | 100% | 7.290.000 | 100% | 7.290.000 | 100% | 21.840.000 | 100% | 33.547.000 | 100% | 40.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 159.967.000 | Kec. Tebing Tinggi |
| | | | 100% | 100% | 8.000.000 | 100% | 11.926.000 | 100% | 33.547.150 | 100% | 40.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 203.473.150 | Kec. Pengabuan |
| | | | 100% | 100% | 7.290.000 | 100% | 7.290.000 | 100% | 21.840.000 | 100% | 33.547.000 | 100% | 40.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 159.967.000 | Kec. Batang Asam |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB |
|-----------------|---|---|---|---------------------------------------|---------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|-----------------|---------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | Rp | 12 | | | | |
| | | | 100% | 100% | 18.200.000 | 100% | 13.750.000 | 100% | 14.000.000 | 100% | 14.000.000 | 100% | 14.000.000 | 100% | 14.000.000 | 100% | 69.750.000 | Kec. Merlung |
| | | | 100% | 100% | 7.899.500 | 100% | 7.700.000 | 100% | 10.900.000 | 100% | 114.000.000 | 100% | 153.665.500 | 100% | 165.715.500 | 100% | 269.846.000 | Kec. Bram Itam |
| | | | 100% | 100% | 5.875.000 | 100% | 5.875.000 | 100% | 6.000.000 | 100% | 6.000.000 | 100% | 6.000.000 | 100% | 6.000.000 | 100% | 35.750.000 | Kec. Muara Paplik |
| | | | 100% | 100% | 4.365.100 | 100% | 3.850.000 | 100% | 3.850.000 | 100% | 4.620.000 | 100% | 5.544.000 | 100% | 6.652.800 | 100% | 24.516.800 | Kec. Kuala Betara |
| | Program perencanaan pembangunan ekonomi | Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan lingkup ekonomi dan sumberdaya alam | 81% | 83% | 137.920.000 | 90% | 137.920.000 | 92% | 64.955.000 | 95% | 71.450.000 | 95% | 78.595.550 | 95% | 86.455.105 | 95% | 577.296.155 | Bappeda |
| 1.06.01.31 | Program Perencanaan Sosial Pemerintahan | Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan | 70% | 75% | 201.890.000 | 90% | 254.325.000 | 90% | 90.000.000 | 95% | 95.000.000 | 95% | 95.000.000 | 95% | 95.000.000 | 95% | 831.215.000 | Bappeda |
| | Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam dan LH | Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan lingkup sarana dan prasarana | 65% | 80% | 105.350.000 | 90% | 165.000.000 | 92% | 200.000.000 | 95% | 240.000.000 | 95% | 260.000.000 | 95% | 286.000.000 | 95% | 1.256.350.000 | Bappeda |
| Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Discleamer | WDP | 7.094.087.900 | WDP | 11.069.000.000 | WTP | 11.663.900.000 | WTP | 12.305.805.000 | WTP | 12.962.305.250 | WTP | 13.569.010.512 | WTP | 173.639.208.662 | BPKAD |
| 1.20.31 | Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Tingkat kenaikan penerimaan pendapatan Asli Daerah | 6% | 6% | 4.293.000.000 | 0,21% | 8.117.848.000 | 2,00% | 11.945.489.550 | 5,1% | 13.941.524.075 | 5,3% | 16.713.434.900 | 5,7% | 19.279.011.900 | 5,7% | 74.290.308.425 | BPPRD |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---------------------------------------|-------------|------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--|---------------|---------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | Rp | 12 |
| 1.20.31 | Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah Buku Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Buku Rencana Kebutuhan Pemeliharaan barang Milik daerah yang tersusun | 0 dokumen | - | - | - | - | 2 dokumen | 165.700.000 | 2 dokumen | 190.555.000 | 2 dokumen | 213.421.600 | 2 dokumen | 239.032.192 | 8 dokumen | 808.708.792 | SETDA Bag. Sanpras |
| | Program Pengelolaan kekayaan daerah Kab. Tanjung Jabung Barat | Jumlah objek aset (tanah) yang dikelola | 0 bidang tanah | - | - | - | - | 3 bidang tanah | 187.200.000 | 5 bidang tanah | 215.280.000 | 20 bidang tanah | 241.113.600 | 20 bidang tanah | 270.047.232 | 48 bidang tanah | 913.640.832 | SETDA Bag. Sanpras |
| Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.20.28 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pejabat ASN yang mengikuti diklat struktural | 26,9% | - | - | - | 27,9% | 27,9% | 377.892.850 | 40,9% | 1.715.035.600 | 44,9% | 1.714.079.880 | 48,9% | 3.383.576.374 | 48,9% | 8.325.337.854 | BKPSDM |
| | | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 11,6% | 12,4% | 261.015.350 | 13,5% | 873.737.800 | 15,5% | 377.892.850 | 17,5% | 1.715.035.600 | 19,2 | 1.714.079.880 | 24,5% | 3.383.576.374 | 24,5% | 8.325.337.854 | BKPSDM |
| 1.20.29 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi | 70% | 73% | - | 76% | 79% | 79% | 1.119.143.250 | 79% | 2.432.458.913 | 85% | 2.484.581.858 | 85% | 1.867.810.951 | 85% | 9.835.329.102 | BKPSDM |
| | | Persentase kasus pelanggaran disiplin pegawai ASN yang diselesaikan | 90% | 90% | 677.594.500 | 90% | 1.253.739.630 | 90% | 1.119.143.250 | 90% | 2.432.458.913 | 90% | 2.484.581.858 | 90% | 1.867.810.951 | 90% | 9.835.329.102 | BKPSDM |
| Penelitian Dan Pengembangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.01.01.06.30 | Program Penelitian dan Pengembangan daerah | Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan | 50% | - | - | 55% | 60% | 60% | 450.000.000 | 63% | 800.000.000 | 65% | 700.000.000 | 65% | 790.000.000 | 65% | 2.800.000.000 | Bappeda |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB |
|----------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|----------------|---------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | Rp | 12 |
| 3.01.01.06.35 | Program Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Jaringan Penelitian dan Pengembangan | Persentase difusi informasi hasil penelitian dan pengembangan | 30% | - | - | - | - | 40% | 25.000.000 | 45% | 75.000.000 | 50% | 75.000.000 | 55% | 75.000.000 | 65% | 250.000.000 | Bappeda |
| Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.20.20 | Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | Persentase ketaatan OPD dalam penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) dan ekstern | 100% | 100% | 2.652.125.400 | 100% | 2.810.645.000 | 100% | 2.810.645.000 | 100% | 2.810.645.000 | 100% | 2.810.645.000 | 100% | 2.810.645.000 | 100% | 16.705.350.400 | Inspektorat |
| 1.20.21 | Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | Jumlah Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) bersertifikat kompetensi Jumlah tenaga pemeriksa yang mengikuti PKS / Bimtek / Sertifikat JFA/ P2UPD | 4 orang | 4 orang | 200.000.000 | 4 orang | 160.000.000 | 4 orang | 160.000.000 | 4 orang | 160.000.000 | 4 orang | 160.000.000 | 4 orang | 160.000.000 | 24 orang | 1.000.000.000 | Inspektorat |
| | | | 29 orang | 29 orang | | 29 orang | | 29 orang | | 30 orang | | 30 orang | | 30 orang | | 30 orang | | |
| Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.20.16 | Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah | Persentase tingkat kelancaran tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam kunjungan /acara | 100% | - | - | 100% | 1.351.300.000 | 100% | 1.553.995.000 | 100% | 1.787.094.250 | 100% | 2.001.545.560 | 100% | 2.241.731.027 | 100% | 8.935.665.837 | SETDA Bag.Umum |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB | | | | |
|---------|--|---|---|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | | | | | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | Rp | 12 | | | | | | | | |
| 1.20.16 | Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah | Jumlah pelaksanaan rakor forkompinda | 2 kali | - | - | 3 kali | 50,275,000 | 6 kali | 175,350,000 | 6 kali | 185,355,000 | 6 kali | 195,350,000 | 6 kali | 2,015,355,000 | 6 kali | 2,621,685,000 | Bag. Pem Otda SETDA | | | | |
| 1.20.01 | Program keagamaan dan kemasyarakatan | Tingkat prestasi kecamatan di kompetisi tingkat kabupaten | Peringkat 3 | Peringkat 2 | 83.054.500 | Peringkat 1 | 542.441.704 | Peringkat 1 | 628.722.674 | Peringkat 1 | 734.659.942 | Peringkat 1 | 808.125.936 | Peringkat 1 | 888.938.529 | Peringkat 1 | 3.685.943.285 | Kec. Tungkal Ilir | | | | |
| | | | Peringkat 1 | Peringkat 2 | 141.996.000 | Peringkat 1 | 554.182.400 | Peringkat 1 | 225.000.000 | Peringkat 1 | 170.000.000 | Peringkat 1 | 170.000.000 | Peringkat 1 | 225.000.000 | Peringkat 1 | 225.000.000 | Peringkat 1 | 1.486.178.400 | Kec. Bram Itam | | |
| | | | Peringkat 6 | Peringkat 5 | 156.573.500 | Peringkat 4 | 199.810.200 | Peringkat 4 | 199.810.200 | Peringkat 4 | 250.000.000 | Peringkat 4 | 250.000.000 | Peringkat 4 | 250.000.000 | Peringkat 4 | 250.000.000 | Peringkat 4 | 1.306.193.900 | Kec. Betara | | |
| | | | Peringkat 10 | Peringkat 11 | 135.0000.000 | Peringkat 10 | 205.705.500 | Peringkat 9 | 330.000.000 | Peringkat 8 | 340.000.000 | Peringkat 5 | 360.000.000 | Peringkat 3 | 1.020.000.000 | Peringkat 3 | 2.255.705.500 | Peringkat 3 | 2.255.705.500 | Kec. Renah Mendaluh | | |
| | | | Peringkat 8 | Peringkat 6 | 124.638.350 | Peringkat 3 | 216.625.100 | Peringkat 3 | 331.650.000 | Peringkat 3 | 345.000.000 | Peringkat 3 | 350.000.000 | Peringkat 3 | 380.000.000 | Peringkat 3 | 380.000.000 | Peringkat 2 | 1.747.913.450 | Kec. Tungkal Ulu | | |
| | | | Peringkat 9 | Peringkat 7 | 193.907.700 | Peringkat 3 | 193.907.700 | Peringkat 3 | 193.907.700 | Peringkat 3 | 193.549.700 | Peringkat 3 | 193.549.700 | Peringkat 3 | 193.549.700 | Peringkat 3 | 193.549.700 | Peringkat 3 | 968.464.500 | Kec. Seberang Kota | | |
| | | | Peringkat 5 | Peringkat 4 | 173.635.850 | Peringkat 3 | 205.705.000 | Peringkat 2 | 210.000.000 | Peringkat 2 | 210.000.000 | Peringkat 1 | 215.000.000 | Peringkat 1 | 865.000.000 | Peringkat 1 | 1.705.705.500 | Peringkat 1 | 1.705.705.500 | Kec. Merlung | | |
| | | | Peringkat 13 | Peringkat 10 | 163.788.500 | Peringkat 8 | 186.212.900 | Peringkat 6 | 204.835.000 | Peringkat 4 | 225.373.500 | Peringkat 2 | 227.616.000 | Peringkat 2 | 250.377.600 | Peringkat 2 | 250.377.600 | Peringkat 2 | 1.258.203.500 | Peringkat 2 | 1.258.203.500 | Kec. Senyerang |
| | | | Peringkat 2 | Peringkat 2 | 34.916.150 | Peringkat 2 | 190.493.350 | Peringkat 4 | 80.085.000 | Peringkat 3 | 96.102.000 | Peringkat 2 | 115.322.400 | Peringkat 1 | 138.386.880 | Peringkat 1 | 655.305.780 | Peringkat 1 | 655.305.780 | Peringkat 1 | 655.305.780 | Kec. Tebing Tinggi |
| | | | Peringkat 7 | Peringkat 6 | 333.910.000 | Peringkat 5 | 110.000.000 | Peringkat 4 | 110.000.000 | Peringkat 3 | 112.000.000 | Peringkat 2 | 112.000.000 | Peringkat 2 | 115.000.000 | Peringkat 2 | 115.000.000 | Peringkat 2 | 892.910.000 | Peringkat 2 | 892.910.000 | Kec. Muara Papalik |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---------|---|--|---|---------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--|----------------|------------------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | Rp | 12 | | | | |
| | | | Peringkat 11 | Peringkat 8 | 145.775.000 | Peringkat 6 | 216.650.000 | Peringkat 3 | 403.125.000 | Peringkat 3 | 408.125.000 | Peringkat 3 | 408.125.000 | Peringkat 3 | 408.125.000 | Peringkat 3 | 1.989.925.000 | Kec. Pengabuan |
| | | | Peringkat 4 | Peringkat 3 | 116.379.700 | Peringkat 3 | 116.379.700 | Peringkat 2 | 410.575.000 | Peringkat 2 | 410.940.000 | Peringkat 1 | 410.000.000 | Peringkat 1 | 410.000.000 | Peringkat 1 | 1.874.274.400 | Kec. Batang Asam |
| | | | Peringkat 4 | Peringkat 3 | 126.242.000 | Peringkat 3 | 163.137.000 | Peringkat 3 | 196.764.400 | Peringkat 3 | 195.764.400 | Peringkat 3 | 234.917.280 | Peringkat 3 | 281.900.736 | Peringkat 3 | 1.198.725.816 | Kec. Kuala Betara |
| 1.20.01 | Program keagamaan dan kemasyarakatan | Persentase pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah terkait bidang keagamaan dan kemasyarakatan | 89% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | | Jumlah murid ngaji yang bisa baca Al Quran | 5800 murid | 6030 murid | 12.929.544.468 | 8040 murid | 16.397.749.000 | 100 murid | 16.140.921.265 | 10050 murid | 16.406.506.000 | 12060 murid | 16.480.886.000 | 13400 murid | 16.480.886.000 | 13400 murid | 93.808.428.283 | SETDA Bag.KSRA dan Keagamaan |
| | | Jumlah peserta pendidikan keagamaan di masyarakat desa / kelurahan | 18345 orang | 19876 orang | | 21892 orang | | 22322 orang | | 23461 orang | | 24152 orang | | 24992 orang | | 24992 orang | | |
| 1.20.22 | Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan | Persentase penyedia jasa konstruksi yang memenuhi standar kualifikasi | 30% | - | - | 45% | 400.000.000 | 50% | 450.000.000 | 55% | 500.000.000 | 60% | 550.000.000 | 65% | 600.000.000 | 65% | 2.500.000.000 | PUPR |
| 1.20.22 | Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan | Level kapabilitas APIP | 2 | 2 | 84.905.000 | 2 | 406.050.500 | 2 | 406.050.500 | 3 | 406.050.500 | 3 | 406.050.500 | 3 | 406.050.500 | 3 | 2.115.157.500 | Inspektorat |
| 1.20.22 | Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan | Persentase ketersediaan data LPPK PD dan Laporan ULP yang benar | 100% | - | - | 100% | 5.521.948.000 | 100% | 6.851.527.950 | 100% | 7.536.678.000 | 100% | 8.290.348.280 | 100% | 9.119.382.000 | 100% | 37.319.884.230 | SETDA Bag. ADP |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---------|---|--|---|---------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|----------------|-----------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | |
| | | Persentase rekomendasi /saran / usulan percepatan pembangunan yang koordinasikan | 100% | - | - | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | | Persentase saran pemanfaatan outcome pembangunan yang dikoordinasikan | 100% | - | - | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| 1.20.22 | Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan | Indeks Kualitas Pelayanan Publik | 74,5 | 74,5 | | 74,5 | | 74,5 | | 75 | | 75 | | 80 | | 85 | | |
| | | Persentase PD dengan akutanbilitas kinerja yang bernilai B | 56% | 70% | 608.568.700 | 85% | 761.887.750 | 95% | 1.084.669.000 | 98% | 1.621.750.000 | 100% | 1.427.500.000 | 100% | 1.496.750.000 | 100% | 7.001.125.450 | SETDA Bag. Organisasi |
| | | Persentase analisis jabatan PD sesuai pedoman penyusunan analisis jabatan | 55% | 65% | | 75% | | 85% | | 95% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | | Jumlah kecamatan yang dilakukan monitoring dan evaluasi PATEN | 13 Kec. | - | - | 13 Kec. | | 13 Kec. | | 13 Kec. | | 13 Kec. | | 13 Kec. | | 13 Kec. | | Bag.Pem Otda SETDA |
| | | Jumlah kerjasama antar daerah dan lembaga disetiap bidang | 0 Mou | - | - | 5 Mou | 304,820,000 | 6 Mou | 575,540,000 | 7 Mou | 585,545,000 | 8 Mou | 595,345,000 | 9 Mou | 605,365,000 | 10 Mou | 2,666,615,000 | Bag.Pem Otda SETDA |
| | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat | Jumlah penetapan rancangan perda | 10 | 15 | 11,319,055,200 | 17 | 17,316,403,895 | 18 | 16.004.136.667 | 19 | 16.700.251.000 | 20 | 16.795.000.000 | 20 | 16.895.000.000 | 99 | 66.394.387.667 | Setwan DPRD |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB | | | | | |
|--|--|--|---|---------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|---------------------|------------------------------|-------------|------|---------------|-------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | | | | | | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | Rp | 12 | | | | | |
| 1.20.23 | Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi | Persentase penyebaran informasi kegiatan Kepala / wakil Daerah serta kegiatan pemerintah daerah | 74% | 78% | | 82% | | 85% | | 87% | | 89% | | 90% | | 90% | | 36.330.753.849 | Setda Bag.Humas dan Protokol | | | | |
| | | | | 2.829.568.000 | | 3.242.756.000 | | 3.872.450.000 | | 6.413.765.000 | | 8.837.827.599 | | 11.134.387.250 | | | | | | | | | |
| | | Persentase terdokumentasinya kegiatan Kepala / wakil Daerah serta kegiatan pemerintah daerah | 66% | 68% | | 70% | | 74% | | 78% | | 82% | | 85% | | 85% | | | | | | | |
| | | Persentase penyebarluasan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan penanaman modal | 60% | - | - | 70% | | 1.134.475.000 | | - | | 90% | | 850.000.000 | | 90% | | 400.000.000 | 100% | 720.000.000 | 100% | 1.134.475.000 | DPM-PTSP |
| | | Jumlah masyarakat umum yang mengakses produk hukum daerah | 425 orang | 450 orang | 133.475.000 | 500 orang | 184.570.000 | 600 orang | 203.027.000 | 600 orang | 223.329.700 | 600 orang | 245.662.670 | 700 orang | 270.228.937 | 700 orang | 1.260.293.307 | | SETDA Bag. Hukum | | | | |
| | | Persentase penyebaran informasi kecamatan ke masyarakat / kelurahan dan desa melalui teknologi informasi | 65% | - | - | 90% | | 43.800.000 | | 95% | | 48.180.000 | | 100% | | 52.998.000 | | 100% | | 58.927.000 | 100% | 64.127.580 | 100% |
| Besaran sebaran Informasi dan dokumentasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD | 100% | - | - | - | | - | | 100% | | 348,100,000 | | 100% | | 406,570,000 | | 100% | | 406,570,000 | 100% | 406,570,000 | 100% | 1,567,810,000 | Setwan DPRD |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| KODE | PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) | Capaian Kinerja dan Program Pendanaan | | | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021) | | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---------|--|--|---|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|----------------|---------------------|
| | | | | TAHUN 2016 | | TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TARGET | Rp | |
| | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | Rp | 12 | | | | |
| 1.20.26 | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | Persentase produk hukum daerah sesuai pedoman penyusunan produk hukum daerah | 100% | 100% | 438.575.000 | 100% | 842.660.000 | 100% | 967.325.000 | 100% | 1.064.057.500 | 100% | 1.170.463.250 | 100% | 1.287.509.575 | 100% | 5.332.015.325 | SETDA Bag. Hukum |
| 1.20.26 | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | Keselarasan perda terhadap peraturan perundangan di atasnya | 100% | 100% | 863.950.000 | 100% | 745.400.000 | 100% | 3.260.000.000 | 100% | 3.713.040.000 | 100% | 3.713.040.000 | 100% | 3.756.570.000 | 100% | 16.052.000.000 | Setwan DPRD |
| | Program Peningkatan Motivasi anggota KORPRI | Persentase bantuan hukum yang difasilitasi | 100% | 100% | 189.870.000 | 100% | 130.070.000 | - | - | 100% | 140.163.500 | 100% | 147.171.675 | 100% | 154.530.259 | 100% | 761.805.434 | BKPSDM |
| | | Tingkat keberhasilan Pelaksanaan HUT KORPRI | 100% | 100% | | 100% | | - | | 100% | | 100% | | 100% | | | | |
| | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Persentase Camat yang memenuhi standar penilaian Camat teladan | 75% | - | - | 100% | 324.201.625 | 100% | 441.772,500 | 100% | 554.365.000 | 100% | 595.656.000 | 100% | 605.765.000 | 100% | 2.521,760,125 | Bag. Pem Otda SETDA |
| | Program pengembangan wilayah perbatasan | Persentase batas kabupaten yang memenuhi tertib administrasi | 70% | - | - | 75% | 479.963,750 | 80% | 855,987,500 | 85% | 946,567,500 | 90% | 976,745,600 | 95% | 996,755,000 | 100% | 4,256,019,350 | Bag. Pem Otda SETDA |
| | Program laporan penyelenggaraan pemerintah daerah | Skor penilaian LPPD Kab. Tanjab Barat | 3.2549 | - | - | 3.2985 | 164,886,000 | 3.3305 | 651,050,000 | 3.3805 | 665,165,000 | 3.4825 | 675,345,000 | 3.5505 | 683,456,000 | 3.5505 | 2,839,902,000 | Bag. Pem Otda SETDA |



BAB VIII

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan indikator kinerja pembangunan dipakai untuk mengukur kinerja suatu organisasi. Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat bila terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja pembangunan daerah merupakan syarat utama untuk menetapkan rencana kinerja tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Penetapan indikator kinerja pembangunan daerah akan menjadi acuan penting dalam lima tahun mendatang.

Indikator kinerja pembangunan daerah adalah alat untuk menilai keberhasilan pembangunan daerah secara kuantitatif maupun kualitatif, yang mencerminkan capaian indikator kinerja program dan kegiatan. Indikator kinerja program adalah gambaran berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Pengukuran indikator hasil lebih utama memperlihatkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan semua pihak. Indikator kinerja dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi deskripsi tentang prestasi organisasi di masa mendatang.



Indikator kinerja pembangunan daerah pada dasarnya terlihat pada tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan keefektifan pencapaian sasaran tersebut. Indikator kinerja yang diharapkan dapat memperlihatkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja haruslah ditetapkan secara benar dan sesuai dengan kondisi nyata. Indikator kinerja pemerintah daerah tersebut digunakan untuk mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama. Untuk mengukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi syarat, antara lain : a) Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, b) Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan daerah yang diharapkan, c) Memfokuskan pada prioritas program pembangunan daerah, d) Terkait dengan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja utama program pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 bertujuan untuk memenuhi visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021. Indikator kinerja pembangunan daerah tersebut di kategorikan atas 3 aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Penetapan indikator kinerja utama yang terkandung dalam Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 dimuat pada tabel berikut ini:



Tabel T.VIII-C.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021

| No | Indikator | Target Tahun ke | | | | | |
|----|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik | 50,20 | 54,50 | 60,00 | 67,50 | 74,00 | 80,10 |
| 2 | Luasan kawasan permukiman kumuh | 140 ha | 112 ha | 84 ha | 56 ha | 28 ha | 0 ha |
| 3 | Persentase kecamatan mendapatkan aksesibilitas / terlayani air bersih | 45% | 53% | 61% | 69% | 84% | 92% |
| 4 | Jumlah gedung dan lapangan olah raga yang memenuhi standar nasional | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Jumlah kawasan Industri dan kawasan agroindustri | 10% | 30% | 50% | 70% | 90% | 100% (1 kawasan) |
| 6 | Jumlah Sentra produksi Holtikultura dan perikanan | 3 Sentra | 5 Sentra | 7 Sentra | 9 Sentra | 11 Sentra | 13 Sentra |
| 7 | Jumlah kawasan agropolitan / minapolitan | 0 kawasan | 1 kawasan | 2 kawasan | 3 kawasan | 4 kawasan | 5 kawasan |
| 8 | Persentase SD dan SMP dengan akreditasi B | SD 20% SMP 25% | SD 25% SMP 35% | SD 30% SMP 45% | SD 40% SMP 50% | SD 50% SMP 60% | SD 60% SMP 70% |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| No | Indikator | Target Tahun ke | | | | | |
|----|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 9 | Besaran tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan | 172 orang | 300 orang | 300 orang | 300 orang | 300 orang | 300 orang |
| 10 | Jumlah RS terakreditasi | 1 RS | 1 RS | 1 RS | 1 RS | 1 RS | 1 RS |
| 11 | Persentase puskesmas yang ditingkatkan dari Non PRI menjadi PRI | 0% | 19% | 28% | 55% | 82% | 100% |
| 12 | Indeks Kepuasan Pelanggan | 3,8 | 3,8 | 4 | 4 | 4,2 | 4,5 |
| 13 | Menurunnya Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Balita | 19% | 18,5% | 18% | 17,5% | 17% | 16,5% |
| 14 | Menurunnya Prevalensi Stunting Pada Baduta | 36% | 35% | 33% | 31% | 29% | 29% |
| 15 | Cakupan pencegahan akibat buruk dari penyakit menular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 16 | Cakupan pencegahan akibat buruk dari penyakit tidak menular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 17 | Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga SDA dan pelestarian lingkungan | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% |
| 18 | Persentase kegiatan / usaha yang memanfaatkan sumber daya alam sesuai peraturan | 80% | 84% | 90% | 92% | 94% | 96% |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| No | Indikator | Target Tahun ke | | | | | |
|----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 19 | Jumlah kearifan lokal yang menjaga keberlanjutan ekosistem yang dilestarikan | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | Nilai Investasi | 17 triliun | 17,4 triliun | 18 triliun | 18,6 triliun | 19,2 triliun | 19,8 triliun |
| 21 | Tingkat partisipasi angkatan kerja | 68,20 | 68,60 | 69,00 | 69,40 | 69,80 | 70,20 |
| 22 | Nilai ekspor agroindustri | USD 19,693,267.50 | USD 11,549,655.07 | USD 14,000,000.00 | USD 15,000,000.00 | USD 16,500,000.00 | USD 18,000,000.00 |
| 23 | Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan | 943.834 kg | 1.049.168 kg | 1.059.659 kg | 1.071.748 kg | 1.084.884 kg | 1.099.759 kg |
| 24 | Jumlah koperasi aktif | 155 | 176 | 198 | 223 | 234 | 249 |
| 25 | Jumlah UMKM berkelanjutan | 150 | 159 | 170 | 195 | 220 | 245 |
| 26 | Upah Minimum Kabupaten | Rp.1.808.201,41 | Rp.1.926.000,00 | Rp.2.084.895,00 | Rp.2.280.249,66 | Rp. 2.394.262,14 | Rp. 2.556.048,84 |
| 27 | Indeks Gini Rasio | 0,328 | 0,325 | 0,320 | 0,319 | 0,315 | 0,30 |
| 28 | Persentase produk lokal yang terdaftar legalitasnya | 45% | 50% | 55% | 68% | 75% | 80% |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| No | Indikator | Target Tahun ke | | | | | |
|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 29 | Persentase pemasaran produk unggulan daerah ke pasaran | 70% | 73% | 75% | 78% | 80% | 85% |
| 30 | Jumlah potensi wisata yang dikembangkan menjadi objek wisata terkenal | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 90% |
| 31 | Indeks kerukunan umat beragama | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% |
| 32 | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | 78% | 80% | 81,5% | 82,25% | 83,5% | 85% |
| 33 | Persentase aparatur pelayanan publik yang memenuhi kompetensi | 25% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
| 34 | Opini laporan keuangan pemerintah | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WDP |
| 35 | Tingkat keselarasan dokumen perencanaan | 80% | 90% | 90% | 95% | 100% | 100% |
| 36 | Jumlah pengunjung perpustakaan | 11.186 pengunjung | 18.720 pengunjung | 26.254 pengunjung | 33.788 pengunjung | 41.322 pengunjung | 48.858 pengunjung |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



Tabel T-C.18
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2015) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021) |
|---|---|---------|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | |
| Fokus Kesejahteraan dan pemerataan Ekonomi | | | | | | | | | | |
| 1. Seluruh Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Pertumbuhan PDRB | % | 6,51 | 6,75 | 6,90 | 7,10 | 7,25 | 7,40 | 7,50 | 7,50 |
| 1.2 | Laju Inflasi | % | 3,50 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,10 | 5,00 | 4,75 | 4,75 |
| 1.3 | PDRB ADHK | Rp.Juta | 100,20 | 106,96 | 114,34 | 122,46 | 131,34 | 141,06 | 151,64 | 151,64 |
| 1.4 | Indeks Gini | % | 0,332 | 0,325 | 0,320 | 0,315 | 0,310 | 0,305 | 0,30 | 0,30 |
| 1.5 | Angka kemiskinan | % | 11,61 | 11,81 | 11,48 | 11,16 | 10,85 | 10,55 | 10,25 | 10,25 |
| Fokus Kesejahteraan Sosial | | | | | | | | | | |
| 1. Pendidikan | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Angka Melek Huruf | % | 98,3 | 98,41 | 98,46 | 98,50 | 98,60 | 98,70 | 98,70 | 98,70 |
| 1.2 | Angka rata-rata lama sekolah | tahun | 8,58 | 8,65 | 8,73 | 8,80 | 8,87 | 8,95 | 8,95 | 8,95 |
| 1.3 | APK SD/MI/SDLB | % | 117.63% | 117.64% | 117.66% | 117.67% | 117.69% | 117.70% | 117.71% | 117.71% |
| 1.4 | APK SMP/MTs | % | 98.90% | 98.92% | 98.94% | 98.96% | 98.98% | 99.00% | 99.02% | 99.02% |
| 1.5 | APK SMA/SMK/ MA | % | 69.94% | 71.44% | 73.19% | 75.19% | 77.44% | 79.94% | 82.44% | 82.44% |
| 1.6 | APM SD/SDLB/ MI | % | 99.01% | 99.02% | 99.03% | 99.04% | 99.05% | 99,06 | 99.07% | 99.07% |
| 1.7 | APM SMP | % | 72.94% | 73.10% | 73.25% | 73.41% | 73.56% | 73.72% | 73.88% | 73.88% |
| 1.8 | APM SMA | % | 51.95% | 53.45% | 55.20% | 57.20% | 59.45% | 61.95% | 64.45% | 64.45% |
| 2. Kesehatan | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4) Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar | % | 93,87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2015) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021) |
|------|--|--------|---|-----------------------------|------|------|------|------|------|--|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 2.2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar | % | 50,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir usia 0-28 hari Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standar | % | 100,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4 | Pelayanan Kesehatan Balita Usia 0-59 bulan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar | % | 88,93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Peserta Didik Kelas 1 (satu) dan Kelas 7 (tujuh) yang Mendapatkan Pelayanan Skrining Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standar | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.6 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Usia 15-59 Tahun Mendapat Skrining Kesehatan Usia Produktif sesuai Standar | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.7 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standar Minimal 1 (satu) Kali | % | 43,47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.8 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai Standar | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.9 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.10 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Promotif Preventif sesuai Standar | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2015) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021) |
|--|---|--------|---|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 2.11 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan TB sesuai Standar | % | 52,52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.12 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, Waria/ Transgender, Pengguna Napza dan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan) Mendapatkan Pemeriksaan HIV sesuai Standar di Fasyankes | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Ketenagakerjaan | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Rasio Penduduk yang bekerja | % | 99,00 | 99,10 | 99,30 | 99,40 | 99,55 | 99,70 | 99,90 | 99,90 |
| Fokus Seni dan Budaya dan Olah Raga | | | | | | | | | | |
| 1. Seni Budaya | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Jumlah Grup Kesenian dan budaya daerah | Grup | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 |
| 1.2 | Gedung Kesenian dan budaya | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Event seni dan budaya | Event | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 2 Pemuda dan Olahraga | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Persentase Kelompok Pemuda Terlibat Gerakan Penanggulangan Masalah Sosial | % | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 |
| 2.2 | Persentase Kelompok Pemuda Terlibat Gerakan Penanggulangan Masalah Kesehatan | % | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 |
| 2.3 | Persentase OSIS Aktiv Gerakan Penanggulangan Masalah Sosial dan Kesehatan di Sekolah | % | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 70 |
| 2.4 | Persentase Kelompok Pemuda Terlibat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | % | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2015) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021) |
|-------------------------------------|--|----------|---|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | | | | |
| Fokus Pelayanan Urusan Wajib | | | | | | | | | | |
| 1 | Pendidikan | | | | | | | | | |
| 1.1 | APK SD | % | 117,85 | 118,00 | 118,50 | 118,75 | 119,00 | 119,50 | 120,00 | 120,00 |
| 1.2 | SD/MI | % | 15,52 | 15,45 | 15,35 | 15,30 | 15,20 | 15,10 | 15,00 | 15,00 |
| 1.3 | SMP/MTs | % | 12,20 | 12,50 | 13,00 | 13,25 | 13,50 | 13,75 | 14,00 | 14,00 |
| 1.4 | Angka Partisipasi Sekolah | | | | | | | | | |
| | a. SD/MI | % | 99,15 | 99,25 | 99,30 | 99,35 | 99,40 | 99,45 | 99,50 | 99,50 |
| | b. SMP/MTs | % | 86,90 | 87,00 | 87,50 | 88,50 | 89,00 | 89,50 | 90,00 | 90,00 |
| | c. SMA/SMK/MA | % | 51,50 | 52,50 | 54,00 | 56,50 | 57,50 | 58,50 | 60,00 | 60,00 |
| 1.5 | Persentase SD Berakreditasi minimal B | % | 19,18% | 27,35% | 35,31% | 43,67% | 51,84% | 60% | 60% | 60% |
| 1.6 | Persentase SMP Berakreditasi minimal B | % | 24,17% | 33,33% | 42,50% | 51,67% | 60,83% | 70% | 70% | 70% |
| 2 | Kesehatan | | | | | | | | | |
| 2.1 | Rasio Bidan per 100.000 penduduk | /100.000 | 33,14 | 33,14 | 34,72 | 35,03 | 35,35 | 35,66 | 35,98 | 35,98 |
| 2.2 | Rasio Perawat per 1.000 penduduk | /100.000 | 131,5 | 131,5 | 145 | 150 | 150 | 158 | 158 | 158 |
| 2.3 | Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk | /100.000 | 17,5 | 22,00 | 23 | 23,50 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| 2.4 | Rasio Dokter gigi per 100.000 penduduk | /100.000 | 5,5 | 5,5 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 9 | 9 | 9 |
| 2.5 | Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk | /30.000 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 2.6 | Rasio Puskesmas Perawatan/ 30. 000 Penduduk | /30.000 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 2.7 | Rasio Dokter Spesialist Per 100.000 Penduduk | /100.000 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2.8 | Rasio Rumah Sakit Per 100.000 Penduduk | /100.000 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2.9 | Fasyankes Memenuhi SPM Pelayanan Kesehatan | % | 55 | 58 | 59 | 60 | 63 | 70 | 85 | 85 |
| 2.10 | Pesentase masyarakat miskin mendapat pelayanan difasilitas kesehatan | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2.11 | Persentase Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan | % | 50 | 50,36 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |
| 3. | Sosial | | | | | | | | | |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2015) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021) |
|--|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 3.1 | Persentase PMKS yang ditangani | % | 35% | 35% | 40% | 60% | 70% | 75% | 80% | 80% |
| 4. Trantibum dan Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 4.2 | Deteksi dini dan penanganan konflik kurang dari 24 Jam | % | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Rasio Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | % | 43,9 | 50,20 | 54,5 | 60 | 67,5 | 74,00 | 80,10 | 80,10 |
| 5.2 | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk | Rasio Panjang jalan/ jumlah penduduk | 0,00587 | 0,00576 | 0,00570 | 0,00564 | 0,00560 | 0,00555 | 0,00550 | 0,00550 |
| 5.2 | Persentase Jembatan Beton di Ruas jalan strategis | % | 60% | 60% | 70% | 75% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| 5.4 | Pembangunan Jalan Baru konektifitas (Km) | Km | 0 | 0 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 56 |
| 5.5 | Persentase rumah tinggal bersanitasi | % | 40% | 42% | 45% | 55% | 58% | 59% | 625 | 62% |
| 5.6 | Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | % | 24% | 32% | 48% | 60% | 68% | 75% | 80% | 80% |
| 5.7 | Tersedianya Dokumen Revisi RTRW yang ditetapkan dengan Perda | Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 6. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman | % | 62% | 62% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 95% |
| 6.2 | Jumlah Kawasan Perumahan Tertata dengan fasilitas umum yang memadai | % | 10% | 105 | 50% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% |
| 6.3 | Persentase Lingkungan Layak Huni | % | | 62% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 95% |
| 6.4 | Ketersediaan Kawasan Hunian Layak Huni | % | | 62% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 95% |
| 11 Ketenagakerjaan | | | | | | | | | | |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2015) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021) |
|---|--|--------------|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 11.1 | Angka partisipasi angkatan kerja | % | 66,83 | 67,00 | 67,50 | 68,00 | 68,50 | 69,00 | 70,00 | 70,00 |
| 11.2 | Angka kesempatan kerja | orang | 202.189 | 205.000 | 205.500 | 206.000 | 206.500 | 207.000 | 207.500 | 207.500 |
| 11.3 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 11.4 | Jumlah tenaga kerja perusahaan yang terdaftar dan terdaftar kepersertaan BPJS ketenaga kerjaan | Orang | 7.254 | 8.144 | 9.783 | 10.800 | 11.500 | 12.000 | 12.500 | 12.500 |
| 11.5 | Jumlah perusahaan yang mengikuti UMK | Perusahaan | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 210 |
| 12 PEMBERDAYAAN WANITA DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan | % | 63,40 | 63,00 | 62,50 | 62,00 | 61,50 | 61,00 | 60,00 | 60,00 |
| 12.2 | Persentase Partisipasi perempuan di lembaga DPRD | % | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 12.3 | Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan | % | 86,00 | 86,00 | 87,00 | 89,00 | 92,00 | 96,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12.4 | Indeks Pembangunan Gender | % | 84.81 | 84.81 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | 87 |
| 12.5 | Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | | | | | | | | | |
| | a. Akseptor KB | Orang | 39.479 | 39.479 | 41.179 | 42.879 | 44.579 | 46.279 | 47.979 | 47.979 |
| | b. Persentase Akseptor KB Aktif | % | 75,95 | 75,91 | 76,8 | 77,69 | 78,58 | 79,97 | 80,36 | 80,36 |
| 12 KETAHANAN PANGAN | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Regulasi Ketahanan pangan | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 12.2 | Aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan | | | | | | | | | |
| | a. Lumbung Pangan | Kelompok | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| | b. Desa Mandiri Pangan | Desa | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 12.3 | Aspek Konsumsi dan Keamanan Pangan | | | | | | | | | |
| | a. Konsumsi beras | kg/kap/bln | 83 | 82,2 | 81,4 | 80,6 | 79,8 | 79 | 78,2 | 78,2 |
| | b. Konsumsi energi | Kkal/kap/bln | 1.828 | 1.850 | 1.875 | 1.900 | 1.915 | 1.925 | 1.935 | 1.935 |
| | c. Konsumsi protein | Gr/kap/hr | 72,55 | 72,75 | 72,85 | 73,00 | 73,15 | 73,25 | 73,30 | 73,30 |
| | d. Skor Diversifikasi (PPH) | Sekor PPH | 72 | 75 | 77 | 79 | 82 | 84 | 85 | 85 |
| 12.4 | Aspek Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan | | | | | | | | | |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2015) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021) |
|-----------|--|--------------|---|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| | a. Distribusi Pangan Oleh Masyarakat (LDPM) | LDPM | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 17 |
| | b. Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) | PUMP | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 |
| 13 | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | |
| 13.1 | Penurunan titik api (hotspot) | Titik api | 55 | 53 | 50 | 45 | 40 | 37 | 35 | 35 |
| 13.2 | Persentase Kegiatan / Usaha Taat Administrasi Pengelolaan Lingkungan | % | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13.4 | Pengelolaan sampah domestik | Kubik | 18.000 | 18.000 | 20.000 | 22.000 | 24.000 | 26.000 | 28.000 | 28.000 |
| 14 | Kependudukan dan Catatan Sipil | | | | | | | | | |
| 14.1 | Rasio Penduduk ber-KTP terhadap Wajib KTP | % | 75,81% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14.2 | Pasangan berakte nikah | Pasangan | 17.200 | 17.400 | 17.600 | 17.800 | 18.000 | 18.200 | 18.400 | 18.400 |
| 14.3 | Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 Penduduk | % | 245 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 |
| 14.4 | Ketersediaan database kependudukan | Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 14.5 | Pertumbuhan penduduk | % | 1,09 % | 0,80 % | 1,00 % | 1,00% | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % |
| 15 | Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | | | | |
| 15.2 | Jumlah desa swasembada | Desa | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| 15.3 | Jumlah Desa Maju | Desa | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | Perhubungan | | | | | | | | | |
| 16.1 | Jumlah pelabuhan laut/LLASDP dan terminal bus | Unit | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16.2 | Jumlah Kendaraan lulus uji kelayakan | Unit | 1.044 | 1.154 | 905 | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 1.450 | 1.450 |
| 16.3 | Pemasangan rambu-rambu | | | | | | | | | |
| | a. Rambu Darat | Unit | 269 | 272 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 |
| | b. Rambu Laut/Sungai | Unit | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 16.4 | Halte dan Dermaga Sungai Kondisi Mantap | Unit | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| 17 | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | |
| 17.1 | Jumlah surat kabar lokal | Koran Harian | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17.2 | Jumlah penyiaran radio lokal | Stasiun | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2015) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021) |
|-----------|--|-----------------------|---|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| | | Radio | | | | | | | | |
| 17.3 | Jumlah penyiaran tv lokal | Stasiun Tv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17.4 | Web site milik pemerintah daerah | Web | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17.5 | Persentase SKPD dengan Kewenangan Pengolahan Web Site Mandiri Terintegrasi | % | 4 | 4 | 20 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 |
| 18 | Koperasi dan UMKM | | | | | | | | | |
| 18.1 | Persentase Koperasi Aktif | % | 33 | 41 | 55 | 69 | 77 | 80 | 82 | 82 |
| 18.2 | Jumlah UKM Berkelanjutan | Usaha Mikro | 6.013 | 6.963 | 7.463 | 7.863 | 8.163 | 8.413 | 8.613 | 8.613 |
| 18.3 | Rasio Penyerapan Tenaga Kerja UMKM | UMKM/ Tenaga Kerja | 0,85 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 |
| 19 | Penanaman Modal | | | | | | | | | |
| 19.1 | Jumlah Investor PMA/PMDN | Perusahaan | 33 | 33 | 33 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 |
| 19.2 | Nilai Investasi | Triliun | 16,8 | 17 | 17,4 | 18 | 18,6 | 19,2 | 19,8 | 19,8 |
| 19.3 | PMA/PMDN peserta TJLS | Perusahaan | 33 | 33 | 33 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 |
| 20 | Kepemudaan dan Olah Raga | | | | | | | | | |
| 20.1 | Jumlah Klub Olahraga | Group | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 |
| 20.2 | Jumlah Sarana Olahraga | Unit | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 |
| 20.3 | Jumlah Karang Taruna | Kelompok | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 20.4 | Persentase Kelompok Pemuda Yang dibina | % | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| 21 | Statistik | | | | | | | | | |
| 21.1 | Buku "Tanjung Jabung Barat dalam Angka" | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 21.2 | Buku " PDRB Kabupaten" | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 22 | Kebudayaan | | | | | | | | | |
| 22.1 | Jumlah Tempat Pagelaran Seni Budaya | Lokasi | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 22.2 | Jumlah budaya yang dilestarikan | Budaya | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 23 | Perpustakaan | | | | | | | | | |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2015) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021) |
|---|--|------------|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 23.1 | Jumlah perpustakaan | Unit | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 |
| 23.2 | Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun | Pengunjung | 105.000 | 125.000 | 125.000 | 137.500 | 150.000 | 162.500 | 175.000 | 175.000 |
| 23.3 | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | Buku | 13.262 | 13.300 | 13.500 | 15.000 | 15.500 | 17.000 | 17.500 | 17.500 |
| 24 Kearsipan | | | | | | | | | | |
| 24.1 | Jumlah Arsip Daerah yang dilestarikan | Dokumen | 2.741 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Fokus Layanan Urusan Pilihan | | | | | | | | | | |
| 1 Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Jumlah PLTS | Unit | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Rasio elektrifikasi (RE) | % | 50,96 | 55,25 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 80,00 |
| 2 Perikanan dan Kelautan | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Produksi Perikanan budidaya | Ton | 1828 | 0 | 2102 | 2417 | 2779 | 3195 | 3674 | 3674 |
| 2.2 | Peningkatan Produksi Perikanan Perairan Umum (Perikanan Tangkap) | Ton | 20,718 | 0 | 22,790 | 25,069 | 27,576 | 30,333 | 33,366 | 33,366 |
| 2.3 | Produksi Benih Ikan | Ekor | 476.0000 | 476.0000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 2.976.000 |
| 2.4 | Pelestarian sumber daya perikanan | % | 30 | | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 3 Pariwisata | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Jumlah pengunjung wisatawan | Orang | 2510 | 3032 | 3150 | 3480 | 3520 | 3589 | 3690 | 3690 |
| 4 Pertanian | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Produksi Padi | Ton | 50.056 | 48.345 | 51.307 | 52.590 | 53.905 | 55.252 | 56.634 | 56.634 |
| 4.2 | Produksi Jagung | Ton | 4.046 | 2.508 | 4.147 | 4.251 | 4.357 | 4.466 | 4.578 | 4.578 |
| 4.3 | Produksi Petai | Ton | 529 | 555 | 542 | 556 | 570 | 584 | 599 | 599 |
| 4.4 | Produksi Kacang tanah | Ton | 12 | 17 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| 4.5 | Produksi Kacang hijau | Ton | 8 | 13 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 4.6 | Produksi Ubi kayu | Ton | 2.384 | 4.069 | 2.444 | 2.505 | 2.567 | 2.631 | 2.697 | 2.697 |
| 4.7 | Produksi Ubi jalar | Ton | 225 | 181 | 231 | 236 | 242 | 248 | 255 | 255 |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2015) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021) |
|------|------------------------------------|--------|---|-----------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 4.8 | Produksi Cabai merah | Ton | 103 | 108 | 106 | 108 | 111 | 114 | 117 | 117 |
| 4.9 | Produksi Cabai rawit | Ton | 102 | 107 | 105 | 107 | 110 | 113 | 115 | 115 |
| 4.10 | Produksi Jeruk siam | Ton | 1.940 | 2.037 | 1.989 | 2.038 | 2.089 | 2.141 | 2.195 | 2.195 |
| 4.11 | Produksi Nanas Paon | Ton | 60 | 63 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 68 |
| 4.12 | Produksi Nangka/Cempedak | Ton | 4.141 | 4.348 | 4.245 | 4.351 | 4.459 | 4.571 | 4.685 | 4.685 |
| 4.13 | Produksi Pepaya | Ton | 222 | 233 | 228 | 233 | 239 | 245 | 251 | 251 |
| 4.14 | Produksi Semangka | Ton | 37 | 39 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 |
| 4.15 | Produksi pisang berangan | Ton | 547 | 574 | 581 | 575 | 589 | 604 | 619 | 619 |
| 4.16 | Produksi Kelapa Sawit | Ton | 131.234 | 131.068 | 136.535 | 139.267 | 142.051 | 144.893 | 147.790 | 147.790 |
| 4.17 | Produksi Karet | Ton | 6.625 | 6.416 | 4.144 | 4.913 | 4.915 | 4.918 | 4.921 | 4.921 |
| 4.18 | Produksi Kelapa Dalam | Ton | 54.890 | 50.414 | 56.941 | 58.080 | 59.241 | 60.426 | 61.635 | 61.635 |
| 4.19 | Produksi Kopi | Ton | 1214 | 1.171 | 1.263 | 1.288 | 1.314 | 1.340 | 1.367 | 1.367 |
| 4.20 | Produksi Pinang | Ton | 9.882 | 9.433 | 11.432 | 11.662 | 11.895 | 12.133 | 12.375 | 12.375 |
| 4.21 | Jumlah Populasi Ternak Sapi | Ekor | 7.193 | 8.306 | 8.389 | 8.557 | 8.728 | 8.902 | 9.081 | 9.081 |
| 4.22 | Jumlah Populasi Ternak Kerbau | Ekor | 607 | 680 | 717 | 740 | 771 | 780 | 811 | 811 |
| 4.23 | Jumlah Populasi Ternak Kambing | Ekor | 40.195 | 40.728 | 48.002 | 48.550 | 48.910 | 49.228 | 49.378 | 49.378 |
| 4.24 | Jumlah Populasi Ternak Domba | Ekor | 634 | 750 | 790 | 816 | 845 | 865 | 890 | 890 |
| 4.25 | Jumlah Populasi Ternak Unggas | Ekor | 913.464 | 969.095 | 969.095 | 981.067 | 1.028.113 | 1.058.956 | 1.090.725 | 1.090.725 |
| 4.26 | Luas Tanam Tanaman Padi | Ha | 11.169 | 11.727 | 12.314 | 12.930 | 13.576 | 14.225 | 14.968 | 14.968 |
| 4.27 | Luas Tanam Tanaman Jagung | Ha | 1.254 | 1.317 | 1.383 | 1.452 | 1.524 | 1.600 | 1.680 | 16. |
| 4.28 | Luas Tanam Tanaman Petai | Ha | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 94 |
| 4.29 | Luas Tanam Tanaman Kacang tanah | Ha | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 320 |
| 4.30 | Luas Tanam Tanaman Kacang hijau | Ha | 35 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 238 |
| 4.31 | Luas Tanam Tanaman Ubi kayu | Ha | 147 | 154 | 162 | 170 | 179 | 406 | 426 | 2.272 |
| 4.32 | Luas Tanam Tanaman Ubi jalar | Ha | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 36 |
| 4.33 | Luas Tanam Tanaman Cabai merah | Ha | 65 | 68 | 72 | 75 | 79 | 83 | 87 | 87 |
| 4.34 | Luas Tanam Tanaman Cabai rawit | Ha | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 78 |
| 4.35 | Luas Tanam Tanaman Jeruk siam | Ha | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 75 | 75 |
| 4.36 | Luas Tanam Tanaman Bayam | Ha | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 |
| 4.37 | Luas Tanam Tanaman Nangka/Cempedak | Ha | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 102 |
| 4.38 | Luas Tanam Tanaman Pepaya | Ha | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 34 |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2015) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021) |
|---|---|-------------|---|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 4.39 | Luas Tanam Tanaman Semangka | Ha | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 34 |
| 4.40 | Luas Lahan Tanaman Produksi Kelapa Sawit | Ha | 61.960 | 63.930 | 63.833 | 64.790 | 65.762 | 66.749 | 67.750 | 67.750 |
| 4.41 | Luas Lahan Tanaman Produksi Karet | Ha | 14.806 | 13.806 | 9.821 | 9.826 | 9.831 | 9.836 | 9.841 | 9.841 |
| 4.42 | Luas Lahan Tanaman Produksi Kelapa Dalam | Ha | 54.730 | 54.537 | 55.183 | 55.458 | 55.736 | 56.014 | 56.294 | 56.294 |
| 4.43 | Luas Lahan Tanaman Produksi Kopi | Ha | 3.028 | 2.873 | 3.119 | 3.166 | 3.213 | 3.262 | 3.310 | 3.310 |
| 4.44 | Luas Lahan Tanaman Produksi Pinang | Ha | 10.446 | 10.518 | 10.484 | 10.798 | 11.122 | 11.456 | 11.800 | 11.800 |
| 4.45 | Produksi Daging Sapi | Kg | 336.156 | 310.310 | 285.658 | 291.371 | 297.199 | 303.143 | 309.205 | 309.205 |
| 4.46 | Produksi Daging Kerbau | Kg | 12.345 | 12.952 | 12.844 | 13.101 | 13.363 | 13.630 | 13.903 | 13.903 |
| 4.47 | Produksi Daging Kambing | Kg | 53.695 | 52.882 | 27.256 | 27.801 | 28.357 | 28.924 | 29.503 | 29.503 |
| 4.48 | Produksi Daging Domba | Kg | 540 | 551 | 562 | 573 | 584 | 596 | 608 | 608 |
| 4.49 | Produksi Daging Unggas | Kg | 2.219.127 | 2.286.241 | 2.331.966 | 2.378.606 | 2.426.179 | 2.475.444 | 2.524.952 | 2.524.952 |
| 5 | ESDM | | | | | | | | | |
| 5.1 | Rumah tangga yang menggunakan listrik | RT | 32.965 | 48.799 | 50.000 | 50.500 | 51.000 | 51.500 | 52.000 | 52.000 |
| 6. | Industri dan Perdagangan | | | | | | | | | |
| 6.1 | Nilai ekspor | US Dollar | 258.801.785,3 5 | 271.255.5 48,14 | 278.910.54 88,48 | 289.235.4 42,10 | 291.249.456, 44 | 300.500.457, 21 | 310.127.953, 55 | 310.127.953,5 5 |
| 6.2 | Cakupan bina kelompok pengrajin | % | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 |
| 6.3 | Permintaan Pasar terhadap produk IKM | % | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
| Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | | | | | | | | | | |
| 1 | Perencanaan | | | | | | | | | |
| 1.1 | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada / tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 1.2 | Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada / tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 1.3 | Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Ada / tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 1.4 | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada / tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2015) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021) |
|---------------------------------------|--|--------|---|-----------------------------|-------|------|------|------|------|--|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 1.5 | Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD | % | 82% | 85% | 89% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.6 | Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD | % | 94% | 97% | 97% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. Keuangan | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Akreditasi Opini BPK | LHP | Disclaimer | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 2.1 | Peningkatan Persentase Pendapatan Asli Daerah | % | 6% | 6% | 0,21% | 2% | 5,1% | 5,3% | 5,7% | 5,7% |
| 3. Kepegawaian dan Diklat | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Peningkatan Kompetensi Pegawai | | | | | | | | | |
| | a. Persentase pejabat ASN yang mengikuti diklat struktural | % | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 27,9 | 40,9 | 44,9 | 48,9 | 48,9 |
| | b. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | % | 11,6 | 12,4 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 19,2 | 24,5 | 24,5 |
| 3.2 | Rasio lulusan S1 dan S2 | % | 45,1 | 59,4 | 66,3 | 67,9 | 73,7 | 80,4 | 84 | 84 |
| 3.3 | Rasio lulusan Diploma/DIII | % | 28,3 | 19,5 | 12,2 | 12,6 | 12,6 | 11,2 | 10,1 | 10,1 |
| 3.4 | Rasio lulusan SLTA | % | 25,4 | 20 | 20,5 | 18,4 | 12,5 | 8,2 | 5,9 | 5,9 |
| 4. Penelitian dan Pengembangan | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Persentase Hasil Penelitian Ditindak Lanjuti | % | 40 | 45 | 60 | 70 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 5. Pengawasan | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) dan ekstern pemerintah (BPK-RI) | % | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.2 | Auditor Profesionalisme sesuai Kode Etik dan Standar Audit | orang | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2015) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021) |
|--|---|-----------|---|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| ASPEK DAYA SAING DAERAH | | | | | | | | | | |
| Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah | | | | | | | | | | |
| 1. | Persentase Penduduk Golongan Pengeluaran Perkapita > 1.000.000 | % | 12,64 | 12,66 | 12,68 | 12,7 | 12,73 | 12,75 | 12,85 | 12,85 |
| 2. | Rata-rata pengeluaran perkapita se bulan kelompok pengeluaran 100.000 – 149.999 | Rp | 141.508 | 150.000 | 175.000 | 200.000 | 225.000 | 250.000 | 300.000 | 300.000 |
| 3. | Nilai Tukar Petani | NTP | 98,6 | 98,6 | 99 | 100 | 101 | 102 | 104 | 104 |
| Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur | | | | | | | | | | |
| 1 Perhubungan | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Jumlah pengguna moda transportasi umum di perkotaan | | | | | | | | | |
| | - Angkutan darat | Orang | 40.760 | 55.474 | 66.569 | 79.883 | 95.859 | 115.031 | 138.037 | 138.037 |
| | - Angkutan sungai | Orang | 362.758 | 349.313 | 419.776 | 503.731 | 604.477 | 725.372 | 870.447 | 870.447 |
| | - Angkutan penyeberangan | Orang | - | - | 5.832 | 6.998 | 8.398 | 10.078 | 12.093 | 12.093 |
| 1.2 | Jumlah sarana transportasi sungai dan laut | | | | | | | | | |
| | - Angkutran darat | Unit | 7.185 | 9.937 | 11.924 | 14.309 | 17.171 | 20.605 | 24.726 | 24.726 |
| | - Angkutan Sungai | Unit | 40.249 | 40.932 | 49.118 | 58.342 | 70.730 | 84.877 | 101.852 | 101.852 |
| | - Angkutan penyeberangan | Unit | - | - | 112 | 134 | 161 | 194 | 232 | 232 |
| 2. Penataan Ruang | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ketaatan terhadap RTRW | Ya/ tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 2.2 | Luas Kawasan Konservasi | Ha | 611 | 611 | 611 | 611 | 615 | 620 | 620 | 620 |
| 2.3 | Luas Kawasan Lindung | Ha | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 |
| 2.4 | Luas Kawasan Hutan Produksi Tetap | Ha | 34.355 | 34.350 | 34.350 | 34.400 | 34.450 | 34.450 | 34.500 | 34.500 |
| 2.5 | Luas Kawasan Hutan Produksi Terbatas | Ha | 179.726 | 179.720 | 179.730 | 179.740 | 179.750 | 179.765 | 179.775 | 179.775 |
| 2.6 | Luas Kawasan Lahan Basah | Ha | 18788 | 18788 | 18788 | 18788 | 18788 | 18788 | 18788 | 18788 |
| 2.7 | Luas Kawasan Lahan Kering | Ha | 291.510 | 291.510 | 291.520 | 291.525 | 291.535 | 291.550 | 291.565 | 291.565 |
| 2.8 | Luas Kawasan Perkebunan | Ha | 171.683 | 171.683 | 171.683 | 171.683 | 171.683 | 171.683 | 171.683 | 171.683 |
| 2.9 | Luas Kawasan Pemukiman | Ha | 2.951,77 | 2.951,77 | 2.951,77 | 2.951,77 | 2.951,77 | 2.951,77 | 2.951,77 | 2.951,77 |

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2015) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021) |
|----------------------------------|--|-----------------|---|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 3 | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | | | | | | | | | |
| 3.1 | Jenis dan jumlah bank/cabang | | | | | | | | | |
| | - Bank Perkreditan Rakyat | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | - Bank Pemerintah | Unit | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | - Bank Swasta | Unit | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 3.2 | Jumlah rumah makan dan restoran | unit | 29 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | 35 | 35 |
| 3.3 | Jumlah penginapan/hotel | unit | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 4 | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | |
| 4.1 | Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih | RT | 2.538 | 2.550 | 2.600 | 2.650 | 2.700 | 2.750 | 2.800 | 2.800 |
| 4.2 | Persentase Rumah tangga dengan jamban sehat | RT | 30 | 0 | 40 | 60 | 70 | 80 | 85 | 85 |
| Fokus Iklim Berinvestasi | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 75 | 75 | 80 | 85 |
| 2 | Jumlah Demo | kasus | 14 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah | | | | | | | | | |
| | a. Pajak Daerah | Objek Pajak | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| | b. Retribusi Daerah | Objek Retribusi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fokus Sumber Daya Manusia | | | | | | | | | | |
| 1 | Ketenagakerjaan | | | | | | | | | |
| 1.1 | Lulusan SMK/ sederajat yang bekerja di DU/DI | % | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 58 | 58 |
| 1.2 | Indeks Demokrasi masyarakat | | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 1.3 | Lulusan SMU/MA/ sederajat yang diterima di PTN | % | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 16% | 20% | 20% |



BAB IX

Penutup

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 disusun dengan berdasarkan peraturan–peraturan dan pertimbangan–pertimbangan, merupakan pedoman bagi perangkat daerah baru sesuai Peraturan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 – 2021 ini akan dapat diwujudkan melalui dukungan seluruh komponen lapisan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga dapat mencapai target – target pembangunan yang pada akhirnya berdampak baik bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya dan masyarakat provinsi jambi pada umumnya.

Bupati Tanjung Jabung Barat

DR.Ir.H.SAFRIAL, MS